



2026



BUPATI SARMI
DOMINGGUS CATUE, S.KM, M.Kes



WAKIL BUPATI SARMI
Hj. JUMRIATI, SH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KABUPATEN SARMI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
TAHUN 2026





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Sarmi Tahun 2026** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**.

LKJIP Kabupaten Sarmi Tahun 2026 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta **Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999** tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun petunjuk teknis penyusunan, pelaporan, dan tata cara review mengacu pada **Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014**.

Secara substantif, LKJIP ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini memuat uraian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan sumber daya, serta kebijakan operasional daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sarmi. Selain itu, disajikan pula informasi mengenai capaian kinerja serta analisis terhadap pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2026.

LKJIP Kabupaten Sarmi Tahun 2026 juga disusun dengan mengacu pada **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026**, sebagai bentuk keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Hal ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari aspek penyajian maupun substansi. Oleh karena itu, berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah serta pelibatan berbagai pihak terkait.



Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi serta tim penyusun yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKJIP ini.

Akhirnya, kami berharap LKJIP Kabupaten Sarmi Tahun 2026 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Sarmi, 30 Maret 2026
BUPATI SARMI

DOMINGGUS CATUE, S.KM, M.Kes



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*), pengelolaan administrasi publik serta pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu keharusan, khususnya dalam era reformasi birokrasi saat ini. Reformasi birokrasi merupakan wujud responsivitas dan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan serta aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarmi terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan yang berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*), sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dalam manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah serta tolok ukur yang jelas dalam perencanaan strategis organisasi. Dengan demikian, hasil yang ingin dicapai dapat terukur, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026, telah ditetapkan arah pembangunan daerah selama empat tahun ke depan yang dijabarkan ke dalam **5 agenda pembangunan, 27 sasaran strategis, dan 53 indikator kinerja utama**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Sarmi Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam periode pelaksanaan RPD 2023–2026 dan menjadi salah satu media pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah. LKJIP tidak hanya berfungsi sebagai alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Secara umum, capaian kinerja terhadap 53 indikator yang mendukung 27 sasaran strategis menunjukkan hasil yang bervariasi, yaitu:

- **23 indikator** dengan kategori *Sangat Baik* ($\geq 91\%$),
- **9 indikator** kategori *Baik* (75–90,99%),
- **3 indikator** kategori *Cukup* (65–74,99%),
- **2 indikator** kategori *Kurang* (50–64,99%),
- **16 indikator** kategori *Sangat Kurang* ($\leq 50\%$).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian indikator telah mencapai target, masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan perhatian serius, terutama pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, ekonomi, pelayanan dasar, dan tata kelola pemerintahan.

Beberapa indikator dengan capaian di bawah optimal antara lain terkait bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi daerah, investasi, pariwisata, pelayanan sosial, serta tata kelola pemerintahan seperti Indeks SPBE, Maturitas SPIP, dan Nilai LKJIP yang masih dalam proses evaluasi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kinerja perlu dilakukan secara lebih terarah dan terintegrasi.

Dari sisi pendanaan, pada Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp508.335.872.307,00** untuk mendukung pencapaian sasaran strategis daerah, dengan realisasi sebesar **Rp354.434.094.852,00** atau **69,72%**. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp153.759.023.893,00** atau **30,28%**. Jika dikaitkan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran, diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar **82,24%**, yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tergolong cukup baik, namun efisiensi anggaran yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pencapaian kinerja. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk



meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke depan, perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui:

1. Penyempurnaan perumusan indikator kinerja agar memenuhi prinsip **SMART** (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound);
2. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data dan analisis yang mendalam;
3. Penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja;
4. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan;
5. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pengukuran kinerja pada akhir tahun anggaran dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, serta menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Sarmi, 30 Maret 2026

BUPATI SARMI



DOMINGGUS CATUE, S.KM, M.Kes



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASA EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SARMI	1
1. Kondisi Geografis dan Iklim	1
2. Struktur Organisasi	2
3. Kependudukan	7
4. Ketenagakerjaan	8
5. Pendidikan	9
6. Kesehatan	9
7. Agama	9
8. Kriminalitas	10
9. Kemiskinan	10
10. Sosial lainnya	10
11. Tanaman Holtikultura	10
12. Perkebunan	11
13. Pertenakan	11
14. Perikanan	11
15. Energi	12
16. Komunikasi	12
17. Pariwisata	12
18. Pengeluaran Penduduk	13
19. Sarana Perdagangan	13



20. PDRB	14
B. MAKSUD DAN TUJUAN	14
C. SISTEMATIKA LAKIP TAHUN 2024	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1. RPD PEMERINTAN KABUPATEN SARMI	17
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
2.3. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Pengukuran Kinerja	33
3.2. Capaian Kinerja	35
3.2.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	35
3.2.2. Membandingkan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Awal RPD sampai dengan Tahun 2025.....	41
3.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir RPD Tahun 2023-2026	47
3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	54
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas SDM religious dan berbudaya	54
Sasaran 2. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan Pendidikan dan kesehatan	62
Sasaran 3. Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab tantangan era perubahan	72
Sasaran 4. Optimalnya Pengarustamaan Gender	80
Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan serta Penataan Drainase	87
Sasaran 6. Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi Layanan	93



Sasaran 7. Terpenuhiya Srana, Prasarana dan Utilitas Perumahan Guna Menekan Kawasan Pemukiman yang Tidak Kumu	101
Sasaran 8. Meningkatnya Layanan Transportasi Antar Wilayah	105
Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	119
Sasaran 10. Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan	112
Sasaran 11. Meningkatnya Penanganan dan Penanggulangan Resiko Bencana.....	119
Sasaran 12. Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	124
Sasaran 13. Meningkatnya Nilai Investasi dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Produk Unggulan Daerah Masyarakat	134
Sasaran 14. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.....	151
Sasaran 15. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	156
Sasaran 16. Meningkatnya Ketahanan Pangan	160
Sasaran 17. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan kampung/Kelurahan yang Merata.....	166
Sasaran 18. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah serta Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah	168
Sasaran 19. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Rukun dan Berlandaskan Wawasan Kebangsaan dan Politik	172
Sasaran 20. Meningkatnya Pemberdayaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	176
Sasaran 21. Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Kesejahteraan Sosial Masyarkat Adat	183
Sasaran 22. Optimalnya Implementasi system Pemerintahan Berbasis Elektronik	186
Sasaran 23. Mingkatnya Kualitas Layanan Publik	195
Sasaran 24. Mingkatnya Kualitas Manajemen ASN	208
Sasaran 25. Mingkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	211
Sasaran 26. Mingkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Pengembangan Daerah	213
Sasaran 27. Mingkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas	219

3.2.5. Analisis Program Yang Menunjukkan Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Kinerja	225
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya dengan Indikator Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dan Persentase Seni Budaya yang dilestarikan.....	242
Sasaran 2. Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dengan Indikator Rata-Rata Lama Sekolah, Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Dan Angka Harapan Hidup	247
Sasaran 3. Meningkatnya SDM Yang Unggul Dan Produktif Dalam Menjawab Tantangan Era Perubahan Dengan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olah Raga Pada Event Kabupaten, Provinsi Dan Nasional.....	254
Sasaran 4. Optimalnya Pengarusutamaan Gender Dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender	261
Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Jembatan Serta Penataan Drainase Dengan Indikator Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap, Presentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	264
Sasaran 6. Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi Layak Dengan Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Persentase Penduduk Yang Memiliki Sanitasi Layak.....	269
Sasaran 7. Terpenuhinya Sarana, Prasarana Dan Utilitas Perumahan Guna Menekan Kawasan	



Permukiman Yang Tidak Kumuh Dengan Indikator Rasio Rumah Layak Huni.....	273
Sasaran 8. Meningkatnya Layanan Transportasi Antar Wilayah Dengan Indikator Cakupan Layanan Armada Angkutan Umum Antar Kabupaten Yang Aktif Dan Arus Pergerakan Penumpang Angkutan Udara.	276
Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Udara (IKU) Dan Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).....	278
Sasaran 10. Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Dengan Indikator Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani Dan Ketersediaan TPA Yang Terkelola Secara Baik	281
Sasaran 11. Meningkatnya Penanganan Dan Penanggulungan Resiko Bencana Dengan Indikator Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (SPM) Dan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (SPM)	284
Sasaran 12. Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perkebunan Dan Perikanan Dengan Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Dan Peternakan Dalam Perekonomian Wilayah, Kontribusi Sektor Perikanan Dalam Perekonomian Wilayah.....	289
Sasaran 13 Meningkatnya Nilai Investasi Dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Produk Unggulan Daerah Masyarakat Dengan Indikator Tingkat Nilai Realisasi Invetasi Tahunan (PMA/PMDN),	



	Tingkat Pengangguran Terbuka, Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB, Persentase UMKM Dan IKM Aktif Dan Persentase Koperasi Aktif	295
Sasaran 14.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Dengan Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Wilayah Dan Persentase Peningkatan Wisatawan (WNA/WNI).....	311
Sasaran 15.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Indikator Peningkatan Nilai PAD	315
Sasaran 16.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Dengan Indikator Skor PPH.....	318
Sasaran 17.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Kampung/Kelurahan Yang Merata Dengan Indikator Persentase Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	320
Sasaran 18.	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Serta Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah Dengan Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	322
Sasaran 19.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Rukun Berlandaskan Wawasan Kebangsaan Dan Politik Dengan Indikator Persentase Etnis/ Suku/ Agama/ Ormas Dan LSM Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Berbangsa Dan Politik.....	324
Sasaran 20.	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dengan Indikator	



Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dan Persentase Layanan Pemberdayaan Sosial	327
Sasaran 21. Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat Dengan Indikator Cakupan Layanan Pemberdayaan.....	331
Sasaran 22. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dengan Indikator Indeks SPBE.....	334
Sasaran 23. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Dengan Indikator: Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan, Persentase Pelayanan Agenda Kerja DPRD, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, Persentase Penegakan Terhadap Perda Dan Perkada Dan Persentase Daerah Yang Terjangkau Layanan Telokomunikasi Dan Internet.....	336
Sasaran 24. Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Dengan Indikator Indeks Merit Sistem	347
Sasaran 25. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan dengan Indikator Nilai LKJp Kabupaten.....	350
Sasaran 26. Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Dengan Indikator Opini BPK Atas Laporan keuangan (IKK Outcome) Dan Persentase Program RKPD Selaras Dengan RPJMD	352
Sasaran 27. Meningkatnya OPD Yang Menerapkan Zona Integritas Dengan Indikator Maturitas SPIP Dan Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	35
3.2.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	361
3.2.7. Realisasi Anggaran Tahun 2025	376



BAB IV PENUTUP	383
4.1 KESIMPULAN	383
4.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	384
4.3. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	384
4.4. PENUTUP	385



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sarmi, 2025.....	8
Tabel 2.1. Agenda dan Fokus Pembangunan Kabupaten Sarmi 2023-2026	18
Tabel 2.2. Indikator Kineja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023-2026	22
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025	29
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	34
Tabel 3.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025	35
Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran di bawah 100 %	40
Tabel 3.4. Perbandingan pencapaian indikator sasaran Kabupaten Sarmi kondisi awal Sampai dengan Tahun 2025	42
Tabel 3.5. Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD Tahun 2023-2026	47
Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya	55
Tabel 3.7. Keragaman Kebudayaan Daerah Kabupaten Sarmi	59
Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan Pendidikan dan Kesehatan	62
Tabel 3.9. Perkembangan Capaian Angka Harapan Hidup Antara 2023 -2025.....	69
Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab tantangan era perubahan	72
Tabel 3.11. Pencapaian kinerja sasaran pada Optimalnya Pengarusutamaan Gender.....	81
Tabel 3.12. Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya kualitas dana kuantitas jalan dan jembatan serta penataan drainase	88
Tabel 3.13. Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak	93
Tabel 3.14. Perkembangan Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Antar Tahun 2023 -2025.....	94
Tabel 3.15. Pencapaian kinerja sasaran pada Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	101
Tabel 3.16. Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	105

Tabel 3.17.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup.....	110
Tabel 3.18.	Pencapaian kinerja sasaran pada optimalnya cakupan pelayanan persampahan.....	112
Tabel 3.19.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana Meningkatkan penanganan dan penanggulangan resiko bencana	119
Tabel 3.20.	Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan	125
Tabel 3.21.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah Masyarakat	134
Tabel 3.22.	Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.....	151
Tabel 3.23.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya pendapatan asli daerah	156
Tabel 3.24.	Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Tahun 2025	157
Tabel 3.25.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya ketahanan pangan.....	160
Tabel 3.26.	Skor PPH, Konsumsi Kalori dan Protein, Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	161
Tabel 3.27.	Kelompok Pangan menurut Konsumsi Kalori, Protein, Skor PPH, Perkabupaten Tahun 2025	161
Tabel 3.28.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata.....	166
Tabel 3.29.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah	169
Tabel 3.30.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik.....	173
Tabel 3.31.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.....	176
Tabel 3.32.	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis Di kabupaten Sarmi Tahun 2025	178
Tabel 3.33.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat.....	184
Tabel 3.34.	Pencapaian kinerja sasaran pada Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	187
Tabel 3.35.	Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025	189
Tabel 3.36.	Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)	189



Tabel 3.37.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya kualitas layanan publik.....	196
Tabel 3.38.	Agregat Jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi DKB semester II Tahun 2025	197
Tabel 3.49.	Agregat WAJIB KTP-EL Kabupaten Sarmi DKB Semester II Tahun 2025	197
Tabel 3.40.	Agregat Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Kia) Kabupaten Sarmi Dkb Semester II Tahun 2025	198
Tabel 3.41.	Indeks Pembangunan literasi Masyarakat Kabupaten Sarmi tahun 2025.....	202
Tabel 3.42.	Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya kualitas manajemen ASN.....	209
Tabel 3.43.	Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	211
Tabel 3.44.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah.....	214
Tabel 3.45.	Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas.....	219
Tabel 3.46.	Pencapaian Dari Setiap Program	225
Tabel 3.47.	Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja untuk Tahun 2025.....	232
Tabel 3.48.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025.....	364
Tabel 3.49.	PNS Kabupaten Sarmi yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025	372
Tabel 3.50.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2025.....	376

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Sarmi	2
Gambar Grafik. 1.2 Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sarmi Tahun 2025	3
Gambar Grafik 1.3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Sarmi (jiwa), 2025.....	8
Gambar Grafik 1.4 Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	9
Gambar Grafik 1.5 Jumlah populasi ternak tahun 2025	11
Gambar Grafik 1.5 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan, 2021 dan 2022	12
Gambar Grafik 1.6 Jumlah Akomodasi Hotel di Kabupaten Sarmi, 2022-2025	12
Gambar 3.1. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Kepada Masyarakat, Guna Mendorong Anak-Anak Untuk Tetap Melanjutkan Pendidikan	64
Gambar 3.2. Kegiatan Antar jemput Pelajar ke Perpustakaan Daerah dan Pelayanan Perpustakaan Keliling (Mobile Perpustakaan)	67
Gambar 3.3. Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula di Kabupaten Sarmi	64
Gambar 3.4. Kejuaraan Daerah Open Karate Turnamen Piala Ketua Umum FORKI Papua Tahun 2025	79
Gambar 3.5. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam bidang ekonomi melalui pelatihan pembuatan briket / arang Batok kelapa dan limbah kayu besi di Kampung Nengke, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Kabupaten Sarmi	82
Gambar 3.6. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam bidang ekonomi Melalui kegiatan pelatihan Pembuatan Abon dan Krupuk Ikan Tenggiri di Kampung Sunum, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi	83
Gambar 3.7. Kegiatan Pembentukan POKJA PUG Tingkat Kabupaten	83

Gambar 3.8. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan.....	85
Gambar 3.9. Peraturan Bupati Sarmi Pembentukan UPTD PPA.....	86
Gambar 3.10. Kegiatan Rekonstruksi Jalan Long Segmen Jalan Ruas Neidam - Kasukwe dan Ruas Kasukwe – Petam	89
Gambar 3.11. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	92
Gambar 3.12. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.....	97
Gambar 3.13. Pengangkutan sampah dari permukiman Masyarakat ke tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir	114
Gambar 3.14. Kegiatan Pengangkutan Sampah dari Pasar setiap hari.....	115
Gambar 3.15. Kampanye Lingkungan Bersih.....	115
Gambar 3.16. Kegiatan Kerja Bakti Setiap Hari Jumat Pembersihan Fasilitas Umum	116
Gambar 3.17. Kegiatan Pelayanan Pemadaman Kebakaran	123
Gambar 3.18. Penyerahan Bantuan Alat Angkut Apung dan Motor Tempel 15 PK Oleh Kepala Dinas Perikanan Kepada Nelayan	128
Gambar 3.19. Pemberian Bantuan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap berupa FREEZER Oleh Dinas Perikanan Kepada Nelayan	128
Gambar 3.20. Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	130
Gambar 3.21. Penyerahan Bantuan Sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar/komoditas lokal (Pakan,Benih dan Peralatan Budidaya).....	131
Gambar 3.22. Kegiatan Pelatihan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Benar (CPPIB) Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi.....	132
Gambar 3.23. Pendidikan dan Pelatihan Komputer, Servis HP, Sablon dan Menjahit.....	138
Gambar 3.24. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaraman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	163

Gambar 3.25. Kegiatan Perbantuan Pemeriksaan Barang Expire , Penertiban Hewan Ternak dan Penertiban Miras oleh SATPOL PP Bersama TNI POLRI	170
Gambar 3.26. Sekretaris Daerah Membuka Sosialisasi Penguatan Politik Bagi Orang Asli Papua Di Kabupaten Sarmi Sarmi, 9 Oktober 2025	174
Gambar 3.27. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Adat/Ormas Adat Di Wilayah Kabupaten Sarmi Tahun 2025	175
Gambar 3.28. Pemberian bantuan Permakanan bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Tahunn 2025.....	179
Gambar 3.29. Pemberian bantuan sandang bagi lanjut usia oleh Dinas Sosial Tahunn 2025	179
Gambar 3.30. Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan tahun 2025	180
Gambar 3.31. Penyerahan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT Oleh Dinas Sosial Kab. Sarmi Tahun 2025	185
Gambar 3.32. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE	188
Gambar 3.33. Hasil Evaluasi SPBE.....	191
Gambar 3.34. Pelayanan jemput bola (mobile service) ke distrik dan kampung untuk perekaman KTP-el dan penerbitan dokumen kependudukan.....	199
Gambar 3.35. Launching IKD	199
Gambar 3.36. Sosialisasi dan Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah dalam rangka memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mencegah korupsi dalam layanan publik, didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	121
Gambar 3.37. Rapat Kerja Inspektorat daerah Kabupaten Sarmi Penyusunan SOP Pemanfaatan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan SOP Pemantauan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut.....	222
Gambar 3.83. Pelatihan Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik Bagi APIP di Wilayah Provinsi Papua	222



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik. 3.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarmi Tahun 2023 - 2025	69
Grafik 1.2 Tren Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2023 - 2025	141
Grafik 3.3 Tren Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (2023-2025)	375
Grafik 3.4 Presentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan, Desember 2025.....	11

LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2023-
2026
2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025



BAB

1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SARMI

1. Kondisi Geografis dan Iklim

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Sarmi memiliki luas wilayah 17.740 km², terletak pada 1°35' dan 3°35' Lintang Selatan serta 138°05' dan 140°30' Bujur Timur. Kecamatan Pantai Timur Barat merupakan Kecamatan terluas yaitu 4.020 km² atau 22,66 persen. Sedangkan Kecamatan Sarmi Selatan adalah kecamatan dengan luas terkecil yakni 471 km² atau 2,66 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Sarmi.

Wilayah yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut tertinggi adalah Kecamatan Apawer Hulu dengan ketinggian 92,03 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Sarmi Selatan merupakan wilayah paling rendah dengan ketinggian 5,53 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Sarmi bagian utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Jayapura, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah, dan bagian barat berbatasan Kabupaten Mamberamo Raya

Gambar 1. 1

Peta Administrasi Kabupaten Sarmi



Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 memiliki suhu udara di antara 21,50oC sampai 33,50oC. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Juni dan Juli dan suhu terendah terjadi pada bulan Juli.

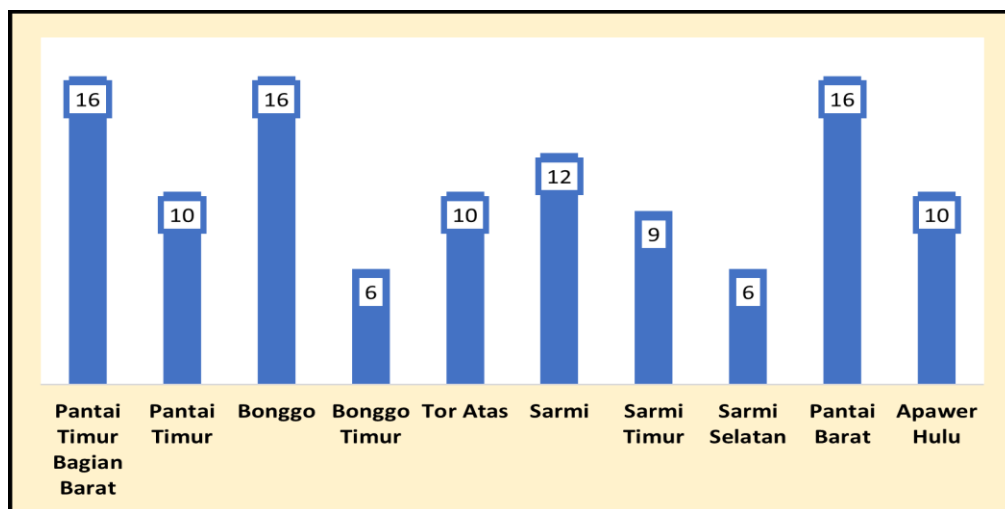
Sepanjang tahun 2025, BMKG mencatat hujan terjadi setiap bulan. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Sarmi tertinggi pada bulan Maret sebesar 438,70 mm dan terendah pada bulan Februari sebesar 108,70 mm. Banyaknya jumlah hari hujan berkisar antara 15-22 hari. Bulan Maret memiliki jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2025 yaitu 22 hari.

2. Struktur Organisasi

Kabupaten Sarmi tercatat memiliki 10 kecamatan dengan 109 desa/kampung dan 2 kelurahan. Kecamatan Sarmi merupakan ibu kota kabupaten dengan 2 kelurahan dan 11 kampung.

Gambar Grafik: 1.2

Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sarmi Tahun 2025



Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2023 sebanyak 2.086 orang, terdiri dari 1.118 laki-laki dan 898 perempuan. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah PNS sebanyak 2.086 orang, terdiri dari 1.188 laki-laki dan 898 perempuan.

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah adalah membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sementara itu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu:

1. **Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan**, membawahi Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum
2. **Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan**, membawahi Bagian Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Protokoler.
3. **Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum**, membawahi Bagian Umum dan Bagian Organisasi.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab secara Teknis Administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis kepada pimpinan DPRD.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. menyelenggarakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada



Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas merupakan perangkat daerah yang disertai wewenang, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

Dinas-Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi berjumlah 22 (duapuluh dua) dinas, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas PU dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
17. Dinas Pertanian
18. Dinas Perikanan
19. Dinas Pemuda dan Olahraga
20. Dinas Pariwisata
21. Dinas Ketahanan Pangan
22. Satuan Polisi Pamong Praja

Badan

Badan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi berjumlah 6 (enam) badan, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur staf atau lini yang dalam melaksanakan tugas operasionalnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati sedangkan penyelenggaraan tugas administrasi di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah adalah perangkat daerah yang disertai wewenang, tugas, dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi berjumlah 1 (satu) unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah yaitu Inspektorat Daerah

Distrik dan Kelurahan

Kabupaten Sarmi Tahun 2023 memiliki 19 (Sembilan belas) distrik yang tersebar di wilayah pedalaman dan pesisir dan 2 (dua) kelurahan, sebagai berikut:

1. Kelurahan Mararena
2. Kelurahan Sarmi
3. Distrik Fee'n
4. Distrik Sungai Biri
5. Distrik Ismari



6. Distrik Tor Atas
7. Distrik Verkam
8. Distrik Muara Tor
9. Distrik Sobey
10. Distrik Bonggo Barat
11. Distrik Bonggo Timur Jauh
12. Distrik Bonggo Timur Tengah
13. Distrik Bonggo
14. Distrik Sarmi Selatan
15. Distrik Sarmi Timur Tengah
16. Distrik Sarmi Timur
17. Distrik Sarmi
18. Distrik Apawer Hulu
19. Distrik Apawer Hilir
20. Distrik Apawer Tengah
21. Distrik Pantai Timur
22. Distrik Pantai Timur Bagian Barat
23. Distrik Pantai Barat

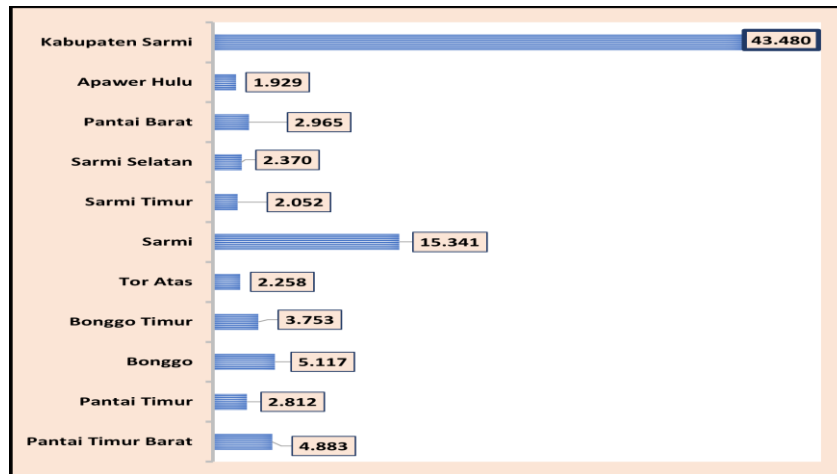
3. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Sarmi berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2025 sebanyak 43.480 jiwa yang terdiri atas 23.090 jiwa penduduk laki-laki dan 20.390 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Sarmi mengalami pertumbuhan sebesar 0,91 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Sarmi tahun 2025 adalah 113,24 yang berarti terdapat 113-114 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sarmi tahun 2025 mencapai 2,45 jiwa/ km².

Gambar Grafik : 1.3

Jumlah Penduduk di Kabupaten Sarmi (jiwa), 2025



Sumber: Sarmi Dalam Angka 2026

4. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Kabupaten Sarmi tahun 2025, penduduk sarmi yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 19.698 orang dan yang pengangguran terbuka sebanyak 900 orang.

Tabel .1.1

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut
Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Sarmi, 2025

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ Educational Attainment ¹	Angkatan Kerja/Labour Force			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja Percentage of Working to Labour Force
	Bekerja Working	Pengangguran ² Unemployment ²	Jumlah Angkatan Kerja Total of Labour Force	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	6.799	N.A.	6.894	98,62
1	2.934	N.A.	2.946	99,59
2	7.380	720*	8.100	91,23
3	2.585	N.A.	2.658	97,25
Jumlah/Total	19.698	900*	20.598	95,63

Sumber: Sarmi Dalam Angka 2026

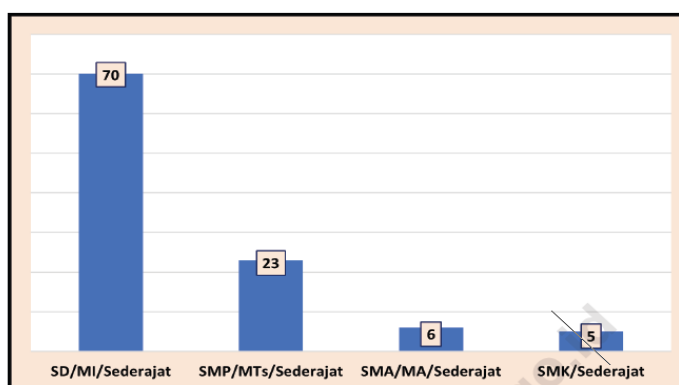
5. Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi di Kabupaten Sarmi tahun 2025 terjadi pada jenjang SMP/MTs/Sederajat yang mencapai 111,00 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi berada pada jenjang SD/MI/ Sederajat mencapai 94,48 persen.

Pada tahun 2025, jumlah sekolah yang terdaftar pada Departemen Pendidikan Nasional sebanyak 104 sekolah. Jumlah unit sekolah terdiri dari 70 SD, 22 SMP, 1 MTs, 6 SMA dan 5 SMK

Gambar Grafik : 1.4

Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025



Sumber: Sarmi Dalam Angka 2026

6. Kesehatan

Kabupaten Sarmi memiliki 1 fasilitas rumah sakit yang terletak di Kecamatan Pantai Timur Barat. Fasilitas kesehatan lain di Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2 klinik pratama, 10 puskesmas, 23 puskesmas pembantu, dan 5 apotek.

7. Agama

Jumlah pemeluk agama Kristen protestan sebanyak 28.585 umat. Sementara itu, pemeluk agama islam tercatat sebanyak 12.785 umat dan pemeluk agama katolik sebanyak 702 umat. Tempat peribadatan Gereja Kristen Protestan adalah tempat peribadatan paling banyak di Kabupaten Sarmi yaitu sebanyak 120 gereja. Tempat peribadatan agama islam ada sebanyak 20 masjid dan 9 musholla, agama katolik sebanyak 3 gereja.

8. Kriminalitas

Perkara yang diterima pada tahun 2023 di Polres Kabupaten Sarmi ada sebanyak 82 kasus sedangkan kasus yang diselesaikan ada sebanyak 37 kasus.

9. Kemiskinan

Garis kemiskinan untuk Kabupaten Sarmi tahun 2025 sebesar 686.768 rupiah per kapita per bulan. Terjadi peningkatan garis kemiskinan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 653.436 rupiah per kapita per bulan.

10. Sosial lainnya

Jumlah surat nikah dan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarmi pada tahun 2023 adalah sebanyak 257 akta nikah dan 257 akta kelahiran.

11. Tanaman hortikultura

Pada tahun 2025, produksi tanaman sayuran yang tercatat di Dinas Pertanian Kabupaten Sarmi adalah produksi untuk tanaman cabai besar yaitu sebesar 6,35 kuintal dengan luas panen 3,13 hektar, cabai keriting sebesar 6,00 kuintal dengan luas panen 3,00 hektar, cabai rawit sebesar 5,00 kuintal dengan luas panen 2,50 hektar, bayam sebesar 4,50 kuintal dengan luas panen 2,25 hektar, kacang panjang sebesar 4,50 kuintal dengan luas panen 2,13 hektar, kangkung sebesar 4,50 kuintal dengan luas panen 1,75 hektar, terung sebesar 4,00 kuintal dengan luas panen 1,75 hektar, dan tomat sebesar 3,00 kuintal dengan luas panen 1,25 hektar.

12. Perkebunan

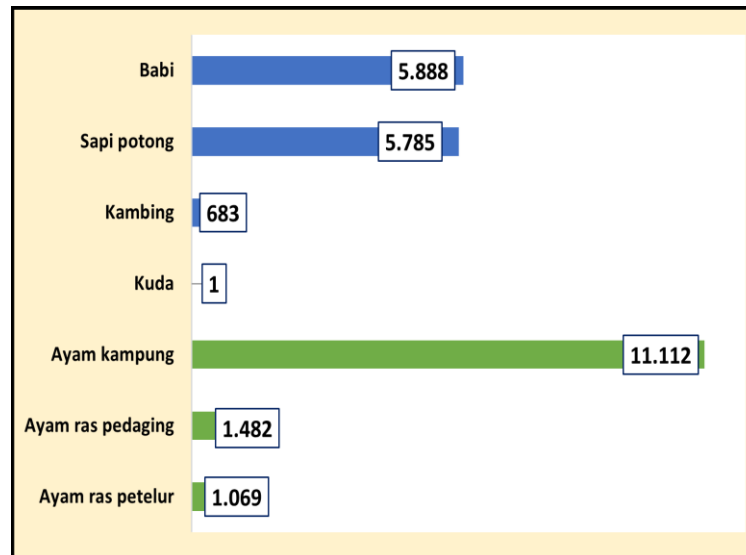
Komoditas tanaman perkebunan yang dicatat di Kabupaten Sarmi tahun 2025 yaitu tanaman kelapa dan kakao. Produksi tanaman perkebunan yang terbesar adalah tanaman kelapa dengan produksi sebesar 1.078,34 ton.

13. Peternakan

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Sarmi, jumlah populasi ternak tahun 2023 di Kabupaten Sarmi tercatat sebanyak 5.785 sapi potong, 1 kuda, 683 kambing, 5.888 babi. Untuk populasi unggas, di Kabupaten Sarmi tahun 2023 tercatat sebanyak 11.112 ayam kampung, 1.069 ayam ras petelur, dan 1.482

ayam ras pedaging. Dinas Pertanian Kabupaten Sarmi mencatat jumlah ternak yang dipotong pada 2023, yaitu 25 sapi potong, 7 kambing, dan 30 babi.

Gambar Grafik : 1.5
Jumlah populasi ternak tahun 2025



Sumber: Sarmi Dalam Angka 2026

14. Perikanan

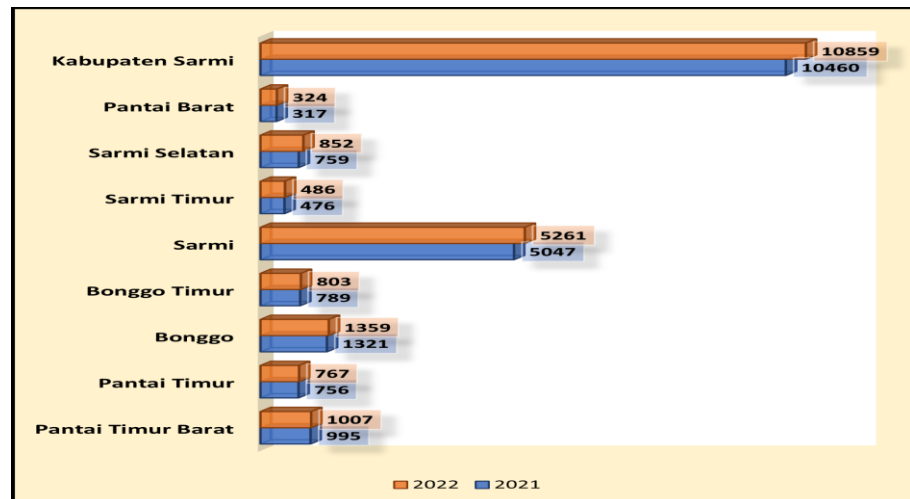
Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi pada tahun 2019, rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Sarmi sebanyak 581 rumah tangga. Sementara untuk perikanan budidaya ada sebanyak 319 rumah tangga.

15. Energi

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Sarmi hingga tahun 2022 sebanyak 10.859 pelanggan. Pelanggan listrik PLN terdapat di 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Pantai Barat, Kecamatan Sarmi, Kecamatan Sarmi Timur, Kecamatan Sarmi Selatan Kecamatan Pantai Timur, Kecamatan Pantai Timur Barat, Kecamatan Bonggo dan Bonggo Timur. Sedangkan ada beberapa kecamatan lain tidak menggunakan listrik PLN.

Grafik :1.6

Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan, 2021 dan 2022



Sumber : Sarmi Dalam Angka Tahun 2026

16. Komunikasi

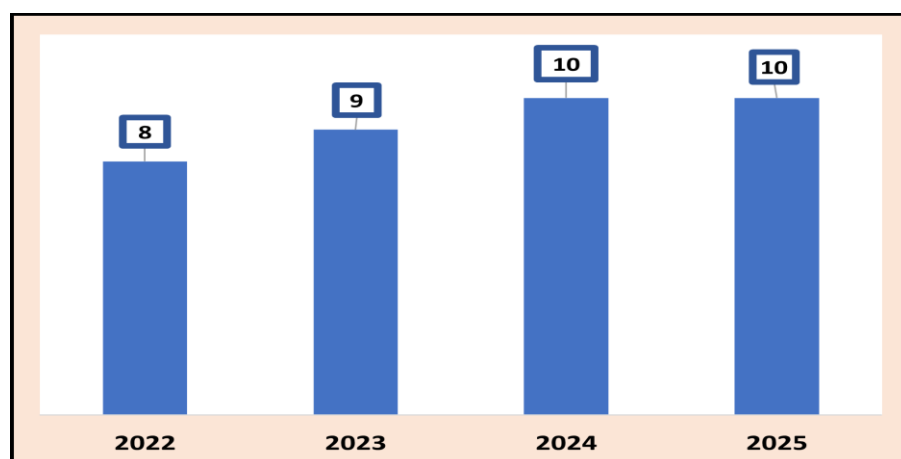
Jumlah kantor pos di Kabupaten Sarmi berdasarkan jenisnya di tahun 2025 adalah 1 kantor pos. Kantor pos tersebut berlokasi di Kecamatan Sarmi.

17. Pariwisata

Pada Tahun 2025 Kabupaten Sarmi di bidang kepariwisataan memiliki 10 buah hotel dan semuanya termasuk dalam kategori hotel tidak berbintang. Dengan jumlah kamar yang dapat dipakai adalah 109 kamar.

Grafik: 1.6

Jumlah Akomodasi Hotel di Kabupaten Sarmi, 2022- 2025



Sumber Badan Pusat Statistik, Updating Direktori Penyedia Jasa Pariwisata /BPS-Statistics

Indonesia

18. Perhubungan Darat

Panjang jalan Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 mencapai 494,275 km. Kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Sarmi pada tahun 2023 berjumlah 12.021 unit.

19. Perhubungan Udara

Pada perhubungan udara, banyaknya lalu lintas pesawat di Kabupaten Sarmi 2025 tercatat bahwa pesawat yang datang dan berangkat sebanyak 107 lintas. Banyaknya penumpang yang berangkat sebanyak 270 orang dan yang datang sebanyak 408 orang.

20. Perhubungan Laut

Pada perhubungan laut, banyaknya lalu lintas kapal di Kabupaten Sarmi 2025 tercatat bahwa kapal yang datang dan berangkat sebanyak 147 lintas.

21. Pengeluaran penduduk

Konsumsi penduduk terdiri dari konsumsi makanan dan non makanan. Konsumsi makanan di Kabupaten Sarmi lebih dominan dibandingkan dengan konsumsi non makanan pada tahun 2024 dan 2025.

Pada Tahun 2025, Mayoritas pen-duduk Kabupaten Sarmi memiliki pengeluaran per kapita sebulan di golongan lebih dari 1.500.000 rupiah, yakni sebesar 57,83 persen. Sedangkan minoritas berada pada kelompok pengeluaran per kapita sebulan diantara 500.000 hingga 749. 999 rupiah yakni 1,41 persen.

Jumlah rata-rata pengeluaran perkapita selama sebulan pada tahun 2025 yaitu untuk pengeluaran makanan adalah sebesar Rp 859.403 sedangkan untuk pengeluaran non makanan sebesar Rp 713. 790.

22. Sarana Perdagangan

Jumlah perusahaan berbadan hukum yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sarmi tahun 2023 sebanyak 206 unit saha. Jumlah sarana perdagangan yang tercatat diKabupaten Sarmi tahun 2023 adalah sebanyak 206 sarana yang terdiri dari 10 pasar, 7 toko, 103 kios, 30 warung dan 86 rumah makan.

23. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator pembangunan di bidang ekonomi dari suatu wilayah. Total dari nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas sektor ekonomi yang terangkum dalam PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Sarmi tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 4.038,74 miliar rupiah. Untuk PDRB atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB tahun 2024 adalah 3.824,65 miliar rupiah.

Sektor pertanian sebagai kontributor tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Sarmi tahun 2025 dengan memberikan kontribusi sebesar 28,09 persen dengan laju pertumbuhan positif sebesar 4,34 persen dan tertinggi kedua adalah sektor konstruksi dengan kontribusi 21,13 persen dengan laju pertumbuhan positif sebesar 0,45 persen.

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP TAHUN 2025

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut memberikan kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni pemerintahan Kabupaten Sarmi yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur dan menganalisis tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sahih. Cara-cara pengukuran

yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permenpan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari SAKIP bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Sarmi. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis pemerintah kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sarmi. Setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Sistem pengukuran kinerja disusun dan dilaksanakan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Sarmi berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode, laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama. **Pertama**, laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 mencakup hal-hal berikut ini:

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sarmi atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran telah dicapai dalam Tahun 2025.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Sarmi bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. SISTEMATIKA LAKIP TAHUN 2025

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Strategis di sini dimaksudkan sebagai kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sarmi, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang berguna bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti tersebut diatas, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 diuraikan dalam bentuk bab-bab sebagai berikut :



- Executive Summary
- Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Sarmi dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2025.
- Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk periode 2023-2026 dan rencana kinerja Tahun 2025.
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran untuk Tahun 2025.
- Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
- Lampiran-lampiran

BAB 2

RENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1. RPD PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Sarmi tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan kerangka pembangunan yang bersifat strategis Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk periode 4 tahun.

Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran agenda pembangunan, RPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Untuk periode Tahun 2023-2026, RPD Kabupaten Sarmi disahkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2023-2026. RPD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Sarmi hingga ke level perencanaan tahunan.

Mengacu pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, sasaran strategik dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Papua 2019- 2023, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sarmi 2002-2025, isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2017-2022, dapat dirumuskan 5 (lima) Agenda Pembangunan dalam RPD Kabupaten Sarmi 2023-2026 sebagai berikut.

Agenda 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Religius, Berbudaya Dan Berdaya Saing

Agenda 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Sesuai Arah Rtrw

Agenda 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan

Agenda 4 : Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, Serta Wawasan Kebangsaan Dan Kehidupan Politik Masyarakat Yang Rukun, Bersatu Dan Demokratis

Agenda 5 : Mengoptimalkan Pelayanan Publik Yang Prima Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel

Fokus pembangunan dari masing-masing agenda Pembangunan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Agenda dan Fokus Pembangunan Kabupaten Sarmi 2023-2026

AGENDA PEMBANGUNAN	FOKUS PEMBANGUNAN
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Religius, Berbudaya Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan SDM yang berkualitas dan bertaqwa kepada Tuhan YME 2. Penguatan moderasi beragama sesuai kepercayaan kepada Tuhan YME 3. Pengembangan potensi intelektual manusia yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. 4. Peningkatan produktifitas, dan daya saing SDM 5. Penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat

	6. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. 7. Pemerataan pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas dan kemudahan akses bagi masyarakat. 8. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi dalam pembangunan
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Sesuai Arah Rtrw	1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan layak huni, air bersih, sanitasi dan sumber daya energi yang berkualitas. 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar secara merata 3. Pemanfaatan ruang sesuai potensi dan daya dukung lingkungan 4. Pemanfaatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur TIK untuk transformasi digital 5. Pengaturan batas-batas wilayah 6. Optimalisasi kepemilikan sertifikat tanah 7. Pengembangan pusatpusat pertumbuhan dan pembangunan kampung guna memperluas pelayanan publik yang merata dan terjangkau 8. Optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan	1. Peningkatan pemerataan ekonomi yang kuat dan berdaya saing. 2. Pengembangan potensi sumber daya ekonomi lokal yang unggul secara Berkelanjutan. 3. Peningkatan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan sector pertanian, peternakan, kelautan dan kehutanan berbasis ekonomi kerakyatan. 4. Pengembangan dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. 5. Peningkatan kesempatan dan peluang berusaha bagi masyarakat dan kemudahan akses terhadap

	faktor produksi. 6. Peningkatan kemandirian daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. 7. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah. 8. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan 9. Pemantapan pembangunan berkelanjutan (pembangunan hijau/rendah karbon) 10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 11. Peningkatan edukasi pemanfaatan sumber daya alam dengan Memperhatikan keseimbangan lingkungan ekologi 12. Peningkatan interaksi kehidupan sosial masyarakat dengan lingkungan
4. Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, Serta Wawasan Kebangsaan Dan Kehidupan Politik Masyarakat Yang Rukun, Bersatu Dan Demokratis	1. Pemantapan kehidupan yang aman dan damai 2. Pemantapan kehidupan masyarakat yang patuh, dan tertib terhadap peraturan hukum 3. Peningkatan layanan pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial 4. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan politik masyarakat yang berbudaya, rukun, bersatu dan demokratis 5. Peningkatan kualitas pelayanan produk-produk hukum
5. Mengoptimalkan Pelayanan Publik Yang Prima Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	1. Peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 2. Peningkatan profesionalitas kerja aparatur dalam melayani masyarakat 3. Peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap aparatur dalam pelayanan publik 4. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

	5. Peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. 6. Pemerataan pelayanan publik yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan
--	---

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Sarmi yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan.

Indikator Kinerja Utama disusun secara sistematis dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga mampu mencerminkan kinerja hasil (*outcome*) yang ingin dicapai. Selain itu, IKU juga menjadi instrumen penting dalam pengukuran, evaluasi, dan peningkatan kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun disusun sebagai berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2023-2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		Sumber Data
A 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang religius, berbudaya dan berdaya saing						
1	Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikankarakter dan pendidikan keagamaan	X 100 %	Dinas P danK
				Jumlah Satuan Pendidikan		
		2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan	X 100 %	Dinas P danK
				Total Seni Budaya		
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	3	Rata-Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.		Dinas P danK
		4	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	X 100 %	Dinas Pepus dan Arsip
				Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani		
		5	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur		Dinkes
3	Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab taantangan era erubahan	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	<u>Angkatan kerja 15 tahun ke atas</u> Jumlah	100 %	Disnaker
				penduduk usia 15 tahun ke atas		
		7	Persentase pemuda dalam pembangunan	<u>Jumlah organisasi pemuda yang aktif</u>	X 100 %	Dispora
				Jumlah seluruh organisasi pemuda		
		8	Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun		Dispora



	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	9	Indeks Pembangunan Gender	komponen persentase perempuan sebagai tenaga profesional		Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
A 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Sesuai Arah RTRW						
1	Meningkatnya kualitas dana kuantitas jalan dan jembatan serta penataan drainase	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kondisi baik	X 100 %	PUPR
				Panjang jalan seluruhnya		
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Jumlah Jembatan kondisi baik	X 100 %	PUPR
				Jumlah Jembatan Seluruhnya		
2	Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak	3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	X 100 %	PUPR
				Jumlah Rumah Tangga seluruhnya yang membutuhkan Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak		
		4	Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	X 100 %	PUPR
				Jumlah rumah tinggal		
3	Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	5	Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni	X 100 %	DPKP
				Jumlah penduduk		
4	Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	6	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Jumlah layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif		Disperhub
		7	Arus pergerakan penumpang angkutan udara	Jumlah penumpang angkutan udara per Tahun		Disperhub

5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	8	Indeks kualitas air (IKA)	Rumus metode IP: $\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$ $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemara ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemara sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemara berat		Dinas Lingkungan Hidup
		9	Indeks kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$		Dinas Lingkungan Hidup
		10	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan		Dinas Lingkungan Hidup
6	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan	11	Persentase timbulan sampah yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{Total Jumlah Timbulan sampah}} \times 100 \%$		Dinas Lingkungan Hidup
		12	Ketersediaan TPA yang dikelola secara baik	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71		Dinas Lingkungan Hidup
7	Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana	13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang membutuhkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}} \times 100 \%$		Dinsos
		14	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Total Wilayah}} \times 100 \%$		SATPOL PP



			kabupaten/kota (SPM)		Luas wilayah kabupaten/kota		
A3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan							
1.	Meningaktnya produktivitas pertanian,perkebunan dan perikanan	1	Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}}$		$X 100 \%$	Dinas Pertanian
		2	Kontribusi sektor peternakan dalam perekonomian wilayah	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor peternakan}}{\text{Jumlah PDRB}}$		$X 100 \%$	Dinas Pertanian
		3	Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perikanan}}{\text{Jumlah PDRB}}$		$X 100 \%$	Dinas Perikanan
2	Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerahmasyarakat	4	Nilai realisasi invetasi tahunan (PMA/PMDN)	Jumlah Nilai invetasi tahunan (PMA/PMDN)			PTSP
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}$		$X 100 \%$	DISNAKER
		6	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}}$		$X 100 \%$	PERINDAG KOPdan UKM
		7	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari industri pengolahan}}{\text{Jumlah PDRB}}$		$X 100 \%$	PERINDAG KOPdan UKM
		8	Persentase UMKM dan IKM aktif	$\frac{\text{Jumlah UMKM dan IKM aktif}}{\text{Jumlah seluruh UMKM dan IKM}}$		$X 100 \%$	PERINDAG KOPdan UKM
		9	Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}}$		$X 100 \%$	PERINDAG KOPdan UKM
3	Meningkatnya daya saing pariwisata	10	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}}$		$X 100 \%$	Dinas Pariwisata
		11	Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)	$\frac{\text{Jumlah wisatawan (WNA/WNI) yang berkunjung tahun lalu}}{\text{Jumlah wisatawan (WNA/WNI) tahun lalu}}$		$X 100 \%$	Dinas Pariwisata



				Jumlah Wisata yang berkunjung tahun N		
4	Meningkatnya pendapatan asli daerah	12	Peningkatan nilai PAD	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah pendapatan daerah}}$	$\times 100 \%$	DISPORA
5	Meningkatnya ketahanan pangan	13	Skor PPH	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan		Dinas Pangan
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata	14	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total Program Pemberdayaan Masyarakat}}$	$\times 100 \%$	DPMK
A 4 : Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, Serta Wawasan Kebangsaan Dan Kehidupan Politik Masyarakat Yang Rukun, Bersat Dan Demokratis						
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}}$	$\times 100 \%$	SATPOL PP
2	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik	2	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	$\frac{\text{Jumlah etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik}}{\text{Jumlah Keseluruhan etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM}}$	$\times 100 \%$	KESBANGPOL
3	Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	3	Persentase layanan rehabilitasi sosial	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos}}$	$\times 100 \%$	DINSOS
		4	Persentase layanan	Jumlah layanan pemberdayaan social	$\times 100 \%$	DINSOS



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

			pemberdayaan sosial	Jumlah yang membutuhkan layanan sosial		
4	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat	5	Cakupan layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Jumlah layanan pemberdayaan kesejahteraan <u>sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)</u> Jumlah KAT (Komunitas Adat Terpencil)	$X 100 \%$	DINSOS
5	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	6	Indeks SPBE	Penyelenggaraan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE		KOMINFO
6	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	7	Tingkat cakupan layanan Administrasi kependudukan	<u>Jumlah dokumen yang diterbitkan</u> Jumlah penduduk	$x100\%$	DUKCAPIL
		8	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	<u>Jumlah pelayanan agenda kerja DPRD</u> Jumlah agenda kerja DPRD	$X 100 \%$	Sekretariaaat DPRD
		9	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	<u>Jumlah Pengunjung Perpustakaan</u> Jumlah Perpustakaan	$X 100 \%$	Dinas Perpustakaan dan arsip
		10	Persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada	<u>Jumlah penyelesaian penegakan PERDA</u> Jumlah pelanggaran PERDA	$X 100 \%$	SATPOL PP
		11	Persentase daerah yang terjangkau layanan telokomunikasi dan internet	<u>Luas Wilayah Yang Ter-coverage</u> Luas Wilayah Keseluruhan	$X 100 \%$	KOMINFO
7	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	12	Indeks Merit Sistem	Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten		BKPSDM
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	13	Nilai SAKIP Kabupaten	Hasil Penilaian Menpan RB		SEKRETARIAT DAERAH



9	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	14	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Hasil Penilaian Oleh BPK		Keuangan
		15	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota		BAPPEDA
10	Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas	16	Maturitas SPIP	Nilai yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal		Inspektorat
		17	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total temuan}} \times 100 \%$	$X 100 \%$	Inspektorat

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025, adalah sebagai berikut .

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
A 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang religius, berbudaya dan berdaya saing					
1	Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100
		2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	54,22
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,11
		2	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	3,04
		3	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,61
3	Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab taantangan era erubahan	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,2
		2	Persentase pemuda dalam pembangunan	Persen	40,66
		3	Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan	Eaven	1

			nasional		
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	83,58
A 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Sesuai Arah RTRW					
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta penataan drainase	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	19,75
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	44,01
2	Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak	1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persen	93,68
		2	Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Persen	78,76
3	Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	1	Rasio rumah layak huni	Persen	73,72
4	Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	1	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Per 1000 penduduk	4,61
		2	Arus pergerakan penumpang angkutan udara	Orang	520
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	81,80
		2	Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,12
		3	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	100,00
6	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan	1	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	20,00
		2	Ketersediaan TPA yang dikelola secara baik	Ada/Tidak Ada	Ada
7	Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana	1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	95,00
		2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)	Persen	100,00



A3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan				
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan	1	Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah	Persen 21,33
		2	Kontribusi sektor peternakan dalam perekonomian wilayah	Persen 2,07
2	Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah masyarakat	3	Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Persen 53,42
		1	Nilai realisasi investasi tahunan (PMA/PMDN)	Rp. Miliar 33,48
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen 3,45
		3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen 13,12
		4	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen 2,33
		5	Persentase UMKM dan IKM aktif	Persen 41,00
3	Meningkatnya daya saing pariwisata	6	Persentase koperasi aktif	Persen 48,21
		1	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	Persen 9,55
4	Meningkatnya pendapatan asli daerah	2	Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)	Persen 2,10
		1	Peningkatan nilai PAD	Persen 1,86
5	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH	Akor 68,72
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata	1	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen 50,00
A 4 : Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, Serta Wawasan Kebangsaan Dan Kehidupan Politik Masyarakat Yang Rukun, Bersat Dan Demokratis				
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen 90,00
2	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik	1	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan	Persen 100,00

			politik		
3	Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1	Persentase layanan rehabilitasi sosial	Persen	48,70
		2	Persentase layanan pemberdayaan sosial	Persen	63,71
4	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat	1	Cakupan layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Persen	38,69
A5 : Mengoptimalkan Pelayanan Publik Yang Prima Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel					
1	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Indeks SPBE	Predikat	Cukup
2	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	1	Tingkat cakupan layanan Administrasi kependudukan	Persen	82,38
		2	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100,00
		3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	77,24
		4	Persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada	Persen	100
		5	Persentase daerah yang terjangkau layanan telokomunikasi dan internet	Persen	37,23
3	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1	Indeks Merit Sistem	Predikat	55,66
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	1	Nilai LKJp Kabupaten	Skala Nilai	B
6	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Predikat	WTP
		2	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	93,72
17	Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas	1	Maturitas SPIP	Level	Level 3
		2	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	85,00

BAB

4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Sarmi Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara umum, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi menunjukkan hasil yang **cukup baik**, meskipun belum seluruh indikator kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator kinerja menunjukkan capaian yang tinggi bahkan melampaui target, namun terdapat pula indikator yang masih belum optimal dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pemerintah daerah telah mampu menunjukkan **tingkat efisiensi yang cukup tinggi**, dengan realisasi belanja yang lebih rendah dibandingkan anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja secara signifikan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip **efisiensi dan efektivitas (value for money)** dalam penggunaan sumber daya.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya pencapaian beberapa indikator kinerja strategis;
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;

- Belum meratanya implementasi program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah;
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung;
- Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja.

4.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pencapaian kinerja, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. **Keterbatasan kapasitas fiskal daerah**, yang mempengaruhi ruang gerak pelaksanaan program pembangunan;
2. **Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah**, termasuk potensi PAD dan sektor unggulan;
3. **Rendahnya kualitas data kinerja**, yang berdampak pada pengukuran dan evaluasi;
4. **Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan program**, sehingga belum memberikan dampak signifikan;
5. **Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal**, dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

4.3. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja**, agar lebih terarah, terukur, dan realistis;
2. **Memperkuat pengendalian dan evaluasi kinerja**, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala;
3. **Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia**, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi;



4. **Mendorong inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan**, guna meningkatkan efektivitas dan dampak;
5. **Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi**, dalam mendukung pengelolaan kinerja dan pelayanan publik;
6. **Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah**, serta dengan pemangku kepentingan lainnya;
7. **Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah**, untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

4.4. PENUTUP

Dengan tersusunnya LKJIP Kabupaten Sarmi Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan. Pemerintah Kabupaten Sarmi berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan berkelanjutan.

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi mengacu pada ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi dilakukan dengan cara membandingkan antara **target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun anggaran**. Hasil perbandingan tersebut menghasilkan nilai capaian kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui **selisih kinerja (performance gap)** antara target dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat pencapaian kinerja. Analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan kinerja (performance improvement) pada periode berikutnya.

Untuk memudahkan interpretasi capaian kinerja, digunakan skala penilaian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut.

:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91	Sangat Baik (SB)	
2.	75 – 90,99	Baik (B)	
3.	65 – 74,99	Cukup (C)	
4.	50 – 64,99	Kurang (K)	
5.	≤ 50	Sangat Kurang (SK)	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sarmi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarmi 2023-2026.

3.2. CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Berikut adalah pencapaian indikator kinerja sasaran Kabupaten Sarmi Tahun 2025.

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Satuan	Tahun 2025			Kategori
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100	100%	100%	SB
		2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	54,22	45%	83%	B
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,11	9,79	88,12	B
		4	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	3,04	0,05	1,64	SK
		5	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,61	70,25	103,90	SB
3	Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab tantangan era erubahan	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72.2	72,81%	100.84	SB
		7	Persentase pemuda dalam pembangunan	Persen	40.66	6	14,6	SK
		8	Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Eaven	1	1	100%	SB



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

4	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	9	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	83.58	84,34	100,91	SB
5	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan serta penataan drainase	10	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	19.75	10.21	51,44	K
		11	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	44.01	40,29	91,55	SB
6	Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak	12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persen	93.68	87,72	95,77	SB
		13	Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Persen	78.76	88,5	112,36	SB
7	Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	14	Rasio rumah layak huni	Persen	73,7	66,1	89.69 %	B
8	Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	15	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Per 1000 penduduk	4.61	1,22	27%	SK
		16	Arus pergerakan penumpang angkutan udara	Orang	520	678	130.38%	SB
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	66,34	71,97	108,49	B
		18	Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,37	90,48	108,53	SB
		19	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	100	100	100	SB



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten SarMI
Tahun 2026

10	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan	20	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	35	45	129%	SB
		21	Ketersediaan TPA yang dikelola secara baik	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak ada	Tidak Ada	SK
11	Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana	22	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	95.00	0	0	SK
		23	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)	Persen	100	100	100	SB
12	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan perikanan	24	Kontribusi sektor pertanian, Peternakan dalam perekonomian wilayah	Persen	21,33 %	28.09%	131.69%	SB
		25	Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Persen	53.42	28,09	52.58 %	K
13	Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah masyarakat	26	Nilai realisasi investasi tahunan (PMA/PMDN)	Rp. Miliar	33.48	6	17,22	SK
		27	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.45	4,37%	126.67%	B
		28	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13.12	10,57%	80,56	B
		29	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	2.33%	1,78%	76.39%	B
		30	Persentase UMKM dan IKM aktif	Persen	41	29,39	71,68	C



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

		31	Persentase koperasi aktif	Persen	48,21	9,09	18,86	SK
14	Meningkatnya daya saing pariwisata	32	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	Persen	9,55	6,53	68,38	C
		33	Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)	Persen	2,1	16,71	795,71	SB
15	Meningkatnya pendapatan asli daerah	34	Peningkatan nilai PAD	Persen	1,86	(-10,19)	-547,35	SK
16	Meningkatnya ketahanan pangan	35	Skor PPH	Skor	68,72	80,94	117,78	SB
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata	36	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	50	0	0	SK
18	Meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah	37	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	90	100	111%	SB
19	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik	38	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	Persen	100	100	100	SB
20	Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	39	Persentase layanan rehabilitasi sosial	Persen	48,70	63,29	129,96	SB
		40	Persentase layanan pemberdayaan sosial	Persen	63,71	2,93	4,6	SK



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

21	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat	41	Cakupan layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Persen	38.69	29,41	76,02	C
22	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	Indeks SPBE	Predikati	Cukup	1.53 /Kurang	Kurang	SK
23	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	43	Tingkat cakupan layanan Administrasi kependudukan	Persen	82.38	80,06	97,19	SB
		44	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100	100	100%	SB
		45	Persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada	Persen	100	100	100%	SB
		46	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	77,24	19,07	25%	SK
		47	Persentase daerah yang terjangkau layanan telokomunikasi dan internet	Persen	37.23	48,91	131,38	SB
24	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	48	Indeks Merit Sistem	Indeks	55,66	Proses Evaluasi	Proses Evaluasi	SK
25	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	49	Nilai LKJp Kabupaten	Skala Nilai	B	Proses Evaluasi	Proses Evaluasi	SK
26	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	50	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Predikati	WTP	WDP	WDP	SK
		51	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	93.72	82.24	87.75	B
27	Meningkatnya OPD yang	52	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 1	Level 1	SK

menerapkan Zona Integritas	53	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	93,72	87,74	82,24	B
-------------------------------	----	--	--------	-------	-------	-------	---

Capaian RPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 yakni sebanyak 53 indikator kinerja yang mendukung 27 sasaran strategis. Terdapat 23 indikator kinerja sasaran mencapai target dengan kategori **Sangat Baik**, 9 indikator kinerja sasaran dengan kategori **Baik**, 2 indikator dengan kategori **Kurang** dan 3 Indikator kinerja dengan kategori **Cukup** dan 15 Indikator kinerja dengan kategori **Sangat Kurang**

Dari 53 indikator kinerja, terdapat 23 indikator telah mencapai target RPD dengan perolehan persentase $\geq 91\%$ Sedangkan indikator kinerja dengan perolehan persentase 75-90,99% sebanyak 9, indikator dengan perolehan capaian 65-74,99% sebanyak 2, indikator dengan perolehan capaian 50-64,99 % sebanyak 3; indikator dengan perolehan capaian ≤ 50 sebanyak 15.

Adapun indikator kinerja sasaran di bawah 100 % adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Sasaran di bawah 100 %

NO	Indikator	Capaian (%)
1	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	83
2	Rata-Rata Lama Sekolah	88,12
3	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	1,64
4	Persentase pemuda dalam pembangunan	14,6
5	Persentase jalan dalam kondisi mantap	51,44
6	Persentase jembatan dalam kondisi baik	91,55
7	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	95,77
8	Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	112,36
9	Rasio rumah layak huni	89.69

10	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	27
11	Ketersediaan TPA yang dikelola secara baik	Tidak Ada
12	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	0
13	Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	52,58
14	Nilai realisasi investasi tahunan (PMA/PMDN)	17,22
15	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	80,56
16	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	76,39
17	Persentase UMKM dan IKM aktif	71,68
18	Persentase koperasi aktif	18,86
19	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	68,38
20	Peningkatan nilai PAD	-547,35
21	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	0
22	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	100
23	Persentase layanan pemberdayaan sosial	4,6
24	Cakupan layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	76,02
25	Indeks SPBE	Kurang
26	Tingkat cakupan layanan Administrasi kependudukan	97,19
27	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	25
28	Indeks Merit Sistem	Proses Evaluasi
29	Nilai LKJp Kabupaten	Proses Evaluasi
30	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	WDP
31	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	87,75
32	Maturitas SPIP	Level 1
33	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	82,24

3.2.2. Membandingkan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Awal RPD sampai dengan Tahun 2025.

Berikut ini adalah perbandingan pencapaian indikator sasaran Kabupaten Sarmi kondisi awal dan Tahun 2025.

Tabel 3.4
Perbandingan pencapaian indikator sasaran Kabupaten Sarmi kondisi awal
Sampai dengan Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Satuan	Realisasi			
					Awal RPD	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100	100	100	100
		2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	40	45	45	83
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,83	9,15.	9,61	88,12
		4	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	2	1	1	1,64
		5	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,46	69,68	69,91	103,9
3	Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab tantangan era erubahan	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,27	63,7	61,74	100.84
		7	Persentase pemuda dalam pembangunan	Persen	30	42	42	14,6
		8	Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Event	N/A	0	1	100
4	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	9	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	82,76	83,37	100	100,91
5	Meningkatnya kualitas dana kuantitas jalan	10	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	9,73	18	8,96	10.21



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

	dan jembatan serta penataan drainase	11	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	38,73	37,38	37,38	40,29
6	Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak	12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persen	89,82	71,4	77	87,72
		13	Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Persen	77,54	84,95	88,50	88,50
7	Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	14	Rasio rumah layak huni	Persen	72,46	84,95	77,54	89,69
8	Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	15	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Per 1000 penduduk	3,61	4,6	4,6	27
		16	Arus pergerakan penumpang angkutan udara	Orang	N/A	487	1.650	130,38
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	80	50	50	108,49
		18	Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,03	95	95	108,53
		19	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	100	100	100	100
10	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan	20	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	100	100	54,9	129
		21	Ketersediaan TPA yang dikelola secara baik	Ada/Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

11	Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana	22	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	80	100	100	0
		23	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)	Persen	100	0	0	100
12	Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan	24	Kontribusi sektor pertanian dan Peternakan dalam perekonomian wilayah	Persen	20,06	29,44	27,81	131.69
		25	Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Persen	48,96	29,83	27,81	52.58
13	Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah masyarakat	26	Nilai realisasi investasi tahunan (PMA/PMDN)	Rp. Miliar	29,3	0	0	17,22
		27	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,26	3,09	3,41	126.67
		28	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	8,78	9,94	10,39	80,56
		29	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	1,88	1,82	1,77	76.39
		30	Persentase UMKM dan IKM aktif	Persen	31		0,12	71,68
		31	Persentase koperasi aktif	Persen	25	1,12	100	18,86



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

14	Meningkatnya daya saing pariwisata	32	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	Persen	8,32	8,85	8,85%	68,38
		33	Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)	Persen	1,25	0	0	795,71
15	Meningkatnya pendapatan asli daerah	34	Peningkatan nilai PAD	Persen	1,5	1	17,95	-547,35
16	Meningkatnya ketahanan pangan	35	Skor PPH	Akor	65	0	78,7	117,78
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/keluahan yang merata	36	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	45	0	0	0
18	Meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah	37	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	75	66,67	100	111
19	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik	38	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	Persen	100	100%	100	100
20	Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	39	Persentase layanan rehabilitasi sosial	Persen	45	57	87,34	129,96
		40	Persentase layanan pemberdayaan sosial	Persen	60	82	50	4,6



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

21	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat	41	Cakupan layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Persen	35	52%	52%	76,02
22	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	Indeks SPBE	Predikat	Cukup	1.35/kurang	Kurang	Kurang
23	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	44	Tingkat cakupan layanan Administrasi kependudukan	Persen	75	96,47	70,66	97,19
		45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100	100	100	100
		46	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	75	1,7	19,07	100
		47	Persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	25
		48	Persentase daerah yang terjangkau layanan telokomunikasi dan internet	Persen	35	52	48,91	131,38
24	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	49	Indeks Merit Sistem	Predikat	N/A	0	0	Proses Evaluasi
25	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	51	Nilai LKJp Kabupaten	Skala Nilai	C	C	C	Proses Evaluasi
26	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan	52	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Predikat	WDP	WDP	WDP	WDP

	Penganggaran Daerah	53	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	90	81,48	81,48	87,75
27	Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas	54	Maturitas SPIP	Level	Level 1	Level 1	Level 1	Level 1
		55	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	70	73,73	75	82,24

3.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir RPD Tahun 2023-2026

Berikut ini disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan target akhir RPD tahun 2023-2026 per sasaran strategis terlihat pada table berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD Tahun 2023-2026

Sasaran Strategis		Indikator		Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPD	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPD
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya kualitas SDM religius dan kebudayaan	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100	100	100	100	100
		2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	54,22	45	83,00	60	75
2	Meningkatnya aksesibilitas	3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,11	9,79	88,12	12	81,6



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

	dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	4	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	3,04	0,05	1,64	3,5	1,43
		5	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,61	70,25	103,90	68	103,31
3	Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab tantangan era erubahan	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72.2	72,81	100.84	75	97.08
		7	Persentase pemuda dalam pembangunan	Persen	40.66	6	14,6	45	13,33
		8	Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Eaven	1	1	100	4	25
4	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	9	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	83.58	84,34	100,91	84	100,40
5	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan serta penataan drainase	10	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	19.75	10,21	51,44	25	40,84
		11	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	44.01	40,29	91,55	50	80,58
6	Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak	12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persen	93.68	87,72	95,77	95	92,34
		13	Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Persen	78.76	88,5	112,36	80	110,63



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

7	Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	14	Rasio rumah layak huni	Persen	73,7	66,1	89,69	75	88,13
8	Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	15	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Per 1000 penduduk	4,61	1,22	27	5	24,4
		16	Arus pergerakan penumpang angkutan udara	Orang	520	678	130,38	750	90,4
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	66,34	71,97	108,49	83,64	86,05
		18	Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,37	90,48	108,53	90,21	100,30
		19	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	100	100	100	100	100
10	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan	20	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	35	45	129	25	180
		21	Ketersediaan TPA yang terkelola secara baik	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
11	Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana	22	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Persen	95,00	0	0	100	0

			bencana (SPM)						
		23	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)	Persen	100	100	100	100	100
12	Meningaktnya produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan	24	Kontribusi sektor pertanian, Peternakan dalam perekonomian wilayah	Persen	21,33 %	28,09	131.69	22	127,68
		25	Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Persen	53.42	28,09	52.58	55	51,07
13	Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah masyarakat	26	Nilai realisasi investasi tahunan (PMA/PMDN)	Rp. Miliar	33.48	6	17,22	35	16,49
		27	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.45	4,37%	126.67	3	1,46
		28	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13.12	10,57 %	80,56	15	0,70
		29	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	2.33 %	1,78%	76.39	2,5	0,712
		30	Persentase UMKM dan IKM aktif	Persen	41	29,39	71,68	45	65,31
		31	Persentase koperasi aktif	Persen	48.21	9,09	18,86	60	15,15
14	Meningkatnya daya saing pariwisata	32	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	Persen	9,55	6,53	68,38	10	65,3



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

		33	Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)	Persen	2,1	16,71	795,71	2,5	668,4
15	Meningkatnya pendapatan asli daerah	34	Peningkatan nilai PAD	Persen	1.86	-10,19	-547,35	2	(509,50)
16	Meningkatnya ketahanan pangan	35	Skor PPH	Skor	68.72	80,94	117.78	70	115,63
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata	36	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	50	0	0	55	0
18	Meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah	37	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	90	100	100	95	105,26
19	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik	38	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	Persen	100	100	100	100	100
20	Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	39	Persentase layanan rehabilitasi sosial	Persen	48.70	63,29	129,96	50	126,58
		40	Persentase layanan pemberdayaan sosial	Persen	63.71	2,93	4,6	65	4,51



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

21	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat	41	Cakupan layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Persen	38,69	29,41	76,02	40	73,53
22	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	Indeks SPBE	Predikat	Cukup	1.53 /Kurang	Kurang	Cukup	Kurang
23	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	43	Tingkat cakupan layanan Administrasi kependudukan	Persen	82,38	80,06	97,19	85	94,19
		44	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100	100	100%	100	100
		45	Persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada	Persen	100	100	100%	78	128,21
		46	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	77,24	19,07	25%	100	19,07
		47	Persentase daerah yang terjangkau layanan telokomunikasi dan internet	Persen	37,23	48,91	131,38	38	128,71
24	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	48	Indeks Merit Sistem	Indeks	55,66	Proses Evaluasi	Proses Evaluasi	Proses Evaluasi	0
25	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	49	Nilai LKJp Kabupaten	Skala Nilai	B	Proses Evaluasi	Proses Evaluasi	Proses Evaluasi	0

26	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	50	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Predikat	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP
		51	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	93,72	82,24	87,75%	95	86,57
27	Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas	52	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 1	Level 1	Level 3	LEVEL 1
		53	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	93,72	87,74	82,24	90	97,49

Cara Interpretasi

$\geq 100\%$ → Kinerja tahun 2025 sudah melampaui target 2026

80% – 99% → Sudah mendekati target 2026

< 80% → Masih perlu upaya signifikan

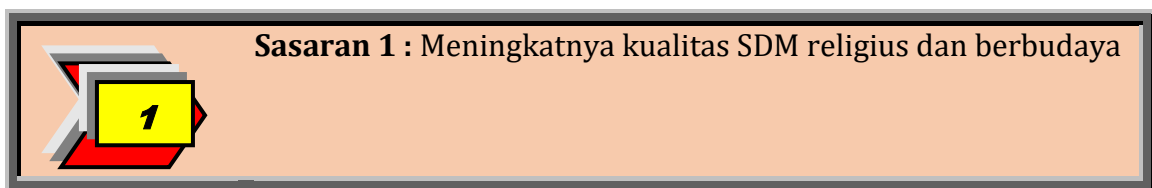
Tabel di atas menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023–2026. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 menjadi penting sebagai dasar evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan RPD. Akan tetapi capaian rata-rata jika dibandingkan dengan target akhir tahun perencanaan, Terdapat 15 Indikator Sasaran yang memperoleh rata-rata capaian kinerja di atas 100% atau sudah melampaui target 2026. Selanjutnya terdapat 10 indikator sasaran yang memperoleh capaian 80,00% - 99,99% atau Sudah mendekati target 2026. Dan yang terakhir adalah 28 Indikator sasaran yang memperoleh capaian dibawah 80% Masih perlu upaya signifikan.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPD Kabupaten Sarmi, mengingat pada tahun 2026 telah ditetapkan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2026–2030. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun 2025 menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan daerah selama periode

RPD serta menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan pada RPJMD periode selanjutnya.

3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Secara Umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2025 ini melebihi hingga 100% meskipun masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai 100%. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan masing-masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut:



Untuk mencapai sasaran 1, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 92% dengan kategori "Sangat Baik".

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel . 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas SDM religius dan
berbudaya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t	Realisas i	Capaian
1	Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100%	100%	100%
		Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	48,99	45%	83%
Capaian indikator kinerja rata-rata						92%

a. Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan

Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai utama (religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian).

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan.

a. Intrakurikuler

Merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum.

b. Kokurikuler

- Merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.

- Dapat dilakukan melalui kerja sama antar Satuan Pendidikan formal, dengan satuan Pendidikan Nonformal dan dengan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait seperti lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.

c. Ekstra kurikuler

- Merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan profesi, bakat minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
- Meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al-Quran dan kitab suci lainnya.

Penguatan pendidikan karakter tersebut diatas dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dimana yang menjadi tanggungjawab penyelenggaraan adalah kepala satuan Pendidikan dan guru. Penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu dengan mempertimbangkan a) kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; b) ketersediaan sarana dan prasarana; c) kearifan lokal; dan d) pendapat tokoh agama atau tokoh masyarakat diluar komite sekolah.

Kalau memperhatikan garis besar arah kebijakan pendidikan karakter sebagaimana diuraikan diatas, maka keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kepiawaian guru untuk menjadi inspirasi dan teladan bagi murid-muridnya. Dan untuk itu, kebijakan kurikulum merdeka belajar menjadi sangat relevan.

1. Tingkat Capaian

Pada tahun 2025, jumlah sekolah di Kabupaten Sarmi yang terdaftar pada departemen Pendidikan Nasional sebanyak 104 Sekolah. Jumlah unit sekolah terdiri dari 70 SD, 22 SMP, 1 MTs, 6 SMA dan 5 SMK.

Tingkat capaian indikator dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, realisasi sebesar **100%** dari target **100%**, sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai **100%** dan termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan telah melaksanakan kegiatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

2. Faktor Pendukung

1. Adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan di satuan pendidikan.
2. Komitmen kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan keagamaan dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan sekolah.
3. Tersedianya program kegiatan sekolah seperti pembiasaan nilai karakter, kegiatan keagamaan, dan pembinaan kerohanian bagi peserta didik.
4. Dukungan dari orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter dan keagamaan di lingkungan sekolah.
5. Pembinaan dan monitoring dari dinas pendidikan terhadap pelaksanaan program di satuan pendidikan.

3. Faktor Penghambat

1. Perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan karakter dan keagamaan di beberapa satuan pendidikan.
3. Belum optimalnya pengukuran kualitas implementasi pendidikan karakter, karena indikator lebih menekankan pada aspek pelaksanaan.

4. Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan atau bimbingan teknis terkait implementasi pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dalam pembelajaran.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan.
3. Mengembangkan kegiatan inovatif yang mendukung pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
4. Meningkatkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan.

b. Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan

1. Analisis Capaian Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seni budaya adalah perihal kesenian dan kebudayaan. Seni budaya juga dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang memiliki unsur keindahan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya. Seni budaya juga dapat dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan komponen yang diciptakan oleh manusia dan memiliki nilai estetika untuk dapat dinikmati dan digunakan didalam kehidupan sehari-hari. Seni budaya dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari sebagai fungsi praktis dan fungsi estetis.

Data statistik tentang objek-objek pemajuan kebudayaan diatas menunjukan bahwa kebudayaan daerah Kabupaten Sarmi beragam. Sebagaimna yang tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Keragaman Kebudayaan Daerah Kabupaten Sarmi

No	Objek Budaya	Nama Mata Budaya
1	Bahasa	Bahasa Kwerba, Bahasa Sobey, Bahasa Armati, Bahasa Manirem, dan Bahasa Rumbuai.
2	Manuskrip	Belum didata
3	Adat istiadat	Afey Weyan, Asimi, Dabusa'wean, Deimausake, Perim, Eit'epor, ewo Natun Sawaridon, Ma'tiwaridon dan Vetraw/Isorema.
4	Ritus	Eisi Samon Nanamor Triric, Peime eit esdio, dan Teteto.
5	Tradisi lisan	Aimda dan Nimsauda, Anak kembar Buaya dan Manusia, Asal Mula Buaya, Asal Mula Gunung Sidwas, Asal mula nama sungai di pantai barat, Asal Saweri di Kampung Aruswar, Asal Usul Orang Marenggi (Bonggo), Asal usul menggunakan kata-kata, Banam Tofris dan Ular Peliharaannya, Batu Buaya, Batu Perahu, Cawem dan Kedua Kakaknya, Durtimasmas, Faniso, Kisah Kehidupan Dinsaf Tane, Kisah Sivibak dan Ketiga Anaknya, Kwarakan anot Saweri pa Samokari, Manusia dan Naga, Nenek Moyang Catue, Rauwzu, Telaga Fiamfon, Tenani, Terjadinya Tkun Mwa, Tuan Tanah Gunung Nuari, Wane, Weraa, dan Wersiuy Aratye.
6	Pengetahuan tradisionanl	Akurec, Ar, Bere Viro, Fawen, Fe-dara, He'ren, Kru Sembor, Mare-rau, Mesyedabu, Mewen fe airau memta, Muaaren, Onafa, On temen, Ountens, Ountmen, Panarema, Pano, Rerma, Some, Soubor, Terse-rau, dan Tersin Aren.
7	Teknologi tradisional	Niwe Rapo, Ai no'o, Amari, Asar, Asding/Eyasay, Atewar, Bai, Bender, Fatiya, Fawen, Krwari/Madi, Mem Fendi Feryavo, Semberma, Tebede, Terfo, Todi, Toye, dan urum.
8	Seni	Asena, Kis-kis, Maudere sa'a d sero, Nasimar, Nyanyian Karamo, Paniso acau yawe, Vatia, dan Toak yafo.
9	Permainan rakyat	Renen Resesnis Fenyo Pani Mado Meda Pana, Safus, Serji Orjis, Wabok Tapris, dan Wado.
10	Olahraga tradisonal	Belum didata
11	Cagar budaya	Taman Aditc dan Wairito

Dari per-objek kemajuan kebudayaan Daerah Kabupaten Sarmi secara menyeluruh masih memiliki kurang dari segi pengembangannya, hal ini

dapat kita lihat dari berbagai aspek seperti sarana prasarana, lembaga atau organisasi yang secara resmi dalam menangani tentang kebudayaan. Selain itu permasalahan lain yang menghambat pemajuan kebudayaan daerah di kabupaten sarmi adalah sumber daya manusia budayanya. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan seperti; Melakukan pendataan dan pendokumentasian mengenai karya budaya daerah; Mengadakan atau memfasilitasi sarana penunjang yang dapat digunakan sebagai wadah atau tempat untuk mengembangkan objek budaya daerah; Melakukan pembinaan dan pelatihan demi pemajuaan kebudayaan daerah; dan Membuat event yang berskala daerah dan nasional demi kemajuan kebudayaan daerah.

Dengan keterbatasan anggaran maka dalam melakukan upaya pengembangan dan pemajuan kebudayaan mengalami hambatan. Seperti, Pendataan dan Pendokumentasian tidak dapat berjalan dengan baik karena kondisi Geomorfologi dan Letak Georafis daerah Kabupaten Sarmi yang beragam, event-event tentang kebudayaan dan sarana prasaran penunjang lainnya.

2. Tingkat Capaian

Pada tahun 2025 Persentase Seni Budaya yang dilestarikan ditargetkan sebesar 48,99% dan terealisasi 45% sehingga capaiannya sebesar 83%. Capaian ini berdasarkan 11 jenis budaya yang ada di Kabupaten Sarmi sedangkan yang sudah tersentuh melalui 37 sanggar budaya yaitu 5 jenis budaya yaitu seni, bahasa, adat istiadat, pengetahuan tradisional dan cagar budaya.

3. Faktor Pendukung

1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pelestarian seni dan budaya daerah.
2. Partisipasi masyarakat dan komunitas seni dalam menjaga dan mengembangkan seni budaya lokal.
3. Penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya seperti festival, pameran, dan pertunjukan seni daerah.

4. Dukungan lembaga pendidikan dan sanggar seni dalam pembinaan generasi muda untuk mengenal dan mencintai budaya daerah.

4. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya secara optimal.
2. Berkurangnya minat generasi muda terhadap seni budaya tradisional karena pengaruh budaya modern.
3. Terbatasnya jumlah pelaku seni dan budaya yang aktif dalam kegiatan pelestarian budaya daerah.
4. Dokumentasi dan pendataan seni budaya yang belum sepenuhnya optimal.

5. Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan komunitas seni serta pelaku budaya di daerah.
2. Mengembangkan program pelestarian seni budaya yang melibatkan generasi muda melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan seni.
3. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan budaya seperti festival dan pertunjukan seni untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas.
4. Memperkuat dokumentasi, inventarisasi, dan promosi seni budaya daerah sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya.
5. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan seni budaya daerah.



Sasaran 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan

Untuk mencapai sasaran 2 Meningkatkan aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan ditetapkan 3 (tiga) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini ukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 64.55% dengan kategori “Kurang”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan Kesehatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.11	9,79	88.12%
		Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	3.04	0.05	1.64 %
		Angka Harapan Hidup	Tahun	67.61	70.25	103.90 %
Capaian indikator kinerja rata-rata						64.55%

a. Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Indikator ini juga menjadi

salah satu komponen penting dalam pengukuran Human Development Index yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Pada Tahun 2025, target kinerja untuk indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) ditetapkan sebesar 9,22 tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Sarmi, realisasi RLS pada Tahun 2025 mencapai 9,79 tahun, sehingga capaian kinerja mencapai 106,18% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan di bidang pendidikan telah melampaui target yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada Tahun 2023 RLS tercatat sebesar 9,36 tahun, kemudian meningkat pada Tahun 2024 menjadi 9,61 tahun, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 9,79 tahun. Peningkatan ini mencerminkan semakin meningkatnya akses dan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal.

Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya dan bahkan melampauinya target indikator tersebut antara lain:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
2. Adanya program pemerintah dalam mendukung wajib belajar, termasuk bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga mendorong anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, yang mendukung proses pembelajaran di sekolah.
5. Pelaksanaan berbagai program peningkatan mutu pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Upaya yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.
2. Memberikan dukungan bantuan pendidikan, seperti bantuan perlengkapan sekolah atau beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
3. Melaksanakan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat, guna mendorong anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan.

Gambar 3.1

Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Kepada Masyarakat, Guna Mendorong
Anak-Anak Untuk Tetap Melanjutkan Pendidikan



Sosialisasi Pendidikan Gratis “Zero Pungutan” serta Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sebagai Tindak Lanjut Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarmi



Sosialisasi Pengenalan Deep Learning dan Penyusunan Perangkat Pembelajaran untuk Guru dan Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Sarmi Tahun 2025



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sarmi mengambil
langkah strategis mengadakan
kegiatan program wajib belajar 13
tahun dengan melibatkan Balai
Pengembangan Mutu

Peresmian Sekolah Rakyat Sarmi
untuk pendidikan yang lebih baik bagi
anak Indonesia

4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator pada tahun-tahun berikutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, agar lulusan pendidikan dasar dapat melanjutkan pendidikan hingga SMA/SMK.
2. Mengurangi angka putus sekolah, melalui program bantuan pendidikan serta pendampingan bagi siswa yang berisiko putus sekolah.
3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil.
4. Memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah pada Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dan telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan perlu terus dipertahankan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di Kabupaten Sarmi.

b. Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan

Indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,04%. Berdasarkan data, jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2025 sebanyak 490 orang dari total penduduk 46.482 jiwa, sehingga tingkat kunjungan adalah:

$$\frac{490}{46.482} \times 100\% = 1,05\%$$

Realisasi tahun 2024 sebesar 1,00%, sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,05%.

Dengan demikian, capaian kinerja indikator adalah:

$$\frac{0,05}{3,04} \times 100\% = 1,64\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator sangat rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan.

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja

Meskipun terdapat sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Faktor Internal:

- Terbatasnya jumlah perpustakaan (hanya 2 unit) dibandingkan dengan jumlah penduduk
- Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan (koleksi buku, fasilitas baca, layanan)
- Kurangnya inovasi layanan, seperti perpustakaan digital atau layanan berbasis komunitas
- Minimnya program promosi dan kampanye literasi

2. Faktor Eksternal:

- Rendahnya minat baca masyarakat
- Perubahan pola konsumsi informasi ke media digital/non-perpustakaan
- Akses geografis masyarakat yang belum merata terhadap fasilitas perpustakaan

Analisis Keberhasilan/Kegagalan

- Keberhasilan:

Terdapat peningkatan kunjungan dari 1,00% menjadi 1,05%, yang menunjukkan adanya upaya yang mulai berdampak meskipun masih sangat kecil.

- **Kegagalan:**

Target peningkatan sebesar 3,04% tidak tercapai, dengan capaian hanya 1,64%, sehingga indikator ini masuk kategori kurang berhasil.

Upaya yang Telah Dilakukan

Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyediaan layanan perpustakaan kepada Masyarakat melalui Mengoptimalkan pelayanan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling kepada masyarakat.

Gambar 3.2



Kegiatan Antar Jemput Pelajar Ke perpustakaan daerah dan Pelayanan Perpustakaan Keliling (Mobile Perpustakaan).

2. Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas perpustakaan yang ada
3. Pelaksanaan kegiatan literasi dalam skala terbatas

Namun upaya tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan.

Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian kinerja ke depan, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut:

- Penambahan dan pemerataan fasilitas perpustakaan atau pengembangan perpustakaan keliling
- Pengembangan layanan perpustakaan digital (e-library)
- Peningkatan program literasi masyarakat melalui sekolah, kampung, dan komunitas
- Pelaksanaan promosi dan kampanye gemar membaca secara masif
- Penguatan kolaborasi dengan OPD, sekolah, dan komunitas literasi
- Penyediaan koleksi buku yang lebih variatif dan sesuai kebutuhan masyarakat

Kesimpulan

Indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan menunjukkan peningkatan, namun masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan. Diperlukan upaya yang lebih inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan minat baca serta akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan.

c. Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Angka ini menggambarkan rata-rata perkiraan umur yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas pada saat itu tetap berlaku.

Tingkat Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja indikator Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$
$$= \frac{70,25}{67,61} \times 100 = 103,90\%$$

Dengan demikian tingkat capaian indikator Angka Harapan Hidup pada tahun 2025 mencapai 103,90%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Perkembangan Capaian Antar Tahun

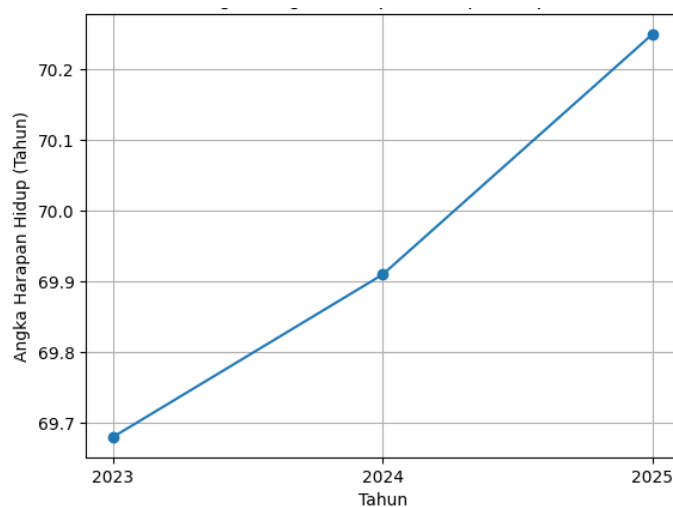
Tabel 3.9

Perkembangan Capaian Angka Harapan Hidup Antara 2023 -2025

Tahun	Capaian (Tahun)
2023	69,68
2024	69,91
2025	70,25

Grafik 3.1

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarmi Tahun 2023 - 2025



Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Sarmi mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahun. Pada

tahun 2023 capaian AHH sebesar 69,68 tahun, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 69,91 tahun, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 70,25 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat serta meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sarmi.

Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator Angka Harapan Hidup pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik karena realisasi yang dicapai lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan angka harapan hidup mencerminkan semakin baiknya kondisi kesehatan masyarakat, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan.

Selain itu, peningkatan AHH juga dipengaruhi oleh berbagai program pembangunan di sektor kesehatan seperti peningkatan pelayanan kesehatan dasar, program imunisasi, peningkatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Tren peningkatan yang terjadi dari tahun 2023 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sarmi.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator Angka Harapan Hidup antara lain:

- a Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui puskesmas, pusku, dan tenaga kesehatan di kampung-kampung.
- b Pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak serta program imunisasi yang berjalan dengan baik.
- c Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan.

- d Dukungan program pemerintah daerah dalam peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan.
- e Kerja sama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Faktor Penghambat

Meskipun capaian indikator cukup baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

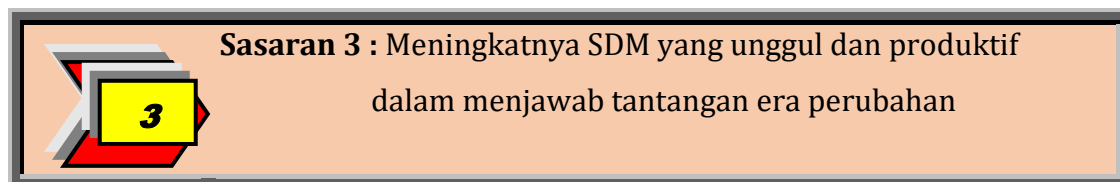
- a. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Sarmi yang cukup luas sehingga menyulitkan akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah terpencil.
- b. Keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan pola hidup sehat.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di beberapa kampung.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Angka Harapan Hidup pada tahun-tahun berikutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan terutama di wilayah terpencil.
- b Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- c Mendorong peningkatan program promotif dan preventif dalam bidang kesehatan.
- d Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan gizi seimbang.

- e Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.



Untuk mencapai sasaran 3 Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab tantangan era perubahan ditetapkan 3 (tiga) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100,42% dengan kategori **"Sangat Baik"**.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab tantangan era perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab taantangan era erubahan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,20%.	72,81%	100,84%.
		Persentase pemuda dalam pembangunan	Persen	40.66	6	14.60
		Prestasi olah raga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Eaven	1	1	100%
Capaian indikator kinerja rata-rata						100.42

a. Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2024, TPAK meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 72,81%, melampaui target sebesar 72,20%. Dengan capaian kinerja sebesar 100,85%, indikator ini termasuk kategori sangat baik. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kondisi ketenagakerjaan dan efektivitas program perluasan kesempatan kerja di daerah.”

Tingkat Capaian

Tingkat capaian indikator dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 72,81% dari target 72,20%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,84%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator telah melampaui target yang ditetapkan.

Jika dilihat dari tren capaian beberapa tahun terakhir, TPAK menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 63,70%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 69,15%, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 72,81%. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan.

Faktor Pendukung

- a. Meningkatnya kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi.
- b. Adanya program pemerintah dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyerap tenaga kerja.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat usia kerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

1. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan lapangan kerja formal yang tersedia.

- b. Kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
- c. Sebagian tenaga kerja masih bekerja pada sektor informal dengan produktivitas yang relatif rendah.
- d. Faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja, seperti pendidikan dan kondisi wilayah.

2. Tindak Lanjut / Rekomendasi

- a. Meningkatkan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- b. Mendorong pengembangan sektor UMKM dan kewirausahaan untuk membuka peluang kerja baru.
- c. Memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri dalam penyediaan kesempatan kerja.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2024, TPAK meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 72,81%, melampaui target sebesar 72,20%. Dengan capaian kinerja sebesar 100,85%, indikator ini termasuk kategori sangat baik. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kondisi ketenagakerjaan dan efektivitas program perluasan kesempatan kerja di daerah.

b. Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Persentase pemuda dalam Pembangunan

Persentase Pemuda dalam Pembangunan adalah proporsi pemuda yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kewirausahaan, kepemimpinan, maupun organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16–30 tahun.

Indikator ini mengukur tingkat partisipasi dan kontribusi generasi muda dalam mendukung pembangunan daerah.

Tujuan Indikator

- Mengukur keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah
- Mengevaluasi efektivitas program kepemudaan
- Mendorong peningkatan peran strategis pemuda
- Mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis generasi produktif

Rumus Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang Terlibat dalam Pembangunan}}{\text{Jumlah Total Pemuda}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase Pemuda dalam Pembangunan ditetapkan sebesar 40,66%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 6%, sehingga tingkat capaian kinerja hanya mencapai 14,60% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Sarmi masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang direncanakan.

Berdasarkan data yang tersedia Pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan pembangunan melalui organisasi kepemudaan sebanyak 1.704 orang, yang terdiri dari:

- Pramuka: 1.387 anggota
- KNPI: 211 anggota
- Karang Taruna: 106 anggota

Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif (15–59 tahun) yang tercatat pada Dinas Kependudukan sebanyak ± 28.713 jiwa. Dengan demikian, proporsi keterlibatan pemuda dalam pembangunan masih relatif kecil dibandingkan dengan total populasi usia produktif yang ada.

Analisis Penyebab Kegagalan / Rendahnya Capaian

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian indikator tersebut antara lain:

1. Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kegiatan pembangunan, sehingga jumlah pemuda yang terlibat masih terbatas.
2. Terbatasnya jumlah organisasi kepemudaan yang aktif, sehingga wadah partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal.
3. Kurangnya program pemberdayaan pemuda yang berkelanjutan, yang mampu menarik minat dan keterlibatan pemuda.
4. Keterbatasan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun dukungan kegiatan.
5. Kurangnya kesadaran pemuda terhadap peran strategis dalam pembangunan daerah, sehingga partisipasi masih rendah.

Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Memfasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan, seperti Pramuka, KNPI, dan Karang Taruna.
2. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pemuda, guna meningkatkan kapasitas dan peran pemuda dalam Pembangunan melalui Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula di Kabupaten Sarmi

Gambar 3.3



Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula di Kabupaten Sarmi

3. Mendorong partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, sebagai bagian dari pembangunan daerah.
4. Melakukan pendataan organisasi kepemudaan, sebagai dasar dalam perencanaan program pemberdayaan pemuda.

Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan program pemberdayaan pemuda, seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
2. Memperluas dan mengaktifkan organisasi kepemudaan di tingkat distrik dan kampung, sehingga lebih banyak pemuda yang terlibat.
3. Meningkatkan dukungan anggaran dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan sosialisasi peran pemuda dalam pembangunan, guna mendorong partisipasi aktif pemuda.

5. Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam pengembangan pemuda.

Secara keseluruhan, capaian indikator Persentase Pemuda dalam Pembangunan Tahun 2025 masih jauh dari target yang ditetapkan, sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi pemuda sebagai salah satu aktor penting dalam pembangunan daerah

c. Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional

Pada Tahun 2025, target kinerja untuk indikator Prestasi Olahraga pada Event Kabupaten, Provinsi dan Nasional ditetapkan sebesar 1 event. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian pada Tahun 2025 sebesar 1 event, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Prestasi olahraga tersebut diperoleh dari cabang olahraga FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia) yang mengikuti Kejuaraan Daerah (Kejurda) dengan jumlah 9 atlet yang berpartisipasi. Dari keikutsertaan tersebut, 1 atlet berhasil meraih medali perak pada ajang PON beladiri Kejuaraan Daerah Open Karate Turnamen Piala Ketua Umum FORKI Papua Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa pembinaan olahraga daerah mulai menunjukkan hasil melalui partisipasi dan prestasi atlet pada tingkat yang lebih tinggi.

Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target indikator tersebut antara lain:

1. Adanya pembinaan atlet pada cabang olahraga tertentu, khususnya pada cabang olahraga karate (FORKI).
2. Partisipasi atlet dalam kejuaraan tingkat daerah dan nasional, sehingga memberikan kesempatan bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.
3. Dukungan dari pemerintah daerah dan organisasi olahraga, dalam memfasilitasi keikutsertaan atlet pada event olahraga.

4. Semangat dan motivasi atlet dalam mengikuti kompetisi, sehingga mampu memberikan hasil yang membanggakan bagi daerah.

Analisis Kendala

Meskipun target indikator telah tercapai, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pengembangan prestasi olahraga di daerah, antara lain:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk mendukung latihan atlet.
2. Terbatasnya anggaran pembinaan olahraga, sehingga jumlah atlet yang dapat difasilitasi untuk mengikuti kejuaraan masih terbatas.
3. Belum meratanya pembinaan olahraga pada seluruh cabang olahraga, sehingga prestasi olahraga masih didominasi oleh cabang tertentu.
4. Keterbatasan kesempatan mengikuti kompetisi, yang dapat menghambat peningkatan pengalaman bertanding atlet.

Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Mendorong partisipasi atlet dalam berbagai kejuaraan olahraga, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

Gambar 3.4



Kejuaraan Daerah Open Karate Turnamen Piala Ketua Umum FORKI
Papua Tahun 2025

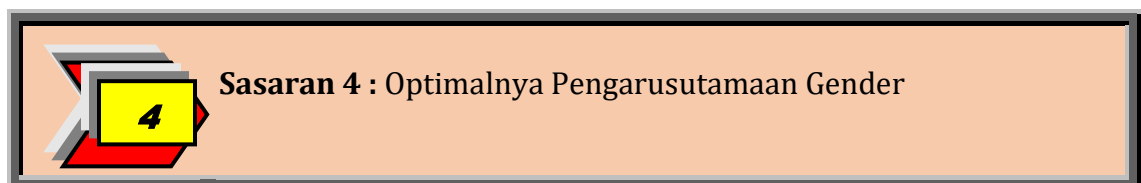
2. Melakukan pembinaan atlet melalui organisasi cabang olahraga, seperti FORKI.
3. Memberikan dukungan terhadap kegiatan olahraga dan kompetisi, guna meningkatkan pengalaman bertanding atlet.
4. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi olahraga daerah, dalam rangka pembinaan dan pengembangan atlet.

Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan prestasi olahraga pada tahun-tahun berikutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pembinaan atlet secara berkelanjutan, mulai dari tingkat usia dini hingga atlet berprestasi.
2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana olahraga, agar proses latihan atlet dapat berjalan lebih optimal.
3. Menambah kesempatan bagi atlet untuk mengikuti kejuaraan olahraga, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
4. Memperkuat kerja sama dengan organisasi olahraga dan pelatih profesional, guna meningkatkan kualitas pembinaan atlet.

Secara keseluruhan, capaian indikator Prestasi Olahraga pada Event Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan, namun perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan dukungan terhadap berbagai cabang olahraga agar prestasi olahraga daerah dapat terus berkembang dan meningkat di masa yang akan datang.



Sasaran 4 : Optimalnya Pengarusutamaan Gender

Untuk mencapai sasaran 4, ditetapkan 1 (satu) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Pemeberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100,91% dengan kategori “Sangat Baik”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11

Pencapaian kinerja sasaran pada Optimalnya Pengarusutamaan Gender

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	83,58	84,34 Angka Thn 2024	100,91%
Capaian indikator kinerja rata-rata						100,91%

Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Indeks Pembangunan Gender

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Data indikator ini umumnya dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahun.

Pada tahun 2025, target Indeks Pembangunan Gender ditetapkan sebesar 83,58, sedangkan capaian yang digunakan dalam evaluasi kinerja adalah 84,34, yang merupakan angka tahun 2024. Hal ini disebabkan karena data IPG tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik dan dijadwalkan akan dipublikasikan pada sekitar bulan Mei tahun 2026.

Dengan menggunakan angka sementara tersebut, maka tingkat capaian kinerja indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{84,34}{83,58} \times 100 = 100,91\%$$

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender mencapai sekitar 100,91%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Apabila dilihat dari capaian tersebut, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang responsif gender di daerah telah berjalan dengan cukup baik, tercermin dari semakin kecilnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa angka yang digunakan masih bersifat sementara, sehingga analisis ini akan diperbarui kembali setelah data resmi tahun 2025 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi.

Faktor yang Mendukung

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator ini antara lain:

1. Meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan, sehingga kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil.
2. Peningkatan akses layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak.
3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, baik pada sektor formal maupun informal. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - a. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam bidang ekonomi melalui pelatihan pembuatan briket / arang Batok kelapa dan limbah kayu besi di Kampung Nengke, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Kabupaten Sarmi.

Gambar 3.5

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam bidang ekonomi melalui pelatihan pembuatan briket / arang Batok kelapa dan limbah kayu besi di Kampung Nengke, Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Kabupaten Sarmi.



- a. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam bidang ekonomi Melalui kegiatan pelatihan Pembuatan Abon dan Krupuk Ikan Tenggiri di Kampung Sunum, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi.

Gambar 3.6

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam bidang ekonomi Melalui kegiatan pelatihan Pembuatan Abon dan Krupuk Ikan Tenggiri di Kampung Sunum, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi



4. Pelaksanaan program pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, yang mendorong kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan.

- a. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pembentukan POKJA PUG Tingkat Kabupaten :

Gambar 3.7

Kegiatan Pembentukan POKJA PUG Tingkat Kabupaten



Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) memiliki manfaat strategis dalam memastikan kesetaraan dan keadilan gender terintegrasi dalam setiap tahap pembangunan. Pokja PUG berfungsi sebagai wadah koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi antar unit kerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan yang responsif gender yaitu :

- Menjamin Keadilan dan Kesetaraan Gender: Memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam pembangunan.
- Perencanaan dan Anggaran Responsif Gender (PPRG): Mengintegrasikan isu gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak diskriminatif.
- Koordinasi Antar lembaga: Menjadi wadah sinergi antar unit kerja dalam mengimplementasikan strategi PUG, sehingga pelaksanaannya tidak terfragmentasi.
- Penyusunan Data Terpilah: Membantu dalam pengembangan data gender daerah yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur: Melakukan peningkatan kapasitas PPRG bagi perangkat daerah pelaksana.
- Optimalisasi Peran Lembaga: Meningkatkan kemandirian lembaga dalam memberdayakan perempuan dan mengoptimalkan pelaksanaan PUG di daerah.
- Mewujudkan Pembangunan Inklusif: Mendorong kebijakan yang adil dan berkelanjutan, serta meminimalisir kesenjangan gender.

b. Pelaksanaan Penguatan dan Pendampingan bagi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Kabupaten.

Gambar 3.8

Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga
Penyedia Layanan



Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bertujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi SDM, dan efektivitas jejaring dalam memberikan pelayanan yang responsif, cepat, dan berperspektif korban. Ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan komprehensif, mencegah kekerasan, dan meningkatkan kualitas hidup serta kesetaraan gender di masyarakat.

Berikut adalah maksud dan tujuan penguatan tersebut:

- *Peningkatan Kapasitas SDM:*

Meningkatkan keahlian, profesionalisme, dan pemahaman etika tenaga layanan dalam manajemen kasus, terutama dalam menangani isu sensitif seperti kekerasan berbasis gender.

- *Optimalisasi Layanan & Perlindungan:*

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2025 tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Memastikan lembaga (seperti UPTD PPA) menjadi ruang aman untuk

pemulihan dan perlindungan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan.

Gambar 3.9

Peraturan Bupati Sarmi Pembentukan UPTD PPA



- *Penguatan Jejaring dan Kolaborasi:*

Membangun koordinasi yang solid antar lembaga, pemerintah daerah, tokoh adat/agama, dan masyarakat sipil untuk sistem perlindungan yang berkelanjutan.

- *Optimalisasi Data Gender:*

Meningkatkan kualitas data terpilah dan analisis gender untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran.

- *Pemberdayaan Ekonomi & Sosial:*

Memperluas kesempatan perempuan untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidup.

Penguatan ini bertujuan akhir pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan maksimal bagi perempuan di tingkat daerah.

Faktor Tantangan

Meskipun capaian sudah melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

- a. Partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi formal masih relatif terbatas.

- b. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti permodalan dan pelatihan usaha.
- c. Masih adanya kesenjangan peran sosial dalam masyarakat, yang mempengaruhi kesempatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender ke depan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memperkuat pelaksanaan program pengarusutamaan gender di seluruh perangkat daerah.
- b. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama melalui pengembangan UMKM perempuan.
- c. Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- d. Meningkatkan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih responsif gender.

Dengan upaya tersebut diharapkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dapat terus meningkat, sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan.

**Sasaran 5:** Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta penataan drainase

Untuk mencapai sasaran 5, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2024. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 71.50% dengan kategori “**Baik**”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta penataan drainase

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta penataan drainase	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	19,75%,	10,16%	51,44%.
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	44.01	40.29	91.55%
Capaian indikator kinerja rata-rata						71.50%

a. Analisis capaian kinerja pada indikator presentase jalan dalam kondisi mantap

Analisis Capaian Kinerja

Ketersediaan Jalan Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 menurut tingkat kondisi jalan terdapat panjang jalan sepanjang 424,93 km berdasarkan **SK Bupati, Nomor : 188.4/405/TAHUN 2023** , Jika dirinci menurut pemerintah yang berwenang mengelola jalan, panjang jalan Kabupaten Sarmi tahun 2025 yang dikelola oleh negara 154,32 km dan provinsi 37,7 km. dimana Kondisi jalan dalam kondisi baik sepanjang 39,74 Km, sedangkan dalam kondisi sedang panjang jalan 4,29 Km, dalam kondisi rusak ringan sepanjang **25,33 Km** dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 424,93 Km.

Perhitungan Realisasi 2025

Persentase jalan kondisi mantap dihitung dengan rumus:

Persentase Jalan Mantap

= (Panjang Jalan Mantap /Total Panjang Jalan) × 100%

= (50,202 km / 494,275 km) × 100%

= **10,16%**

Berdasarkan perhitungan tersebut, realisasi Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap tahun 2025 sebesar 10,16%, masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 19,75%, dengan tingkat capaian 51,44%. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 8,96%, terjadi peningkatan sebesar 1,20%. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, meskipun belum mampu mencapai target yang direncanakan.

Faktor Pendukung

- Adanya program pembangunan dan peningkatan kualitas jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan kegiatan Rekonstruksi Jalan sepanjang 17,728 KM dengan total anggaran yang terdapat dalam Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarmi sebesar Rp 25.811.987.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 24.314.376.600,00 atau sebesar 94.20%

Gambar 3.10

Kegiatan Rekonstruksi Jalan
Long Segmen Jalan Ruas Neidam - Kasukwe dan Ruas Kasukwe - Petam



Sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- b. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.
- c. Adanya kegiatan pemeliharaan jalan secara berkala untuk menjaga kondisi jalan tetap mantap.
- d. Prioritas pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya peningkatan konektivitas wilayah.

Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan anggaran dibandingkan dengan total panjang jalan yang harus ditangani.
- b. Kondisi geografis dan medan wilayah yang cukup sulit sehingga mempengaruhi proses pembangunan dan pemeliharaan jalan.
- c. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh faktor cuaca, curah hujan tinggi, serta beban kendaraan berat.
- d. Luasnya jaringan jalan yang belum seluruhnya dapat ditangani dalam satu tahun anggaran.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

- a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan secara bertahap.
- b. Memprioritaskan penanganan ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan memiliki peran strategis dalam konektivitas wilayah.
- c. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala guna menjaga kondisi jalan tetap mantap.
- d. Mengoptimalkan sumber pendanaan lain seperti dukungan pemerintah pusat atau skema pendanaan lainnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan.

b. Analisis Capaian Kinerja pada Persentase jembatan dalam kondisi baik

Pada Tahun 2025, target kinerja untuk indikator Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik ditetapkan sebesar 44,01%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar

40,29%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 91,55% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemeliharaan dan peningkatan kondisi jembatan di Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya mencapai target, namun secara umum masih menunjukkan hasil yang cukup baik.

Berdasarkan data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarmi, jumlah jembatan yang terdata pada ruas jalan kabupaten sebanyak 206 jembatan dengan total panjang 1.622,2 meter. Dari jumlah tersebut, jembatan yang berada dalam kondisi baik sebanyak 77 jembatan dengan panjang total 428,5 meter. Pada Tahun 2025 pemerintah daerah telah melakukan perbaikan terhadap 6 jembatan dengan panjang 67,5 meter, dan seluruh pekerjaan tersebut terealisasi sebanyak 6 jembatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target indikator tersebut antara lain:

1. Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sehingga perbaikan jembatan belum dapat dilakukan secara menyeluruh pada semua jembatan yang mengalami kerusakan.
2. Jumlah jembatan yang cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk penanganannya.
3. Kondisi geografis dan faktor alam, seperti curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil yang dapat mempercepat kerusakan jembatan.
4. Usia konstruksi beberapa jembatan yang sudah cukup lama, sehingga memerlukan rehabilitasi atau pembangunan ulang yang membutuhkan biaya lebih besar.

Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan kondisi jembatan, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi jembatan secara bertahap sesuai dengan prioritas tingkat kerusakan dan tingkat kebutuhan Masyarakat melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Rehabilitasi Jembatan

sebanyak 11 jembatan kayu dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 975.000.000,00 atau 97.50%.

Gambar 3.11

Kegiatan Rehabilitasi Jembatan



2. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap jembatan yang masih dalam kondisi sedang agar tidak mengalami kerusakan lebih berat.
3. Melakukan pendataan dan evaluasi kondisi jembatan secara berkala sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.
4. Mengusulkan dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk percepatan perbaikan infrastruktur jembatan.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jembatan pada ruas jalan kabupaten.
2. Menetapkan prioritas penanganan jembatan yang mengalami kerusakan berat, terutama yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah.
3. Memperkuat program pemeliharaan rutin jembatan, sehingga kerusakan dapat dicegah sejak dini.
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memperoleh dukungan program pembangunan infrastruktur.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kondisi jembatan di Kabupaten Sarmi telah berjalan, namun masih

diperlukan peningkatan penanganan secara bertahap agar jumlah jembatan dalam kondisi baik dapat terus meningkat dan mendukung kelancaran konektivitas wilayah.

Sasaran 6 : Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak

Untuk mencapai sasaran 6, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 95.77% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13

Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persen	93,68	89,72	95,77%,
		Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Persen	78.76	88.50	112.74
Capaian indikator kinerja rata-rata						95.77

a. Analisis Capaian Kinerja pada Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Indikator: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Sarmi

Target Tahun 2025: 93,68 %

Realisasi Tahun 2025: 89,72 %

Realisasi Tahun 2023: 87,90 %

Realisasi Tahun 2024: 90,28 %

1. Tingkat Capaian Kinerja

Tingkat capaian indikator dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ &= \frac{89,72}{93,68} \times 100 = 95,77\% \end{aligned}$$

Dengan demikian tingkat capaian indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak pada tahun 2025 sebesar 95,77%, yang berarti belum mencapai target yang ditetapkan, meskipun secara umum masih menunjukkan capaian yang cukup baik.

2. Perkembangan Capaian Antar Tahun

Tabel 3.14

Perkembangan Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Antar Tahun 2023 -2025

Tahun		Capaian (%)
2023		87,90
2024		90,28
2025		89,72

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Sarmi mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu dari 87,90% menjadi 90,28%. Namun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan menjadi 89,72%.

Walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2024, secara umum kondisi akses air minum layak masih berada pada tingkat yang cukup baik karena berada di atas capaian tahun 2023.

3. Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Sarmi telah memiliki akses terhadap sumber air minum yang memenuhi standar kelayakan. Namun demikian, realisasi yang dicapai masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Belum tercapainya target tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pembangunan sarana air bersih di beberapa wilayah, kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau, serta keterbatasan infrastruktur pendukung penyediaan air minum layak. Selain itu, beberapa rumah tangga masih mengandalkan sumber air yang belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan seperti air sungai atau sumur yang belum terlindungi.

Secara umum, upaya peningkatan akses air minum layak telah dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih, pengembangan sistem penyediaan air minum di tingkat kampung, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas sumber air. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak bagi masyarakat.

4. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan akses air minum layak di Kabupaten Sarmi antara lain:

1. Diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum

Pada Dinas Pekerjaan Umum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Secara lebih rinci, tujuan pembentukan UPTD SPAM antara lain sebagai berikut:

– **Meningkatkan pelayanan air minum kepada Masyarakat**

UPTD SPAM dibentuk untuk memberikan pelayanan air minum yang lebih optimal, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

– **Mendukung pengelolaan operasional SPAM secara profesional**

Dengan adanya UPTD, pengelolaan operasional sistem penyediaan air minum seperti pengolahan, distribusi, dan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan profesional.

– **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana air minum**

UPTD SPAM bertugas mengelola, mengoperasikan, dan memelihara sarana serta prasarana SPAM agar dapat berfungsi secara optimal.

– **Memperluas cakupan pelayanan air minum**

Pembentukan UPTD SPAM diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak, terutama di wilayah yang belum terlayani.

– **Mendukung pencapaian target pelayanan dasar pemerintah daerah**

UPTD SPAM membantu pemerintah daerah dalam memenuhi target pelayanan dasar bidang air minum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

– **Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan air minum daerah**

Dengan adanya unit khusus yang menangani SPAM, pengelolaan pelayanan air minum menjadi lebih terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Adanya program pembangunan sarana air bersih yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang tersebar di 5 titik

yaitu Pulau Liki, Pulau Wakde, Kampung Ansudu, Kampung Tanjung Batu dan Ebran. Dengan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun sebesar 25 Liter/Detik./. Anggaran yang tersedia melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 sebesar Rp. 4.763.566.504,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.691.999.944,00 atau 98.50%

Gambar 3.12

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan



Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kampung Pulau Wakde Distrik Pantai Timur Bagian Barat



Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kampung Ebran Distrik Sarmi Selatan



Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Pulau Liki Distrik Sarmi



Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kampung Pulau Anus Distrik Bonggo



Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
di Kampung Tanjung Batu
Distrik Sarmi Selatan



Penyediaan Air Minum dengan
kegiatan Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan di Kampung
Pulau Wakde Distrik Pantai
Timur Bagian Barat

3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih di tingkat kampung.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan air minum yang layak dan aman bagi kesehatan.

5. Faktor Penghambat

Beberapa kendala yang mempengaruhi belum tercapainya target indikator antara lain:

- a. Kondisi geografis wilayah yang menyulitkan pembangunan jaringan air bersih di beberapa kampung terpencil.
- b. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur air minum.
- c. Masih adanya masyarakat yang menggunakan sumber air yang belum memenuhi standar kelayakan.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan air bersih di beberapa wilayah.

6. Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun-tahun berikutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana air minum layak terutama di wilayah yang belum terlayani.

- b Memperluas cakupan program penyediaan air bersih di kampung-kampung terpencil.
- c Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam pengelolaan sarana air minum.
- d Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana air bersih yang telah dibangun.
- e Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air minum yang layak dan aman bagi kesehatan.

b. Analisis Capaian Kinerja pada Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak

Indikator persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak merupakan indikator yang menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, seperti kepemilikan jamban sehat dan sistem pembuangan limbah yang aman. Indikator ini juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada tujuan akses air bersih dan sanitasi.

Pada tahun 2025, target indikator persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak ditetapkan sebesar 78,76%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 88,50% berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi. Dengan demikian tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 112,36%, yang menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 76,50%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 88,50%, dan pada tahun 2025 tetap berada pada angka 88,50%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak, yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan.

Faktor Penunjang

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak antara lain:

1. Pelaksanaan program pembangunan sanitasi berbasis masyarakat, seperti pembangunan jamban keluarga dan pengelolaan sanitasi lingkungan.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi sehat, terutama dalam mencegah penyakit berbasis lingkungan.
3. Dukungan program pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembangunan sarana sanitasi dan program peningkatan kualitas permukiman.
4. Peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk melalui kegiatan gotong royong dan program kesehatan lingkungan.
5. Peningkatan penyuluhan dan edukasi kesehatan lingkungan oleh tenaga kesehatan dan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Faktor Penghambat

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Masih terdapat sebagian masyarakat di wilayah terpencil yang belum memiliki akses sanitasi layak.
2. Keterbatasan kondisi ekonomi sebagian masyarakat, sehingga belum mampu membangun fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan.
3. Kondisi geografis di beberapa wilayah yang menyulitkan pembangunan infrastruktur sanitasi.
4. Perilaku hidup bersih dan sehat yang belum merata pada seluruh masyarakat.
5. Keterbatasan sarana pengelolaan limbah domestik, terutama di wilayah permukiman yang padat.

Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melanjutkan program pembangunan sanitasi layak bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki akses sanitasi rendah.

2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana sanitasi.
4. Memberikan bantuan stimulan pembangunan jamban keluarga bagi masyarakat kurang mampu.
5. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap program sanitasi berbasis masyarakat agar sarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak menunjukkan hasil yang sangat baik karena telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak serta keberhasilan berbagai program pembangunan di bidang kesehatan lingkungan



Sasaran 7: Terpenuhi sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh

Untuk mencapai sasaran 7, ditetapkan 1 (satu) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan instansi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 89.69 % dengan kategori “Baik”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15

Pencapaian kinerja sasaran pada Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	Rasio rumah layak huni	Persen	73,7	66,10	89.69 %
Capaian indikator kinerja rata-rata						89.69 %

Analisis Capaian Kinerja pada indikator rasio rumah layak huni

Indikator Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 73,7%, namun realisasinya hanya mencapai 66,10%. Dengan demikian capaian indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan, dengan selisih sebesar **7,6%** di bawah target. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang belum memenuhi kriteria rumah layak huni.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, rasio rumah layak huni menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2023 capaian sebesar 61,40%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 68,60%, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 66,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan pada periode sebelumnya, keberlanjutan peningkatan tersebut belum dapat dipertahankan secara optimal pada tahun 2025.

Rasio rumah layak huni dihitung berdasarkan beberapa komponen utama yaitu:

1. Akses air minum layak, yaitu rumah tangga yang menggunakan sumber air seperti leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan.

2. Akses sanitasi layak, yaitu rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar dengan kloset leher angsa dan pembuangan akhir berupa tangki septik atau IPAL.
3. Ketahanan bangunan, dilihat dari kualitas bahan atap, dinding, dan lantai rumah.
4. Kecukupan luas lantai, yaitu minimal 7,2 m² per kapita.

Belum tercapainya target rasio rumah layak huni menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang belum memenuhi salah satu atau beberapa indikator tersebut, terutama pada aspek sanitasi, akses air minum, dan kualitas fisik bangunan.

Analisis Penyebab Penurunan / Tidak Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya indikator ini antara lain:

1. Keterbatasan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni
Program pembangunan rumah layak huni atau rehabilitasi rumah tidak layak huni masih terbatas dibandingkan dengan jumlah rumah yang membutuhkan perbaikan.
2. Akses air minum layak yang belum merata
Sebagian masyarakat, khususnya di wilayah kampung atau daerah terpencil, masih menggunakan sumber air yang belum memenuhi standar air minum layak.
3. Akses sanitasi yang belum memadai
Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak seperti septic tank atau MCK yang memenuhi standar kesehatan.
4. Kondisi ekonomi masyarakat
Kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas menyebabkan sebagian rumah tangga belum mampu memperbaiki kualitas rumahnya secara mandiri.
5. Keterbatasan infrastruktur dasar permukiman
Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase di beberapa wilayah permukiman belum tersedia secara optimal.

Program / Upaya yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan rasio rumah layak huni, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Pelaksanaan program Program Kawasan Permukiman Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 30 Unit dengan anggaran Rp. 2.200.000.000,00 dan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sebanyak 30 Unit Rumah type 36 dengan anggaran Rp. 11.443.500.000,00.
2. Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih dan sanitasi masyarakat.
3. Penyediaan MCK komunal pada beberapa wilayah permukiman.
4. Mendorong partisipasi masyarakat melalui swadaya dalam perbaikan rumah.
5. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi melalui program bantuan perumahan dan kawasan permukiman.

4. Alternatif Solusi / Rencana Perbaikan

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini antara lain:

1. Meningkatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Memperluas pembangunan sarana air minum dan sanitasi layak terutama di wilayah kampung dan daerah terpencil.
3. Mengoptimalkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta dalam program pembangunan perumahan masyarakat.
4. Mendorong program pemberdayaan masyarakat dan swadaya perumahan untuk meningkatkan kualitas rumah secara mandiri.
5. Peningkatan perencanaan kawasan permukiman agar pembangunan perumahan terintegrasi dengan penyediaan infrastruktur dasar.

Capaian indikator rasio rumah layak huni tahun 2025 sebesar 66,1% masih berada di bawah target 73,7%, sehingga diperlukan peningkatan intervensi

program terutama pada perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air minum layak, sanitasi, serta peningkatan kualitas infrastruktur permukiman guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat secara berkelanjutan.



Sasaran 8 : Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah

Untuk mencapai sasaran 8, ditetapkan 2 (tiga) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 76.69% dengan kategori “ **Baik** ”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya layanan transportasi antar wilayah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Per 1000 penduduk	4,61	1.22	27%
		Arus pergerakan penumpang angkutan udara	Orang	520	678	130.38%
Capaian indikator kinerja rata-rata						76.69 %

a. Analisis apaian kinerja pada indikator cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif

Pada Tahun 2025, target kinerja indikator cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif per 1.000 penduduk ditetapkan sebesar 4,61, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1,226, sehingga tingkat capaian kinerja hanya mencapai 27% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan layanan angkutan umum antar kabupaten di Kabupaten Sarmi masih belum memadai.

Berdasarkan data yang tersedia:

- Jumlah armada angkutan umum antar kabupaten:
 - Darmi: 7 armada
 - Komunitas Rental Sarmi: 50 armada
 - Total: 57 armada
- Jumlah penduduk: 46.482 jiwa

Perhitungan indikator:

$$\frac{57}{46.482} \times 1000 = 1,226$$

Nilai ini masih jauh di bawah target 4,61, sehingga layanan transportasi umum antar kabupaten belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara optimal.

Analisis Penyebab Rendahnya Capaian

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian indikator antara lain:

1. Jumlah armada angkutan umum yang terbatas, sehingga belum mampu melayani seluruh kebutuhan mobilitas masyarakat.
2. Belum optimalnya sistem transportasi umum antar kabupaten, termasuk trayek dan jadwal layanan yang belum teratur.
3. Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai di beberapa wilayah, sehingga menghambat operasional angkutan umum.

4. Dominasi penggunaan kendaraan pribadi atau sewa (rental) yang tidak seluruhnya terdata sebagai angkutan umum resmi.
5. Minimnya minat investasi di sektor transportasi, sehingga penambahan armada berjalan lambat.

Upaya yang Telah Dilakukan

Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah antara lain:

1. Pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha angkutan umum, termasuk komunitas rental.
2. Mendorong operasional angkutan antar kabupaten, baik melalui armada resmi maupun non-formal.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam pengembangan sistem transportasi daerah.
4. Mendukung keberadaan angkutan masyarakat (rental) sebagai alternatif layanan transportasi.

Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mendorong penambahan jumlah armada angkutan umum antar kabupaten, baik melalui investasi swasta maupun dukungan pemerintah.
2. Menata dan menetapkan trayek serta sistem operasional angkutan umum secara lebih terstruktur, agar pelayanan lebih optimal.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, khususnya pada jalur antar kabupaten yang menjadi rute utama angkutan umum.
4. Mengintegrasikan dan menglegalisasi angkutan rental sebagai bagian dari sistem transportasi umum, sehingga dapat dihitung sebagai layanan resmi.
5. Memberikan insentif atau kemudahan perizinan bagi pelaku usaha transportasi, guna menarik minat investasi di sektor ini.

Secara keseluruhan, capaian indikator cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten per 1.000 penduduk Tahun 2025 masih rendah (27%), yang menunjukkan bahwa ketersediaan layanan transportasi umum belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah armada, penataan sistem transportasi, serta dukungan infrastruktur agar pelayanan transportasi dapat lebih optimal dan merata.

b. Analisis capaian kinerja pada indikator arus pergerakan penumpang angkutan udara

Arus pergerakan penumpang angkutan udara dihitung berdasarkan jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui bandar udara. Pada tahun 2025 tercatat bahwa jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 270 orang dan yang datang sebanyak 408 orang, sehingga total arus pergerakan penumpang mencapai 678 orang.

Dengan target sebesar 520 orang, maka tingkat capaian kinerja indikator ini adalah:

$$\left(\frac{678}{520}\right) \times 100 = 130,38\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi arus pergerakan penumpang angkutan udara telah melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, pada tahun 2025 tercatat 107 lintasan pesawat yang datang dan berangkat di Kabupaten Sarmi, yang menunjukkan bahwa aktivitas transportasi udara tetap berjalan dan menjadi salah satu moda transportasi penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas antarwilayah.

Faktor Pendukung

- Transportasi udara masih menjadi moda transportasi utama untuk mobilitas masyarakat antarwilayah.
- Adanya operasional penerbangan perintis Susi Air yang melayani rute ke wilayah Kabupaten Sarmi.
- Meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat untuk kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan sosial.

- d. Dukungan operasional bandar udara yang tetap berjalan sehingga aktivitas penerbangan dapat berlangsung secara rutin.

Faktor Penghambat

- a. Frekuensi penerbangan yang masih terbatas karena bergantung pada jadwal penerbangan perintis.
- b. Kapasitas pesawat yang relatif kecil sehingga jumlah penumpang yang dapat diangkut terbatas.
- c. Faktor cuaca yang sering mempengaruhi kelancaran jadwal penerbangan.
- d. Keterbatasan fasilitas pendukung transportasi udara di daerah.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pihak maskapai dan pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan penerbangan perintis.
- b. Mendorong peningkatan frekuensi penerbangan guna mendukung mobilitas masyarakat.
- c. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan di bandar udara agar dapat mendukung kelancaran operasional penerbangan.
- d. Memperkuat peran transportasi udara dalam mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas perekonomian daerah.



Sasaran 9: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Untuk mencapai sasaran 9, ditetapkan 3 (tiga) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 105.67 % dengan kategori **"Sangat Baik"**.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.17

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	66,34,	71,97	108,49%.
		Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,37	90,48,	108,53%.
		Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	100,	100	100%
Capaian indikator kinerja rata-rata						105.67

a. Analisis Capaian Kinerja pada Indeks kualitas air (IKA), Udara (IKU) dan Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tingkat Capaian Kinerja

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun berjalan sebesar 71,97, melampaui target yang ditetapkan yaitu 66,34, sehingga tingkat capaian mencapai 108,49%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas air di wilayah daerah relatif baik dan upaya pengendalian pencemaran air serta pengelolaan sumber daya air telah berjalan secara optimal.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,48, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 83,37, sehingga tingkat capaian mencapai 108,53%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di wilayah daerah masih berada pada kategori baik. Rendahnya tingkat pencemaran udara serta terbatasnya aktivitas industri yang menghasilkan emisi menjadi salah satu faktor yang mendukung capaian indikator ini.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 100, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100, sehingga tingkat capaian indikator mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tutupan lahan di wilayah daerah masih terjaga dengan baik dan upaya perlindungan kawasan hutan serta pengelolaan lahan berjalan secara optimal.

Faktor Pendukung

1. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Kondisi tutupan lahan yang masih baik sehingga mendukung kualitas udara dan keseimbangan lingkungan.
3. Program pengendalian pencemaran air dan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
4. Rendahnya aktivitas industri besar yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara.

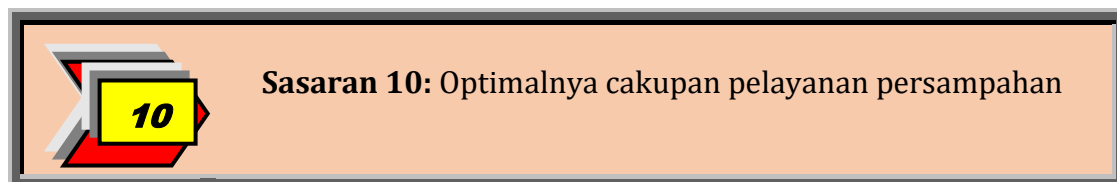
Faktor Penghambat

1. Masih terdapat aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemantauan kualitas lingkungan secara berkala.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pengelolaan serta pengawasan lingkungan hidup.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas air dan udara secara berkala untuk menjaga kondisi lingkungan tetap baik.
2. Mempertahankan dan meningkatkan program konservasi serta perlindungan tutupan lahan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup.

4. Memperkuat koordinasi antarinstansi dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.



Untuk mencapai sasaran 10, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 64.29 % dengan kategori '**Cukup**'.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.18

Pencapaian kinerja sasaran pada optimalnya cakupan pelayanan persampahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	35%	45%	128,57%.
		Ketersediaan TPA yang terkelola secara baik	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	0%
Capaian indikator kinerja rata-rata						64.29 %

a. Analisis Capaian Kinerja pada Persentase timbulan sampah yang tertangani

Penanganan persampahan meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan

serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Persentase penanganan persampahan yang dikelola TPA merupakan indikator kinerja yang menunjukkan sejauh mana penanganan sampah di lingkungan masyarakat yang terangkut sampai dan dikelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Penanganan persampahan di Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya dilakukan masih banyak kampung dan distrik yang belum menerima pelayanan persampahan karena kondisi geografis yang berjauhan sehingga pelayanan belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Sarmi, Pelayanan hanya dilakukan di Distrik Sarmi dan Distrik Sarmi Selatan.

Tingkat Capaian Kinerja

Tingkat capaian indikator Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani dihitung dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, realisasi sebesar 45% dari target 35%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 128,57%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah di daerah telah melampaui target yang direncanakan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah berjalan cukup baik. Hal ini juga didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai dalam mendukung operasional pengelolaan sampah.

Dari sisi sarana dan prasarana, peralatan yang tersedia dan dalam kondisi baik meliputi:

- Truck Arm Roll sebanyak 2 unit
- Dump Truck sebanyak 2 unit
- Motor tiga roda pengangkut sampah
- Kontainer bak sampah sebanyak 7 unit

Selain itu, pengelolaan kebersihan juga didukung oleh ketersediaan personil, antara lain:

- Petugas penyapu jalan sebanyak 100 orang

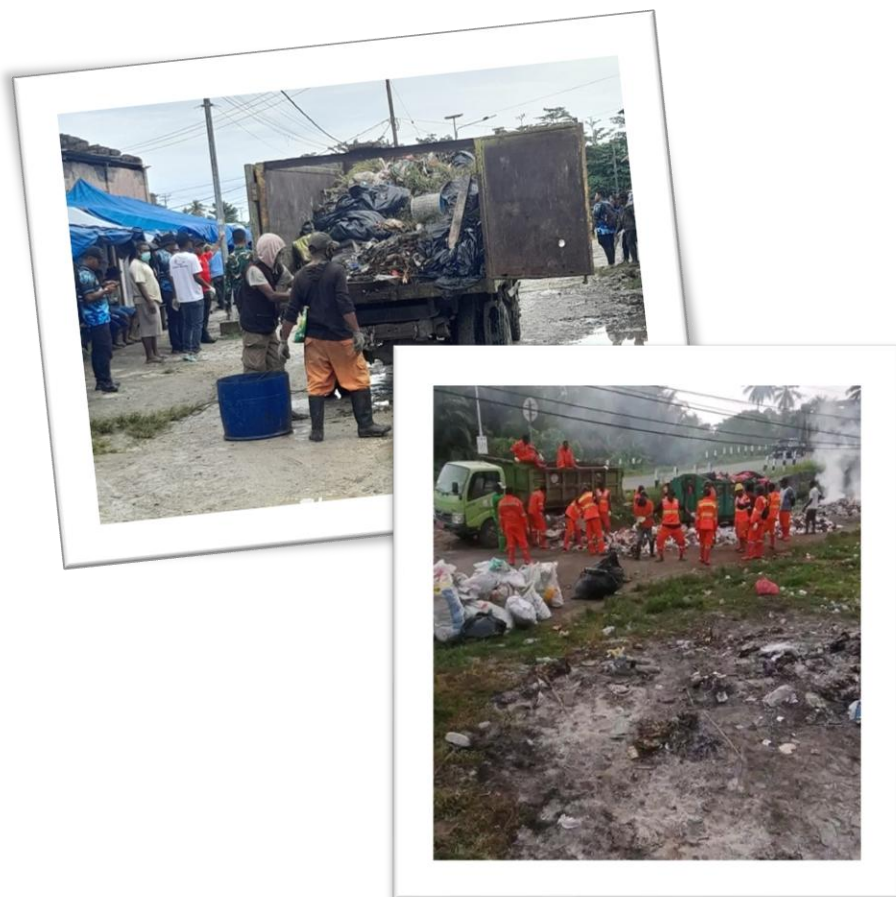
- Supir truk sampah sebanyak 13 orang
- Petugas kebersihan sebanyak 65 orang

Faktor Pendukung

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang masih dalam kondisi baik sehingga mendukung operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah.
2. Peningkatan layanan pengangkutan sampah dari permukiman masyarakat ke tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir.

Gambar 3.13

Pengangkutan sampah dari permukiman masyarakat ke tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir.



3. Jumlah personil kebersihan yang cukup memadai, baik petugas penyapu jalan, supir truk sampah, maupun petugas kebersihan lainnya.
4. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah seperti pemilahan dan pengurangan sampah.
5. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, termasuk kegiatan pengangkutan sampah secara rutin.

Gambar 3.14

Kegiatan Pengangkutan Sampah dari Pasar setiap hari



6. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, yang turut mendukung pengelolaan sampah di wilayah perkotaan maupun permukiman.

Gambar 3.15

Kampanye Lingkungan Bersih



7. Adanya program pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Gambar 3.16

Kegiatan Kerja Bakti Setiap Hari Jumat Pembersihan Fasilitas Umum



Faktor Penghambat

Meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi optimalisasi pengelolaan sampah, antara lain:

1. Jumlah armada pengangkut sampah yang masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan.
2. Sebaran wilayah permukiman yang cukup luas, sehingga belum seluruh timbulan sampah dapat tertangani secara optimal.
3. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Keterbatasan fasilitas pengolahan sampah, sehingga sebagian sampah masih langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian pengelolaan sampah pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menambah sarana dan prasarana pengangkutan sampah, seperti truk sampah, kontainer, dan kendaraan pengangkut sampah lainnya.
2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, termasuk pengembangan sistem pengolahan sampah seperti reduce, reuse, recycle (3R).
3. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar.
4. Memperluas cakupan pelayanan pengangkutan sampah, terutama pada wilayah permukiman yang belum terlayani secara optimal.
5. Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kebersihan lingkungan, agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator persentase timbulan sampah yang tertangani pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena realisasi yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

b. Analisis Capaian Kinerja pada Ketersediaan TPA yang terkelola secara baik

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPA diartikan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir yang berfungsi memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA yang ada di Indonesia umumnya terdiri dari 3 metode penanganan, di antaranya *open dumping*, *sanitary landfill*, dan *controlled landfill*

Tingkat Capaian Kinerja

Indikator Ketersediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terkelola secara baik bertujuan untuk mengukur ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah pada tahap akhir yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun berjalan belum tersedia TPA yang dikelola secara baik,

sehingga realisasi indikator ini belum tercapai dan tingkat capaian kinerja berada pada 0%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di daerah masih menghadapi keterbatasan pada aspek infrastruktur, khususnya fasilitas pemrosesan akhir. Ketiadaan TPA yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan berpotensi mempengaruhi efektivitas sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan..

Faktor Penghambat

- Belum tersedianya lahan yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan TPA.
- Keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas TPA.
- Proses perencanaan dan perizinan pembangunan TPA yang memerlukan waktu dan kajian teknis yang cukup panjang.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Menyusun perencanaan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan.
2. Mengidentifikasi dan menyiapkan lahan yang memenuhi persyaratan teknis untuk pembangunan TPA.
3. Mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat atau sumber pendanaan lainnya untuk pembangunan fasilitas TPA.
4. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui pengurangan sampah dari sumbernya serta pengolahan sampah sebelum tahap pemrosesan akhir.

Sasaran 11 : Meningkatkan penanganan dan penanggulangan resiko bencana

Untuk mencapai sasaran 11, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.19

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana Meningkatkan penanganan dan penanggulangan resiko bencana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	95	0	0
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)	Persen	100,00	100	100%
Capaian indikator kinerja rata-rata						100%

a. Analisis Capaian Kinerja pada Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)

Pada Tahun 2025, target kinerja untuk indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM) ditetapkan sebesar 95.00%. Namun demikian, realisasi capaian indikator tersebut belum dapat disajikan pada tahun pelaporan karena kegiatan yang dilaksanakan lebih difokuskan pada sosialisasi dan pelaksanaan program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai upaya penguatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah.

Kegiatan sosialisasi dan pembentukan serta pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) merupakan bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan relawan dalam menghadapi potensi bencana, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana.

Analisis Penyebab Belum Tersajinya Realisasi

Beberapa faktor yang menyebabkan realisasi indikator belum dapat disajikan antara lain:

1. Tidak terjadi kejadian bencana yang signifikan pada tahun 2025 yang memerlukan penanganan tanggap darurat secara luas sehingga indikator tidak dapat diukur secara langsung.
2. Kegiatan program lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, melalui sosialisasi dan pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
3. Belum tersedianya data korban bencana yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga perhitungan indikator tidak dapat dilakukan.
4. Prioritas kegiatan pada tahap pencegahan dan mitigasi bencana, dibandingkan dengan penanganan tanggap darurat.

Upaya yang Telah Dilakukan

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
2. Membentuk dan memperkuat kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai relawan sosial dalam penanganan bencana.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun dengan pihak lainnya dalam penanggulangan bencana.
4. Menyiapkan sumber daya manusia dan sistem kesiapsiagaan bencana, agar penanganan korban bencana dapat dilakukan secara cepat dan efektif apabila terjadi bencana.

Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

Untuk mendukung pencapaian indikator pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kesiapan logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dapat dilakukan secara cepat.
2. Memperkuat kapasitas relawan dan anggota TAGANA, melalui pelatihan dan simulasi penanganan bencana secara berkala.
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait lainnya.
4. Melakukan pendataan dan sistem pelaporan penanganan korban bencana secara lebih sistematis, agar capaian indikator dapat diukur secara akurat ketika terjadi bencana.

Secara keseluruhan, meskipun realisasi indikator belum dapat disajikan, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 telah difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan korban bencana pada masa mendatang

b. Analisis Capaian Kinerja pada Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)

Indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman dan

ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2025, target indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh karena seluruh kejadian kebakaran yang terjadi dapat ditangani oleh petugas pemadam kebakaran.

Berdasarkan data yang ada:

- Jumlah kejadian kebakaran: 3 kejadian
- Jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani: 3 kejadian

Perhitungan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$$

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pelayanan penanganan kebakaran telah memenuhi target yang ditetapkan.

Walaupun capaian indikator telah memenuhi target, kondisi sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih relatif terbatas. Saat ini fasilitas yang tersedia meliputi:

- Armada pemadam kebakaran: 1 unit
- Personil pemadam kebakaran: 6 orang

Dengan keterbatasan tersebut, petugas tetap mampu menangani seluruh kejadian kebakaran yang terjadi, sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat tetap dapat terpenuhi.

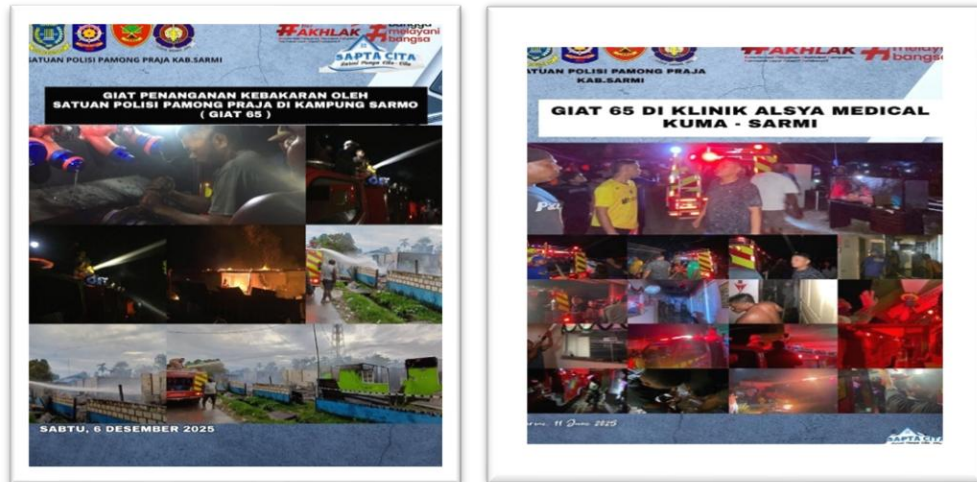
Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:

1. Respons cepat petugas pemadam kebakaran dalam menangani kejadian kebakaran dengan menyediakan kontak siaga darurat 24 jam melalui no Handphone yaitu : +62 813-1206-7350 dan +62 813-5407-6684.

Gambar 3.17

Kegiatan Pelayanan Pemadaman Kebakaran



2. Koordinasi yang baik antara petugas dan masyarakat dalam pelaporan kejadian kebakaran.
3. Jumlah kejadian kebakaran yang relatif sedikit, sehingga seluruh kejadian dapat tertangani.
4. Kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana kebakaran.

Faktor Kendala

Meskipun target tercapai, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Keterbatasan armada pemadam kebakaran, yang saat ini hanya tersedia 1 unit untuk melayani seluruh wilayah.
2. Jumlah personil pemadam kebakaran yang masih terbatas, yaitu 6 orang, sehingga berpotensi mempengaruhi kecepatan penanganan apabila terjadi beberapa kejadian secara bersamaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional, seperti peralatan pemadam kebakaran dan perlengkapan keselamatan.
4. Luas wilayah pelayanan, yang dapat mempengaruhi waktu respon apabila kejadian terjadi di lokasi yang jauh.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kebakaran ke depan, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menambah armada pemadam kebakaran untuk meningkatkan jangkauan pelayanan.
2. Menambah jumlah personil pemadam kebakaran, sehingga kesiapsiagaan petugas lebih optimal.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional, termasuk peralatan pemadam dan perlengkapan keselamatan petugas.
4. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran.
5. Meningkatkan pelatihan dan kapasitas personil pemadam kebakaran, sehingga kemampuan penanganan kebakaran semakin baik.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan pelayanan penanganan kebakaran kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan, sehingga risiko kerugian akibat bencana kebakaran dapat diminimalkan serta keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin.

**Sasaran 12:** Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan

Untuk mencapai sasaran 12, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 94.24% dengan kategori “Sangat Baik”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20

Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningaktnya produktivitas pertanian,perkebunan dan perikanan	Kontribusi sector pertanian dan Peternakan dalam perekonomian wilayah	Persen	21.33	27,81	134,41%
		Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Persen	53.42	27,81	54.07 %
Capaian indikator kinerja rata-rata						94,24%

a. Analisis Capaian Kinerja pada Kontribusi sektor pertanian dan Peternakan dalam perekonomian wilayah

Tingkat capaian indikator Kontribusi Sektor Pertanian dan Peternakan dalam Perekonomian Wilayah dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, realisasi sebesar 28,09% dari target 21,33%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 131,69%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap perekonomian daerah telah melampaui target yang direncanakan.

Tingginya kontribusi sektor pertanian dan peternakan menunjukkan bahwa sektor ini masih menjadi salah satu sektor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas pertanian, perkebunan, serta peternakan yang dilakukan oleh masyarakat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Faktor Pendukung

- a. Potensi sumber daya alam yang mendukung kegiatan pertanian dan peternakan.
- b. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pertanian dan peternakan.
- c. Adanya program pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan.
- d. Permintaan pasar terhadap produk pertanian dan peternakan yang cukup stabil.

Faktor Penghambat

- a. Produktivitas sektor pertanian dan peternakan yang masih perlu ditingkatkan.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti irigasi, alat pertanian, dan fasilitas peternakan.
- c. Fluktuasi harga komoditas pertanian yang dapat mempengaruhi pendapatan petani.
- d. Keterbatasan akses pasar dan teknologi bagi sebagian pelaku usaha pertanian.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih modern.
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada petani dan peternak.
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, serta fasilitas produksi.
4. Meningkatkan akses pasar dan pengembangan nilai tambah produk pertanian dan peternakan melalui pengolahan hasil.

b. Analisis Capaian Kinerja pada Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah

Indikator Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah di Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 53,42, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 28,89. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut, maka tingkat capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{28,89}{53,42} \times 100 = 54,07\%$$

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 54,07%, yang menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun belum mencapai target, sektor perikanan tetap memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan nelayan.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa kontribusi sektor perikanan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 kontribusi sektor perikanan tercatat sebesar 29,83, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 27,81, dan meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 28,89. Peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor perikanan dibandingkan tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut masih relatif kecil sehingga belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum, sektor perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Sarmi memiliki potensi sumber daya yang cukup besar baik untuk kegiatan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Potensi tersebut apabila dikelola secara optimal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian wilayah antara lain :

- a. Potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, mengingat wilayah Kabupaten Sarmi memiliki kawasan pesisir dan laut yang luas sehingga dalam pengembangan sektor perikanan melalui program kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi yaitu Program Pengelolaan Perikanan. Dengan anggaran sebesar Rp. 2.289.137.253,00 dan terealisasi Rp. 2.289.137.253,00 atau 100%. Adapun kegiatan dimaksud antara lain :

- Pemberian Bantuan prasarana usaha perikanan tangkap berupa Perahu Fiber ukuran 8 Meter dan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Spesifikasi: Mesin Motor Tempel Ukuran 15 PK Merk Yamaha sebanyak 13 Unit.

Gambar 3.18



Penyerahan Bantuan Alat Angkut Apung dan Motor Tempel 15 PK Oleh Kepala Dinas Perikanan Kepada Nelayan

- Penyediaan Bantuan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap berupa FREEZER sebanyak 10 unit

Gambar 3.19



Pemberian Bantuan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap berupa FREEZER Oleh Dinas Perikanan Kepada Nelayan.

- Bantuan Prasarana Alat Penangkapan Ikan Berupa Mata Kail, Nelon, dan Rol Penggulung.



Penyerahan Bantuan Prasarana Alat Penangkapan Ikan Oleh Dinas Perikanan
Kepada Nelayan

- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa bantuan pembangunan gudang freezer 5x3 m dengan tinggi 3 m dan pembangkit listrik tenaga surya Tahun 2025

Gambar 3.20



Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil

- b. Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (OTSUS 2025) Sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar/komoditas lokal (Pakan, Benih dan Peralatan Budidaya)

Gambar 3.21



Penyerahan Bantuan Sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar/komoditas lokal (Pakan,Benih dan Peralatan Budidaya)

- c. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi kelompok usaha dan kelompok pembudidaya ikan kecil sebanyak 25 Kelompok

Gambar 3.22



Kegiatan Pelatihan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Benar (CPPIB) Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi

Faktor Penghambat

Belum optimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan, seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas penyimpanan hasil tangkapan (cold storage).
2. Teknologi penangkapan ikan yang masih sederhana, sehingga produktivitas nelayan belum maksimal.

3. Keterbatasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan, terutama untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
4. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil perikanan, sehingga nilai tambah produk perikanan masih relatif rendah.
5. Keterbatasan modal usaha nelayan dan pelaku usaha perikanan, yang berdampak pada kemampuan meningkatkan kapasitas produksi.
6. Pengaruh kondisi cuaca dan musim, yang dapat mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan di laut.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah pada masa yang akan datang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan, seperti pembangunan pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil perikanan.
2. Memberikan bantuan peralatan tangkap yang lebih modern dan ramah lingkungan kepada nelayan guna meningkatkan produktivitas hasil tangkapan.
3. Mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan.
4. Meningkatkan akses pemasaran hasil perikanan, baik melalui penguatan jaringan distribusi maupun kerja sama dengan daerah lain.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nelayan, melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan kelompok nelayan.
6. Mendorong pengembangan perikanan budidaya, sebagai alternatif peningkatan produksi perikanan selain perikanan tangkap.



Sasaran 13: Meningkatkan nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah masyarakat

Untuk mencapai sasaran 13, ditetapkan 6 (enam) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Perindagkop dan UKM Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 57.28% dengan kategori “Kurang”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah masyarakat	Nilai realisasi invetasi tahunan (PMA/PMDN)	Rp. Miliar	33,48	5.77	17.22
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,45	4.37	78.95
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13.12	10,57	80.56%
		Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	2,33	1,78%	76.39 %
		Persentase UMKM dan IKM aktif	Persen	41	29.39	71.68 %

		Persentase koperasi aktif	Persen	48.21	9.09%	18.86%
Capaian indikator kinerja rata-rata						57.28%

a. Analisis capaian kinerja pada indikator tingkat Nilai realisasi investasi tahunan (PMA/PMDN)

Pada tahun 2025 target kinerja untuk indikator Nilai Realisasi Investasi Tahunan (PMA/PMDN) ditetapkan sebesar Rp33,48 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2025 realisasi investasi yang tercatat, khususnya dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebesar Rp5.766.571.787 atau sekitar Rp5,77 miliar, sehingga tingkat capaian kinerja hanya mencapai 17,22% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi investasi daerah pada tahun 2025 belum mencapai target yang direncanakan. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan investasi di daerah masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi internal maupun eksternal.

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi investasi antara lain:

1. Kondisi iklim investasi daerah yang belum sepenuhnya kondusif, baik dari aspek infrastruktur pendukung maupun kesiapan kawasan investasi.
2. Keterbatasan promosi potensi investasi daerah, sehingga peluang investasi yang tersedia belum banyak diketahui oleh investor potensial.
3. Aksesibilitas wilayah dan kondisi geografis daerah yang relatif sulit dijangkau, sehingga mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal.
4. Terbatasnya investasi skala besar, sehingga realisasi investasi yang tercatat didominasi oleh usaha kecil dan menengah dengan nilai investasi relatif rendah.

5. Proses perizinan dan kesiapan dokumen usaha pada sebagian pelaku usaha yang belum sepenuhnya tertib melaporkan kegiatan penanaman modal melalui sistem pelaporan investasi.
6. Dampak kondisi ekonomi nasional maupun regional, yang mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan ekspansi usaha.

Upaya / Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan realisasi investasi daerah, beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan promosi dan publikasi potensi investasi daerah, baik melalui forum investasi, media informasi, maupun kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat.
2. Memperbaiki pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha, melalui optimalisasi pelayanan perizinan terpadu dan pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik.
3. Mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang memiliki potensi investasi tinggi seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan.
4. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyediaan infrastruktur dasar dan dukungan bagi kegiatan investasi.
5. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, agar pelaporan realisasi investasi dapat dilakukan secara tertib dan terdata dengan baik.
6. Meningkatkan kerja sama dengan investor dan pelaku usaha lokal, guna mendorong pengembangan usaha serta meningkatkan nilai investasi di daerah.

Capaian indikator Nilai Realisasi Investasi Tahunan (PMA/PMDN) tahun 2025 sebesar 17,22% menunjukkan bahwa kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis melalui peningkatan promosi investasi, perbaikan iklim usaha, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar realisasi investasi di daerah dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.

b. Analisis capaian kinerja pada indikator tingkat pengangguran terbuka

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 3,45%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 4,37%. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut, maka tingkat capaian kinerja indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3,45}{4,37} \times 100 = 78,95\%$$

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 sebesar 78,95%, yang menunjukkan bahwa indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Tingginya angka pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah angkatan kerja yang belum terserap dalam lapangan pekerjaan.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, terlihat adanya tren peningkatan tingkat pengangguran. Pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,09%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 3,41%, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 4,37%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pengangguran di daerah, yang berarti penyerapan tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan dan perkembangan ekonomi daerah. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, maka semakin besar pula jumlah penduduk usia kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, peningkatan angka pengangguran perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Pendukung

- c. Beberapa faktor yang mendukung indikator tingkat pengangguran terbuka antara lain:

Program penanganan pengangguran dilaksanakan secara terkoordinasi, yaitu melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Sub Kegiatan

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi bagi 100 orang pencari kerja, sebagaimana terdapat pada Dokumen Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 899.998.392,00 dan realisasi Rp.899.998.392,00 atau 100%

Gambar 3.23



Pendidikan dan Pelatihan Komputer, Servis HP, Sablon dan Menjahit

Faktor Penyebab / Penghambat

Belum tercapainya target indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sarmi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di sektor formal maupun informal.

2. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga sebagian tenaga kerja belum mendapatkan pekerjaan.
3. Keterbatasan investasi di daerah, yang berdampak pada minimnya pembukaan usaha baru dan peluang kerja.
4. Kualitas dan keterampilan tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Keterbatasan pengembangan sektor ekonomi produktif, seperti industri kecil, usaha mikro, dan sektor jasa yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
6. Faktor geografis dan aksesibilitas wilayah, yang mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dan peluang usaha di beberapa wilayah.

Tindak Lanjut.

Untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mendorong peningkatan investasi daerah, baik melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk membuka lapangan kerja baru.
2. Mengembangkan sektor ekonomi produktif, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui program pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
4. Mendorong kewirausahaan masyarakat, khususnya bagi generasi muda agar mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri.
5. Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dalam pengembangan ekonomi lokal, sehingga mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
6. Memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kampung, agar dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sarmi dapat menurun pada tahun-tahun mendatang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik

d. Analisis capaian kinerja pada indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 13,12%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 10,57%. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut, maka tingkat capaian kinerja indikator dapat dihitung sebagai berikut:

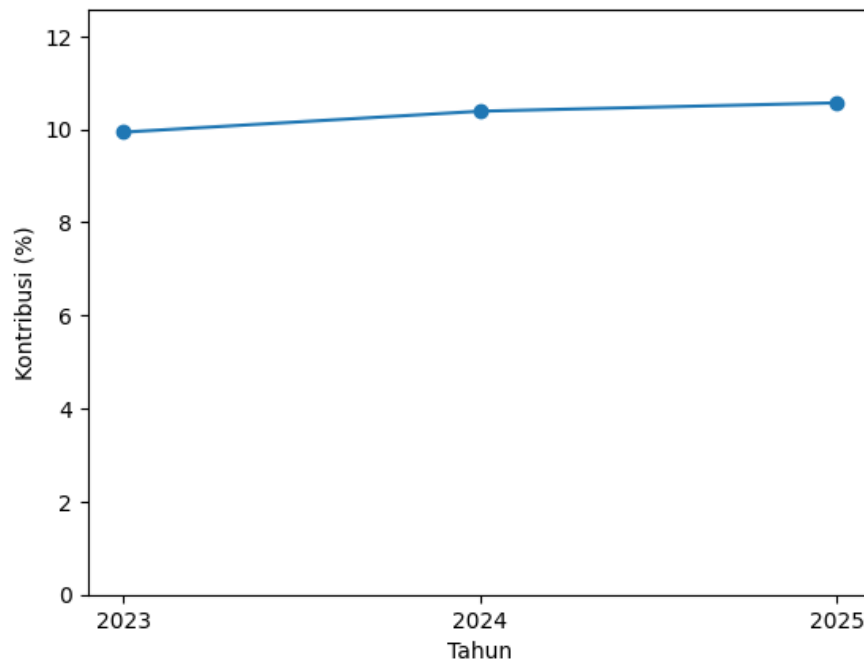
$$\frac{10,57}{13,12} \times 100 = 80,56\%$$

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2025 sebesar 80,56%, yang menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan belum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun masih berada pada kategori cukup baik.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan tercatat sebesar 9,94%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 10,39%, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 10,57%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di daerah terus berkembang, meskipun peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Grafik 3.2

Tren Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2023 - 2025



Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah karena berperan dalam distribusi barang dan jasa, penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja. Di Kabupaten Sarmi, aktivitas perdagangan umumnya didominasi oleh perdagangan skala kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat melalui pasar tradisional, toko kelontong, serta usaha mikro dan kecil.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB antara lain:

- Melakukan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yaitu Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan pengendalian stok yang tersedia sebagaimana termuat dalam Dokumen Anggaran pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 180.170.000,00 dan terealisasi Rp180.170.000,00 atau 100%

-

Faktor Penyebab / Penghambat

Belum tercapainya target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Skala usaha perdagangan yang masih didominasi oleh usaha kecil, sehingga kontribusi terhadap PDRB belum terlalu besar.
2. Keterbatasan infrastruktur perdagangan, seperti fasilitas pasar yang memadai, gudang penyimpanan, serta sarana distribusi barang.
3. Daya beli masyarakat yang masih relatif terbatas, sehingga mempengaruhi volume transaksi perdagangan.
4. Keterbatasan akses distribusi barang dari dan ke daerah, terutama karena kondisi geografis dan transportasi yang belum sepenuhnya optimal.
5. Belum berkembangnya pusat-pusat perdagangan modern, sehingga aktivitas perdagangan masih terpusat pada pasar tradisional dengan kapasitas terbatas.
6. Terbatasnya investasi pada sektor perdagangan, yang berdampak pada lambatnya perkembangan usaha perdagangan berskala besar.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di masa mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:
2. Pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan aktivitas perdagangan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur pendukung perdagangan, seperti akses jalan, transportasi distribusi barang, dan fasilitas penyimpanan.
4. Pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembinaan, pelatihan, serta akses permodalan.
5. Mendorong pengembangan pusat-pusat perdagangan baru, baik di tingkat distrik maupun kawasan strategis ekonomi.
6. Meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga distribusi barang dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

7. Mendorong masuknya investasi di sektor perdagangan, yang dapat memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan volume aktivitas perdagangan.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan sektor perdagangan di Kabupaten Sarmi dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Analisis capaian kinerja pada indikator kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB

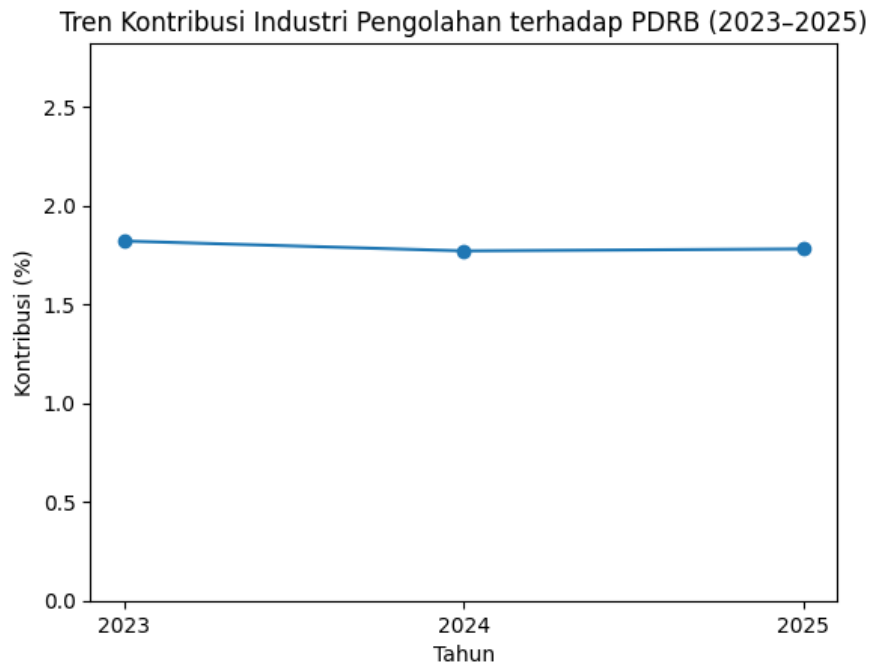
Indikator Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 2,33%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1,78%. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut, maka tingkat capaian kinerja indikator dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1,78}{2,33} \times 100 = 76,39\%$$

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2025 sebesar 76,39%, yang menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan cenderung stagnan bahkan sedikit menurun. Pada tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan tercatat sebesar 1,82%, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 1,77%, dan sedikit meningkat pada tahun 2025 menjadi 1,78%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri pengolahan di daerah masih berjalan relatif lambat dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap struktur perekonomian daerah.

Grafik 3.3



Sektor industri pengolahan sebenarnya memiliki peran strategis dalam perekonomian karena mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Namun demikian, di Kabupaten Sarmi kegiatan industri pengolahan masih didominasi oleh industri skala kecil dan rumah tangga, seperti pengolahan hasil perikanan, hasil pertanian, serta produk pangan lokal.

Faktor Penyebab / Penghambat

Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah industri pengolahan berskala menengah dan besar di daerah.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung industri, seperti listrik, air, dan fasilitas produksi.
3. Minimnya investasi di sektor industri pengolahan, sehingga perkembangan industri berjalan relatif lambat.
4. Keterbatasan teknologi dan peralatan produksi yang masih sederhana pada sebagian besar pelaku industri kecil.

5. Keterbatasan akses pasar dan jaringan distribusi produk industri, sehingga produksi belum berkembang secara optimal.
6. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan usaha industri dan inovasi produk.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung indikator kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB antara lain:

- Melaksanakan kegiatan Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri dengan indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome); Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan fasilitasi sarana prasarana IKM; Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota serta Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah sebagaimana termuat dalam Dokumen Anggaran pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 69.899.940,00 dan terealisasi Rp 69.899.940,00 atau 100%.

-

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di masa yang akan datang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi lokal, seperti pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
2. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana industri, termasuk akses listrik, air, dan fasilitas produksi.

3. Meningkatkan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku industri kecil, terutama dalam pengembangan produk, manajemen usaha, dan pemasaran.
4. Mendorong masuknya investasi di sektor industri pengolahan, khususnya industri berbasis sumber daya lokal.
5. Mengembangkan sentra industri kecil, sehingga pelaku usaha dapat berkembang secara lebih terorganisir dan produktif.
6. Memperluas akses pemasaran produk industri lokal, baik melalui pasar daerah maupun kerja sama dengan wilayah lain.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan sektor industri pengolahan di Kabupaten Sarmi dapat berkembang lebih baik dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

f. Analisis capaian kinerja pada indikator persentase UMKM dan IKM aktif

Indikator Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) aktif di Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 41,00%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 29,39%.

Tingkat capaian kinerja indikator dihitung sebagai berikut:

$$\frac{29,39}{41,00} \times 100 = 71,68\%$$

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator sebesar 71,68%, yang menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, terlihat adanya peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2024 persentase UMKM dan IKM aktif tercatat sebesar 0,12%, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 29,39%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pengembangan dan pendataan kembali pelaku UMKM dan IKM di daerah sehingga jumlah usaha aktif yang tercatat semakin meningkat.

UMKM dan IKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan jumlah UMKM dan IKM aktif antara lain:

2. Adanya program pemberdayaan UMKM dari pemerintah daerah, seperti pelatihan kewirausahaan dan pembinaan usaha melalui :
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) yang terdapat Dokumen Anggaran pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2025 dengan kegiatan pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan bagi 10 Unit Usaha dan koordinasi dengan parapemangku kepentingan Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 51.495.000,00 dan terealisasi Rp. 51.495.000,00 atau 100%
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) yang terdapat Dokumen Anggaran pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2025 dengan kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro bagi 10 Unit Usaha dan koordinasi dengan parapemangku kepentingan Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 840.639.091,00 dan terealisasi Rp. 840.639.091,00 atau 100%
3. Potensi usaha masyarakat yang cukup besar, terutama pada sektor perdagangan kecil, pengolahan hasil pertanian, dan hasil perikanan.
4. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan usaha mandiri sebagai sumber pendapatan.
5. Pendataan dan pembinaan UMKM yang lebih baik, sehingga pelaku usaha yang sebelumnya tidak terdata mulai tercatat dalam sistem pemerintah daerah.

Faktor Penghambat

Belum tercapainya target indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keterbatasan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan IKM, sehingga banyak usaha yang sulit berkembang.
2. Keterbatasan keterampilan manajemen usaha dan pemasaran, terutama pada pelaku usaha kecil di tingkat kampung.
3. Akses pasar yang masih terbatas, sehingga produk UMKM belum dapat dipasarkan secara luas.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi, seperti peralatan usaha dan fasilitas pengolahan.
5. Sebagian pelaku usaha masih bersifat informal, sehingga belum seluruhnya tercatat sebagai usaha aktif.
6. Keterbatasan pendampingan usaha secara berkelanjutan bagi pelaku UMKM dan IKM.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk meningkatkan persentase UMKM dan IKM aktif di masa mendatang, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan program pembinaan dan pendampingan UMKM secara berkelanjutan.
2. Memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha, melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan program kredit usaha rakyat.
3. Meningkatkan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, terutama bagi masyarakat di tingkat distrik dan kampung.
4. Mendorong pemasaran produk UMKM, baik melalui pameran, pasar lokal, maupun pemasaran digital.
5. Mengembangkan sentra-sentra UMKM berbasis potensi lokal, seperti pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
6. Melakukan pendataan UMKM secara berkala, sehingga pelaku usaha yang aktif dapat teridentifikasi dengan lebih baik.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan jumlah UMKM dan IKM aktif di Kabupaten Sarmi dapat terus meningkat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat

g. Analisis capaian kinerja pada indikator Persentase koperasi aktif

Capaian kinerja pada indikator Persentase Koperasi Aktif pada Tahun 2025 sebesar 9,09% dari target yang ditetapkan sebesar 48,21%, sehingga tingkat capaian kinerja hanya 18,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator tersebut belum mencapai target yang direncanakan. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh masih banyaknya koperasi yang tidak aktif menjalankan kegiatan usaha, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta memiliki keterbatasan dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.

Penyebab Belum Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya persentase koperasi aktif antara lain:

1. Rendahnya kapasitas manajemen pengurus koperasi dalam mengelola administrasi dan kegiatan usaha koperasi secara berkelanjutan.
2. Tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin oleh sebagian koperasi, yang merupakan salah satu indikator utama koperasi aktif.
3. Terbatasnya modal usaha dan akses pembiayaan, sehingga kegiatan usaha koperasi tidak berkembang.
4. Kurangnya partisipasi anggota koperasi, yang berdampak pada rendahnya aktivitas dan keberlangsungan koperasi.
5. Masih terdapat koperasi yang secara administratif masih terdaftar namun tidak beroperasi.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan persentase koperasi aktif, beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan antara lain:

6. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pengurus koperasi agar mampu mengelola organisasi dan usaha koperasi dengan baik. Melalui

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi yang terdapat pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2025 dengan kegiatan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dan Indikator Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi sebanyak 43 Unit Usaha . Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 53.045.000,00 dan terealisasi Rp. 53.045.000,00 atau 100%

7. Melakukan pemutakhiran data koperasi melalui identifikasi koperasi aktif dan tidak aktif. Melalui Program Penguatan Badan Hukum Koperasi yang terdapat pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2025 dengan kegiatan Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi dan Indikator Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi sebanyak 35 Kelompok Usaha . Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 29.242.000,00 dan terealisasi Rp. 29.242.000,00 atau 100%

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan pada tahun berikutnya persentase koperasi aktif dapat meningkat dan kinerja pada indikator ini dapat lebih optimal.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pelatihan manajemen koperasi bagi pengurus dan anggota koperasi.
2. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan RAT secara rutin pada seluruh koperasi yang terdaftar.
3. Melakukan revitalisasi koperasi yang tidak aktif melalui pendampingan usaha dan penguatan kelembagaan.
4. Menghapus atau membubarkan koperasi yang sudah tidak beroperasi sesuai ketentuan, sehingga data koperasi lebih akurat.
5. Mendorong inovasi usaha koperasi dan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya agar koperasi dapat berkembang dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut diharapkan persentase koperasi aktif dapat meningkat pada tahun berikutnya serta mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui kelembagaan koperasi yang sehat dan produktif.

Sasaran 14 : Meningkatnya daya saing pariwisata

Untuk mencapai sasaran 14, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2024. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 0%dengan kategori “Sangat Buruk”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.22

Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya Daya Saing Pariwisata

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	Persen	9.55	6.53	68.38
		Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)	Persen	2.10	16.71	795.71%
Capaian indikator kinerja rata-rata						432.05

a. ***Analisis Capaian Kinerja pada indikator kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah***

Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Perekonomian Wilayah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 9,55%.

Berdasarkan data yang tersedia:

- Total PDRB = 4.038,74
- Sektor terkait pariwisata:
 - Transportasi dan Pergudangan = 231,85
 - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum = 32,06

Total kontribusi sektor pariwisata: = 231,85 + 32,06 = 263,91

Persentase kontribusi terhadap PDRB: = $(263,91 / 4.038,74) \times 100\% = 6,53\%$

Dengan demikian, realisasi kinerja sebesar 6,53% belum mencapai target 9,55%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar sekitar 68,38% dan termasuk kategori belum optimal.

Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

Belum tercapainya target kontribusi sektor pariwisata disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih rendah, terutama dari sektor akomodasi dan makan minum yang nilainya relatif kecil.
2. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata, sehingga belum mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi secara signifikan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti akses transportasi, fasilitas penginapan, dan infrastruktur dasar.
4. Minimnya investasi di sektor pariwisata, baik dari pihak swasta maupun investor luar daerah.
5. Rendahnya lama tinggal wisatawan (length of stay), sehingga dampak ekonomi terhadap sektor pendukung menjadi terbatas.
6. Belum maksimalnya promosi pariwisata, terutama untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Analisis Faktor Pendukung (Keberhasilan Parsial)

Meskipun belum mencapai target, terdapat beberapa capaian positif, yaitu:

1. Sektor transportasi dan pergudangan cukup berkontribusi, yang menunjukkan adanya mobilitas wisatawan.

2. Adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, yang mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi lokal.
3. Mulai berkembangnya usaha kuliner dan jasa pendukung, meskipun kontribusinya masih terbatas.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata antara lain:

1. Pengembangan dan penataan destinasi wisata, terutama berbasis potensi lokal.
2. Peningkatan promosi pariwisata daerah, melalui event dan media digital.
3. Pemberdayaan pelaku UMKM sektor pariwisata, khususnya kuliner dan ekonomi kreatif.
4. Koordinasi lintas sektor, terutama dengan dinas perhubungan dan pelaku usaha jasa wisata.
5. Peningkatan kualitas pelayanan wisata, untuk menarik kunjungan ulang wisatawan.

Rekomendasi / Arah Kebijakan ke Depan

Untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Mendorong investasi di sektor pariwisata, khususnya akomodasi dan jasa wisata.
2. Mengembangkan destinasi unggulan (leading tourism sector) yang memiliki daya tarik tinggi.
3. Meningkatkan lama tinggal wisatawan, melalui paket wisata terpadu dan event berkelanjutan.
4. Penguatan promosi pariwisata berbasis digital dan kerja sama antar daerah.
5. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata.
6. Penguatan integrasi sektor pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya, seperti UMKM dan ekonomi kreatif.

Kesimpulan

Secara umum, capaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Perekonomian Wilayah Tahun 2025 sebesar 6,53% masih belum memenuhi target

9,55%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah, sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan perannya di masa mendatang.

b. ***Analisis capaian kinerja pada indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan***

Indikator Persentase Peningkatan Wisatawan (WNA/WNI) pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 2,10%.

Berdasarkan data yang tersedia pada Dinas Pariwisata :

- Wisatawan WNI 2024: 2.117 orang
- Wisatawan WNI 2025: 2.443 orang
- Peningkatan WNI: 326 orang ($\pm 15,40\%$)

- Wisatawan WNA 2024: 86 orang
- Wisatawan WNA 2025: 128 orang
- Peningkatan WNA: 42 orang ($\pm 48,84\%$)

Total Wisatawan:

- Tahun 2024: 2.203 orang
- Tahun 2025: 2.571 orang
- Peningkatan total: 368 orang ($\pm 16,71\%$)

Capaian Kinerja

Dengan realisasi peningkatan sebesar $\pm 16,71\%$, dibandingkan target 2,10%, maka capaian kinerja Adalah 795,71% (sangat tinggi / melampaui target)

Analisis Keberhasilan

Peningkatan signifikan jumlah wisatawan dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Meningkatnya daya tarik destinasi wisata local
Objek wisata mulai dikenal dan diminati.
2. Promosi pariwisata yang lebih intensif
Baik melalui media sosial maupun kegiatan event daerah.

3. Peningkatan kunjungan wisatawan domestik (WNI)
Menjadi kontributor utama peningkatan.
4. Mulainya minat wisatawan mancanegara (WNA)
Terlihat dari kenaikan signifikan ($\pm 48,84\%$).
5. Perbaikan aksesibilitas dan informasi wisata
Memudahkan wisatawan untuk berkunjung.

Analisis Potensi Kelemahan

Meskipun capaian sangat tinggi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Basis awal wisatawan masih relatif kecil Sehingga kenaikan terlihat sangat tinggi secara persentase.
2. Belum meratanya pengembangan destinasi wisata
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung wisata
4. Data kunjungan wisatawan belum sepenuhnya terintegrasi

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Promosi dan publikasi destinasi wisata daerah
2. Penyelenggaraan event/kegiatan pariwisata
3. Pendataan kunjungan wisatawan
4. Koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata

Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

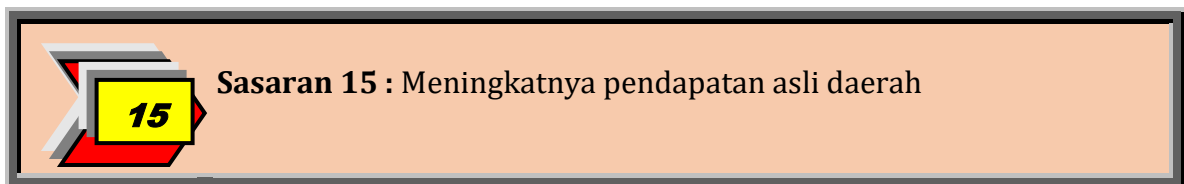
Untuk menjaga dan meningkatkan capaian ke depan, perlu dilakukan:

1. Penguatan promosi pariwisata secara berkelanjutan melalui digital marketing dan branding daerah
2. Pengembangan destinasi wisata unggulan termasuk peningkatan fasilitas dan aksesibilitas
3. Peningkatan kualitas layanan wisata seperti akomodasi, pemandu wisata, dan kebersihan
4. Penguatan kolaborasi dengan pihak swasta dan Masyarakat Pengembangan event wisata berskala regional/nasional

5. Peningkatan sistem pendataan wisatawan yang akurat dan terintegrasi

Kesimpulan

Capaian indikator Persentase Peningkatan Wisatawan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat berhasil, dengan capaian mencapai 795,71% dari target. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan signifikan wisatawan WNI dan WNA. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga tren positif ini serta meningkatkan kualitas dan daya saing sektor pariwisata daerah.



Untuk mencapai sasaran 15, ditetapkan 1 (tiga) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata Menurun (-10,19%)

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.23

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya pendapatan asli daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Peningkatan nilai PAD	Persen	1,86	Menurun 10,19%	Menurun 10,19%
Capaian indikator kinerja rata-rata						Menurun 10,19%

Indikator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah. Peningkatan PAD merupakan

salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2025, target indikator peningkatan PAD ditetapkan sebesar 1,86, sedangkan realisasi PAD yang diperoleh sebesar Rp16.471.191.645,00 dari target anggaran sebesar Rp14.436.416.020,00. Dengan demikian tingkat capaian realisasi PAD mencapai 114,09%, yang menunjukkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3.24

Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (4/3)*100	5
PENDAPATAN DAERAH	969.715.538.643,00	869.528.266.462,00	89,66	1.113.594.610.195,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.436.416.020,00	16.471.191.645,00	114,09	18.339.019.892,67
Pajak Daerah	4.523.287.750,00	4.561.349.086,00	100,84	3.516.513.936,00
Retribusi Daerah	390.000.000,00	518.356.270,00	132,91	270.839.093,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.168.929.651,00	7.168.929.651,00	100,00	5.859.433.240,00
Lain-lain PAD yang Sah	2.354.198.619,00	4.222.556.638,00	179,36	8.692.233.623,67
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.436.416.020,00	16.471.191.645,00	114,09	18.339.019.892,67

Sumber data BPKAD Kabupaten Sarmi (unaudited)

Berikut perhitungan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Perhitungan Capaian Terhadap Target Tahun 2025

- Target PAD 2025 : Rp14.436.416.020,00
- Realisasi PAD 2025 : Rp16.471.191.645,00

$$\text{Selisih Realisasi terhadap Target} = 16.471.191.645 - 14.436.416.020 \\ = \text{Rp}2.034.775.625$$

$$\text{Persentase Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$$

$$= (16.471.191.645 / 14.436.416.020) \times 100 = 114,09\%$$

Artinya PAD tahun 2025 melampaui target sebesar 14,09%.

2. Perbandingan dengan Realisasi Tahun 2024

- Realisasi PAD 2024 : Rp18.339.019.892,67
- Realisasi PAD 2025 : Rp16.471.191.645,00

Selisih 2025 terhadap 2024 = 16.471.191.645 – 18.339.019.892,67
= – Rp1.867.828.247,67

**Artinya terjadi penurunan PAD sebesar Rp1.867.828.247,67
dibanding tahun 2024.**

Persentase Penurunan

= (Selisih / Realisasi 2024) × 100

= (–1.867.828.247,67 / 18.339.019.892,67) × 100

= –10,19%

**Artinya PAD tahun 2025 turun sekitar 10,19% dibanding tahun
2024.**

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

Capaian Kinerja = (Realisasi / Target) × 100%

= (–10,19 / 1,86) × 100% = –547,85%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja indikator mengalami penurunan yang signifikan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai negatif menunjukkan bahwa PAD tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

Penurunan nilai PAD ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penurunan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama PAD.
2. Tidak tercapainya target pada beberapa objek pajak/retribusi unggulan, seperti pajak hotel, restoran, dan jasa usaha.
3. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang berdampak langsung terhadap kemampuan bayar wajib pajak.
4. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD, termasuk masih adanya potensi yang belum tergali secara maksimal.
5. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, serta lemahnya pengawasan dan penagihan.
6. Keterbatasan inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah, sehingga belum mampu mengimbangi penurunan pada sektor utama.

Analisis Faktor Pendukung

Meskipun terjadi penurunan, terdapat beberapa aspek yang masih mendukung, antara lain:

1. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD tetap dilaksanakan, meskipun belum memberikan hasil optimal.
2. Beberapa sektor masih memberikan kontribusi stabil, walaupun tidak cukup untuk menutupi penurunan pada sektor lainnya.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka mengatasi penurunan PAD, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, melalui peningkatan pengawasan dan penagihan.
2. Pendataan ulang objek dan subjek pajak/retribusi, untuk memperluas basis penerimaan.
3. Peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.
4. Penguatan koordinasi antar perangkat daerah pengelola PAD, untuk meningkatkan efektivitas pemungutan.
5. Penerapan sistem digitalisasi pengelolaan PAD, untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data.

Rekomendasi / Arah Kebijakan ke Depan

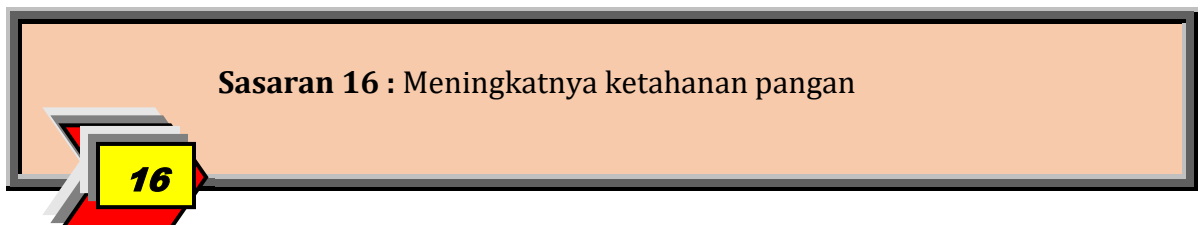
Untuk meningkatkan kinerja PAD ke depan, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Diversifikasi sumber PAD baru, sehingga tidak bergantung pada sektor tertentu saja.
2. Peningkatan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pemanfaatan teknologi.
3. Penegakan regulasi dan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, agar basis penerimaan PAD meningkat.
5. Penguatan kapasitas SDM pengelola PAD, terutama dalam hal pengawasan dan pemungutan.

Kesimpulan

Capaian indikator Peningkatan Nilai PAD Tahun 2025 sebesar -10,19% menunjukkan bahwa kinerja mengalami penurunan signifikan dan tidak mencapai target 1,86%, dengan tingkat capaian -547,85%.

Hal ini menandakan perlunya perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan PAD, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, agar ke depan kinerja pendapatan daerah dapat kembali meningkat secara optimal.



Untuk mencapai sasaran 16, ditetapkan 1 (satu) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 116,67% dengan kategori “Sangat Baik”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.25

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya ketahanan pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH	Skor	68,72	80,94	117,78
Capaian indikator kinerja rata-rata						116,67%

Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kelompok bahan pangan yang dikonsumsi. Data indikator ini umumnya bersumber dari

hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Pada tahun 2025, target Skor PPH ditetapkan sebesar 68,72, sedangkan berdasarkan data SUSENAS 2025 realisasi yang dicapai sebesar 80,94. Dengan demikian tingkat capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{80,94}{68,72} \times 100 = 117,78\%$$

Tabel 3.26

Skor PPH, Konsumsi Kalori dan Protein, Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

		Skor PPH	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	Konsumsi Protein (gram protein/kap/hari)
		Mean	Mean	Mean
KABUPATEN/KOTA	9403 KAB. JAYAPURA	85.76	1809	52.00
	9408 KAB. KEPULAUAN YAPEN	81.24	1961	53.70
	9409 KAB. BIAK NUMFOR	68.30	1675	50.04
	9419 KAB. SARMI	80.94	1844	54.79
	9420 KAB. KEEROM	82.84	1739	48.95
	9426 KAB. WAROPEN	60.39	1575	40.11
	9427 KAB. SUPIORI	76.24	1770	54.96
	9428 KAB. MAMBERAMO RAYA	69.78	1477	43.52
	9471 KOTA JAYAPURA	80.18	1710	55.68
	9999 INDONESIA	95.12	2073	62.78

Tabel 3.27

Kelompok Pangan menurut Konsumsi Kalori, Protein,
Skor PPH, Perkabupaten Tahun 2025

		(gram/kap/hari)	(kkal/kap/hari)	protein/kap/hari)	Skor Maksimal	Skor PPH
		Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
KELOMPOKPANGAN	Padi-padian	221.10	838	19.28	25.00	19.96
	Umbi-umbian	151.03	282	1.36	2.50	2.50
	Pangan Hewani	173.94	255	26.84	24.00	24.00
	Minyak dan Lemak	27.27	245	.02	5.00	5.00
	Buah/Biji Berminyak	2.15	12	.14	1.00	.28
	Kacang-kacangan	10.81	28	2.62	10.00	2.71
	Gula	17.96	65	.22	2.50	1.54
	Sayur dan Buah	209.84	105	3.83	30.00	24.96
	Lain-lain	31.83	15	.47	0.00	0.00

Hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator Skor PPH telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terlihat adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Pada tahun 2024 Skor PPH tercatat sebesar 78,7, kemudian meningkat pada tahun 2025 menjadi 80,94. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat semakin beragam dan lebih seimbang antar kelompok pangan, sehingga kualitas gizi masyarakat juga cenderung membaik.

Skor PPH yang semakin tinggi mencerminkan bahwa konsumsi pangan masyarakat tidak hanya bertumpu pada satu jenis bahan pangan saja, tetapi mulai beragam dengan adanya konsumsi sumber protein, sayur, buah, dan pangan lainnya secara lebih seimbang.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator Skor PPH antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaraman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Gambar 3.24

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaraman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal



PENGAMBILAN DATA CP / CL



SOSIALISASI KEGIATAN



PEMBERSIHAN LAHAN KELADI



PEMBERSIHAN LAHAN TALAS



PENGOLAHAN LAHAN



PENANAMAN KELADI



PENYIANGAN TANAMAN



MONITORING



REVIU BIBIT



REVIU APK DAN HERBISIDA



PANEN



PANEN

2. Program pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, termasuk kampanye konsumsi pangan beragam.
3. Ketersediaan bahan pangan yang semakin beragam di pasar, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan konsumsi.

4. Pemanfaatan potensi pangan lokal, seperti hasil pertanian, perikanan, dan hortikultura yang mendukung keberagaman konsumsi pangan.
5. Program pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi, termasuk edukasi mengenai pola makan sehat.

Faktor Tantangan

Meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Keterbatasan akses pangan di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil.
2. Ketergantungan masyarakat pada beberapa jenis pangan tertentu, seperti beras sebagai sumber utama karbohidrat.
3. Keterbatasan daya beli sebagian masyarakat, yang mempengaruhi kemampuan dalam mengonsumsi pangan bergizi seimbang.
4. Belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Skor PPH ke depan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
2. Mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, seperti umbi-umbian, jagung, sagu, dan hasil perikanan.
3. Memperkuat program ketahanan pangan daerah, melalui peningkatan produksi pangan lokal.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, terutama di wilayah terpencil.
5. Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat terus meningkat, sehingga berdampak positif terhadap perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Sasaran 17 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata

Untuk mencapai sasaran 17, ditetapkan 1 (satu) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 0% dengan kategori “Buruk”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.28

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	45,00	Tdak diukur	0
Capaian indikator kinerja rata-rata						0

Analisis Capaian Kinerja

Indikator Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 45,00%. Namun

demikian, realisasi indikator tidak dapat diukur karena keterbatasan ketersediaan data yang memadai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum dapat dievaluasi secara kuantitatif, sehingga tingkat keberhasilan atau kegagalan indikator belum dapat ditentukan secara pasti.

Analisis Permasalahan

Tidak terukurnya realisasi indikator disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Belum tersedianya sistem pengumpulan dan pengolahan data yang terstruktur terkait kontribusi swadaya masyarakat
- Belum adanya indikator operasional yang terukur dan baku, sehingga menyulitkan dalam proses penghitungan
- Keterbatasan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemerintah kampung/desa dalam pelaporan kegiatan berbasis masyarakat
- Dokumentasi kontribusi swadaya masyarakat (tenaga, material, maupun finansial) yang belum terdata secara sistematis

Dampak terhadap Kinerja

Keterbatasan data ini berdampak pada:

- Tidak dapat dihitungnya tingkat capaian kinerja secara akuntabel
- Menurunnya kualitas pengukuran kinerja dalam dokumen LKJIP
- Potensi penilaian kurang optimal dalam evaluasi SAKIP

Rekomendasi / Tindak Lanjut

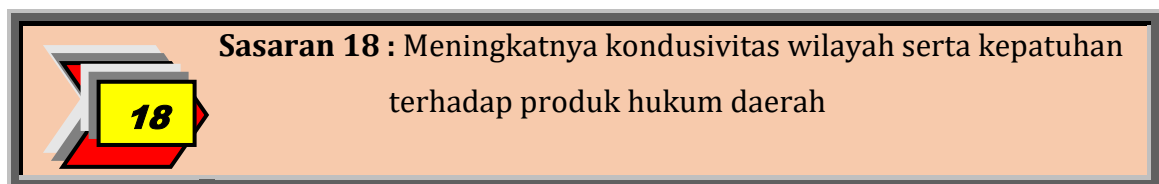
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan antara lain:

- Menyusun definisi operasional indikator yang jelas beserta metode pengukuran (misalnya persentase nilai kontribusi swadaya dibanding total nilai kegiatan pembangunan)
- Mengembangkan sistem pendataan dan pelaporan berbasis aplikasi atau format baku dari tingkat kampung/desa hingga kabupaten
- Meningkatkan koordinasi lintas OPD dan pemerintah kampung/desa dalam pengumpulan data

- Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada aparat kampung/desa terkait pentingnya pencatatan swadaya masyarakat
- Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaporan kegiatan berbasis masyarakat

Kesimpulan

Indikator ini belum dapat menggambarkan capaian kinerja secara nyata karena kendala pada aspek pengukuran, bukan pada pelaksanaan program semata. Oleh karena itu, fokus perbaikan ke depan perlu diarahkan pada penguatan sistem data dan metodologi pengukuran, agar indikator ini dapat diukur secara valid, reliabel, dan akuntabel.



Untuk mencapai sasaran 18, ditetapkan 1 (satu) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 111,11% dengan kategori "Sangat Baik".

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.29

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	90	100	111,11%
Capaian indikator kinerja rata-rata						111,11%

Analisis Capaian Kinerja pada indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menindaklanjuti dan menyelesaikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pelaksanaan indikator ini umumnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah.

Pada tahun 2025, target indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ditetapkan sebesar 90,00%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran yang tercatat telah berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Perhitungan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\frac{100}{90} \times 100 = 111,11\%$$

Dengan demikian, capaian kinerja indikator mencapai 111,11%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut didukung oleh beberapa kegiatan operasional penegakan Perda dan Perkada, antara lain:

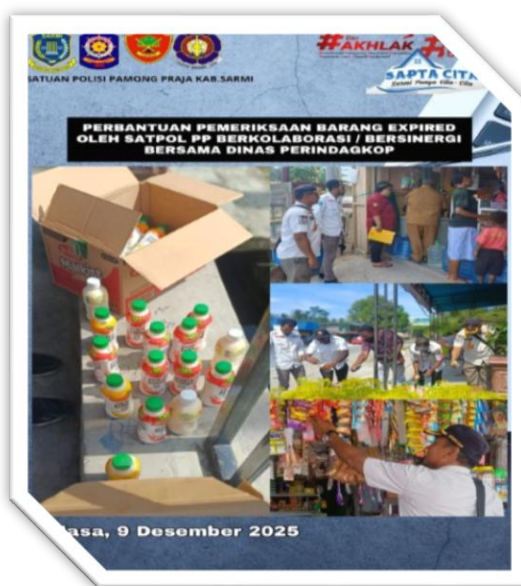
1. Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang ditindaklanjuti: 8 laporan dan seluruhnya terealisasi 8 laporan.
2. Jumlah patroli ketertiban umum: dilaksanakan 4 kali setiap bulan secara rutin.

Gambar 3.25

Kegiatan Perbantuan Pemeriksaan Barang Expire , Penertiban Hewan Ternak dan Penertiban Miras oleh SATPOL PP Bersama TNI POLRI dan Instansi Terkait



Kegiatan Patroli Mobile Penertiban Hewan Ternak Oleh Tim SATPOL PP bersama Bidang Peternakan dan Distrik Sarmi



Kegiatan Perbantuan Pemeriksaan Barang Expire oleh SATPOL PP berkolaborasi Bersama PERINDAGKOP



Kegiatan Penertiban Miras sinergitas dan Kolaborasi Bersama TNI, POLRI (Perda No, 17 Tahun 2017) Tentang Pelarangan Penjualan pendistribusian Miras

3. Jumlah masyarakat yang terlayani akibat dampak penegakan Perda dan Perkada: 8 orang.
4. Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang dilayani: 8 pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.
5. Jumlah aparatur/anggota Satpol PP yang mengikuti pendidikan dasar (Dikdas): 24 orang, yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas penegakan Perda.

Pelaksanaan patroli rutin serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan patroli rutin oleh aparat Satpol PP, sehingga potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih dini.
2. Respons cepat terhadap laporan dan pengaduan masyarakat, sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
3. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dasar (Dikdas) bagi anggota Satpol PP.
4. Koordinasi yang baik antara aparat penegak Perda dan masyarakat, sehingga penanganan pelanggaran dapat berjalan efektif.
5. Jumlah kasus pelanggaran yang relatif dapat dikendalikan, sehingga seluruh laporan dapat diselesaikan.

Faktor Tantangan

Walaupun capaian telah melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah personel Satpol PP dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan.
2. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap Perda masih perlu ditingkatkan.

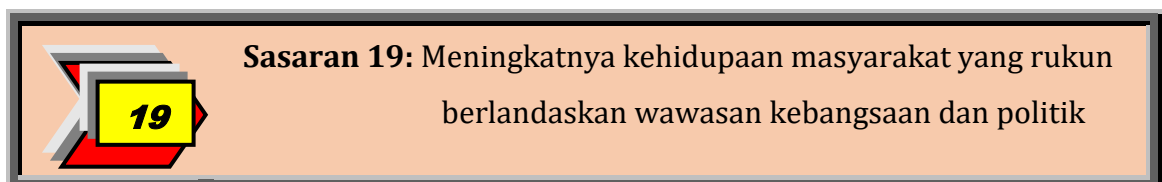
3. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional patroli di beberapa wilayah.
4. Potensi munculnya pelanggaran baru seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.

Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas patroli ketertiban umum secara berkala di wilayah yang rawan pelanggaran.
2. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan dapat meningkat.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur Satpol PP, melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan.
4. Memperkuat sistem penanganan pengaduan masyarakat, agar laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efektif.
5. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana operasional, guna menunjang kegiatan patroli dan penegakan Perda.

Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan ketertiban, ketentraman, dan keindahan lingkungan masyarakat dapat terus terjaga, serta tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah semakin meningkat



Untuk mencapai sasaran 19, ditetapkan 1 (satu) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2024. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Bdan Kesatuan Bangsa dan politik dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.30

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	Persen	100	100	100%
Capaian indikator kinerja rata-rata						100%

Analisis Capaian Kinerja pada indikator persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik

Pada Tahun 2025, target kinerja untuk indikator Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Rukun Berlandaskan Wawasan Kebangsaan dan Politik ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian pada Tahun 2025 juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjaga kerukunan masyarakat serta meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan kehidupan politik berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Capaian ini menggambarkan bahwa kondisi kehidupan masyarakat yang rukun, aman, serta memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kehidupan politik yang demokratis dapat terjaga dengan baik di Kabupaten Sarmi.

Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan demokrasi.
2. Terjalannya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dalam menjaga stabilitas sosial dan kehidupan bermasyarakat.
3. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi, sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalisir.
4. Kondisi sosial masyarakat yang relatif kondusif, yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.

Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam rangka mendukung tercapainya indikator tersebut, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

Gambar 3.26



Sekretaris Daerah Membuka Sosialisasi
Penguatan Politik Bagi Orang Asli Papua
Di Kabupaten Sarmi Sarmi, 9 Oktober
2025

2. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial di masyarakat.

Gambar 3.27



*Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Adat/Ormas Adat Di Wilayah Kabupaten
Sarmi Tahun 2025*

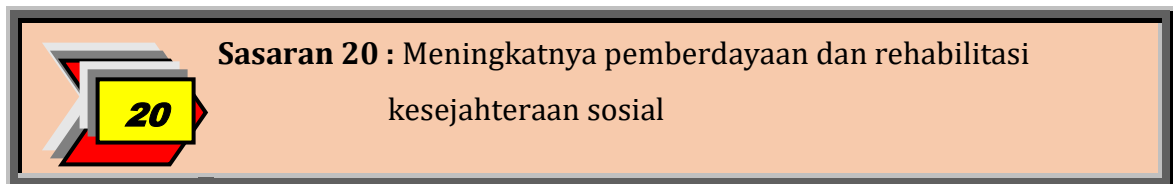
3. Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait, dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan, agar dapat berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut pada tahun-tahun berikutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi wawasan kebangsaan dan pendidikan politik, khususnya kepada generasi muda.
2. Memperkuat peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat.
3. Meningkatkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan aparat keamanan dan lembaga kemasyarakatan.
4. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap organisasi kemasyarakatan, agar tetap berperan aktif dalam mendukung kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa kondisi kehidupan masyarakat yang rukun dan berlandaskan nilai-nilai wawasan kebangsaan serta kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Sarmi dapat terjaga dengan baik, sehingga perlu terus dipertahankan melalui berbagai program pembinaan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.



Untuk mencapai sasaran 20, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2024. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 67.28% dengan kategori **“Cukup”**.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.31

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial	Persen	48.70	63,29%	129,96%
		Persentase layanan pemberdayaan sosial	Persen	63.71	2,93%	4.60 %
Capaian indikator kinerja rata-rata						67.28 %

a. Analisis Capaian Kinerja pada indikator persentase layanan rehabilitasi sosial

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial ditetapkan sebesar 48,70%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 63,29%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 129,96% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Sarmi telah melampaui target yang direncanakan.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sarmi pada Tahun 2025 sebanyak 395 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

Analisis Penyebab Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya bahkan melampauinya target kinerja tersebut antara lain:

1. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar.
2. Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah distrik, kampung, serta lembaga sosial, sehingga proses identifikasi dan penanganan sasaran dapat dilakukan lebih efektif.
3. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial secara lebih intensif, baik melalui bantuan sosial, pendampingan sosial, maupun fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan.
4. Pendataan dan verifikasi sasaran yang lebih optimal, sehingga pelayanan rehabilitasi sosial dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Upaya yang Telah Dilakukan

Untuk mendukung peningkatan layanan rehabilitasi sosial, beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial secara berkala.

Tabel 3.32

Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis
Di kabupaten Sarmi Tahun 2025

No	Distrik	Jenis PMKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
1.	Pantai Barat	-	150	145	-	295
2.	Sarmi Timur	100	-	-	-	100
Jumlah		100	150	145	-	395

2. Memberikan bantuan dan pelayanan rehabilitasi sosial kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis .

Program Kegiatan yang terdapat pada Dokumen Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sarmi tahun 2025:

- Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Sub kegiatan penyediaan permakanan dan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi sebanyak 250 orang, kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar RP. 221.919.539,00 dan terealisasi sebesar Rp. RP. 221.919.539,00 atau 100%.

Gambar 3.28



Pemberian bantuan Permakanaan bagi anak terlantar oleh Dinas Sosial Tahunn 2025

- Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Sub kegiatan Penyediaan Sandang dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun sebanyak 250 Orang. kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar RP. 184.630.441,00 dan terealisasi sebesar Rp. RP. 184.630.441,00 atau 100%

Gambar 3.29



Pemberian bantuan sandang bagi lanjut usia oleh Dinas Sosial Tahunn 2025

3. Melaksanakan pendampingan sosial kepada penerima layanan, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan sosial dan kembali berfungsi secara optimal di masyarakat.

Program Kegiatan yang terdapat pada Dokumen Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sarmi tahun 2025:

- Program Rehabilitasi Sosial dengan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dan Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA sebanyak 150 Orang. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar RP. 99.997.926,00 dan terealisasi sebesar Rp. RP. 99.997.926,00 atau 100%

Gambar 3.30



*Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan tahun 2025*

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melanjutkan dan memperluas cakupan layanan rehabilitasi sosial, agar seluruh kelompok rentan yang membutuhkan dapat terlayani.
2. Meningkatkan kualitas pendampingan sosial, sehingga layanan yang diberikan tidak hanya bersifat bantuan tetapi juga pemberdayaan.
3. Memperkuat sistem pendataan dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial, agar sasaran program lebih akurat.
4. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta lembaga sosial, untuk mendukung pelaksanaan program rehabilitasi sosial secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Sarmi telah berjalan sangat baik dan berhasil melampaui target, sehingga perlu dipertahankan serta ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya pada tahun-tahun mendatang.

b. Analisis Capaian Kinerja pada indikator persentase layanan Pemberdayaan sosial

Pada Tahun 2025, target kinerja untuk indikator Persentase Layanan Pemberdayaan Sosial ditetapkan sebesar 63,71%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 2,93%, sehingga tingkat capaian kinerja hanya mencapai 4,60% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan pemberdayaan sosial masih jauh dari target yang direncanakan.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Sarmi sebanyak 6.822 KK, sedangkan jumlah keluarga yang menerima layanan pemberdayaan sosial melalui kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Tahun 2025 sebanyak 200 keluarga. Dengan demikian cakupan layanan yang diberikan baru menjangkau sebagian kecil dari total keluarga miskin yang menjadi sasaran program pemberdayaan sosial.

Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian indikator tersebut antara lain:

1. Keterbatasan alokasi anggaran program pemberdayaan sosial, sehingga jumlah keluarga penerima manfaat yang dapat difasilitasi masih sangat terbatas dibandingkan dengan total keluarga miskin yang ada.
2. Besarnya jumlah sasaran program, yaitu 6.822 keluarga miskin, sementara kemampuan program yang tersedia hanya mampu menjangkau sebagian kecil penerima manfaat.
3. Keterbatasan program pemberdayaan sosial yang tersedia, sehingga intervensi yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran.
4. Kendala geografis dan akses wilayah, yang menyebabkan pelaksanaan program pemberdayaan sosial tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.
5. Keterbatasan kapasitas pendamping dan pelaksana program, sehingga proses pendataan, pendampingan, dan pelaksanaan kegiatan belum maksimal.

Upaya yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan layanan pemberdayaan sosial, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga bagi keluarga penerima manfaat sebanyak 200 keluarga.
2. Melakukan pendataan dan verifikasi keluarga miskin sebagai dasar penetapan sasaran program pemberdayaan sosial.
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kampung dalam pelaksanaan program serta penentuan sasaran prioritas.
4. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat, agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

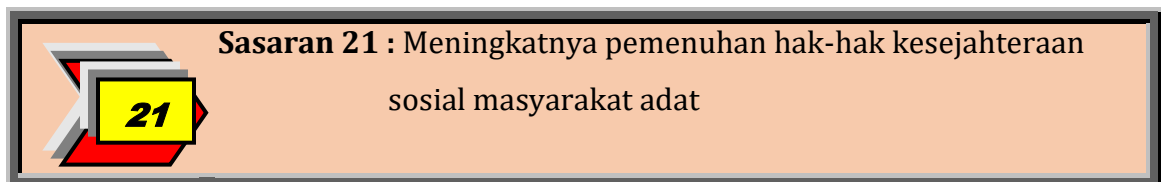
Alternatif Solusi / Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan alokasi anggaran program pemberdayaan sosial, sehingga cakupan penerima manfaat dapat diperluas.

2. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha ekonomi produktif, dan pemberdayaan kelompok usaha.
3. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar Kabupaten Sarmi dapat memperoleh tambahan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
4. Memperkuat sistem pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan, sehingga program pemberdayaan sosial dapat lebih tepat sasaran.
5. Meningkatkan peran pemerintah distrik dan kampung dalam pendampingan masyarakat, agar pelaksanaan program pemberdayaan sosial lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa cakupan layanan pemberdayaan sosial di Kabupaten Sarmi masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah sasaran yang ada, sehingga diperlukan peningkatan dukungan program, anggaran, dan koordinasi lintas sektor agar target pelayanan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.



Untuk mencapai sasaran 21, ditetapkan 1 (satu) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2024. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 76.02% dengan kategori "Sangat Baik".

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3.33

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat	Cakupan layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Persen	38.69	29.41	76.02%
Capaian indikator kinerja rata-rata						76.02%

Analisis Capaian Kinerja pada indikator persentase layanan pemberdayaan sosial

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase Layanan Pemberdayaan Sosial ditetapkan sebesar 38,69%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 29,41%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 76,02% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan sosial belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Sarmi sebanyak 850 keluarga, sedangkan jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial sebanyak 250 keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh keluarga dalam Komunitas Adat Terpencil dapat terlayani melalui program pemberdayaan sosial pada tahun berjalan, sehingga mempengaruhi capaian indikator kinerja.

Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut antara lain:

1. Keterbatasan anggaran program pemberdayaan sosial, sehingga jumlah keluarga yang dapat difasilitasi masih terbatas dibandingkan dengan total keluarga KAT yang ada.
2. Kondisi geografis wilayah dan keterpencilan lokasi KAT, yang menyulitkan proses pelaksanaan program dan pendampingan secara maksimal.

3. Keterbatasan sumber daya manusia pendamping sosial, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan belum dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran.
4. Proses verifikasi dan pendataan sasaran yang memerlukan waktu, terutama dalam memastikan bahwa bantuan dan fasilitas pemberdayaan tepat sasaran.

Upaya yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan sosial kepada keluarga KAT secara bertahap, dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan melalui Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT sebanyak 250 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 690.187.072,00 dan terealisasi sebesar Rp. 690.187.072,00 atau 100%

Gambar 3.31



*Penyerahan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Oleh
Dinas Sosial Kab. Sarmi Tahun 2025*

2. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap keluarga KAT, sebagai dasar dalam penetapan sasaran program pemberdayaan sosial.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kampung, guna mempermudah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di wilayah KAT.

4. Memberikan pendampingan kepada keluarga penerima program, agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan sosial, sehingga jumlah keluarga KAT yang dapat difasilitasi semakin meningkat.
2. Meningkatkan intensitas pendampingan kepada komunitas adat terpencil, agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, guna memperoleh dukungan program pemberdayaan sosial bagi KAT.
4. Meningkatkan pemutakhiran data KAT secara berkala, sehingga perencanaan program pemberdayaan sosial dapat lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan pemberdayaan sosial kepada Komunitas Adat Terpencil telah berjalan namun masih perlu ditingkatkan, agar lebih banyak keluarga KAT yang memperoleh fasilitas pemberdayaan sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat.

**Sasaran 22: Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Untuk mencapai sasaran 22, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2024. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 1.53 /Kurang dengan kategori “**Kurang**”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3.34

Pencapaian kinerja sasaran pada Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Predikat	Kurang	1.53 /Kurang	Kurang
Capaian indikator kinerja rata-rata						1.53 /Kurang

Analisis Capaian Kinerja pada indikator Indeks SPBE dan Tingkat keamanan penyelenggaraan egovernment

Kabupaten Sarmi terus melakukan upaya penguatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan terus melakukan penyiapan untuk kebijakan-kebijakan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi digital.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

A. TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN SPBE

Gambar 3.32



Tabel 3.35

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Tabel 3.36

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	NoIndikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

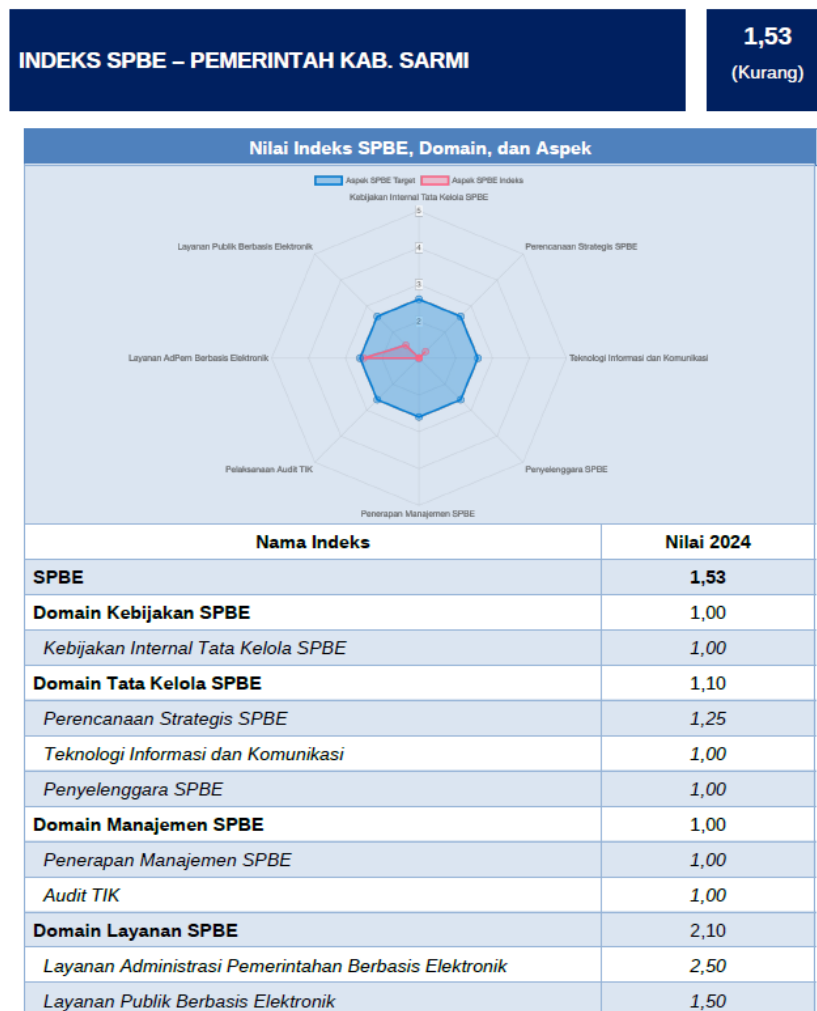
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
28	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	1
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	1
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	1
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	1
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	1
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	1

B. INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. SARMI

Hasilnya, pada evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sarmi pada Tahun 2024 meraih predikat Kurang dengan indeks pencapaian sebesar 1.53 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil evaluasi berikut :

Gambar Grafik 3.33

Hasil Evaluasi SPBE



C. KEKUATAN DAN KELEMAHAN

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi secara formal

1. Kekuatan

Belum tampak adanya kekuatan pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Sarmi

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Sarmi belum memiliki Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra IPPD, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, Tim Koordinasi SPBE IPPD1

Perencanaan Strategis SPBE

Penerapan Perencanaan strategis belum dipenuhi secara lengkap oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi

1. Kekuatan

Belum tampak adanya kekuatan pada aspek perencanaan strategis di Pemerintah Kabupaten Sarmi

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Sarmi belum memiliki Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE yang lengkap,

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi

1. Kekuatan

Belum tampak adanya kekuatan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Sarmi

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Sarmi belum memiliki Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, belum menggunakan Jaringan Intra IPPD serta Sistem Penghubung Layanan IPPD

Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan Aspek Penyelenggara SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi

1. Kekuatan

Belum tampak adanya kekuatan pada Aspek Penyelenggara SPBE di Pemerintah Kabupaten Sarmi

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Sarmi belum memiliki tim koordinasi pelaksanaan SPBE dan kolaborasi pelaksanaan SPBE

Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi

1. Kekuatan

Belum tampak adanya kekuatan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Sarmi

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Sarmi belum melakukan Penerapan Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE

Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi

1. Kekuatan

Belum tampak adanya kekuatan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK di Pemerintah Kabupaten Sarmi

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Sarmi belum melakukan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sebagian Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi

1. Kekuatan

Kekuatan di Pemerintah Kabupaten Sarmi terletak pada aspek Layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kepegawaian.

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Sarmi belum memiliki Layanan Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Sebagian Aspek Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi

1. Kekuatan

Belum tampak adanya kekuatan pada Aspek Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Sarmi

2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Sarmi belum memiliki Layanan Publik Sektor 1,2

D. REKOMENDASI

1. Perlu koordinasi, bimbingan teknis dari pusat untuk penerapan SPBE
2. Perlu koordinasi antar pimpinan, OPD teknis di IPPD terkait dengan Kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen SPBE
3. Aspek Perencanaan Strategis SPBE, dokumen perencanaan strategis harus disusun dan disahkan secara formal khususnya untuk arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta Perencanaan Anggaran SPBE termasuk proses

bisnis SPBE yang harus diupdate sesuai dengan arsitektur SPBE yang nanti akan ditetapkan

4. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, penggunaan TIK masih rendah oleh karena itu perlu diaktifkan penggunaan TIK sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat serta melengkapi dokumentasi pembangunan aplikasi SPBE dan Sistem Penghubung Layanan termasuk menerapkan ke semua unit kerja.
5. Aspek Penyelenggara SPBE, tugas dan fungsi tim koordinasi serta pelaksanaan kolaborasi dalam pelaksanaan SPBE perlu ditingkatkan.
6. Aspek Penerapan Manajemen SPBE, semua penerapan manajemen SPBE harus segera dilaksanakan dan didokumentasikan sekecil apapun sehingga Manajemen SPBE dapat berjalan
7. Aspek Audit TIK, audit TIK sangat penting bagi kematangan SPBE oleh karena itu harus dilakukan secara periodik oleh tim Audit internal maupun eksternal untuk memastikan pengelolaan teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.
8. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilakukan analisis, reviu, evaluasi dan perbaikan aplikasi yang digunakan secara berkala.



Sasaran 23 : Meningkatnya kualitas Layanan Publik

Untuk mencapai sasaran 23, ditetapkan 5 (lima) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2024. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat DPRD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah SATPOL PP dan Dinas KOMINFO Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 89,51% dengan kategori “Baik”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3.37

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya kualitas layanan publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Tingkat cakupan layanan Administrasi kependudukan	Persen	82.38	80.06	97.19%
		Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100	100	100%
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	76,49	19,07	24,93%
		Persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada	Persen	100	100	100%
		Persentase daerah yang terjangkau layanan telokomunikasi dan internet	Persen	36,47	48,91%	134,11%
Capaian indikator kinerja rata-rata						89,51%

a. Analisis capaian kinerja pada indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan

Pada Tahun 2025, target Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan ditetapkan sebesar 82,38%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 80,06%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,19% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan cukup baik dan mendekati target yang direncanakan.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Sarmi sebanyak 46.482 jiwa dengan jumlah wajib KTP elektronik (KTP-el) sebanyak

30.388 jiwa. Dari jumlah tersebut, yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 28.804 jiwa. Selain itu, untuk Kartu Identitas Anak (KIA), jumlah anak yang wajib memiliki KIA sebanyak 16.100 anak, namun yang telah memiliki KIA baru sebanyak 4.732 anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.38
Agregat Jumlah Penduduk Kabupaten Sarmi
DKB Semester II Tahun 2025

NO	DISTRIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SARMI	8,132	7,377	15,509
2	TOR ATAS	1,243	1,063	2,306
3	PANTAI BARAT	1,657	1,458	3,115
4	PANTAI TIMUR	1,688	1,518	3,206
5	BONGGO	2,887	2,573	5,460
6	APAWER HULU	862	806	1,668
7	SARMI SELATAN	1,711	1,522	3,233
8	SARMI TIMUR	1,607	1,432	3,039
9	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	2,840	2,537	5,377
10	BONGGO TIMUR	1,859	1,710	3,569
TOTAL		24,486	21,996	46,482

PDAK- Kementerian Dalam Negeri RI

Tabel 3.39
Agregat WAJIB KTP-EL Kabupaten Sarmi
DKB Semester II Tahun 2025

NO	DISTRIK	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	PEREKAMAN KTP-EL	BELUM PEREKAMAN KTP-EL	PERSENTASE
1	SARMI	15,509	10,437	10,036	401	96.16%
2	TOR ATAS	2,306	1,373	1,284	89	93.52%
3	PANTAI BARAT	3,115	1,893	1,751	142	92.50%
4	PANTAI TIMUR	3,206	2,090	1,971	119	94.31%
5	BONGGO	5,460	3,661	3,497	164	95.52%
6	APAWER HULU	1,668	982	907	75	92.36%
7	SARMI SELATAN	3,233	2,138	2,029	109	94.90%
8	SARMI TIMUR	3,039	1,863	1,753	110	94.10%
9	PANTAI TIMUR BARAT	5,377	3,536	3,299	237	93.30%
10	BONGGO TIMUR	3,569	2,415	2,277	138	94.29%
JUMLAH		46,482	30,388	28,804	1,584	94.79%

PDAK- Kementerian Dalam Negeri RI

Tabel 3.40

Agregat Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Kia) Kabupaten Sarmi
Dkb Semester II Tahun 2025

DISTRIK/KECAMATAN	LK	PR	JUMLAH	MEMILIKI KIA		JUMLAH	BELUM MEMILIKI KIA		JUMLAH	PERSEN
				LK	PR		LK	PR		
SARMI	2,617	2,455	5,072	1,16	1,112	2,272	1,457	1,343	2,8	45
TOR ATAS	504	431	935	78	74	152	426	357	783	16
PANTAI BARAT	664	559	1,223	93	105	198	571	454	1,025	16
PANTAI TIMUR	564	552	1,116	189	189	378	375	363	738	34
BONGGO	928	872	1,8	241	233	474	687	639	1,326	26
APAWER HULU	336	351	687	36	44	80	300	307	607	12
SARMI SELATAN	570	526	1,096	152	136	288	418	390	808	26
SARMI TIMUR	610	566	1,176	141	122	263	469	444	913	22
PANTAI TIMUR BARAT	944	897	1,841	270	230	500	674	667	1,341	27
BONGGO TIMUR	580	574	1,154	59	68	127	521	506	1,027	11
TOTAL	8,317	7,783	16,1	2,419	2,313	4,732	5,898	5,47	11,368	29

Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator tersebut antara lain:

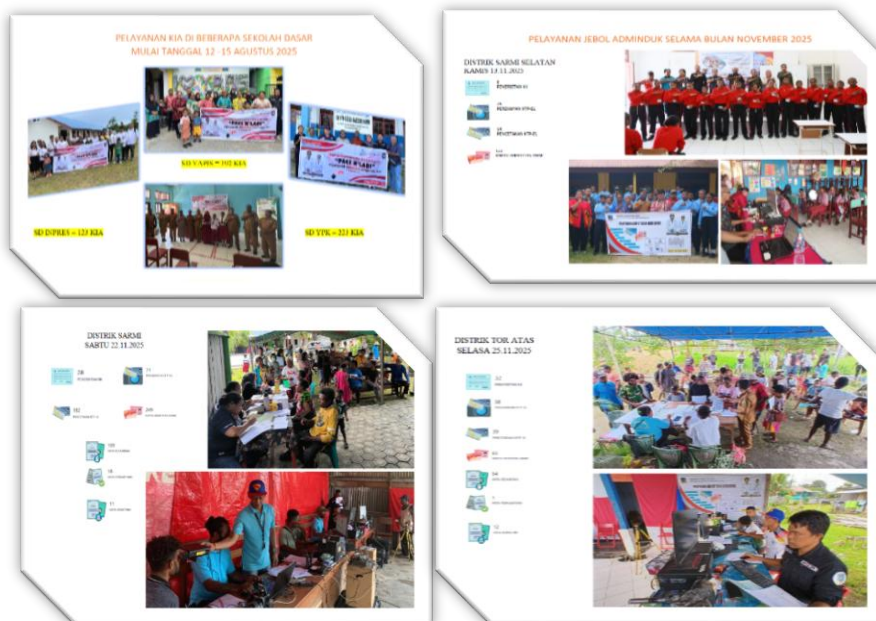
1. Keterbatasan akses pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi masyarakat yang berada di distrik atau kampung yang jauh dari pusat pelayanan.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua dalam mengurus dokumen kependudukan bagi anak seperti KIA.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, seperti perangkat perekaman dan jaringan yang kadang mengalami kendala teknis.
4. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Sarmi yang cukup luas dan sebagian wilayah sulit dijangkau sehingga mempengaruhi jangkauan pelayanan.

Upaya yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan, pemerintah daerah melalui instansi terkait telah melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Pelayanan jemput bola (mobile service) ke distrik dan kampung untuk perekaman KTP-el dan penerbitan dokumen kependudukan.

Gambar 3.34



Pelayanan jemput bola (mobile service) ke distrik dan kampung untuk perekaman KTP-el dan penerbitan dokumen kependudukan

2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan KIA.

Gambar 3.35



Launching IKD

3. Koordinasi dengan pemerintah distrik, kampung, serta sekolah untuk pendataan dan pengurusan dokumen kependudukan, khususnya KIA.
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar proses penerbitan dokumen dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan intensitas pelayanan jemput bola, khususnya untuk perekaman KTP-el bagi penduduk yang belum melakukan perekaman.
2. Memperkuat kerja sama dengan sekolah dan fasilitas pendidikan untuk mempercepat penerbitan KIA bagi anak-anak usia sekolah.
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan sebagai dasar pelayanan publik.
4. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan, termasuk perangkat perekaman dan sistem pelayanan berbasis digital.

Secara umum, capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sarmi telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan cakupan layanan agar seluruh masyarakat dapat memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

b. Analisis capaian kinerja pada indikator persentase pelayanan agenda kerja DPRD

Indikator persentase pelayanan agenda kerja DPRD menggambarkan tingkat kemampuan perangkat daerah dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti rapat-rapat DPRD, rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat paripurna, serta kegiatan kedewanan lainnya.

Pada tahun 2025, target indikator persentase pelayanan agenda kerja DPRD ditetapkan sebesar 100%, dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa realisasi juga mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini adalah 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh agenda kerja DPRD yang telah direncanakan dapat difasilitasi dan dilayani dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa dukungan pelayanan administrasi, fasilitasi rapat, penyediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antara

Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD telah berjalan dengan baik. Seluruh kegiatan kedewanan yang telah dijadwalkan dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya agenda yang tidak terlayani.

Beberapa faktor penunjang dalam pencapaian indikator ini antara lain:

1. Koordinasi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD dalam penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung pelayanan administrasi dan teknis kegiatan DPRD.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan rapat dan persidangan DPRD, seperti ruang rapat, perlengkapan sidang, dan dukungan administrasi.
4. Perencanaan agenda kerja DPRD yang terjadwal dengan baik, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan pelayanan kegiatan.

Adapun faktor penghambat relatif kecil karena seluruh agenda yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian, potensi kendala yang dapat terjadi antara lain perubahan jadwal kegiatan DPRD yang bersifat mendadak atau adanya penyesuaian agenda karena kebutuhan tertentu.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Mempertahankan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara optimal.
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Sekretariat DPRD dengan pimpinan dan anggota DPRD dalam perencanaan agenda kegiatan.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung pelayanan kegiatan DPRD agar pelayanan dapat semakin profesional dan responsif.
4. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD agar pelaksanaan agenda kerja dapat berjalan lancar.

Secara keseluruhan, capaian indikator persentase pelayanan agenda kerja DPRD tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena seluruh agenda

kerja yang direncanakan dapat difasilitasi dan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Analisis capaian kinerja pada indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 77,24, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar 19,07. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = (19,07 / 77,24) \times 100\% = 24,69\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja indikator belum optimal dan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Nilai ini juga sejalan dengan hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sarmi Tahun 2025.

Tabel 3.41

Indeks Pembangunan literasi Masyarakat Kabupaten Sarmi tahun 2025

No	AktifitasMembaca	Nulai	Keterangan
1	UPMLM 1 : Memeratakan Layanan Perpustakaan	34,31	
2	UPMLM 2 : Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	28,10	
3	UPMLM : Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	49,1	
4	UPMLM 4: Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	7,16	
5	UPMLM 5: Perpustakaan ber SNP	0,98	
6	UPMLM 6 : Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatanPerpustakaan	0,70	
7	UPMLM 7 : Anggota Perpustakaan	13,26	
	Jumlah	19,07	

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program pada perangkat daerah yang membidangi perpustakaan dan literasi, antara lain:

- Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
- Program Pelestarian Bahan Pustaka dan Pengelolaan Koleksi Perpustakaan

Namun demikian, program-program tersebut belum mampu mendorong peningkatan signifikan terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat.

Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja

Rendahnya capaian indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Rendahnya minat baca masyarakat, yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya membaca yang belum terbentuk secara kuat.
2. Keterbatasan akses terhadap bahan bacaan, terutama di wilayah distrik/kampung.
3. Jumlah dan kualitas perpustakaan yang masih terbatas, baik dari sisi koleksi maupun sarana prasarana.
4. Kurangnya inovasi dalam layanan perpustakaan, sehingga belum menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda.
5. Minimnya kegiatan literasi yang berkelanjutan, seperti pojok baca, taman baca, dan kegiatan membaca bersama.
6. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, dalam mendukung literasi digital.

Analisis Faktor Pendukung (Keberhasilan Parsial)

Meskipun capaian masih rendah, terdapat beberapa upaya yang telah memberikan dampak positif, yaitu:

1. Telah dilaksanakannya program pembinaan dan pengembangan perpustakaan, meskipun skalanya masih terbatas.

2. Adanya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, sebagai dasar pengukuran kinerja literasi.
3. Mulai adanya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya literasi, terutama di lingkungan pendidikan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan capaian indikator, beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Pengembangan perpustakaan daerah dan perpustakaan kampung, termasuk penambahan koleksi bahan pustaka.
2. Pelaksanaan kegiatan literasi, seperti sosialisasi gemar membaca dan lomba literasi.
3. Penyediaan layanan perpustakaan keliling, untuk menjangkau wilayah yang sulit akses.
4. Kerja sama dengan sekolah dan komunitas, dalam meningkatkan budaya membaca.
5. Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, melalui pelatihan dan pembinaan.

Rekomendasi / Arah Kebijakan ke Depan

Untuk meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat, diperlukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan perpustakaan, hingga ke wilayah terpencil.
2. Mengembangkan inovasi layanan literasi berbasis digital, seperti e-library dan aplikasi baca online.
3. Mendorong gerakan literasi masyarakat secara masif, melibatkan sekolah, komunitas, dan keluarga.
4. Menambah koleksi bahan bacaan yang menarik dan relevan, khususnya bagi anak dan remaja.
5. Mengintegrasikan program literasi dengan program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan

Capaian indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2025 sebesar 24,69% menunjukkan bahwa kinerja masih sangat rendah dan belum mencapai target. Program yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan budaya membaca masyarakat, sehingga diperlukan penguatan program, inovasi layanan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong peningkatan literasi secara berkelanjutan.

d. Analisis capaian kinerja pada indikator persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada

Capaian kinerja pada indikator *Persentase Penegakan terhadap Perda dan Perkada* pada Tahun 2025 mencapai 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang terjadi selama tahun berjalan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan secara optimal. Berdasarkan data yang ada, terdapat 8 kasus pelanggaran Perda dan seluruhnya berhasil ditangani dan diselesaikan (8 kasus), sehingga tingkat penyelesaian mencapai 100%.

Penyebab Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target kinerja tersebut antara lain:

1. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait, khususnya aparat penegak Perda dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.
2. Respon yang cepat dari petugas dalam menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran Perda di lapangan.
3. Sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat yang cukup efektif sehingga memudahkan proses penertiban dan penyelesaian pelanggaran.
4. Komitmen aparaturnya penegak Perda dalam melaksanakan tugas pengawasan, penertiban, dan penegakan peraturan daerah secara konsisten.

Potensi Kendala

Meskipun capaian telah mencapai target, masih terdapat beberapa potensi kendala yang dapat mempengaruhi kinerja ke depan, antara lain:

- Terbatasnya jumlah personil penegak Perda dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan.
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap beberapa Perda yang masih perlu ditingkatkan.

Alternatif Solusi yang Dilakukan

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Perda dan Perkada agar tingkat kepatuhan semakin tinggi.
2. Meningkatkan pengawasan rutin dan patroli wilayah guna mencegah terjadinya pelanggaran Perda.
3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait serta aparat keamanan dalam proses penegakan Perda.
4. Peningkatan kapasitas aparatur penegak Perda melalui pelatihan dan pembinaan teknis.

Dengan tercapainya target kinerja sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada pada Tahun 2025 berjalan efektif dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun upaya peningkatan pengawasan dan sosialisasi tetap perlu dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.

e. Analisis capaian kinerja pada indikator Persentase daerah yang terjangkau layanan telekomunikasi dan internet

Indikator persentase daerah yang terjangkau layanan telekomunikasi dan internet menggambarkan tingkat ketersediaan akses jaringan komunikasi dan internet pada wilayah kampung di Kabupaten Sarmi. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam mendukung konektivitas wilayah, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, pendidikan, serta akses informasi bagi masyarakat.

Pada tahun 2025, target persentase daerah yang terjangkau layanan telekomunikasi dan internet ditetapkan sebesar 37,23%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 48,91%. Realisasi tersebut diperoleh dari 45 kampung yang telah

terlayani jaringan komunikasi dan internet dari total 92 kampung di Kabupaten Sarmi.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai sekitar 131,38% dari target yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator ini telah melampaui target yang direncanakan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Tercapainya bahkan melampauinya target indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah kampung, seperti pembangunan menara BTS dan jaringan internet yang memperluas cakupan layanan komunikasi.
2. Dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet, khususnya di wilayah terpencil.
3. Kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi, yang turut mendukung perluasan jangkauan jaringan komunikasi dan internet.
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan internet, terutama untuk kegiatan pendidikan, pelayanan pemerintahan, dan aktivitas ekonomi.
5. Pengembangan layanan internet desa atau fasilitas komunikasi publik, yang membantu masyarakat dalam mengakses layanan digital.

Faktor Penghambat

Meskipun capaian telah melampaui target, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam perluasan layanan telekomunikasi dan internet, antara lain:

1. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Sarmi yang cukup luas dan sebagian sulit dijangkau, sehingga menyulitkan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
2. Keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti jaringan listrik dan akses transportasi ke beberapa kampung.

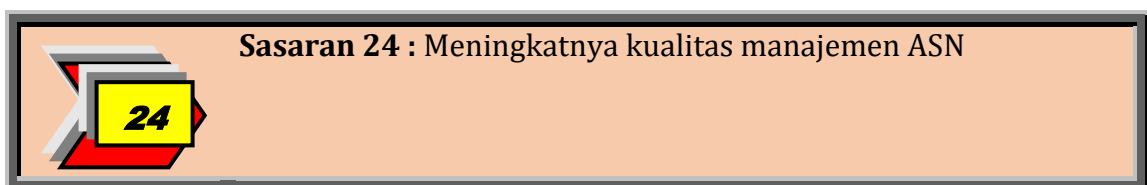
3. Biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang relatif tinggi, terutama pada wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.
4. Masih adanya kampung yang berada di wilayah terpencil, sehingga belum seluruhnya terjangkau jaringan komunikasi dan internet.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi dan internet di Kabupaten Sarmi, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, khususnya pada kampung yang belum terjangkau jaringan komunikasi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan penyedia layanan telekomunikasi, dalam rangka pengembangan jaringan di wilayah terpencil.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas internet yang telah tersedia, terutama untuk mendukung pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan masyarakat.
4. Melakukan pemetaan wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi, sebagai dasar perencanaan pengembangan jaringan pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian indikator persentase daerah yang terjangkau layanan telekomunikasi dan internet di Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena realisasi yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun upaya perluasan jaringan tetap perlu dilakukan agar seluruh kampung di Kabupaten Sarmi dapat terlayani jaringan komunikasi dan internet secara merata.



Untuk mencapai sasaran 24, ditetapkan 1 (satu) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja Indeks Merit Sistem belum dapat disajikan karena masih dalam penilaian KASN.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3.42

Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya kualitas manajemen ASN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	Predikat	50,6	Proses Evaluasi	0%
Capaian indikator kinerja rata-rata						0%

Indikator Indeks Merit Sistem merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penilaian ini meliputi beberapa aspek, antara lain perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan ASN, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, serta sistem penghargaan dan disiplin pegawai yang dilaksanakan secara objektif dan berbasis kompetensi.

Pada tahun 2025, target Indeks Merit Sistem ditetapkan sebesar 55,66. Namun hingga saat penyusunan laporan kinerja ini, realisasi capaian indikator belum tersedia, karena penilaian Indeks Merit Sistem belum dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang melakukan evaluasi. Penilaian terhadap penerapan sistem merit pada pemerintah daerah umumnya dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui proses evaluasi secara berkala.

Analisis Penyebab Belum Tersedianya Realisasi

Belum tersedianya nilai realisasi indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum dilaksanakannya proses penilaian atau evaluasi oleh KASN terhadap penerapan sistem merit pada tahun berjalan.

2. Penilaian Indeks Merit Sistem dilakukan secara periodik, sehingga tidak selalu dilaksanakan setiap tahun pada seluruh pemerintah daerah.
3. Proses pengumpulan dokumen dan eviden pendukung penerapan sistem merit masih dalam tahap persiapan atau verifikasi.
4. Penyesuaian kebijakan atau mekanisme evaluasi secara nasional, yang dapat mempengaruhi jadwal penilaian.

Dampak terhadap Pengukuran Kinerja

Belum tersedianya nilai realisasi indikator menyebabkan capaian kinerja pada indikator Indeks Merit Sistem tahun 2025 belum dapat diukur secara kuantitatif. Namun demikian, upaya peningkatan penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme aparatur.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerapan sistem merit antara lain:

1. Meningkatkan penerapan manajemen ASN berbasis kompetensi, khususnya dalam proses pengisian jabatan, promosi, dan mutasi pegawai.
2. Melakukan penataan sistem manajemen kepegawaian, termasuk perencanaan kebutuhan ASN dan pengembangan kompetensi pegawai.
3. Melengkapi dokumen dan eviden pendukung penerapan sistem merit, sebagai persiapan dalam proses penilaian oleh KASN.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam rangka evaluasi penerapan sistem merit di lingkungan pemerintah daerah.

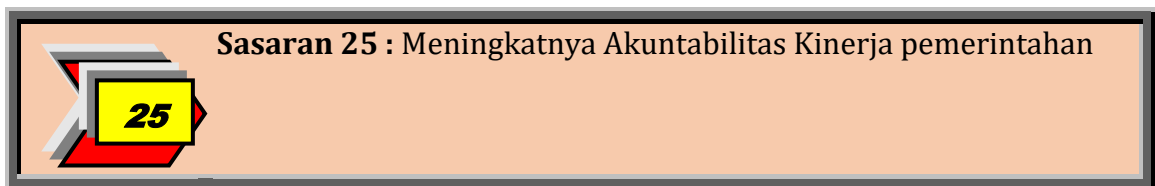
Rekomendasi Perbaikan

Untuk mendukung peningkatan nilai Indeks Merit Sistem pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memperkuat implementasi sistem merit dalam seluruh proses manajemen ASN, termasuk perencanaan, pengembangan karier, dan penilaian kinerja.

2. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola kepegawaian, melalui pelatihan dan penguatan kompetensi di bidang manajemen ASN.
3. Mengoptimalkan sistem informasi kepegawaian, guna mendukung pengelolaan data ASN yang lebih akurat dan terintegrasi.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan sistem merit, sebagai dasar perbaikan dalam pengelolaan ASN.

Secara keseluruhan, capaian indikator Indeks Merit Sistem tahun 2025 belum dapat disajikan, karena hasil penilaian resmi belum tersedia. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu melanjutkan upaya penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN agar pada saat dilakukan evaluasi oleh KASN, pemerintah daerah dapat memperoleh nilai yang lebih baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Untuk mencapai sasaran 25, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2024. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Sekretariat Daerah dan Seluruh OPD dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3.43

Pencapaian kinerja sasaran pada Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai LKJp Kabupaten	Skala Nilai	CC	Proses Evaluasi	Proses Evaluasi

Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan

Berdasarkan kondisi tersebut, upaya peningkatan dari nilai C ke CC pada Tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian, keberhasilan peningkatan tersebut masih sangat bergantung pada hasil evaluasi dari Kementerian PANRB.

Secara umum, belum optimalnya peningkatan nilai LKJIP disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja belum optimal, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan hasil kinerja yang terukur.
2. Kualitas indikator kinerja masih perlu ditingkatkan, agar lebih spesifik, terukur, dan relevan dengan sasaran strategis.
3. Analisis dalam dokumen LKJIP masih bersifat deskriptif, belum sepenuhnya berbasis evaluasi kinerja dan outcome.
4. Pemahaman dan komitmen perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP belum merata, sehingga kualitas dokumen kinerja masih bervariasi.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal, khususnya dalam memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Analisis Keberhasilan (Faktor Pendukung)

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang mendukung upaya peningkatan nilai LKJIP, antara lain:

1. Tersusunnya dokumen LKJIP secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Adanya koordinasi antar perangkat daerah, dalam penyusunan laporan kinerja.
3. Pengalaman capaian tahun sebelumnya (nilai C), yang menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.
4. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai SAKIP, yang ditunjukkan melalui penetapan target yang lebih tinggi.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan nilai LKJIP Kabupaten, beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan pembinaan SAKIP pada perangkat daerah, melalui rapat dan pendampingan teknis.
2. Perbaikan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, agar lebih terintegrasi.
3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pelaksanaan reviu internal oleh Inspektorat.
4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kinerja, melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
5. Penyesuaian indikator kinerja, agar lebih terukur dan sesuai dengan sasaran pembangunan.

Kesimpulan

Upaya peningkatan nilai LKJIP dari C pada Tahun 2024 menuju CC pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, keberhasilan peningkatan tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi Kementerian PANRB.

Untuk mencapai target yang diharapkan, diperlukan penguatan implementasi SAKIP secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek penyusunan dokumen, tetapi juga pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

**Sasaran 26 : Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah**

Untuk mencapai sasaran 26, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Badan

Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 88.94% dengan kategori “ Baik”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3.44

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Predikat	WTP	WDP	WDP
		Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	93.72	82.24	88.94%
Capaian indikator kinerja rata-rata						88.94%

a. Analisis Capaian pada Indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)

Indikator Opini atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan ukuran penting dalam menilai tingkat akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Opini tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2025, target opini atas laporan keuangan pemerintah daerah ditetapkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, realisasi yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain itu, dalam dua tahun terakhir pemerintah daerah juga masih memperoleh opini WDP, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Belum tercapainya target opini WTP dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang belum sepenuhnya tertib, sehingga masih ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan dan pengadministrasian aset.
2. Sistem pengendalian internal pemerintah yang belum optimal, terutama dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan pada perangkat daerah.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu ditingkatkan, sehingga masih terdapat beberapa temuan pemeriksaan.
4. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintahan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.
5. Belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga beberapa permasalahan masih berulang.

Dampak terhadap Kinerja Pemerintahan

Belum tercapainya opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan sistem pengendalian internal. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Melakukan penertiban dan inventarisasi aset daerah, guna memastikan kesesuaian antara pencatatan aset dan kondisi riil di lapangan.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pada setiap perangkat daerah.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, melalui pelatihan dan bimbingan teknis di bidang akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
4. Melakukan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sehingga temuan yang ada dapat segera diselesaikan.
5. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan, agar penyajian laporan keuangan dapat lebih akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Rekomendasi Perbaikan

Untuk mencapai target opini WTP pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan tertib administrasi dan penatausahaan aset daerah secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, khususnya dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sehingga permasalahan yang sama tidak terulang kembali.
5. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pada setiap perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang belum optimal, karena target WTP belum tercapai dan realisasi masih berada pada opini WDP. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah agar pada tahun-tahun mendatang pemerintah daerah dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

b. Analisis Capaian pada Indikator Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD

Indikator persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi antara program yang direncanakan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan arah kebijakan, sasaran, dan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar 93,72%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 82,24%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai sekitar 87,74% dari target yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator ini belum mencapai target yang direncanakan.

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Belum tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Masih adanya program dan kegiatan perangkat daerah yang belum sepenuhnya mengacu pada program prioritas dalam RPJMD, sehingga tingkat keselarasan perencanaan belum optimal.
2. Adanya penyesuaian kebijakan pembangunan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang menyebabkan beberapa program dalam RKPD mengalami perubahan atau penyesuaian.
3. Koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yang belum optimal, sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman dalam menerjemahkan sasaran RPJMD ke dalam program RKPD.
4. Keterbatasan pemahaman sebagian perangkat daerah terhadap keterkaitan antara sasaran, indikator, dan program dalam dokumen RPJMD, sehingga penyusunan program belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dampak terhadap Kinerja Pembangunan

Ketidaksesuaian antara program RKPD dengan RPJMD dapat berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran pembangunan daerah, karena program yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan keselarasan antara RKPD dan RPJMD, pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui forum koordinasi perencanaan dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tahun 2026.
2. Melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan program dan kegiatan perangkat daerah, agar lebih selaras dengan sasaran dan prioritas RPJMD tahun 2026-2030.
3. Mengoptimalkan peran perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan, dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap konsistensi dokumen perencanaan.
4. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap dokumen perencanaan pembangunan, khususnya RPJMD 2026-2030 sebagai pedoman utama pembangunan daerah.

Rekomendasi Perbaikan

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun-tahun mendatang antara lain:

1. Memperkuat proses verifikasi dan pengendalian program dalam RKPD, agar seluruh program benar-benar mendukung sasaran RPJMD.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana pada perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan program yang berbasis pada sasaran dan indikator kinerja daerah.
3. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi perencanaan daerah, guna memastikan keterkaitan antara program, kegiatan, dan sasaran pembangunan daerah.
4. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam proses perencanaan, sehingga tercipta keselarasan yang lebih baik antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Secara keseluruhan, capaian indikator persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD pada tahun 2025 masih belum mencapai target, sehingga diperlukan upaya peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan daerah

agar program yang dilaksanakan dapat lebih mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sasaran 27 : Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas

Untuk mencapai sasaran 27, ditetapkan 2 (dua) Indikator sasaran. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan tahun 2025. Sedangkan institusi yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sarmi dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 63.28% dengan kategori “Cukup”.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3.45

Pencapaian kinerja sasaran pada meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas	Maturitas SPIP	Level	Level3	Level 1	Level 1
		Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	85,00	53.79	63.28%
Capaian indikator kinerja rata-rata						63.28%

a. Analisis Capaian pada Indikator Maturitas SPIP

Indikator Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) menunjukkan tingkat kematangan penerapan sistem pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai instansi pembina SPIP nasional.

Pada tahun 2025, target Maturitas SPIP ditetapkan pada Level 3 (Terdefinisi). Namun berdasarkan hasil penilaian, realisasi yang dicapai masih berada pada Level 1 (Rintisan). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah masih berada pada tahap awal dan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Level 1 menggambarkan bahwa praktik pengendalian intern masih bersifat dasar dan belum terstruktur secara menyeluruh dalam proses manajemen organisasi, sedangkan Level 3 menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah terdefinisi dengan baik dan diterapkan secara konsisten pada seluruh perangkat daerah.

Analisis Penyebab Kegagalan / Rendahnya Capaian

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target maturitas SPIP antara lain:

1. Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah terhadap penerapan SPIP, sehingga implementasinya belum berjalan secara menyeluruh.
2. Dokumen dan perangkat pengendalian intern belum lengkap, seperti peta risiko, rencana tindak pengendalian, serta prosedur pengendalian intern pada masing-masing perangkat daerah.
3. Peran unit pengawasan internal belum optimal dalam melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penerapan SPIP.
4. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami pengendalian intern dan manajemen risiko.
5. Koordinasi antar perangkat daerah dalam penerapan SPIP belum berjalan secara maksimal.

Dampak Penurunan / Rendahnya Kinerja

Belum optimalnya penerapan SPIP dapat berdampak pada:

1. Kurangnya efektivitas pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Potensi terjadinya kesalahan administrasi maupun pengelolaan keuangan daerah.
3. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Alternatif Solusi dan Upaya yang Telah Dilakukan

Beberapa langkah yang telah dan perlu dilakukan untuk meningkatkan maturitas SPIP antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penerapan SPIP kepada seluruh perangkat daerah.

Gambar 3.36



Sosialisasi dan Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah dalam rangka memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mencegah korupsi dalam layanan publik, didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2. Menyusun dan melengkapi dokumen pengendalian intern, seperti peta risiko, rencana tindak pengendalian, serta standar operasional prosedur (SOP).

Gambar 3.37



Rapat Kerja Inspektorat daerah Kabupaten Sarmi Penyusunan SOP Pemanfaatan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan SOP Pemantauan Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut.

3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi SPIP.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mengenai pengendalian intern dan manajemen risiko.

Gambar 3.38



Pelatihan Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik
Bagi APIP di Wilayah Provinsi Papua

5. Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan unit pengawasan internal dalam penerapan SPIP secara berkelanjutan.

Capaian indikator Maturitas SPIP pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan, karena realisasi masih berada pada Level 1 dari target Level 3. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengendalian intern agar tingkat maturitas SPIP dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Analisis Capaian pada Indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Indikator persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal maupun internal pemerintah. Indikator ini penting untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat pengawasan internal.

Pada tahun 2025, target indikator persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan ditetapkan sebesar 85,00%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 53,79%. Dengan demikian tingkat capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 63,28%, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Analisis Penyebab Kegagalan / Rendahnya Capaian

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target indikator ini antara lain:

1. Masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, baik yang berkaitan dengan perbaikan administrasi maupun pengembalian kerugian daerah.
2. Koordinasi antar perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan belum berjalan secara optimal.

3. Sebagian rekomendasi membutuhkan proses penyelesaian yang cukup panjang, seperti penyelesaian dokumen administrasi atau proses hukum.
4. Keterbatasan sumber daya manusia pada perangkat daerah yang menangani tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Kurangnya pemahaman sebagian perangkat daerah terhadap mekanisme pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dampak Penurunan Kinerja

Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dapat berdampak pada:

1. Belum optimalnya perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
2. Potensi terulangnya temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya.
3. Menurunnya tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Alternatif Solusi / Upaya yang Telah Dilakukan

Beberapa upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pada setiap perangkat daerah.
2. Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelesaian tindak lanjut temuan.
3. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi kepada perangkat daerah terkait mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.
4. Mendorong komitmen pimpinan perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
5. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala agar proses pemantauan dapat berjalan lebih efektif.

a. Kesimpulan

Capaian indikator persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan, dimana realisasi hanya mencapai 53,79% dari target 85,00% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 63,28%. Oleh karena itu diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan fungsi pengawasan internal, serta komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

3.2.5. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 53 Program. Adapun pencapaian dari setiap program tersebut diuraikan dibawah ini :

Tabel 3.46

Pencapaian Dari Setiap Program

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	115.087.599.584,00	86.082.320.726,00	74,80
2.	Program Pembinaan Sejarah	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00
3.	Program Pengembangan Kesenian	522.751.642,00	379.998.080,00	72,69
4.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	229.901.850,00	229.901.850,00	100,00
5.	Program Pembinaan Perpustakaan	2.099.841.987,00	2.098.785.233,00	99,95
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	699.999.139,00	699.199.139,00	99,89
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusiakesehatan	1.100.000.000,00	1.085.000.000,00	98,64
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89.910.642.239,00	60.322.265.776,00	67,09



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

9.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.039.022.392,00	1.039.022.392,00	100,00
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	563.544.090,00	563.544.090,00	100,00
11.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.365.167.804,00	1.354.979.000,00	99,25
12.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	249.998.375,00	249.998.375,00	100,00
13.	Program Perlindungan Perempuan	149.999.328,00	147.773.328,00	98,52
14.	Program Penyelenggaraan Jalan	24.811.987.000,00	23.964.876.600,00	96,59
15.	Program Penyelenggaraan Jalan	1.350.000.000,00	1.324.500.000,00	98,11
16.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.763.566.504,00	4.691.999.944,00	98,50
17.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.040.000.000,00	1.039.930.000,00	99,99
18.	Program Pengembangan Perumahan	12.045.744.000,00	11.363.868.000,00	94,34
19.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.412.346.874,00	1.412.155.000,00	99,99
20.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.034.817.182,00	2.034.557.484,00	99,99
21.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	150.203.142,00	150.203.142,00	100,00
22.	Program Pengelolaan Persampahan	2.183.792.326,00	2.181.155.000,00	99,88
23.	Program Penanganan Bencana	136.255.407,00	136.255.407,00	100,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

24.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	224.800.000,00	224.800.000,00	100,00
25.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.788.089.500,00	4.788.089.500,00	100,00
26.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	904.027.000,00	896.527.000,00	99,17
27.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	329.755.000,00	329.755.000,00	100,00
28.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	399.990.000,00	399.990.000,00	100,00
29.	Program Penyuluhan Pertanian	2.323.294.210,00	2.227.293.910,00	95,87
30.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.289.137.253,00	2.289.137.253,00	100,00
31.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	899.967.578,00	899.967.578,00	100,00
32.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.301.016.381,00	1.298.604.381,00	99,81
33.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	102.954.000,00	102.935.000,00	99,98
34.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	102.741.625,00	102.628.000,00	99,89
35.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	103.978.875,00	103.795.000,00	99,82
36.	Program Hubungan Industrial	668.278.940,00	668.228.540,00	99,99
37.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	180.170.000,00	180.170.000,00	100,00
38.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.999.998.000,00	1.999.998.000,00	100,00
39.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	83.376.000,00	83.376.000,00	100,00
40.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	69.899.940,00	69.899.940,00	100,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

41.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) Dan Program Pengembangan Umkm	892.134.091,00	892.134.091,00	100,00
42.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32.049.375,00	32.000.000,00	99,85
43.	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	29.242.000,00	29.235.000,00	99,98
44.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.699.988.387,00	1.576.101.990,00	92,71
45.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.299.974.500,00	1.299.916.000,00	100,00
46.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.286.567.134,00	1.286.567.134,00	100,00
47.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	939.999.680,00	881.019.944,00	93,73
48.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.174.839.000,00	1.174.839.000,00	100,00
49.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	930.000.000,00	929.950.000,00	99,99
50.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.108.369.159,00	2.108.369.159,00	100,00
51.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	466.354.921,00	466.354.000,00	100,00
52.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.099.999.844,00	1.099.998.500,00	100,00
53.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	34.188.141,00	34.188.141,00	100,00
54.	Program Rehabilitasi Sosial	506.547.906,00	506.547.906,00	100,00
55.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	653.378.651,00	653.378.651,00	100,00
56.	Program Pemberdayaan Sosial	768.947.732,00	768.947.732,00	100,00

57.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	999.992.975,00	999.992.975,00	100,00
58.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	85.759.793,00	67.920.793,00	79,20
59.	Program Pendaftaran Penduduk	550.000.000,00	450.000.000,00	81,82
60.	Program Pencatatan Sipil	350.000.000,00	349.999.000,00	100,00
61.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	27.454.791.443,00	26.476.616.432,00	96,44
62.	Program Pembinaan Perpustakaan	499.962.675,00	499.961.903	100,00
63.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	299.974.921,00	299.974.921,00	
64.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	81.996.898,00	81.996.898,00	100,00
65.	Program Kepegawaian Daerah	1.403.081.870,00	1.403.080.000,00	100,00
66.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.680.873.212,00	1.399.968.500,00	83,29
67.	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	200000000	200000000	100,00
68.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	170.051.305.199,00	80.759.485.105,00	47,49
69.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.789.617.222,00	1.454.633.000,00	81,28
70.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.361.913.876,00	3.130.229.596,00	58,38
71.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.786.133.953,00	2.786.133.356,00	100,00
72.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.099.992.375,00	1.099.992.250,00	100,00
		508.421.632.100,00	354.502.015.645,00	69,73 %

Dari 72 program tersebut ditujukan untuk mencapai 53 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Sarmi Periode 2023-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung

ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke 53 Indikator Kinerja tersebut sebesar Rp. 508.421.632.100,00 dari total Anggaran Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun 2025

Berdasarkan data, tahun anggaran 2025 pada program utama yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja ke 53 indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 508.421.632.100,00 yang diserap sebesar Rp 354.502.015.645,00 dengan persentase capaian 69,73%

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi pemerintah daerah yang mempengaruhi capaian kinerja program dan indikator, antara lain:

1. Perencanaan program dan penganggaran:

Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan program dengan kebutuhan riil pencapaian indikator kinerja, sehingga berdampak pada rendahnya serapan anggaran (69,73%).

2. Kapasitas dan kualitas SDM

Keterbatasan kompetensi aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum maksimal.

3. Koordinasi antar perangkat daerah

Koordinasi dalam pelaksanaan program yang mendukung 53 indikator kinerja belum berjalan optimal, sehingga terjadi tumpang tindih atau ketidakefisienan kegiatan.

4. Pengendalian dan pengawasan internal

Mekanisme pengendalian pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif, sehingga terdapat kegiatan yang tidak terlaksana sesuai rencana.

5. Manajemen pelaksanaan kegiatan

Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan (proses pengadaan, administrasi, dan teknis) yang berdampak pada tidak terserapnya anggaran secara optimal.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi yang turut mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Kondisi geografis wilayah

Kabupaten Sarmi memiliki tantangan geografis yang cukup berat sehingga mempengaruhi aksesibilitas dan kelancaran pelaksanaan program di lapangan.

2. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan masih belum optimal, sehingga berdampak pada pencapaian indikator.

3. Kondisi ekonomi dan sosial Masyarakat

Keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program tertentu.

4. Kebijakan dan regulasi pusat

Adanya perubahan kebijakan/regulasi dari pemerintah pusat yang mempengaruhi pelaksanaan program daerah.

5. Ketersediaan data dan informasi

Keterbatasan data yang akurat dan terkini dalam mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja.

Efisiensi anggaran sebesar 69,73% menunjukkan bahwa terdapat sisa anggaran yang cukup signifikan, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, sehingga diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program agar capaian kinerja terhadap 53 indikator dapat lebih optimal.

Tabel analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja untuk tahun anggaran 2025, sebagai berikut



Tabel 3.47
Analisis Program yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian indikator kinerja untuk Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Satuan	Tahun 2025			Program	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
					Target	Realisasi	Capaian						
1	Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100	100	100	Program Pengelolaan Pendidikan	115.087.599.584,00	86.082.320.726,00	74,80	29.005.278.858,00	25,20
		2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	54,22	45	83	Program Pembinaan Sejarah	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	0,00	-
								Program Pengembangan Kesenian	522.751.642,00	379.998.080,00	72,69	0,00	27,31
								Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	229.901.850,00	229.901.850,00	100,00	0,00	-
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,11	9,79	88,12	Program Pengelolaan Pendidikan	115.087.599.584,00	86.082.320.726,00	74,80	29.005.278.858,00	25,20
		4	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	3,04	0,05	1,64	Program Pembinaan Perpustakaan	2.099.841.987,00	2.098.785.233,00	99,95	1.056.754,00	0,05
		5	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,61	70,25	103,90	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	699.999.139,00	699.199.139,00	99,89	800.000,00	0,11



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusiakesehatan	1.100.000.000,00	1.085.000.000,00	98,64	15.000.000,00	1,36
								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89.910.642.239,00	60.322.265.776,00	67,09	29.588.376.463,00	32,91
3	Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab tantangan era erubahan	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,2	72,81	100,84	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.039.022.392,00	1.039.022.392,00	100,00	0,00	-
		7	Persentase pemuda dalam pembangunan	Persen	40,66	6	14,6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	563.544.090,00	563.544.090,00	100,00	0,00	-
		8	Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Eaven	1	1	100	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.365.167.804,00	1.354.979.000,00	99,25	10.188.804,00	0,75
4	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	9	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	83,58	84,34	100,91	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	249.998.375,00	249.998.375,00	100,00	0,00	-
								Program Perlindungan Perempuan	149.999.328,00	147.773.328,00	98,52	2.226.000,00	1,48
5	Meningkatnya kualitas dana kuantitas jalan	10	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	19,75	10,21	51,44	Program Penyelenggaraan Jalan	24.811.987.000,00	23.964.876.600,00	96,59	847.110.400,00	3,41



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

	dan jembatan serta penataan drainase	11	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	44,01	40,29	91,55	Program Penyelenggaraan Jalan	1.350.000.000,00	1.324.500.000,00	98,11	25.500.000,00	1,89
6	Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak	12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persen	93,68	87,72	95,77	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.763.566.504,00	4.691.999.944,00	98,50	71.566.560,00	1,50
		13	Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Persen	78,76	87,72	95,77	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.040.000.000,00	1.039.930.000,00	99,99	70.000,00	0,01
7	Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	14	Rasio rumah layak huni	Persen	73,7	66,1	89,69	Program Pengembangan Perumahan	12.045.744.000,00	11.363.868.000,00	94,34	681.876.000,00	5,66
8	Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	15	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Per 1000 penduduk	4,61	1,22	27	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.412.346.874,00	1.412.155.000,00	99,99	191.874,00	0,01
		16	Arus pergerakan penumpang angkutan udara	Orang	520	678	130,38						
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	66,34	71,97	108,49	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.034.817.182,00	2.034.557.484,00	99,99	259.698,00	0,01
		18	Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	93,37	90,49	108,53						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

		19	Indeks kualitasutupan lahan (IKTL)	Indeks	100	100	100	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	150.203.142,00	150.203.142,00	100,00	0,00	-
10	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan	20	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	35	45	129	Program Pengelolaan Persampahan	2.183.792.326,00	2.181.155.000,00	99,88	2.637.326,00	0,12
		21	Ketersediaan TPA yang dikelola secara baik	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak ada	Tidak Ada						
11	Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana	22	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	90	0	0	Program Penanganan Bencana	136.255.407,00	136.255.407,00	100,00	0,00	-
		23	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)	Persen	100	100	100	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	224.800.000,00	224.800.000,00	100,00	0,00	-
12	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan perikanan	24	Kontribusi sector pertanian dan Peternakan dalam perekonomian wilayah	Persen	21,33	28,09	131,69	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.788.089.500,00	4.788.089.500,00	100,00	0,00	-
								Program Penyediaan Dan Pengembangan	904.027.000,00	896.527.000,00	99,17	7.500.000,00	0,83



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

								Prasarana Pertanian					
								Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	329.755.000,00	329.755.000,00	100,00	0,00	-
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	399.990.000,00	399.990.000,00	100,00	0,00	-
								Program Penyuluhan Pertanian	2.323.294.210,00	2.227.293.910,00	95,87	96.000.300,00	4,13
			Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Persen	53,42	28,09	52,58	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.289.137.253,00	2.289.137.253,00	100,00	0,00	-
								Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	899.967.578,00	899.967.578,00	100,00	0,00	-
								Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.301.016.381,00	1.298.604.381,00	99,81	2.412.000,00	0,19
13	Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah masyarakat	26	Nilai realisasi invetasi tahunan (PMA/PMDN)	Rp. Miliar	32,02	5,77	17,22	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	102.954.000,00	102.935.000,00	99,98	19.000,00	0,02
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	102.741.625,00	102.628.000,00	99,89	113.625,00	0,11
								Program Pengelolaan Data Dan Sistem	103.978.875,00	103.795.000,00	99,82	183.875,00	0,18



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

							Informasi Penanaman Modal						
		27	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,45	4,37	126,67	Program Hubungan Industrial	668.278.940,00	668.228.540,00	99,99	50.400,00	0,01
		28	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,12	10,57	80,56	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	180.170.000,00	180.170.000,00	100,00	0,00	-
								Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.999.998.000,00	1.999.998.000,00	100,00	0,00	-
								Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	83.376.000,00	83.376.000,00	100,00	0,00	-
		29	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	2,33	1,78	76,39	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	69.899.940,00	69.899.940,00	100,00	0,00	-
		30	Persentase UMKM dan IKM aktif	Persen	41	29,39	71,68	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) Dan Program Pengembangan Umk	892.134.091,00	892.134.091,00	100,00	0,00	-
		31	Persentase koperasi aktif	Persen	48,21	9,09	18,86	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32.049.375,00	32.000.000,00	99,85	49.375,00	0,15



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

								Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	29.242.000,00	29.235.000,00	99,98	7.000,00	0,02
14	Meningkatnya daya saing pariwisata	32	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	Persen	9,55	6,53	68,38	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.699.988.387,00	1.576.101.990,00	92,71	123.886.397,00	7,29
		33	Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)	Persen	2,1	16,71	795,21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.299.974.500,00	1.299.916.000,00	100,00	58.500,00	0,00
15	Meningkatnya pendapatan asli daerah	34	Peningkatan nilai PAD	Persen	1,86	-10,19	(547,85)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.286.567.134,00	1.286.567.134,00	100,00	0,00	-
16	Meningkatnya ketahanan pangan	35	Skor PPH	Skor	68,72	80,94	117,78	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	939.999.680,00	881.019.944,00	93,73	58.979.736,00	6,27
								Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.174.839.000,00	1.174.839.000,00	100,00	0,00	-
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	930.000.000,00	929.950.000,00	99,99	50.000,00	0,01



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata	36	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	50	0	0	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.108.369.159,00	2.108.369.159,00	100,00	0,00	-
18	Meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah	37	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	90	100	111	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	466.354.921,00	466.354.000,00	100,00	921,00	0,00
19	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik	38	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	Persen	100	100	100	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.099.999.844,00	1.099.998.500,00	100,00	1.344,00	0,00
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	34.188.141,00	34.188.141,00	100,00	0,00	-
20	Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	39	Persentase layanan rehabilitasi sosial	Persen	48,7	63,29	129,96	Program Rehabilitasi Sosial	506.547.906,00	506.547.906,00	100,00	0,00	-
		40	Persentase layanan pemberdayaan sosial	Persen	63,71	2,93	4,6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	653.378.651,00	653.378.651,00	100,00	0,00	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

21	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat	41	Cakupan layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Persen	38,69	29,41	76,02	Program Pemberdayaan Sosial	768.947.732,00	768.947.732,00	100,00	0,00	-
22	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	Indeks SPBE	Predikat	Cukup	1,53/ Kurang	Kurang	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	999.992.975,00	999.992.975,00	100,00	0,00	-
23	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	43	Tingkat cakupan layanan Administrasi kependudukan	Persen	82,38	80,06	97,19	Program Pendaftaran Penduduk	550.000.000,00	450.000.000,00	81,82	100.000.000,00	18,18
								Program Pencatatan Sipil	350.000.000,00	349.999.000,00	100,00	1.000,00	0,00
		44	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100	100	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	27.454.791.443,00	26.476.616.432,00	96,44	978.175.011,00	3,56
		45	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	77,24	19,07	25	Program Pembinaan Perpustakaan	499.962.675,00	499.961.903	100,00	772,00	0,00
		46	Persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	299.974.921,00	299.974.921,00	100,00	0,00	
		47	Persentase daerah yang terjangkau layanan telekomunikasi dan internet	Persen	73,23	48,91	131,38	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	81.996.898,00	81.996.898,00	100,00	0,00	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

24	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	48	Indeks Merit Sistem	Predikat	55,66	Proses Evaluasi	Proses Evaluasi	Program Kepegawaian Daerah	1.403.081.870,00	1.403.080.000,00	100,00	1.870,00	0,00
								Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.680.873.212,00	1.399.968.500,00	83,29	280.904.712,00	16,71
25	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	49	Nilai LKJp Kabupaten	Skala Nilai	CC	Proses Evaluasi	Proses Evaluasi	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah	200000000	200000000	100,00	0,00	-
26	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	50	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Predikat	WDP	WDP	WDP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	170.051.305.199,00	80.759.485.105,00	47,49	89.291.820.094,00	52,51
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.789.617.222,00	1.454.633.000,00	81,28	334.984.222,00	18,72
		51	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	93,72	82,24	87,75	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.361.913.876,00	3.130.229.596,00	58,38	2.231.684.280,00	41,62
27	Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas	52	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 1	Level 1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.786.133.953,00	2.786.133.356,00	100,00	597,00	0,00
		53	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	93,72	87,74	82,24	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.099.992.375,00	1.099.992.250,00	100,00	125,00	0,00
Rata-rata Capaian							82.45%		508.335.872.307,00	354.434.094.852,00	69,72	153.759.023.893,00	30,28

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 82.45 % dengan realisasi anggaran sebesar 69.72% dari pagu anggaran sebesar Rp. 508.335.872.307,00 dengan realisasi sebesar Rp. 354.434.094.852,00. Terdapat 63 program yang sudah mencapai target dan 9 yang belum mencapai target. Ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran, walaupun anggaran tidak mencapai 100% namun capaian kinerja di beberapa kegiatan sudah melampaui target yang diharapkan.

Adapun capaian kinerja dan Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan masing-masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya dengan Indikator Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dan Persentase Seni Budaya yang dilestarikan.

a. Analisis Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Indikator Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan

Pada Tahun 2025, indikator Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan ditetapkan sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sarmi telah mengimplementasikan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.087.599.584,00 dan realisasi sebesar Rp. 86.082.320.726,00 atau 74,80%.

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa aspek program yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Implementasi Program Pengelolaan Pendidikan secara menyeluruh

Program ini mencakup pengelolaan kurikulum, pembinaan tenaga pendidik, serta penguatan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter dan keagamaan di seluruh satuan pendidikan.

2. Integrasi Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran

Nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan toleransi telah diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler.

3. Pelaksanaan Pendidikan Keagamaan di Sekolah

Kegiatan keagamaan seperti pembinaan iman dan takwa, serta kegiatan rutin keagamaan di sekolah berjalan dengan baik dan merata.

4. Komitmen dan Peran Aktif Tenaga Pendidik

Guru dan tenaga kependidikan berperan aktif dalam menerapkan pendidikan karakter dan keagamaan dalam proses pembelajaran.

5. Dukungan Kebijakan dan Pembinaan dari Pemerintah Daerah

Adanya kebijakan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan yang mendorong seluruh satuan pendidikan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan keagamaan.

Efisiensi Anggaran

Meskipun capaian indikator mencapai 100%, tingkat realisasi anggaran sebesar 74,80% menunjukkan bahwa program dapat dilaksanakan secara efisien, tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang tersedia. Hal ini mengindikasikan adanya optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Cakupan satuan pendidikan yang relatif terjangkau untuk pembinaan
2. Kebijakan yang bersifat wajib bagi seluruh satuan pendidikan
3. Sinergi antara sekolah, guru, dan pemerintah daerah

4. Program yang bersifat rutin dan berkelanjutan

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas capaian ke depan, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas implementasi pendidikan karakter dan keagamaan, tidak hanya pada aspek keterlaksanaan tetapi juga pada dampaknya terhadap perilaku peserta didik.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, guna memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan di setiap satuan pendidikan.
3. Meningkatkan kapasitas guru dalam pendidikan karakter, melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
4. Mengembangkan inovasi program pendidikan karakter dan keagamaan, agar lebih menarik dan relevan bagi peserta didik.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, sehingga capaian tidak hanya efektif tetapi juga semakin efisien.

Kesimpulan

Keberhasilan capaian indikator sebesar 100% menunjukkan bahwa Program Pengelolaan Pendidikan telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mendorong seluruh satuan pendidikan menerapkan pendidikan karakter dan keagamaan. Ke depan, fokus perlu diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi dan dampak nyata terhadap pembentukan karakter peserta didik.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Indikator Persentase Seni Budaya yang dilestarikan.

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan ditetapkan sebesar 48,99%, dengan realisasi sebesar 45%, sehingga capaian kinerja mencapai 83%. Meskipun belum sepenuhnya

mencapai target, kinerja indikator ini tergolong cukup baik dan menunjukkan adanya upaya nyata dalam pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Sarmi.

Pencapaian indikator ini didukung oleh dua program utama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi, yaitu:

1. Program Pengembangan Kesenian
 - Anggaran: Rp.522.751.642,00
 - Realisasi: Rp.379.998.080,00 (72,70%)
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Anggaran: Rp.229.901.850,00
 - Realisasi: Rp.229.901.850,00 (100%)

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa program/kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian indikator antara lain:

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Kesenian

Program ini mendukung pelestarian seni budaya melalui kegiatan pembinaan, pertunjukan seni, serta fasilitasi kelompok seni di masyarakat. Walaupun realisasi anggaran belum optimal (72,70%), program ini tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelestarian seni budaya.

2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini berjalan optimal dengan realisasi anggaran mencapai 100%, yang mendukung upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan objek cagar budaya. Keberhasilan program ini menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya daerah.

3. Keterlibatan Masyarakat dan Komunitas Budaya

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya turut mendukung upaya pelestarian, baik melalui kegiatan adat, pertunjukan, maupun tradisi lokal.

4. Dukungan Pemerintah Daerah

Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pelestarian budaya melalui kebijakan dan penganggaran.

Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Capaian

Meskipun capaian cukup baik, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan target belum tercapai sepenuhnya:

1. Realisasi anggaran Program Pengembangan Kesenian belum maksimal, sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana secara optimal.
2. Terbatasnya jangkauan kegiatan pelestarian seni budaya, terutama di wilayah terpencil.
3. Masih kurangnya pendataan dan inventarisasi seni budaya secara menyeluruh, sehingga belum semua potensi budaya terakomodasi.
4. Keterbatasan SDM dan pelaku seni budaya, khususnya generasi muda yang terlibat dalam pelestarian budaya.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Program Pengembangan Kesenian, termasuk peningkatan serapan anggaran agar seluruh kegiatan dapat terlaksana.
2. Memperluas cakupan kegiatan pelestarian seni budaya, terutama di kampung dan distrik.
3. Melakukan pendataan dan inventarisasi seni budaya secara komprehensif, sebagai dasar perencanaan program.
4. Meningkatkan pembinaan dan pelibatan generasi muda, agar keberlanjutan seni budaya tetap terjaga.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan komunitas budaya dan lembaga adat, dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya.

Kesimpulan

Program yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian indikator Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan, meskipun belum mencapai target secara penuh. Dengan optimalisasi pelaksanaan program, peningkatan cakupan kegiatan, serta penguatan peran masyarakat, diharapkan capaian indikator dapat meningkat dan mencapai target pada tahun mendatang.

Sasaran 2: Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dengan Indikator Rata-Rata Lama Sekolah, Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Dan Angka Harapan Hidup

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada Indikator Rata-Rata Lama Sekolah

Pada Tahun 2025, target indikator Rata-Rata Lama Sekolah ditetapkan sebesar 11,11 tahun, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 9,79 tahun, sehingga capaian kinerja mencapai 88,12%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.087.599.584,00 dan realisasi sebesar Rp86.082.320.726,00 atau 74,80%.

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa aspek program yang berkontribusi terhadap capaian indikator antara lain:

1. Pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan
Program ini mencakup pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, peningkatan akses pendidikan, serta dukungan operasional satuan pendidikan yang berkontribusi terhadap peningkatan lama sekolah masyarakat.

2. Penyediaan layanan pendidikan yang lebih merata
Upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, termasuk di wilayah distrik dan kampung, turut mendukung peningkatan partisipasi sekolah.
3. Dukungan pembiayaan pendidikan
Bantuan operasional sekolah dan program bantuan pendidikan lainnya membantu mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
Penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai mendorong keberlanjutan pendidikan peserta didik.
5. Komitmen pemerintah daerah dalam sektor pendidikan
Alokasi anggaran yang cukup besar menunjukkan prioritas pembangunan di bidang pendidikan.

Faktor yang Mempengaruhi Belum Tercapainya Target

Meskipun capaian cukup tinggi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan target belum tercapai, antara lain:

1. Realisasi anggaran belum optimal (74,80%), sehingga beberapa program/kegiatan belum terlaksana secara maksimal.
2. Masih adanya angka putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah.
3. Akses pendidikan di wilayah terpencil masih terbatas, baik dari sisi jarak maupun fasilitas.
4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
5. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan, khususnya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian indikator ke depan, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan, terutama peningkatan serapan anggaran agar seluruh kegiatan dapat berjalan maksimal.
2. Menekan angka putus sekolah, melalui program bantuan pendidikan dan intervensi khusus bagi kelompok rentan.
3. Meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil, melalui penyediaan sarana transportasi, asrama, atau sekolah satu atap.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, melalui sosialisasi dan pendekatan kepada orang tua.
5. Memperkuat program pendidikan nonformal dan kesetaraan, bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal.

Kesimpulan

Program yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah, namun belum sepenuhnya mencapai target. Dengan optimalisasi pelaksanaan program, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta penguatan dukungan sosial, diharapkan capaian indikator ini dapat meningkat dan mencapai target pada tahun-tahun berikutnya.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada Indikator Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan ditetapkan sebesar 3,04%, sedangkan realisasi mencapai 245%, sehingga capaian kinerja sangat tinggi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan di Kabupaten Sarmi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarmi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.099.841.987,00 dan realisasi sebesar Rp 2.099.841.987,00 atau 100%.

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa aspek program yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian indikator antara lain:

1. Optimalisasi Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilaksanakan secara maksimal dengan tingkat realisasi anggaran 100%, sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

2. Peningkatan layanan perpustakaan

Perbaikan dan pengembangan layanan, baik di perpustakaan daerah maupun melalui layanan perpustakaan keliling, meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan.

3. Kegiatan literasi dan promosi minat baca

Pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, kampanye gemar membaca, dan kunjungan perpustakaan ke sekolah-sekolah mendorong peningkatan jumlah pengunjung.

4. Ketersediaan sarana perpustakaan

Adanya perpustakaan daerah dan layanan perpustakaan mobile turut memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

5. Dukungan anggaran yang optimal

Realisasi anggaran yang mencapai 100% menunjukkan bahwa program dilaksanakan secara efektif dan sesuai perencanaan.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi
2. Kemudahan akses layanan melalui perpustakaan keliling
3. Sinergi antara perpustakaan dan satuan pendidikan
4. Pelaksanaan program yang terencana dan tepat sasaran

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ke depan, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik dari sisi koleksi maupun fasilitas.
2. Memperluas jangkauan layanan perpustakaan keliling, terutama ke wilayah terpencil.
3. Mengembangkan inovasi layanan perpustakaan berbasis digital, guna menjangkau lebih banyak pengguna.
4. Meningkatkan kegiatan literasi secara berkelanjutan, khususnya bagi pelajar dan masyarakat umum.
5. Memperkuat kerja sama dengan sekolah dan komunitas, dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

Kesimpulan

Program Pembinaan Perpustakaan telah dilaksanakan secara optimal dan efektif, sehingga mampu mendorong peningkatan kunjungan perpustakaan secara signifikan dan melampaui target yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga tren positif ini serta meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di Kabupaten Sarmi.

c. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada Angka Harapan Hidup

Pada Tahun 2025, target Angka Harapan Hidup sebesar 67,61 tahun dan terealisasi 70,25 tahun, sehingga capaian kinerja mencapai 103,90%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena melampaui target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi, yaitu:

Rincian Anggaran dan Realisasi

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- Anggaran: Rp699.999.139,00
 - Realisasi: Rp699.199.139,00
 - Serapan: 99,89%
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
- Anggaran: Rp1.100.000.000,00
 - Realisasi: Rp1.085.000.000,00
 - Serapan: 98,64%
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
- Anggaran: Rp89.910.642.239,00
 - Realisasi: Rp60.322.265.776,00
 - Serapan: 67,09%
- Total Anggaran : Rp. 91.710.641.378,00
Total Realisasi : Rp. 62.106.464.915,00
Tingkat Efisiensi (Serapan): ± 67,73%

Analisis Efisiensi

Capaian kinerja yang melebihi target (103,90%) dengan tingkat serapan anggaran sebesar 67,73% menunjukkan bahwa pelaksanaan program tergolong efisien. Artinya, dengan penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap, indikator kinerja tetap dapat tercapai bahkan melampaui target.

Interpretasi Efisiensi:

- Efektivitas tinggi: Target terlampaui secara signifikan.
- Efisiensi anggaran: Output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan sumber daya yang digunakan.
- Optimalisasi program prioritas: Program dengan serapan tinggi (pemberdayaan masyarakat dan peningkatan SDM) memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan angka harapan hidup.

Program yang Paling Berkontribusi

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Memberikan dampak langsung melalui pendekatan promotif dan preventif (penyuluhan, posyandu, PHBS), dengan serapan hampir 100%.
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
Meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui tenaga kesehatan yang lebih kompeten.
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Walaupun serapan belum optimal, program ini tetap menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat.

Faktor Pendukung Efisiensi

1. Fokus pada program promotif dan preventif yang relatif berbiaya rendah namun berdampak besar
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan tanpa membutuhkan tambahan biaya besar
3. Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang sudah ada secara optimal
4. Sinergi program pusat dan daerah (misalnya program kesehatan nasional)

Hal yang Perlu Diperhatikan

- Serapan anggaran pada program pelayanan kesehatan masih belum optimal (67,09%), sehingga masih terdapat ruang peningkatan kualitas layanan.
- Efisiensi perlu tetap dijaga tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Rekomendasi

1. Mengoptimalkan serapan anggaran, khususnya pada program pelayanan kesehatan
2. Mempertahankan program promotif dan preventif sebagai strategi utama
3. Meningkatkan pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil
4. Melakukan evaluasi efisiensi program secara berkala, untuk memastikan kualitas tetap terjaga
5. Mengalokasikan anggaran berbasis kinerja, agar lebih tepat sasaran

Kesimpulan

Capaian indikator Angka Harapan Hidup Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat efektif dan efisien, dimana target terlampaui (103,90%) dengan tingkat penggunaan anggaran hanya 67,73%. Hal ini mengindikasikan bahwa program kesehatan telah dilaksanakan dengan baik dan optimal, namun masih terdapat peluang peningkatan pada sisi pemanfaatan anggaran dan pemerataan layanan.

Sasaran 3: Meningkatnya SDM Yang Unggul Dan Produktif Dalam Menjawab Tantangan Era Perubahan Dengan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olah Raga Pada Event Kabupaten, Provinsi Dan Nasional

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada Tahun 2025, target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditetapkan sebesar 72,20%, sedangkan realisasi mencapai 72,81%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,84%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator telah tercapai dan sedikit melampaui target, yang mencerminkan meningkatnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Sarmi.

Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan program pada perangkat daerah, yaitu:

Program Pendukung

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Anggaran: Rp1.039.022.392,00
- Realisasi: Rp1.039.022.392,00
- Serapan: 100%

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa aspek program yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian indikator antara lain:

1. Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berbasis Kebutuhan:

Program pelatihan kerja memberikan keterampilan teknis kepada masyarakat usia kerja, sehingga meningkatkan kesiapan mereka untuk masuk ke dunia kerja atau membuka usaha mandiri.

2. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja:

Kegiatan peningkatan produktivitas membantu tenaga kerja menjadi lebih kompetitif dan mampu terserap dalam pasar kerja.

3. Realisasi Anggaran yang Optimal (100%):

Seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja.

4. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Bekerja:

Program pelatihan dan pemberdayaan turut mendorong masyarakat usia produktif untuk aktif dalam kegiatan ekonomi.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Ketersediaan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja
2. Dukungan anggaran yang optimal dan tepat sasaran
3. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan kerja
4. Meningkatnya peluang usaha mandiri dan sektor informal

Analisis Efisiensi

Dengan capaian kinerja sebesar 100,84% dan tingkat serapan anggaran 100%, maka pelaksanaan program dapat dikategorikan sebagai efektif, karena target tercapai bahkan melampaui rencana.

Namun dari sisi efisiensi:

- Program tergolong cukup efisien, karena output (peningkatan TPAK) sebanding dengan penggunaan anggaran.

- Tidak terdapat sisa anggaran, sehingga seluruh sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ke depan, perlu dilakukan:

1. Meningkatkan kualitas dan variasi pelatihan kerja, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
2. Memperluas jangkauan peserta pelatihan, khususnya bagi pencari kerja di wilayah terpencil.
3. Mendorong kewirausahaan dan usaha mandiri, sebagai alternatif penyerapan tenaga kerja.
4. Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta, untuk membuka peluang kerja yang lebih luas.
5. Melakukan monitoring terhadap lulusan pelatihan, untuk memastikan mereka terserap di pasar kerja.

Kesimpulan

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dengan capaian yang melampaui target (100,84%) dan didukung oleh realisasi anggaran yang optimal. Ke depan, peningkatan kualitas program dan perluasan cakupan akan menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan capaian indikator secara berkelanjutan.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Persentase pemuda dalam Pembangunan

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase Pemuda dalam Pembangunan ditetapkan sebesar 40,66%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 6%, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 14,60%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja indikator masih sangat rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Pendukung

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- Anggaran: Rp563.544.090,00
- Realisasi: Rp563.544.090,00
- Serapan: 100%

Analisis Program yang Menunjang (dan Keterbatasannya)

Meskipun capaian indikator rendah, program yang dilaksanakan tetap memberikan kontribusi, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda

Program ini memberikan pelatihan, pembinaan, dan fasilitasi bagi pemuda untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing.

2. Dukungan penuh anggaran (100%)

Seluruh kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengembangan kepemudaan.

3. Adanya wadah organisasi kepemudaan

Keberadaan organisasi seperti Pramuka, KNPI, dan Karang Taruna menjadi sarana partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Namun demikian, program tersebut belum mampu mendorong peningkatan capaian indikator secara signifikan, yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam efektivitas program.

Faktor Penyebab Rendahnya Capaian

1. Cakupan program masih terbatas Program belum menjangkau seluruh pemuda di wilayah Kabupaten Sarmi.

2. Partisipasi pemuda masih rendah Tidak semua pemuda terlibat dalam kegiatan pembangunan maupun organisasi kepemudaan.
3. Kegiatan belum berdampak langsung pada indikator Program lebih berfokus pada pelatihan, namun belum diikuti dengan keterlibatan nyata dalam pembangunan.
4. Minimnya wadah dan kegiatan yang berkelanjutan Kegiatan kepemudaan masih bersifat sporadis dan belum terstruktur secara berkelanjutan.
5. Kurangnya integrasi lintas sektor Peran pemuda dalam pembangunan belum terintegrasi dengan program OPD lain.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

- Efektivitas rendah:

Meskipun anggaran terserap 100%, capaian indikator hanya 14,60%, menunjukkan bahwa program belum efektif dalam mencapai target.

- Efisiensi kurang optimal:

Penggunaan anggaran belum menghasilkan output yang sebanding dengan target yang ditetapkan.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Memperluas cakupan program kepemudaan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
2. Mengintegrasikan program kepemudaan dengan sektor lain (pendidikan, ekonomi, sosial) agar keterlibatan pemuda lebih luas.
3. Mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan pembangunan nyata, bukan hanya pelatihan.
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas organisasi kepemudaan, sebagai wadah partisipasi.
5. Melakukan evaluasi program berbasis hasil (outcome), bukan hanya kegiatan (output).
6. Mengembangkan program kewirausahaan pemuda, untuk meningkatkan peran dalam pembangunan ekonomi.

Kesimpulan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan telah dilaksanakan secara optimal dari sisi anggaran (100%), namun belum efektif dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Pemuda dalam Pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, perluasan cakupan, serta peningkatan kualitas program agar keterlibatan pemuda dalam pembangunan dapat meningkat secara signifikan.

c. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Indikator Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional

Pada Tahun 2025, target indikator Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional ditetapkan sebesar 1 event, dan terealisasi sebesar 1 event, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai sesuai rencana.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Pendukung

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- Anggaran: Rp1.365.167.804,00
- Realisasi: Rp1.354.979.000,00
- Serapan: 99,25%

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa aspek program yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian indikator antara lain:

1. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Program ini mendukung peningkatan kemampuan atlet melalui latihan, seleksi, dan pembinaan cabang olahraga secara terarah.

2. Fasilitasi Keikutsertaan dalam Event Olahraga Dukungan pembiayaan dan fasilitasi keikutsertaan atlet dalam event olahraga menjadi faktor utama tercapainya target.
3. Dukungan terhadap Cabang Olahraga (Cabor) Pembinaan melalui organisasi cabang olahraga (seperti FORKI dan lainnya) membantu meningkatkan kesiapan atlet dalam mengikuti kompetisi.
4. Realisasi Anggaran yang Optimal Tingkat serapan anggaran yang tinggi (99,25%) menunjukkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai perencanaan.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan olahraga
2. Ketersediaan atlet yang siap bertanding
3. Koordinasi yang baik antara Dispora dan organisasi olahraga
4. Pelaksanaan program yang terencana dan tepat sasaran

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

- Efektivitas:
Program dinilai efektif, karena target indikator tercapai 100% sesuai dengan yang direncanakan.
- Efisiensi:
Dengan capaian 100% dan serapan anggaran 99,25%, program tergolong cukup efisien, karena output yang dihasilkan sebanding dengan penggunaan anggaran.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian kinerja ke depan, perlu dilakukan:

1. Meningkatkan jumlah partisipasi event olahraga, tidak hanya 1 event tetapi lebih banyak event di berbagai tingkatan.
2. Meningkatkan kualitas prestasi atlet, tidak hanya keikutsertaan tetapi juga perolehan medali.

3. Memperluas pembinaan cabang olahraga prioritas, agar menghasilkan atlet berprestasi secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga, untuk mendukung latihan atlet.
5. Meningkatkan dukungan anggaran secara proporsional, sesuai dengan target peningkatan prestasi.

Kesimpulan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan telah berhasil mendukung pencapaian indikator secara optimal (100%), dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi. Ke depan, fokus perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas prestasi olahraga agar tidak hanya mencapai target, tetapi juga memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan olahraga di Kabupaten Sarmi.

Sasaran 4: Optimalnya Pengarusutamaan Gender Dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Indikator Indeks Pembangunan Gender

Pada Tahun 2025, target indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditetapkan sebesar 83,58, sedangkan realisasi mencapai 84,34, sehingga capaian kinerja sebesar 100,91%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan gender di Kabupaten Sarmi telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan adanya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Pendukung

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Anggaran: Rp249.998.375,00
- Realisasi: Rp249.998.375,00
- Serapan: 100%

2. Program Perlindungan Perempuan

- Anggaran: Rp149.999.328,00
- Realisasi: Rp147.773.328,00
- Serapan: 98,52%

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa aspek program yang berkontribusi terhadap keberhasilan capaian indikator antara lain:

1. Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG)

Program ini mendorong integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program pembangunan, sehingga perempuan memperoleh akses, partisipasi, dan manfaat yang lebih setara.

2. Pemberdayaan Perempuan di Berbagai Sektor

Kegiatan peningkatan kapasitas perempuan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan.

3. Program Perlindungan Perempuan

Upaya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan diskriminasi memberikan rasa aman serta mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan.

4. Realisasi Anggaran yang Optimal

Tingkat serapan anggaran yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa program/kegiatan dilaksanakan secara maksimal sesuai perencanaan.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender
2. Sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program gender
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender
4. Pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara berkelanjutan

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

- Efektivitas:
Program dinilai sangat efektif, karena capaian indikator melampaui target (100,91%).
- Efisiensi:
Dengan serapan anggaran sebesar $\pm 99,45\%$ dan capaian yang melebihi target, program dapat dikategorikan efisien, karena hasil yang dicapai sebanding bahkan lebih tinggi dari sumber daya yang digunakan.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Memperluas implementasi pengarusutamaan gender di seluruh OPD, agar dampaknya lebih merata.
2. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi perempuan, untuk memperkuat kemandirian perempuan.
3. Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, terutama di wilayah terpencil.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program gender, agar keberlanjutan program terjaga.
5. Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan.

Kesimpulan

Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan telah berhasil mendukung pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender secara optimal, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Ke depan,

diperlukan penguatan program secara berkelanjutan agar kesetaraan gender semakin meningkat dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi.

Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jalan Dan Jembatan Serta Penataan Drainase Dengan Indikator Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap, Presentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada indikator presentase jalan dalam kondisi mantap

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase jalan dalam kondisi mantap ditetapkan sebesar 19,75%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 10,16%, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 51,44%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi jalan mantap di Kabupaten Sarmi belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Pendukung

Program Penyelenggaraan Jalan

- Anggaran: Rp24.811.987.000,00
- Realisasi: Rp23.964.876.600,00
- Serapan: 96,58%

Analisis Program yang Menunjang (dan Keterbatasannya)

Beberapa kontribusi program terhadap capaian indikator antara lain:

1. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan

Program ini mencakup peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten yang secara langsung berpengaruh terhadap kondisi kemantapan jalan.

2. Realisasi anggaran yang tinggi

Tingkat serapan anggaran mencapai 96,58%, menunjukkan bahwa kegiatan fisik telah dilaksanakan secara optimal.

3. Prioritas pada ruas jalan tertentu

Penanganan difokuskan pada ruas prioritas sehingga memberikan dampak peningkatan kondisi jalan, meskipun belum merata.

Namun demikian, capaian indikator masih rendah, yang menunjukkan bahwa:

- Volume pekerjaan belum mampu meningkatkan persentase jalan mantap secara signifikan
- Kebutuhan penanganan jalan masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian hanya 51,44% dari target
- Menunjukkan bahwa program belum efektif dalam mencapai target kinerja

Efisiensi

- Serapan anggaran: 96,58%
- Sisa anggaran (efisiensi):
$$Rp. 24.811.987.000 - Rp. 23.964.876.600 = Rp. 847.110.400$$
- Tingkat efisiensi anggaran: $\pm 3,42\%$

Interpretasi

- Dari sisi keuangan, program tergolong cukup efisien (serapan tinggi)
- Namun dari sisi kinerja, belum efektif, karena output (jalan mantap) belum sesuai target

Faktor Penyebab Rendahnya Capaian

1. Keterbatasan anggaran dibandingkan panjang jalan yang harus ditangani

2. Kondisi geografis dan cuaca yang mempengaruhi kualitas dan kecepatan pekerjaan
3. Kerusakan jalan yang cukup berat sehingga membutuhkan biaya besar
4. Belum meratanya penanganan jalan di seluruh wilayah
5. Fokus kegiatan lebih pada pemeliharaan dibanding peningkatan jalan mantap

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan peningkatan jalan
2. Menentukan prioritas penanganan berbasis kondisi jalan agar lebih tepat sasaran
3. Meningkatkan kualitas perencanaan teknis, agar hasil pekerjaan lebih optimal dan tahan lama
4. Mengoptimalkan pemeliharaan rutin, untuk mencegah kerusakan berat
5. Mendorong dukungan dari pemerintah provinsi/pusat, untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan

Kesimpulan

Program Penyelenggaraan Jalan telah dilaksanakan dengan serapan anggaran tinggi (96,58%) dan relatif efisien dari sisi keuangan, namun belum efektif dalam mencapai target kinerja, dengan capaian hanya 51,44%. Diperlukan peningkatan anggaran, perencanaan yang lebih tepat, serta penanganan yang lebih terfokus agar kondisi jalan mantap dapat meningkat secara signifikan pada tahun berikutnya.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Indikator Presentase Jembatan dalam kondisi baik

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase jembatan dalam kondisi baik ditetapkan sebesar 44,01%, sedangkan realisasi mencapai 40,29%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 91,55%. Hal ini menunjukkan

bahwa kinerja sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Program Pendukung

Pencapaian indikator ini didukung oleh:

Program Penyelenggaraan Jalan

- Anggaran: Rp. 1.350.000.000,00
- Realisasi: Rp. 1.350.000.000,00
- Serapan: 100%

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa kontribusi program terhadap capaian indikator antara lain:

1. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan

Kegiatan dalam program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kondisi jembatan menjadi baik.

2. Realisasi anggaran optimal (100%)

Seluruh anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara penuh untuk kegiatan fisik.

3. Fokus pada jembatan prioritas

Penanganan difokuskan pada jembatan dengan kondisi rusak sedang hingga berat, sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan persentase jembatan baik.

4. Konsistensi pelaksanaan kegiatan

Seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target fisik.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian kinerja: 91,55%

- Menunjukkan bahwa program cukup efektif, namun masih terdapat gap sebesar 8,45% dari target

Efisiensi

- Serapan anggaran: 100%
- Sisa anggaran: $Rp. 1.350.000.000 - Rp. 1.350.000.000 = Rp. 0$
Tingkat efisiensi: 0%

Interpretasi

- Dari sisi keuangan, program tidak memiliki efisiensi anggaran karena seluruh anggaran terserap
- Namun dari sisi output, capaian belum 100%, sehingga masih perlu peningkatan efektivitas pelaksanaan

Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target

1. Keterbatasan anggaran dibanding jumlah jembatan yang perlu ditangani
2. Kondisi kerusakan jembatan yang beragam, termasuk kerusakan berat yang membutuhkan biaya besar
3. Faktor geografis dan aksesibilitas, yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan
4. Prioritas penanganan terbatas pada jembatan tertentu, sehingga belum menjangkau seluruh kebutuhan
5. Keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Meningkatkan alokasi anggaran khusus penanganan jembatan
2. Memperkuat perencanaan berbasis kondisi jembatan, agar penanganan lebih tepat sasaran
3. Mengoptimalkan pemeliharaan rutin, untuk menjaga kondisi jembatan tetap baik

4. Meningkatkan kualitas konstruksi, agar umur layanan jembatan lebih panjang
5. Mendorong dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi/pusat

Kesimpulan

Program Penyelenggaraan Jalan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kondisi jembatan dengan capaian 91,55%, sehingga tergolong cukup efektif. Namun, meskipun serapan anggaran mencapai 100%, capaian belum maksimal, sehingga diperlukan peningkatan perencanaan, prioritas penanganan, serta dukungan anggaran untuk mencapai target secara penuh pada tahun berikutnya.

Sasaran 6: Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi Layak Dengan Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Persentase Penduduk Yang Memiliki Sanitasi Layak

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan pada Indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 93,68%, dengan realisasi sebesar 89,72%, sehingga capaian kinerja mencapai 95,77%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sudah baik dan mendekati target, meskipun masih terdapat selisih sebesar 3,96% yang perlu ditingkatkan.

Program Pendukung

Pencapaian indikator ini didukung oleh:

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

- Anggaran: Rp4.763.566.504,00
- Realisasi: Rp4.691.999.944,00
- Serapan: 98,50%

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung capaian indikator antara lain:

1. Pengembangan dan peningkatan jaringan SPAM

Pembangunan dan rehabilitasi jaringan air minum meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

2. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada

Sistem yang sudah terbangun dimanfaatkan secara maksimal untuk memperluas akses layanan.

3. Tingginya realisasi anggaran (98,50%)

Menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan fisik dan nonfisik dapat dilaksanakan sesuai rencana.

4. Fokus pada wilayah prioritas layanan dasar

Intervensi difokuskan pada daerah dengan keterbatasan akses air minum.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 95,77%
- Menunjukkan program sudah efektif, walaupun belum mencapai target 100%

Efisiensi

- Sisa anggaran: $Rp4.763.566.504 - Rp4.691.999.944 = Rp71.566.560$
- Tingkat efisiensi: $\pm 1,50\%$

Interpretasi

- Program tergolong efisien dengan serapan tinggi dan sisa anggaran relatif kecil
- Output yang dihasilkan juga tinggi, sehingga program dapat dikategorikan cukup optimal

Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target

1. Sebaran wilayah yang sulit dijangkau (geografis)
2. Keterbatasan jaringan distribusi air minum di beberapa wilayah

3. Kondisi sumber air yang belum merata atau terbatas
4. Kapasitas pengelolaan SPAM yang belum optimal di beberapa lokasi
5. Pertumbuhan jumlah penduduk yang mempengaruhi cakupan layanan

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Perluasan jaringan SPAM ke wilayah yang belum terlayani
2. Peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air minum
3. Penguatan kelembagaan pengelola (UPTD/SPAM kampung)
4. Optimalisasi pemeliharaan infrastruktur air minum
5. Kolaborasi dengan pemerintah pusat/provinsi untuk pendanaan tambahan

Kesimpulan

Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM telah berjalan efektif dan efisien, dengan capaian kinerja 95,77% dan tingkat efisiensi anggaran sekitar 1,50%. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan cakupan layanan agar target dapat tercapai sepenuhnya pada tahun berikutnya, terutama melalui perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas layanan air minum.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 78,76%, sedangkan realisasi mencapai 88,50%, sehingga capaian kinerja sebesar 112,36%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sangat berhasil (melampaui target) dan mencerminkan peningkatan signifikan dalam akses sanitasi layak di Kabupaten Sarmi.

Program Pendukung

Pencapaian indikator ini didukung oleh:

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Anggaran: Rp1.040.000.000,00
- Realisasi: Rp1.039.930.000,00

- Serapan: 99,99%

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa faktor utama yang mendukung keberhasilan capaian indikator antara lain:

1. Pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi

Kegiatan pembangunan jamban sehat, sistem pengelolaan air limbah, dan sanitasi berbasis masyarakat meningkatkan akses sanitasi layak.

2. Pendekatan berbasis masyarakat (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM)

Mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan sanitasi yang layak.

3. Realisasi anggaran yang sangat tinggi (99,99%)

Hampir seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal.

4. Intervensi pada wilayah prioritas

Fokus pada daerah dengan akses sanitasi rendah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan capaian.

5. Sinergi lintas sektor

Dukungan dari pemerintah kampung dan masyarakat dalam pembangunan sanitasi.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 112,36%
- Menunjukkan program sangat efektif, bahkan melampaui target yang ditetapkan

Efisiensi

- Sisa anggaran:

$$Rp1.040.000.000 - Rp1.039.930.000 = Rp70.000$$

- Tingkat efisiensi: $\pm 0,01\%$

Interpretasi

1. Program sangat optimal dari sisi pelaksanaan (serapan hampir 100%)
2. Efisiensi anggaran sangat kecil, namun output yang dihasilkan tinggi
3. Secara keseluruhan, program dapat dikategorikan sangat efektif dan optimal

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan layanan dasar sanitasi
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi
3. Program yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat
4. Pendekatan perubahan perilaku yang efektif (STBM)
5. Dukungan pembiayaan yang memadai dan tepat waktu

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Mempertahankan capaian yang telah melampaui target
2. Meningkatkan kualitas sanitasi (tidak hanya kuantitas)
3. Melakukan pemeliharaan sarana sanitasi secara berkelanjutan
4. Memperluas edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
5. Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah yang lebih terintegrasi

Kesimpulan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terbukti sangat berhasil, dengan capaian kinerja 112,36% dan serapan anggaran 99,99%. Program ini tidak hanya efektif dalam mencapai target, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses sanitasi yang lebih layak. Ke depan, fokus perlu diarahkan pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan sanitasi.

Sasaran 7: Terpenuhinya Sarana, Prasarana Dan Utilitas Perumahan Guna Menekan Kawasan Permukiman Yang Tidak Kumuh Dengan Indikator Rasio Rumah Layak Huni.

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada indikator rasio rumah layak huni

Pada Tahun 2025, target indikator rasio rumah layak huni ditetapkan sebesar 73,70, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 66,10, sehingga capaian kinerja mencapai 89,69%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja cukup baik, namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Program Pendukung

Pencapaian indikator ini didukung oleh:

Program Pengembangan Perumahan

- Anggaran: Rp12.045.744.000,00
- Realisasi: Rp11.363.868.000,00
- Serapan: 94,34%

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa kontribusi program terhadap capaian indikator antara lain:

1. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni

Program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas rumah masyarakat melalui pembangunan baru maupun perbaikan rumah tidak layak huni.

2. Tingginya realisasi anggaran

Serapan anggaran sebesar 94,34% menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.

3. Intervensi pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Program difokuskan pada kelompok sasaran prioritas sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan rasio rumah layak huni.

4. Sinergi dengan program pusat/provinsi dan swadaya Masyarakat

Peningkatan capaian juga didukung oleh kontribusi pihak lain di luar APBD.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 89,69%
- Menunjukkan program cukup efektif, namun belum optimal karena masih terdapat gap sebesar 10,31%

Efisiensi

- Sisa anggaran: $Rp12.045.744.000 - Rp11.363.868.000 = Rp681.876.000$
- Tingkat efisiensi: $\pm 5,66\%$

Interpretasi

- Program tergolong efisien dengan serapan anggaran tinggi dan sisa anggaran relatif kecil
- Namun dari sisi kinerja, masih perlu peningkatan agar target dapat tercapai sepenuhnya

Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target

1. Jumlah rumah tidak layak huni masih cukup tinggi dibandingkan kemampuan intervensi program
2. Keterbatasan anggaran untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat
3. Kendala geografis dan aksesibilitas wilayah
4. Pertumbuhan kebutuhan perumahan baru yang cukup cepat
5. Belum optimalnya pendataan dan penetapan sasaran penerima bantuan

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program perumahan
2. Memperluas cakupan penerima manfaat (RTLH) secara bertahap
3. Meningkatkan akurasi data perumahan (by name by address)

4. Mendorong swadaya masyarakat dan kemitraan dengan pihak lain
5. Meningkatkan kualitas pembangunan agar rumah lebih berkelanjutan

Kesimpulan

Program Pengembangan Perumahan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan rasio rumah layak huni, dengan capaian 89,69% dan tingkat serapan anggaran 94,34%. Program ini tergolong cukup efektif dan efisien, namun masih diperlukan peningkatan cakupan dan intervensi yang lebih luas agar target indikator dapat tercapai secara optimal pada tahun berikutnya.

Sasaran 8: Meningkatnya Layanan Transportasi Antar Wilayah Dengan Indikator Cakupan Layanan Armada Angkutan Umum Antar Kabupaten Yang Aktif Dan Arus Pergerakan Penumpang Angkutan Udara.

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada indikator cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 4,61, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1,226, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 27%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja masih rendah dan belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Program Pendukung

Pencapaian indikator ini didukung oleh:

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Anggaran: Rp1.412.346.874,00
- Realisasi: Rp1.412.155.000,00
- Serapan: 99,99%

Analisis Program yang Menunjang (dan Keterbatasannya)

Beberapa kontribusi program terhadap indikator antara lain:

1. Pengaturan dan pengawasan angkutan umum

Program ini mendukung operasional angkutan melalui pengawasan, perizinan, dan pembinaan.

2. Fasilitasi operasional transportasi darat

Kegiatan dalam program membantu menjaga keberlangsungan layanan angkutan umum.

3. Realisasi anggaran sangat tinggi

Menunjukkan seluruh kegiatan administratif dan pendukung telah dilaksanakan.

Namun demikian, capaian indikator masih rendah, yang mengindikasikan bahwa:

- Program lebih dominan pada aspek regulasi dan administrasi, belum menyentuh peningkatan jumlah armada secara signifikan
- Belum ada intervensi langsung untuk penambahan atau penguatan armada angkutan umum

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 27%
- Menunjukkan program belum efektif dalam mencapai target indikator

Efisiensi

- Sisa anggaran:

$$Rp1.412.346.874 - Rp1.412.155.000 = Rp191.874$$

- Tingkat efisiensi: $\pm 0,01\%$

Interpretasi

- Dari sisi keuangan, program sangat optimal (serapan hampir 100%)
- Namun dari sisi kinerja, tidak efektif, karena output indikator masih sangat rendah

Faktor Penyebab Rendahnya Capaian

1. Jumlah armada angkutan umum terbatas

Armada yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan.

2. Minimnya minat investasi di sektor transportasi umum

Usaha angkutan umum kurang menarik secara ekonomi.

3. Kondisi infrastruktur jalan dan jarak antar wilayah

Mempengaruhi operasional angkutan umum antar kabupaten.

4. Persaingan dengan transportasi non-formal (rental/pribadi)

Mengurangi peran angkutan umum resmi.

5. Program belum menyasar penambahan armada secara langsung

Lebih fokus pada pengaturan dibanding pengembangan layanan.

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Mendorong penambahan armada angkutan umum melalui insentif atau bantuan pemerintah
2. Meningkatkan daya tarik investasi sektor transportasi
3. Mengembangkan skema subsidi angkutan umum untuk wilayah tertentu
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung transportasi
5. Melakukan penataan dan integrasi transportasi formal dan non-formal
6. Memperluas jangkauan layanan angkutan antar wilayah

Kesimpulan

Program Penyelenggaraan LLAJ telah dilaksanakan dengan serapan anggaran sangat tinggi (99,99%), namun belum efektif dalam meningkatkan cakupan layanan armada angkutan umum, dengan capaian hanya 27%. Hal ini menunjukkan perlunya pergeseran kebijakan dari sekadar pengaturan menuju pengembangan dan peningkatan jumlah armada serta layanan transportasi agar target indikator dapat tercapai di masa mendatang

Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Udara (IKU) Dan Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Indeks kualitas air (IKA), Udara (IKU) dan Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Pada Tahun 2025, capaian indikator kualitas lingkungan hidup menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
 - Target: 66,34
 - Realisasi: 71,97
 - Capaian: 108,49% (melampaui target)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - Target: 83,37
 - Realisasi: 90,48
 - Capaian: 108,54% (melampaui target)
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
 - Target: 100
 - Realisasi: 100
 - Capaian: 100% (sesuai target)

Secara keseluruhan, seluruh indikator menunjukkan kinerja optimal, bahkan sebagian melampaui target yang ditetapkan.

Program Pendukung

Capaian indikator didukung oleh program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi, yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Anggaran: Rp2.034.817.182,00
 - Realisasi: Rp2.034.557.484,00
 - Serapan: 99,99%
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Anggaran: Rp150.203.142,00
 - Realisasi: Rp150.203.142,00
 - Serapan: 100%

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator didukung oleh beberapa faktor utama:

1. Pengendalian pencemaran lingkungan yang efektif:

Kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penanganan pencemaran air dan udara berjalan optimal sehingga meningkatkan nilai IKA dan IKU.

2. Pelestarian keanekaragaman hayati:

Program KEHATI berkontribusi dalam menjaga ekosistem dan tutupan lahan, sehingga IKTL dapat tercapai sesuai target.

3. Tingginya realisasi anggaran:

Serapan anggaran yang hampir mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana.

4. Kondisi lingkungan yang relatif terjaga:

Minimnya tekanan industri dan masih luasnya kawasan alami turut mendukung kualitas lingkungan.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- IKA: 108,49% (sangat efektif)
- IKU: 108,54% (sangat efektif)
- IKTL: 100% (efektif)

Secara keseluruhan program sangat efektif dalam mencapai bahkan melampaui target.

Efisiensi

- Total anggaran Rp.2.034.817.182 + Rp. 150.203.142
= Rp. 2.185.020.324
- Total realisasi Rp. 2.034.557.484 + Rp. 150.203.142
= Rp. 2.184.760.626
- Sisa anggaran:

$$Rp. 2.185.020.324 - Rp. 2.184.760.626 = Rp. 259.698$$

- Tingkat efisiensi: $\pm 0,01\%$

Interpretasi

- Program memiliki serapan anggaran sangat tinggi (mendekati 100%)
- Output yang dihasilkan juga tinggi (indikator tercapai dan melampaui target)
- Dengan demikian, program dapat dikategorikan sangat efektif dan optimal, meskipun efisiensi anggaran sangat kecil

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Pelaksanaan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan
3. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan
4. Kondisi geografis yang masih mendukung kualitas lingkungan alami

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Mempertahankan capaian kualitas air, udara, dan tutupan lahan
2. Meningkatkan pengawasan terhadap potensi pencemaran lingkungan
3. Memperluas program konservasi dan rehabilitasi lingkungan
4. Meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat
5. Mengantisipasi tekanan pembangunan terhadap lingkungan di masa depan

Kesimpulan

Program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi telah berjalan sangat berhasil, dengan capaian indikator yang melampaui target untuk IKA dan IKU serta mencapai target untuk IKTL. Didukung oleh serapan anggaran hampir 100%, program ini dapat dinilai sangat efektif dan optimal, serta memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Sasaran 10: Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Dengan Indikator Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani Dan Ketersediaan TPA Yang Terkelola Secara Baik

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Indikator Persentase timbulan sampah yang tertangani dan Ketersediaan TPA yang dikelola secara baik

Pada Tahun 2025, capaian indikator persampahan menunjukkan hasil yang beragam, yaitu:

1. Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani

- Target: 35%
- Realisasi: 45%
- Capaian: 128,57% (melampaui target)

Menunjukkan kinerja sangat baik, di mana penanganan sampah melebihi target yang ditetapkan.

2. Ketersediaan TPA yang Terkelola Secara Baik

- Target: Ada
- Realisasi: Tidak Ada
- Capaian: 0% (tidak tercapai)

Menunjukkan bahwa aspek pengelolaan akhir persampahan belum terpenuhi.

Program Pendukung

Capaian indikator didukung oleh:

Program Pengelolaan Persampahan

- Anggaran: Rp2.183.792.326,00
- Realisasi: Rp2.181.155.000,00
- Serapan: 99,88%

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pada Penanganan Sampah

1. Optimalisasi layanan pengangkutan sampah:

Kegiatan operasional seperti pengumpulan dan pengangkutan berjalan dengan baik.

2. Peningkatan peran Masyarakat:

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (pemilahan dan pembuangan) meningkat.

3. Dukungan sarana dan prasarana persampahan:

Ketersediaan armada dan fasilitas pendukung meningkatkan cakupan layanan.

4. Realisasi anggaran tinggi

Serapan hampir 100% menunjukkan kegiatan berjalan optimal.

Kegagalan pada Ketersediaan TPA

1. Belum tersedianya TPA yang memenuhi standar pengelolaan
2. Keterbatasan lahan dan perencanaan lokasi TPA
3. Kendala pembiayaan pembangunan TPA yang memadai
4. Proses perizinan dan kesiapan teknis yang belum terpenuhi
5. Program lebih fokus pada pengangkutan, belum pada pengelolaan akhir (TPA)

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Penanganan sampah: 128,57% (sangat efektif)
- Ketersediaan TPA: 0% (tidak efektif)

Secara keseluruhan, program belum sepenuhnya efektif, karena hanya berhasil pada aspek hulu (pengangkutan), namun gagal pada aspek hilir (pengelolaan akhir).

Efisiensi

- Sisa anggaran: $Rp. 2.183.792.326 - Rp. 2.181.155.000 = Rp. 2.637.326$

- Tingkat efisiensi: $\pm 0,12\%$

Interpretasi

- Serapan anggaran sangat tinggi (99,88%)
- Namun output belum seimbang karena TPA belum tersedia

Program efisien secara keuangan, tetapi belum optimal secara hasil (outcome)

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Memprioritaskan pembangunan dan pengelolaan TPA sesuai standar
2. Menyusun perencanaan teknis (DED) dan penetapan lokasi TPA
3. Meningkatkan alokasi anggaran khusus pengelolaan akhir sampah
4. Mengembangkan sistem pengolahan sampah (reduce, reuse, recycle/3R)
5. Mendorong kemitraan dengan pemerintah pusat/provinsi dan swasta
6. Mengintegrasikan pengelolaan dari hulu hingga hilir

Kesimpulan

Program Pengelolaan Persampahan telah berhasil sangat baik dalam meningkatkan penanganan sampah dengan capaian 128,57%, namun belum berhasil menyediakan TPA yang terkelola dengan baik. Dengan serapan anggaran 99,88%, program tergolong efisien, tetapi belum sepenuhnya efektif karena belum mencakup seluruh aspek sistem pengelolaan persampahan secara menyeluruh. Diperlukan fokus ke depan pada pembangunan dan pengelolaan TPA agar sistem persampahan menjadi lebih terpadu.

Sasaran 11: Meningkatnya Penanganan Dan Penanggulangan Resiko Bencana Dengan Indikator Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (SPM) Dan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (SPM)

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 48,70%, namun realisasi belum dapat disajikan pada tahun pelaporan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan pada sosialisasi dan penguatan kapasitas melalui program Taruna Siaga Bencana (TAGANA), sehingga belum terdapat kejadian bencana yang dapat diukur pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Program Pendukung

Pencapaian indikator didukung oleh:

Program Penanganan Bencana

- Anggaran: Rp136.255.407,00
- Realisasi: Rp136.255.407,00
- Serapan: 100%

Analisis Program yang Menunjang

Meskipun realisasi indikator belum dapat diukur, program yang dilaksanakan memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui TAGANA:
Kegiatan sosialisasi dan pelatihan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan relawan dalam menghadapi bencana.
2. Peningkatan kesiapsiagaan daerah:
Program lebih diarahkan pada aspek pencegahan dan mitigasi, sehingga memperkuat sistem respons darurat.
3. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan:
Seluruh anggaran terserap, menunjukkan kegiatan berjalan sesuai rencana.
4. Pendekatan preventif dibanding responsive
Fokus pada pengurangan risiko bencana sebelum terjadi kejadian.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

Realisasi indikator: Belum dapat diukur

- Secara output indikator, efektivitas belum dapat dinilai
- Namun dari sisi proses, program dapat dikategorikan cukup baik dalam mendukung kesiapsiagaan

Efisiensi

- Sisa anggaran: $Rp136.255.407 - Rp136.255.407 = Rp0$
- Tingkat efisiensi: 0%

Interpretasi

- Serapan anggaran mencapai 100%
- Kegiatan terlaksana seluruhnya sesuai perencanaan
- Namun karena indikator berbasis kejadian (event-based), hasilnya belum dapat diukur

Permasalahan Utama

1. Indikator bersifat situasional (tergantung kejadian bencana)
2. Tidak adanya kejadian bencana yang signifikan pada tahun berjalan
3. Fokus kegiatan lebih pada sosialisasi dan peningkatan kapasitas
4. Belum adanya pengukuran alternatif untuk kesiapsiagaan bencana

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Menambahkan indikator antara (output/outcome antara)
Misalnya: tingkat kesiapsiagaan TAGANA atau jumlah relawan terlatih
2. Memperkuat sistem pendataan dan pelaporan saat terjadi bencana
3. Melanjutkan program peningkatan kapasitas TAGANA secara berkelanjutan
4. Mengembangkan simulasi penanggulangan bencana sebagai ukuran kinerja
5. Mengintegrasikan program mitigasi dan respons bencana

Kesimpulan

Program Penanganan Bencana telah dilaksanakan dengan serapan anggaran 100% dan berfokus pada peningkatan kapasitas melalui TAGANA.

Meskipun capaian indikator belum dapat diukur, program ini tetap memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana. Ke depan, diperlukan penyempurnaan indikator dan sistem pengukuran agar kinerja dapat dinilai secara lebih komprehensif.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Indikator Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)

Pada Tahun 2025, target indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Sarmi telah optimal dan sesuai target, di mana seluruh kejadian kebakaran dapat ditangani dengan baik.

Program Pendukung

Pencapaian indikator ini didukung oleh:

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Anggaran: Rp224.800.000,00
- Realisasi: Rp224.800.000,00
- Serapan: 100%

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Respons cepat penanganan kebakaran:
Seluruh kejadian kebakaran yang terjadi dapat ditangani secara cepat dan tepat oleh petugas.
2. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan:
Sosialisasi dan upaya pencegahan kebakaran membantu meminimalisir risiko dan dampak kejadian.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia:

Meskipun dengan keterbatasan sarana dan personil, pelayanan tetap dapat diberikan secara maksimal.

4. Realisasi anggaran 100%

Menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 100%
- Program sangat efektif dalam mencapai target kinerja

Efisiensi

- Sisa anggaran: **$Rp224.800.000 - Rp224.800.000 = Rp0$**
- Tingkat efisiensi: 0%

Interpretasi

- Serapan anggaran maksimal (100%)
- Output indikator juga maksimal (100%)

Program dapat dikategorikan optimal, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Kesiapan petugas dan sistem penanganan kebakaran
2. Koordinasi yang baik antar unit terkait
3. Ketersediaan sarana dasar pemadam kebakaran
4. Dukungan anggaran yang digunakan secara tepat sasaran

Tindak Lanjut / Rekomendasi

1. Mempertahankan kualitas pelayanan kebakaran yang sudah optimal
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
3. Menambah jumlah dan kapasitas personil pemadam kebakaran
4. Memperluas edukasi dan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat

5. Mengembangkan sistem respon darurat yang lebih cepat dan terintegrasi

Kesimpulan

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran telah dilaksanakan dengan sangat baik, ditunjukkan oleh capaian indikator 100% dan serapan anggaran 100%. Program ini tergolong sangat efektif dan optimal, serta memberikan dampak nyata dalam menjamin pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Sarmi.

Sasaran 12 : Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Perkebunan Dan Perikanan Dengan Indikator Kontribusi Sektor Pertanian Dan Peternakan Dalam Perekonomian Wilayah, Kontribusi Sektor Perikanan Dalam Perekonomian Wilayah.

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Indikator Kontribusi sektor pertanian dan Peternakan dalam perekonomian wilayah

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 21,33%, sedangkan realisasi mencapai 28,09%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 131,69%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan peternakan memberikan kontribusi yang sangat tinggi dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Program Pendukung

Keberhasilan indikator ini didukung oleh beberapa program pada Dinas Pertanian Kabupaten Sarmi, yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Anggaran: Rp904.027.000,00
 - Realisasi: Rp896.527.000,00
 - Serapan: 99,17%

Program ini berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana produksi seperti alat dan bahan pertanian.

2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Anggaran: Rp329.755.000,00
- Realisasi: Rp329.755.000,00
- Serapan: 100%

Program ini mendukung stabilitas produksi dengan meminimalisir risiko gagal panen akibat bencana atau gangguan alam.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Anggaran: Rp. 399.990.000,00
- Realisasi: Rp. 399.990.000,00
- Serapan: 100%

Program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas dan produktivitas subsektor peternakan melalui pengendalian penyakit hewan dan jaminan kesehatan produk hewani.

4. Program Penyuluhan Pertanian

- Anggaran: Rp. 2.323.294.210,00
- Realisasi: Rp. 2.227.293.910,00
- Serapan: 95,87%

Program ini berperan penting dalam meningkatkan kapasitas petani melalui edukasi, pendampingan, dan penerapan teknologi pertanian.

Analisis Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Optimalnya dukungan sarana dan prasarana pertanian:

Ketersediaan sarana produksi meningkatkan hasil dan efisiensi usaha tani.

2. Pengendalian risiko pertanian yang efektif:

Penanganan bencana pertanian menjaga keberlanjutan produksi.

3. Meningkatnya kapasitas petani melalui penyuluhan:

Petani lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi pertanian.

4. Dukungan subsektor peternakan yang semakin baik:

Program kesehatan hewan mendorong peningkatan produksi dan kualitas hasil ternak.

5. Struktur ekonomi daerah yang berbasis pertanian:

Sektor pertanian dan peternakan menjadi kontributor utama PDRB daerah.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 131,69%

Menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan sangat efektif dalam mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian dan peternakan.

Efisiensi

Total Anggaran:

Rp. 904.027.000 + Rp. 329.755.000 + Rp. 399.990.000 + Rp. 2.323.294.210
= Rp3.957.066.210,00

Total Realisasi:

Rp. 896.527.000 + Rp. 329.755.000 + Rp. 399.990.000 + Rp. 2.227.293.910
= Rp. 3.853.565.910,00

Sisa Anggaran:

= Rp103.500.300,00

Tingkat Efisiensi: $\approx 2,62\%$

Interpretasi

- Tingkat efisiensi relatif kecil (2,62%), yang berarti penyerapan anggaran sudah sangat optimal.
- Capaian kinerja yang tinggi dengan penyerapan anggaran yang baik menunjukkan kinerja program sangat efektif dan efisien.

Kesimpulan

Program-program pada Dinas Pertanian Kabupaten Sarmi secara keseluruhan telah berjalan sangat baik, dengan tingkat efektivitas tinggi (capaian 131,69%) dan efisiensi anggaran yang optimal. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi antara penyediaan sarana, pengendalian risiko, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan subsektor peternakan, sehingga sektor pertanian tetap menjadi pilar utama perekonomian daerah.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah

Pada Tahun 2025, target kontribusi sektor perikanan ditetapkan sebesar 53,42%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 28,09%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 54,07%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian wilayah Kabupaten Sarmi belum mencapai target dan masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Program Pendukung

Capaian indikator didukung oleh program pada Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Anggaran: Rp2.289.137.253,00
- Realisasi: Rp2.289.137.253,00
- Serapan: 100%

Program ini bertujuan meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pemanfaatan sumber daya laut.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Anggaran: Rp899.967.578,00
- Realisasi: Rp899.967.578,00
- Serapan: 100%

Program ini mendukung peningkatan produksi melalui kegiatan budidaya ikan air tawar maupun laut.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Anggaran: Rp1.301.016.381,00
- Realisasi: Rp1.298.604.381,00
- Serapan: 99,81%

Program ini berperan dalam meningkatkan nilai tambah dan distribusi hasil perikanan.

Analisis Capaian Kinerja

Meskipun seluruh program menunjukkan serapan anggaran yang sangat tinggi (mendekati 100%), capaian indikator hanya mencapai 54,07%, yang berarti Kinerja belum optimal secara hasil (outcome), meskipun input (anggaran) terserap maksimal.

Analisis Penyebab Rendahnya Capaian

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target antara lain:

1. Belum optimalnya produksi perikanan

Produksi perikanan tangkap maupun budidaya belum meningkat secara signifikan.

2. Keterbatasan sarana dan teknologi

Alat tangkap, sarana budidaya, serta teknologi pengolahan masih terbatas.

3. Rantai pemasaran yang belum kuat

Akses pasar dan distribusi hasil perikanan belum optimal sehingga nilai ekonomi rendah.

4. Kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya

Keterampilan dan pengetahuan masih perlu ditingkatkan.

5. Faktor geografis dan cuaca

Kondisi alam mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 54,07%

Menunjukkan program belum efektif sepenuhnya dalam mencapai target kontribusi sektor perikanan.

Efisiensi

Total Anggaran:

Rp. 2.289.137.253 + Rp. 899.967.578 + Rp. 1.301.016.381
= Rp. 4.490.121.212,00

Total Realisasi:

Rp. 2.289.137.253 + Rp. 899.967.578 + Rp. 1.298.604.381
= Rp. 4.487.709.212,00

Sisa Anggaran:

= Rp. 2.412.000,00

Tingkat Efisiensi:

≈ 0,05%

Interpretasi

- Efisiensi sangat kecil (0,05%), artinya anggaran hampir seluruhnya terserap.
- Namun, tingginya serapan tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja, sehingga menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam hal pemanfaatan anggaran terhadap hasil (outcome).

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pelaksanaan program perikanan tangkap dan budidaya secara optimal
2. Peningkatan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
3. Dukungan sarana produksi perikanan kepada masyarakat
4. Pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Meningkatkan produktivitas perikanan melalui modernisasi alat tangkap dan budidaya
2. Memperkuat rantai pemasaran dan akses pasar hasil perikanan
3. Meningkatkan kapasitas SDM nelayan dan pembudidaya melalui pelatihan
4. Mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah

5. Melakukan evaluasi program berbasis outcome, bukan hanya serapan anggaran

Kesimpulan

Capaian indikator kontribusi sektor perikanan tahun 2025 masih belum optimal dengan capaian hanya 54,07%, meskipun didukung oleh program dengan serapan anggaran yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih perlu diarahkan pada peningkatan hasil nyata (outcome) agar kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah dapat meningkat secara signifikan.

Sasaran 13: Meningkatnya Nilai Investasi Dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Produk Unggulan Daerah Masyarakat Dengan Indikator Tingkat Nilai Realisasi Invetasi Tahunan (PMA/PMDN), Tingkat Pengangguran Terbuka, Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB , Persentase UMKM Dan IKM Aktif Dan Persentase Koperasi Aktif

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator tingkat Nilai realisasi invetasi tahunan (PMA/PMDN)

Pada Tahun 2025, target nilai realisasi investasi ditetapkan sebesar Rp33,48 miliar, sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp5,77 miliar, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 17,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja investasi daerah masih sangat rendah dan jauh dari target yang telah ditetapkan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarmi, yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Anggaran: Rp102.954.000
- Realisasi: Rp102.935.000
- Serapan: 99,98%

Program ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui promosi dan kemudahan investasi.

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Anggaran: Rp102.741.625
- Realisasi: Rp102.628.000
- Serapan: 99,89%

Program ini berfokus pada monitoring dan pengawasan realisasi investasi yang masuk.

3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Anggaran: Rp103.978.875
- Realisasi: Rp103.795.000
- Serapan: 99,82%

Program ini mendukung penyediaan data dan informasi investasi yang akurat dan terintegrasi.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Secara umum, seluruh program menunjukkan serapan anggaran yang sangat tinggi (mendekati 100%), namun capaian indikator hanya 17,22%, yang berarti Program belum mampu mendorong peningkatan realisasi investasi secara signifikan (tidak efektif secara outcome)

Analisis Penyebab Rendahnya Capaian

Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi antara lain:

1. Iklim investasi belum cukup menarik

Meskipun program telah berjalan, daya tarik investasi daerah masih rendah dibanding daerah lain.

2. Keterbatasan infrastruktur pendukung

Akses transportasi, energi, dan fasilitas penunjang investasi masih terbatas.

3. Kurangnya promosi investasi yang agresif dan terarah

Potensi daerah belum dipasarkan secara optimal kepada investor.

4. Minimnya minat investor (PMA/PMDN)

Faktor risiko usaha, lokasi geografis, dan skala ekonomi mempengaruhi keputusan investor.

5. Belum optimalnya kemudahan perizinan secara implementatif

Walaupun sistem sudah ada, dalam praktiknya masih terdapat hambatan teknis dan administratif.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 17,22%

Menunjukkan program tidak efektif dalam mencapai target investasi.

Efisiensi

Total Anggaran: Rp.102.954.000 + Rp.102.741.625 + Rp.103.978.875 =
Rp.309.674.500

Total Realisasi Rp102.935.000 + Rp102.628.000 + Rp103.795.000
= Rp309.358.000

Sisa Anggaran = Rp316.500

Tingkat Efisiensi: $\approx 0,10\%$

Interpretasi

- Serapan anggaran sangat tinggi (hampir 100%)
- Namun capaian indikator sangat rendah
Menunjukkan bahwa efisiensi input tinggi tetapi efektivitas outcome sangat rendah

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Penyusunan dan penguatan sistem informasi investasi
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi
3. Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif
4. Pelayanan perizinan melalui sistem terpadu satu pintu

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Meningkatkan promosi investasi secara aktif dan terarah (misalnya melalui forum investasi, kerjasama dengan investor potensial)

2. Menyusun peta potensi investasi daerah (investment profile) agar investor lebih mudah melihat peluang usaha
3. Meningkatkan kemudahan dan kepastian perizinan termasuk percepatan layanan berbasis digital
4. Mendorong pengembangan infrastruktur pendukung investasi melalui kolaborasi lintas sektor
5. Memberikan insentif atau kemudahan bagi investor untuk meningkatkan daya tarik daerah

Kesimpulan

Meskipun program pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah dilaksanakan dengan serapan anggaran yang sangat optimal, namun belum mampu meningkatkan realisasi investasi secara signifikan. Dengan capaian hanya 17,22%, diperlukan perbaikan strategi yang lebih fokus pada peningkatan daya tarik investasi dan hasil nyata (outcome) agar target investasi daerah dapat tercapai pada tahun berikutnya.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator tingkat pengangguran terbuka

Pada Tahun 2025, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditetapkan sebesar 3,45%, sedangkan realisasi mencapai 4,37%. Dengan demikian, capaian kinerja sebesar 126,67% menunjukkan deviasi negatif, karena untuk indikator ini semakin kecil nilai realisasi maka semakin baik kinerjanya. Artinya, tingkat pengangguran masih lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Hubungan Industrial

- Anggaran: Rp668.278.940
- Realisasi: Rp668.228.540
- Serapan: 99,99%

Program ini bertujuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Meskipun tingkat serapan anggaran sangat tinggi (99,99%), kondisi TPT masih berada di atas target. Hal ini menunjukkan bahwa:

- Program yang dilaksanakan belum efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan
- Program hubungan industrial lebih berfokus pada stabilitas hubungan kerja, bukan secara langsung menciptakan lapangan kerja baru.

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran antara lain:

1. Terbatasnya lapangan kerja baru

Pertumbuhan kesempatan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja.

2. Keterbatasan keterampilan tenaga kerja

Kualifikasi tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Minimnya investasi daerah

Rendahnya realisasi investasi berdampak pada terbatasnya penyerapan tenaga kerja.

4. Program belum langsung menyasar penciptaan kerja

Program hubungan industrial lebih bersifat preventif, bukan ekspansif.

5. Kondisi ekonomi daerah

Struktur ekonomi yang terbatas menyebabkan peluang kerja juga terbatas.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 126,67% (deviasi negatif)
Menunjukkan program belum efektif dalam mencapai target penurunan pengangguran.

Efisiensi

Sisa Anggaran: Rp668.278.940 – Rp668.228.540 = Rp50.400

Tingkat Efisiensi: $\approx 0,01\%$

Interpretasi

- Anggaran terserap hampir seluruhnya (sangat efisien secara administratif)
- Namun tidak diikuti dengan pencapaian target
Menunjukkan efisiensi tinggi tetapi efektivitas rendah

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pembinaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha
2. Penyelesaian perselisihan hubungan kerja
3. Pengawasan ketenagakerjaan untuk menjaga stabilitas kerja

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Mengembangkan program penciptaan lapangan kerja seperti padat karya dan dukungan UMKM
2. Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
3. Mendorong investasi daerah untuk membuka peluang kerja baru
4. Memperkuat program kewirausahaan bagi pencari kerja
5. Mengintegrasikan program lintas sektor antara tenaga kerja, pendidikan, dan ekonomi

Kesimpulan

Program pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi, khususnya Program Hubungan Industrial, telah dilaksanakan dengan serapan anggaran yang sangat optimal, namun belum mampu menurunkan tingkat pengangguran sesuai target. Dengan capaian 126,67% (deviasi negatif), diperlukan penguatan program yang lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar kinerja indikator dapat membaik di tahun berikutnya.

c. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Pada Tahun 2025, target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditetapkan sebesar 13,12%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 10,57%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 80,56%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan belum mencapai target, meskipun masih berada pada kategori cukup.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sarmi, yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- Anggaran: Rp180.170.000
- Realisasi: Rp180.170.000
- Serapan: 100%

Program ini bertujuan meningkatkan kelancaran distribusi barang dan memperkuat jaringan perdagangan.

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Anggaran: Rp1.999.998.000
- Realisasi: Rp1.999.998.000
- Serapan: 100%

Program ini berperan menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

3. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- Anggaran: Rp83.376.000
- Realisasi: Rp83.376.000
- Serapan: 100%

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas barang serta perlindungan konsumen dalam aktivitas perdagangan.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Seluruh program menunjukkan serapan anggaran 100%, yang berarti pelaksanaan kegiatan berjalan optimal dari sisi administrasi. Namun demikian, capaian indikator hanya 80,56%, yang menunjukkan:

Program cukup mendukung, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Rendahnya aktivitas perdagangan local
Volume transaksi perdagangan belum meningkat secara signifikan.
2. Keterbatasan infrastruktur distribusi
Aksesibilitas antar wilayah masih menjadi kendala dalam distribusi barang.
3. Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah
Perdagangan lebih bersifat konsumtif daripada produktif.
4. Skala usaha perdagangan masih kecil
Didominasi oleh usaha mikro dan kecil dengan kontribusi terbatas terhadap PDRB.
5. Program lebih berfokus pada stabilisasi, bukan ekspansi
Kegiatan belum secara langsung mendorong peningkatan nilai tambah perdagangan.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 80,56%
Menunjukkan program cukup efektif, namun belum optimal dalam mencapai target.

Efisiensi

Total Anggaran = Rp180.170.000 + Rp1.999.998.000 + Rp83.376.000 =
Rp2.263.544.000

Total Realisasi = Rp. 2.263.544.000

Sisa Anggaran: = Rp. 0

Tingkat Efisiensi = 0% (anggaran terserap 100%)

Interpretasi

- Dari sisi keuangan, program sangat optimal (tidak ada sisa anggaran)
- Namun dari sisi hasil (outcome), belum maksimal
Menunjukkan bahwa efisiensi tinggi tetapi efektivitas masih perlu ditingkatkan

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
2. Stabilisasi harga kebutuhan pokok
3. Perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas barang

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Mendorong pengembangan pasar dan pusat perdagangan lokal
2. Meningkatkan konektivitas dan sistem distribusi antar wilayah
3. Mendorong pelaku usaha kecil naik kelas
4. Mengembangkan perdagangan berbasis digital (e-commerce)
5. Mengintegrasikan sektor perdagangan dengan sektor produksi (pertanian, perikanan, UMKM)

Kesimpulan

Program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sarmi telah berjalan dengan serapan anggaran yang optimal, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sesuai target. Dengan capaian 80,56%, diperlukan penguatan program yang lebih berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai tambah sektor perdagangan agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah dapat meningkat secara signifikan.

d. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB

Pada Tahun 2025, target kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB ditetapkan sebesar 2,33%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 1,78%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 76,39%. Hal ini menunjukkan bahwa

kontribusi sektor industri pengolahan belum mencapai target dan masih perlu ditingkatkan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- Anggaran: Rp69.899.940
- Realisasi: Rp69.899.940
- Serapan: 100%

Program ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor industri melalui perencanaan, pembinaan, dan pembangunan industri skala kecil maupun menengah.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Meskipun program telah dilaksanakan dengan serapan anggaran 100%, capaian indikator hanya 76,39%, yang berarti Program belum efektif secara optimal dalam meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB.

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Skala industri pengolahan masih kecil

Industri didominasi oleh usaha mikro dan kecil dengan nilai tambah terbatas.

2. Keterbatasan bahan baku dan rantai pasok

Ketersediaan bahan baku belum stabil dan belum terintegrasi dengan sektor produksi lokal.

3. Minimnya investasi di sektor industri

Kurangnya investasi menyebabkan perkembangan industri berjalan lambat.

4. Keterbatasan teknologi dan inovasi

Proses produksi masih sederhana sehingga produktivitas dan kualitas rendah.

5. Program masih bersifat perencanaan

Kegiatan lebih fokus pada perencanaan dibanding implementasi langsung yang berdampak pada peningkatan produksi.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 76,39%

Menunjukkan program cukup efektif, namun belum mampu mencapai target secara maksimal.

Efisiensi

- Anggaran: Rp69.899.940
- Realisasi: Rp69.899.940
- Sisa anggaran: Rp0

Tingkat Efisiensi = 0% (anggaran terserap 100%)

Interpretasi

- Dari sisi keuangan, program telah dilaksanakan secara optimal
 - Namun dari sisi hasil, belum memberikan dampak signifikan
- Menunjukkan bahwa efisiensi tinggi tetapi efektivitas masih terbatas

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan industri daerah
2. Pembinaan awal terhadap pelaku industri kecil
3. Identifikasi potensi industri berbasis sumber daya lokal

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal (hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan)
2. Meningkatkan dukungan sarana dan teknologi industri untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk
3. Mendorong investasi di sektor industri pengolahan melalui kemudahan perizinan dan insentif
4. Mengembangkan hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah lebih tinggi

5. Meningkatkan pelatihan dan pendampingan pelaku industri khususnya UMKM sektor pengolahan

Kesimpulan

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan dengan serapan anggaran optimal, namun belum mampu meningkatkan kontribusi industri pengolahan secara signifikan. Dengan capaian 76,39%, diperlukan penguatan program yang lebih berorientasi pada implementasi dan peningkatan nilai tambah industri agar kontribusi sektor ini terhadap PDRB dapat meningkat di masa mendatang

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator persentase UMKM dan IKM aktif

Pada Tahun 2025, target indikator persentase UMKM dan IKM aktif ditetapkan sebesar 41,00%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 29,39%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 71,68%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah UMKM dan IKM aktif belum mencapai target yang ditetapkan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

2. Program Pengembangan UMKM

- Total Anggaran: Rp892.134.091
- Realisasi: Rp892.134.091
- Serapan: 100%

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, serta keberlangsungan usaha UMKM dan IKM.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Meskipun program telah dilaksanakan dengan serapan anggaran 100%, capaian indikator hanya 71,68%, yang menunjukkan Program cukup

mendukung, namun belum efektif secara optimal dalam meningkatkan jumlah UMKM dan IKM yang aktif.

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Banyak UMKM/IKM belum aktif secara berkelanjutan
Sebagian pelaku usaha masih bersifat musiman atau tidak konsisten.
2. Keterbatasan akses permodalan
UMKM mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha.
3. Kapasitas manajemen usaha yang masih rendah
Pengelolaan usaha belum profesional.
4. Akses pasar yang terbatas
Produk UMKM belum memiliki jangkauan pasar yang luas.
5. Dampak kondisi ekonomi
Menyebabkan penurunan aktivitas usaha masyarakat.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 71,68%
Menunjukkan program cukup efektif, namun belum mencapai target yang diharapkan.

Efisiensi

- Anggaran: Rp. 892.134.091
- Realisasi: Rp. 892.134.091
- Sisa anggaran: Rp. 0

Tingkat Efisiensi: = 0% (serapan 100%)

Interpretasi

- Dari sisi keuangan, program berjalan optimal
- Namun dari sisi hasil, belum maksimal
Menunjukkan bahwa efisiensi tinggi tetapi efektivitas masih perlu ditingkatkan

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pembinaan dan pemberdayaan pelaku UMKM
2. Pelatihan peningkatan kapasitas usaha
3. Fasilitasi pengembangan usaha dan produk
4. Pendataan UMKM dan IKM

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Meningkatkan akses permodalan bagi UMKM melalui kerja sama dengan lembaga keuangan
2. Memperluas akses pasar termasuk pemasaran digital dan kemitraan usaha
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk melalui pelatihan dan pendampingan
4. Mendorong legalitas usaha UMKM agar lebih mudah berkembang
5. Melakukan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan UMKM tetap aktif

Kesimpulan

Program pemberdayaan dan pengembangan UMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan dengan serapan anggaran optimal, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan jumlah UMKM dan IKM aktif sesuai target. Dengan capaian 71,68%, diperlukan penguatan program yang lebih fokus pada keberlanjutan usaha dan peningkatan daya saing UMKM agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah semakin meningkat.

f. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator Persentase koperasi aktif

Pada Tahun 2025, target persentase koperasi aktif ditetapkan sebesar 48,21%, sedangkan realisasi yang dicapai hanya 9,09%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 18,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi koperasi di Kabupaten Sarmi sangat jauh dari target dan mayoritas koperasi belum aktif secara optimal.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sarmi, yaitu:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- Anggaran: Rp32.049.375
- Realisasi: Rp32.000.000
- Serapan: 99,85%

Program ini bertujuan memastikan koperasi berjalan sesuai ketentuan dan meningkatkan tata kelola koperasi.

2. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

- Anggaran: Rp29.242.000
- Realisasi: Rp29.235.000
- Serapan: 99,98%

Program ini berfokus pada legalitas dan penguatan kelembagaan koperasi.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Meskipun kedua program memiliki serapan anggaran sangat tinggi (mendekati 100%), capaian indikator hanya 18,86%, yang berarti Program belum efektif dalam meningkatkan jumlah koperasi yang aktif

Program yang dilaksanakan lebih berfokus pada aspek administratif dan legalitas, belum menyentuh secara langsung penguatan operasional dan usaha koperasi.

Analisis Penyebab Rendahnya Capaian

Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya koperasi aktif antara lain:

1. Banyak koperasi tidak menjalankan kegiatan usaha Koperasi hanya aktif secara administratif, tidak secara operasional.
2. Manajemen koperasi yang lemah Pengurus belum memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola usaha koperasi.

3. Minimnya modal usaha koperasi Keterbatasan permodalan menghambat aktivitas usaha.
4. Kurangnya partisipasi anggota Anggota koperasi belum aktif dalam kegiatan usaha koperasi.
5. Program belum menyentuh pengembangan usaha koperasi Lebih fokus pada pengawasan dan legalitas, bukan pada peningkatan kinerja usaha.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 18,86%

Menunjukkan program tidak efektif dalam mencapai target indikator.

Efisiensi

Total Anggaran Rp32.049.375 + Rp29.242.000 = Rp61.291.375

Total Realisasi Rp32.000.000 + Rp29.235.000 = Rp61.235.000

Sisa Anggaran = Rp56.375

Tingkat Efisiensi $\approx 0,09\%$

Interpretasi

- Serapan anggaran sangat tinggi
- Namun capaian indikator sangat rendah menunjukkan efisiensi tinggi tetapi efektivitas sangat rendah

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
2. Penguatan aspek legalitas dan badan hukum koperasi
3. Pendataan koperasi yang ada

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Melakukan revitalisasi koperasi tidak aktif melalui pembinaan intensif atau pembubaran koperasi yang tidak berjalan
2. Meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan manajemen dan kewirausahaan
3. Mendorong akses permodalan koperasi melalui kemitraan dengan lembaga keuangan

4. Mengembangkan usaha koperasi berbasis potensi local agar memiliki aktivitas ekonomi yang nyata
5. Meningkatkan partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha dan pengelolaan koperasi

Kesimpulan

Program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan dengan serapan anggaran yang optimal, namun belum mampu meningkatkan persentase koperasi aktif secara signifikan. Dengan capaian hanya 18,86%, diperlukan perubahan strategi yang lebih fokus pada penguatan usaha dan operasional koperasi, bukan hanya aspek administratif, agar koperasi dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Sasaran 14: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Dengan Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Wilayah Dan Persentase Peningkatan Wisatawan (WNA/WNI)

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada Kontribusi Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Wilayah

Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata dalam Perekonomian Wilayah pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 9,55%, dengan realisasi sebesar 6,53%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 68,38%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja indikator belum mencapai target yang ditetapkan dan masih perlu ditingkatkan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pada Dinas Pariwisata, yaitu:

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.699.988.387 dan realisasi sebesar Rp1.576.101.990 atau 92,71%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,29%.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata melalui penataan objek wisata, pengembangan fasilitas

pendukung, serta peningkatan atraksi wisata. Secara umum, program ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi lokal, namun belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Analisis Faktor Pendukung (Keberhasilan Parsial)

Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain:

1. Realisasi anggaran yang cukup tinggi (92,71%), sehingga sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan.
2. Adanya pengembangan dan penataan destinasi wisata, yang meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan.
3. Meningkatnya aktivitas wisata lokal, yang mulai memberikan dampak terhadap sektor ekonomi pendukung.

Analisis Penyebab Kegagalan

Belum tercapainya target indikator disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Dampak program terhadap kontribusi ekonomi masih terbatas, karena fokus kegiatan lebih pada pengembangan fisik destinasi, belum optimal pada peningkatan nilai ekonomi.
2. Kontribusi sektor akomodasi dan jasa wisata masih rendah, sehingga belum mampu mendorong peningkatan signifikan terhadap PDRB.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti aksesibilitas, fasilitas umum, dan akomodasi.
4. Rendahnya lama tinggal wisatawan (length of stay), sehingga belanja wisatawan masih terbatas.
5. Belum optimalnya promosi dan investasi pariwisata, sehingga potensi ekonomi belum tergarap maksimal.

Analisis Efisiensi Anggaran

Dari sisi efisiensi, terdapat selisih anggaran sebesar Rp123.886.397 atau sekitar 7,29%, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien. Namun demikian, efisiensi tersebut belum diikuti

dengan efektivitas capaian kinerja, terlihat dari capaian indikator yang masih sebesar 68,38%.

Kesimpulan

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata telah dilaksanakan dengan efisien, namun belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian wilayah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara efisiensi anggaran dan hasil yang dicapai.

Rekomendasi

1. Mengintegrasikan pengembangan destinasi dengan peningkatan aktivitas ekonomi, seperti UMKM, kuliner, dan ekonomi kreatif.
2. Mendorong investasi sektor pariwisata, khususnya akomodasi dan jasa wisata.
3. Meningkatkan promosi pariwisata secara lebih luas, termasuk digital marketing.
4. Mengembangkan paket wisata terpadu, untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan.
5. Memperkuat perencanaan berbasis outcome, agar program lebih berdampak pada peningkatan kontribusi ekonomi.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)

Indikator Persentase Peningkatan Wisatawan (WNA/WNI) pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,10%, dengan realisasi sebesar 16,71%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 795,71%. Capaian ini menunjukkan bahwa indikator tersebut melampaui target secara sangat signifikan.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pada Dinas Pariwisata, yaitu:

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.299.974.500 dan realisasi sebesar

Rp1.299.916.000 atau 99,99%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,00% (sangat kecil/efisien).

Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan SDM, serta pemberdayaan masyarakat dalam mendukung aktivitas kepariwisataan.

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja yang sangat tinggi ini antara lain:

1. Realisasi anggaran yang sangat tinggi (99,99%), sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif, yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan wisata.
3. Meningkatnya aktivitas promosi dan partisipasi masyarakat, dalam mendukung sektor pariwisata.
4. Adanya peningkatan kunjungan wisatawan secara signifikan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.
5. Pemulihan sektor pariwisata pasca perlambatan sebelumnya, yang menyebabkan lonjakan kunjungan wisatawan.

Analisis Kritis (Interpretasi Capaian Tinggi)

Meskipun capaian kinerja sangat tinggi, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati:

1. Target yang relatif rendah (2,10%), sehingga mudah terlampaui secara signifikan.
2. Lonjakan capaian yang sangat tinggi (795,71%) mengindikasikan bahwa perencanaan target belum sepenuhnya realistis atau belum berbasis tren pertumbuhan yang akurat.
3. Potensi ketidakseimbangan antara capaian indikator dan dampak ekonomi, sehingga peningkatan jumlah wisatawan belum tentu sebanding dengan kontribusi terhadap PDRB.

Analisis Efisiensi Anggaran

Dari sisi efisiensi, terdapat selisih anggaran sebesar Rp58.500 atau sekitar 0,00%, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara sangat efisien dan optimal. Efisiensi ini sejalan dengan tingginya capaian kinerja, sehingga mencerminkan adanya hubungan yang cukup baik antara penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai.

Kesimpulan

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berhasil menunjang pencapaian indikator Persentase Peningkatan Wisatawan, bahkan melampaui target secara signifikan. Namun demikian, capaian yang sangat tinggi tersebut perlu diimbangi dengan perbaikan dalam penetapan target yang lebih realistis dan berbasis data, agar pengukuran kinerja menjadi lebih akurat dan kredibel.

Rekomendasi

1. Menyusun target yang lebih realistis dan berbasis tren data, agar capaian kinerja lebih terukur.
2. Mengaitkan peningkatan jumlah wisatawan dengan dampak ekonomi, seperti kontribusi terhadap PDRB.
3. Meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisata, agar kunjungan wisatawan berkelanjutan.
4. Mengembangkan ekonomi kreatif lokal, untuk meningkatkan belanja wisatawan.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap indikator kinerja, agar tetap relevan dengan kondisi riil.

Sasaran 15: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Indikator Peningkatan Nilai PAD

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator Peningkatan nilai PAD

Pada Tahun 2025, target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar 1,73%, namun realisasi justru mengalami penurunan sebesar 10,19%. Dengan demikian, capaian kinerja menunjukkan deviasi negatif, yang berarti target tidak tercapai dan kinerja menurun secara signifikan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Perindagkop Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Anggaran: Rp1.286.567.134
- Realisasi: Rp1.286.567.134
- Serapan: 100%

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Meskipun program telah dilaksanakan dengan serapan anggaran 100%, realisasi PAD justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan:

- Program belum efektif dalam meningkatkan penerimaan PAD
- Kegiatan yang dilaksanakan belum berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah

Analisis Penyebab Kegagalan

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan PAD antara lain:

1. Menurunnya aktivitas ekonomi Masyarakat
Berdampak pada penurunan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD
Sumber-sumber PAD belum digali dan dimanfaatkan secara maksimal.
3. Kepatuhan wajib pajak/retribusi yang rendah
Kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban masih kurang.

4. Keterbatasan sistem dan pengawasan pendapatan

Pengelolaan masih belum sepenuhnya berbasis digital dan terintegrasi.

5. Program lebih bersifat administrative

Belum menyentuh strategi peningkatan penerimaan secara langsung.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Realisasi: -10,19% (penurunan)
- Menunjukkan program tidak efektif dalam mencapai target peningkatan PAD

Efisiensi

- Anggaran: Rp1.286.567.134
- Realisasi: Rp1.286.567.134
- Sisa anggaran: Rp0

Tingkat Efisiensi = 0% (serapan 100%)

Interpretasi

- Anggaran terserap sepenuhnya
- Namun tidak menghasilkan peningkatan PAD menunjukkan efisiensi administratif tinggi, tetapi efektivitas sangat rendah

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pengelolaan administrasi pendapatan daerah
2. Pendataan objek pajak dan retribusi
3. Penagihan dan monitoring penerimaan

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
2. Meningkatkan sistem digitalisasi pendapatan daerah untuk transparansi dan kemudahan pembayaran
3. Meningkatkan pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak
Mengembangkan sumber PAD baru berbasis potensi daerah

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi local agar basis penerimaan PAD meningkat

Kesimpulan

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Perindagkop Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan dengan serapan anggaran optimal, namun belum mampu meningkatkan PAD, bahkan mengalami penurunan sebesar 10,19%. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan strategi yang lebih berorientasi pada peningkatan penerimaan riil (outcome) agar kinerja PAD dapat meningkat pada tahun berikutnya.

Sasaran 16: Meningkatnya Ketahanan Pangan Dengan Indikator Skor PPH

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator Skor PPH

Idikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2025 ditargetkan sebesar 68,72 dan terealisasi 68,72, sehingga capaian kinerja mencapai 117,78%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sangat efektif dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Program Pendukung dan Efisiensi Anggaran

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - Anggaran: Rp939.999.680
 - Realisasi: Rp881.019.944 (93,73%)
 - Efisiensi: 6,27%

Program ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran dengan capaian output yang tetap optimal dalam mendukung ketersediaan pangan berbasis potensi lokal.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Anggaran: Rp1.174.839.000
- Realisasi: Rp1.174.839.000 (100%)
- Efisiensi: 0%

Program ini menjadi faktor utama dalam peningkatan skor PPH melalui perubahan pola konsumsi masyarakat menuju pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Anggaran: Rp930.000.000
- Realisasi: Rp929.950.000 (99,99%)
- Efisiensi: 0,01%

Program ini mendukung stabilitas konsumsi pangan terutama pada wilayah rawan pangan, sehingga menjaga kualitas konsumsi masyarakat.

Analisis Keberhasilan

Capaian indikator yang melebihi target dipengaruhi oleh:

- Tingginya realisasi anggaran pada seluruh program ($\geq 93\%$).
- Efektivitas program diversifikasi pangan dalam mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat.
- Intervensi yang tepat sasaran pada daerah rawan pangan.
- Sinergi antar program dalam meningkatkan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan.

Kendala yang Dihadapi

Meskipun capaian sangat baik, masih terdapat beberapa kendala:

- Pola konsumsi masyarakat yang belum sepenuhnya beragam.
- Ketergantungan terhadap komoditas tertentu seperti beras.
- Keterbatasan jangkauan sosialisasi di wilayah terpencil.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pencapaian indikator Skor PPH didukung oleh pelaksanaan program yang efektif dan relatif efisien, khususnya pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian

Pangan yang menunjukkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas output. Hal ini mencerminkan optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja.

Rekomendasi

- Meningkatkan efisiensi pada seluruh program melalui perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
- Memperluas edukasi konsumsi pangan B2SA secara merata.
- Mengembangkan inovasi pangan lokal untuk memperkuat diversifikasi konsumsi masyarakat.

Sasaran 17: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Kampung/Kelurahan Yang Merata Dengan Indikator Persentase Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis Masyarakat

Indikator Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 50%, namun realisasi belum tersedia, sehingga capaian kinerja belum dapat dihitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran indikator belum optimal dan memerlukan perbaikan dalam sistem pengumpulan serta pelaporan data.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, yaitu:

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.108.369.159 dan realisasi sebesar Rp2.108.369.159 atau 100%, sehingga tidak terdapat efisiensi anggaran (serapan penuh).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga adat, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam mendukung kegiatan pariwisata berbasis masyarakat.

Analisis Faktor Pendukung (Keberhasilan Parsial)

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung antara lain:

1. Realisasi anggaran mencapai 100%, menunjukkan seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.
2. Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat, yang berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Penguatan peran masyarakat lokal, dalam mendukung pembangunan berbasis komunitas.

Analisis Permasalahan/Kegagalan

Meskipun program telah dilaksanakan secara optimal dari sisi anggaran, terdapat beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Tidak tersedianya data realisasi indikator, sehingga capaian kinerja tidak dapat diukur.
2. Belum adanya sistem pengukuran yang jelas terhadap swadaya masyarakat, baik dalam bentuk kontribusi tenaga, material, maupun pendanaan.
3. Keterkaitan antara program dan indikator belum terukur secara langsung, sehingga dampak program terhadap indikator tidak dapat dibuktikan.
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan belum optimal, khususnya dalam mengumpulkan data berbasis output dan outcome.

Analisis Efisiensi Anggaran

Dari sisi anggaran, program menunjukkan realisasi 100%, yang berarti seluruh anggaran telah digunakan. Namun demikian, kondisi ini tidak dapat langsung diartikan sebagai efektif, karena capaian indikator tidak dapat diukur akibat tidak tersedianya data realisasi.

Dengan demikian, terdapat potensi ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran dan pengukuran kinerja, sehingga prinsip akuntabilitas dan value for money belum sepenuhnya terpenuhi.

Kesimpulan

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat telah dilaksanakan dengan baik dari sisi penyerapan anggaran, namun belum dapat dinilai keberhasilannya dalam mendukung indikator kinerja, karena tidak tersedianya data realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pengukuran kinerja dan pelaporan masih menjadi kelemahan utama.

Rekomendasi

1. Menyusun mekanisme dan indikator pengukuran swadaya masyarakat yang jelas dan terukur.
2. Meningkatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data kinerja, berbasis output dan outcome.
3. Memperkuat monitoring dan evaluasi program, agar capaian kegiatan dapat terukur secara kuantitatif.
4. Mengaitkan secara langsung program dengan indikator kinerja, sehingga kontribusi program dapat dibuktikan.
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan data kinerja, khususnya pada level OPD.

Sasaran 18: Meningkatkan Kondusifitas Wilayah Serta Kepatuhan Terhadap Produk Hukum Daerah Dengan Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)

Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 didukung oleh pelaksanaan program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten SarMI, yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program ini berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial serta menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban, ketenteraman, dan keindahan lingkungan.

Program Pendukung

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Anggaran: Rp466.354.921
- Realisasi: Rp466.354.000
- Serapan: 99,99%

Program ini mencakup kegiatan penertiban, penegakan peraturan daerah, patroli rutin, serta penanganan pelanggaran K3.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Program ini secara umum memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian pelanggaran K3, ditunjukkan dengan:

1. Pelaksanaan penertiban secara rutin
Mampu menekan dan menyelesaikan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peningkatan pengawasan dan patrol
Membantu mencegah terjadinya pelanggaran berulang.
3. Koordinasi lintas sektor
Mendukung efektivitas penegakan peraturan daerah.

Namun, tingkat keberhasilan sangat tergantung pada:

- Jumlah pelanggaran yang terjadi
- Respons masyarakat terhadap penegakan aturan
- Konsistensi penegakan hukum

Analisis Efektivitas

Secara umum, program ini cukup efektif hingga efektif dalam mendukung penyelesaian pelanggaran K3, tergantung pada tingkat capaian indikator yang dihasilkan. Jika seluruh pelanggaran dapat ditangani, maka program dapat dikategorikan sangat efektif.

Analisis Efisiensi

Sisa Anggaran: $Rp466.354.921 - Rp466.354.000 = Rp921$

Tingkat Efisiensi: $\approx 0,0002\%$ (sangat kecil)

Interpretasi

- Serapan anggaran hampir 100%

- Tidak terdapat sisa anggaran yang signifikan menunjukkan pengelolaan anggaran sangat optimal secara administratif

Permasalahan yang Mungkin Dihadapi

1. Masih adanya pelanggaran K3 di masyarakat
2. Kesadaran masyarakat terhadap aturan masih rendah
3. Keterbatasan personil dan sarana penunjang
4. Penegakan sanksi yang belum memberikan efek jera maksimal

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya ketertiban dan ketentraman
2. Memperkuat penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas
3. Meningkatkan kapasitas dan jumlah personil Satpol PP
4. Mengoptimalkan patroli rutin dan pengawasan wilayah
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban

Kesimpulan

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan dengan serapan anggaran sangat tinggi (99,99%) dan mendukung penyelesaian pelanggaran K3 secara optimal. Secara umum, program ini efektif dan efisien, namun masih perlu penguatan pada aspek kesadaran masyarakat dan penegakan hukum agar pelanggaran K3 dapat ditekan secara berkelanjutan.

Sasaran 19: Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Rukun Berlandaskan Wawasan Kebangsaan Dan Politik Dengan Indikator Persentase Etnis/ Suku/ Agama/ Ormas Dan LSM Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Berbangsa Dan Politik

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada indikator Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi juga mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat (etnis/suku/agama/ormas/LSM) terhadap nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik di Kabupaten Sarmi telah tercapai secara optimal.

Program Pendukung

Keberhasilan indikator ini didukung oleh program pada perangkat daerah, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Anggaran: Rp1.099.999.844
- Realisasi: Rp1.099.998.500
- Serapan: 99,99%

Program ini berperan dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan melalui sosialisasi, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat.

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- Anggaran: Rp34.188.141
- Realisasi: Rp34.188.141
- Serapan: 100%

Program ini mendukung terciptanya kondisi sosial yang kondusif serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian indikator didukung oleh beberapa faktor:

1. Pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan secara intensif
Meningkatkan pemahaman masyarakat lintas kelompok.
2. Pendekatan inklusif terhadap seluruh elemen masyarakat
Melibatkan etnis, agama, ormas, dan LSM secara aktif.
3. Penguatan kewaspadaan dan pencegahan konflik sosial
Menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kehidupan berbangsa.

4. Sinergi antar program dan pemangku kepentingan
Mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 100%

Program sangat efektif dalam mencapai target indikator.

Efisiensi

Total Anggaran: $\text{Rp}1.099.999.844 + \text{Rp}34.188.141 = \text{Rp}1.134.187.985$

Total Realisasi: $\text{Rp}1.099.998.500 + \text{Rp}34.188.141 = \text{Rp}1.134.186.641$

Sisa Anggaran: = $\text{Rp}1.344$

Tingkat Efisiensi: $\approx 0,0001\%$ (sangat kecil)

Interpretasi

- Serapan anggaran hampir 100%
- Capaian indikator juga 100%

Menunjukkan program dilaksanakan secara sangat optimal, efektif, dan efisien

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan
2. Tingginya partisipasi masyarakat
3. Kegiatan sosialisasi yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat
4. Kondisi sosial yang relatif kondusif

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas program pembinaan kebangsaan
2. Melakukan penguatan nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan metode sosialisasi yang lebih inovatif dan partisipatif
4. Memperluas jangkauan program hingga ke tingkat kampung/desa
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat pemahaman masyarakat

Kesimpulan

Program penguatan ideologi dan kewaspadaan nasional telah dilaksanakan dengan sangat baik, ditunjukkan oleh capaian indikator 100% dan serapan anggaran yang hampir sempurna. Program ini terbukti sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Sarmi.

Sasaran 20: Meningkatkan Pemberdayaan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dengan Indikator Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Dan Persentase Layanan Pemberdayaan Sosial

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada indikator persentase layanan rehabilitasi sosial

Pada Tahun 2025, target indikator persentase layanan rehabilitasi sosial ditetapkan sebesar 48,70%, sedangkan realisasi mencapai 63,29%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 129,96%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Sarmi telah melampaui target yang ditetapkan.

Program Pendukung

Keberhasilan indikator ini didukung oleh program pada perangkat daerah, yaitu:

Program Rehabilitasi Sosial

- Anggaran: Rp653.378.651
- Realisasi: Rp653.378.651
- Serapan: 100%

Program ini bertujuan memberikan layanan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta kelompok rentan lainnya.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Optimalisasi pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial

Pelayanan menjangkau lebih banyak sasaran dari yang direncanakan.

2. Pendataan yang semakin baik terhadap kelompok rentan
Memungkinkan penyaluran layanan yang lebih tepat sasaran.
3. Komitmen pemerintah daerah dalam pelayanan sosial
Mendukung peningkatan akses layanan bagi masyarakat membutuhkan.
4. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait
Mempercepat penanganan dan penyaluran bantuan sosial.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 129,96%
Menunjukkan program sangat efektif dalam mencapai bahkan melampaui target kinerja.

Efisiensi

- Anggaran: Rp653.378.651
 - Realisasi: Rp653.378.651
 - Sisa anggaran: Rp0
- Tingkat Efisiensi = 0% (serapan 100%)

Interpretasi

- Anggaran terserap sepenuhnya
- Capaian kinerja sangat tinggi Menunjukkan program berjalan optimal, efektif, dan tepat sasaran

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Tingginya kebutuhan layanan rehabilitasi sosial di masyarakat
2. Program yang langsung menyentuh kelompok sasaran
3. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran
4. Dukungan anggaran yang dimanfaatkan secara maksimal

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi sosial

2. Meningkatkan jangkauan layanan ke wilayah terpencil
3. Mengembangkan layanan berbasis kebutuhan spesifik kelompok rentan
4. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana layanan sosial
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

Kesimpulan

Program Rehabilitasi Sosial telah dilaksanakan dengan sangat baik, ditunjukkan oleh capaian indikator sebesar 129,96% dan serapan anggaran 100%. Program ini terbukti sangat efektif dan optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada kelompok rentan, sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Sarmi.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator Persentase layanan pemberdayaan sosial

Pada Tahun 2025, target indikator persentase layanan pemberdayaan sosial ditetapkan sebesar 63,71%, sedangkan realisasi yang dicapai hanya 2,93%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 4,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator sangat rendah dan jauh dari target yang telah ditetapkan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada perangkat daerah, yaitu:

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Anggaran: Rp653.378.651
- Realisasi: Rp653.378.651
- Serapan: 100%

Program ini berfokus pada pemberian bantuan sosial dan perlindungan kepada masyarakat rentan.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Meskipun program telah dilaksanakan dengan serapan anggaran 100%, capaian indikator hanya 4,60%, yang menunjukkan:

- Program tidak efektif dalam meningkatkan layanan pemberdayaan sosial
- Kegiatan yang dilaksanakan lebih berorientasi pada bantuan sosial (charity), bukan pemberdayaan (empowerment)

Analisis Penyebab Rendahnya Capaian

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Ketidaksesuaian jenis program dengan indikator Program perlindungan sosial lebih fokus pada bantuan langsung, bukan pemberdayaan masyarakat.
2. Terbatasnya jumlah penerima program pemberdayaan Layanan pemberdayaan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat.
3. Belum adanya program pemberdayaan yang berkelanjutan Kegiatan belum mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
4. Keterbatasan kapasitas dan pendampingan Pendampingan kepada kelompok sasaran belum optimal.
5. Pendataan dan targeting belum maksimal Sasaran pemberdayaan belum sepenuhnya tepat dan merata.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 4,60% Menunjukkan program sangat tidak efektif dalam mencapai target indikator.

Efisiensi

- Anggaran: Rp653.378.651
- Realisasi: Rp653.378.651
- Sisa anggaran: Rp0

Tingkat Efisiensi = 0% (serapan 100%)

Interpretasi

- Anggaran terserap seluruhnya

- Namun capaian sangat rendah menunjukkan efisiensi administratif tinggi, tetapi efektivitas sangat rendah

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat
2. Perlindungan bagi kelompok rentan
3. Pendataan penerima manfaat

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Menyelaraskan program dengan indikator pemberdayaan sosial
Mengembangkan program berbasis peningkatan kemandirian (usaha, keterampilan, dll.)
2. Mengalihkan fokus dari bantuan ke pemberdayaan seperti pelatihan, bantuan usaha, dan pendampingan kelompok
3. Meningkatkan jumlah dan jangkauan penerima manfaat pemberdayaan
4. Memperkuat pendampingan dan monitoring program
5. Mengintegrasikan program lintas sektor (UMKM, tenaga kerja, koperasi)

Kesimpulan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial telah dilaksanakan dengan serapan anggaran 100%, namun tidak mampu mendukung pencapaian indikator pemberdayaan sosial. Dengan capaian hanya 4,60%, program dinilai tidak efektif karena tidak selaras dengan tujuan indikator. Ke depan, diperlukan pergeseran pendekatan dari bantuan sosial ke pemberdayaan masyarakat agar kinerja dapat meningkat secara signifikan.

Sasaran 21: Meningkatkan Pemenuhan Hak-Hak Kesejahteraan Sosial Masyarakat Adat Dengan Indikator Cakupan Layanan Pemberdayaan

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator persentase layanan pemberdayaan sosial

Pada Tahun 2025, target indikator persentase layanan pemberdayaan sosial ditetapkan sebesar 38,69%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 29,41%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 76,02%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator belum memenuhi target, namun masih dalam kategori cukup baik.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Sosial Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Pemberdayaan Sosial

- Anggaran: Rp768.947.732
- Realisasi: Rp768.947.732
- Serapan: 100%

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Program ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan layanan pemberdayaan sosial, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari:

- Capaian kinerja 76,02% (belum mencapai target)
- Serapan anggaran 100%, tetapi dampak terhadap indikator masih terbatas

Dengan demikian, program dapat dikategorikan cukup efektif, namun perlu peningkatan kualitas pelaksanaan.

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Keterbatasan jangkauan layanan pemberdayaan:

Program belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

2. Kapasitas masyarakat penerima manfaat masih rendah:

Membutuhkan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

3. Keterbatasan jenis kegiatan pemberdayaan:

Program belum sepenuhnya variatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Pendampingan dan monitoring belum optimal

Mengurangi keberhasilan program dalam meningkatkan kemandirian.

5. Faktor geografis wilayah

Menyulitkan akses pelayanan ke daerah terpencil.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 76,02%

Menunjukkan program cukup efektif, namun belum mencapai target.

Efisiensi

- Anggaran: Rp768.947.732
- Realisasi: Rp768.947.732
- Sisa anggaran: Rp0

Tingkat Efisiensi = 0% (serapan 100%)

Interpretasi

- Anggaran terserap seluruhnya
- Capaian belum maksimal menunjukkan efisiensi tinggi, namun efektivitas masih perlu ditingkatkan

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial bagi masyarakat rentan
2. Pemberian bantuan stimulan dan pelatihan
3. Pendataan kelompok sasaran
4. Koordinasi dengan pihak terkait

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Meningkatkan jangkauan program pemberdayaan sosial agar lebih banyak masyarakat yang terlayani

2. Memperkuat pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan keberhasilan program
3. Mengembangkan jenis kegiatan pemberdayaan yang lebih variative sesuai potensi lokal masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana program
5. Mengintegrasikan program dengan sektor lain seperti UMKM dan tenaga kerja

Kesimpulan

Program Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan dengan serapan anggaran optimal, dan mampu memberikan kontribusi terhadap capaian indikator sebesar 76,02%. Namun demikian, program masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga target kinerja dapat tercapai secara maksimal di tahun berikutnya.

Sasaran 22: Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dengan Indikator Indeks SPBE

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan pada indikator Indeks SPBE

Pada Tahun 2025, target Indeks SPBE ditetapkan pada kategori “Cukup”, namun realisasi yang dicapai sebesar 1,53 dengan kategori “Kurang”. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum memenuhi target dan implementasi SPBE di Kabupaten Sarmi masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Anggaran: Rp999.992.975
- Realisasi: Rp999.992.975
- Serapan: 100%

Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Meskipun program telah dilaksanakan dengan serapan anggaran 100%, capaian Indeks SPBE masih berada pada kategori “Kurang”, yang menunjukkan:

- Program belum efektif dalam meningkatkan kualitas penerapan SPBE
- Implementasi masih terbatas pada penyediaan aplikasi, belum pada integrasi dan pemanfaatan optimal

Analisis Penyebab Rendahnya Capaian

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Belum terintegrasinya sistem aplikasi antar perangkat daerah Aplikasi masih berjalan secara parsial.
2. Keterbatasan infrastruktur TIK Jaringan dan sarana pendukung belum memadai.
3. Kapasitas SDM yang masih terbatas Pengelola SPBE belum memiliki kompetensi yang memadai.
4. Belum optimalnya tata kelola SPBE Regulasi, arsitektur, dan roadmap SPBE belum berjalan efektif.
5. Rendahnya pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan public Aplikasi yang tersedia belum digunakan secara maksimal.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Realisasi: Indeks 1,53 (Kategori Kurang) menunjukkan program belum efektif dalam mencapai target.

Efisiensi

- Anggaran: Rp999.992.975
- Realisasi: Rp999.992.975
- Sisa anggaran: Rp0

Tingkat Efisiensi = 0% (serapan 100%)

Interpretasi

- Anggaran terserap sepenuhnya

Namun capaian indikator masih rendah menunjukkan efisiensi administratif tinggi, tetapi efektivitas rendah

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan
2. Penyediaan layanan berbasis elektronik
3. Dukungan operasional sistem informasi

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Menyusun dan memperkuat arsitektur SPBE daerah agar sistem terintegrasi antar perangkat daerah
2. Meningkatkan infrastruktur TIK termasuk jaringan dan pusat data
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola SPBE melalui pelatihan dan sertifikasi
4. Mendorong integrasi dan interoperabilitas aplikasi
5. Meningkatkan pemanfaatan SPBE dalam pelayanan publik
6. Melakukan evaluasi berkala sesuai indikator penilaian SPBE nasional

Kesimpulan

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika telah dilaksanakan dengan serapan anggaran optimal, namun belum mampu meningkatkan Indeks SPBE sesuai target. Dengan capaian masih pada kategori “Kurang”, diperlukan perbaikan menyeluruh pada aspek tata kelola, infrastruktur, SDM, dan integrasi sistem, agar implementasi SPBE dapat meningkat ke kategori yang lebih baik di tahun mendatang.

Sasaran 23: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Dengan Indikator: Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan, Persentase Pelayanan Agenda Kerja DPRD, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase Penegakan Terhadap Perda Dan Perkada Dan Persentase Daerah Yang Terjangkau Layanan Telekomunikasi Dan Internet

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan

Pada Tahun 2025, target indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan ditetapkan sebesar 82,38%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 80,06%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 97,19%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator hampir memenuhi target dan termasuk kategori sangat baik, meskipun belum sepenuhnya tercapai.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sarmi, yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk

- Anggaran: Rp550.000.000
- Realisasi: Rp450.000.000
- Serapan: 81,82%

2. Program Pencatatan Sipil

- Anggaran: Rp350.000.000
- Realisasi: Rp350.000.000
- Serapan: 100%

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Program yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan cakupan layanan administrasi kependudukan. Hal ini terlihat dari:

- Capaian kinerja tinggi (97,19%)
- Pelayanan administrasi kependudukan berjalan relatif baik dan menjangkau sebagian besar masyarakat

Namun demikian, masih terdapat selisih kecil terhadap target yang menunjukkan adanya ruang perbaikan.

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman dokumen kependudukan
2. Kendala geografis dan akses wilayah terpencil
3. Keterbatasan sarana pelayanan dan mobilitas layanan
4. Kesadaran masyarakat yang belum merata
5. Serapan anggaran Program Pendaftaran Penduduk belum optimal

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 97,19% menunjukkan program sangat efektif, meskipun belum mencapai target 100%.

Efisiensi

Total Anggaran Rp. 550.000.000 + Rp. 350.000.000 = Rp. 900.000.000

Total Realisasi Rp . 450.000.000 + Rp. 350.000.000 = Rp. 800.000.000

Sisa Anggaran = Rp100.000.000

Tingkat Efisiensi $\approx 11,11\%$

Interpretasi

- Terdapat efisiensi anggaran sebesar 11,11%
- Capaian kinerja tetap tinggi menunjukkan program efektif dan cukup efisien

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan
3. Pelayanan jemput bola ke masyarakat
4. Sosialisasi pentingnya administrasi kependudukan

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pelayanan jemput bola ke wilayah terpencil
2. Mendorong percepatan perekaman KTP-el dan penerbitan dokumen
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi
4. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran program pendaftaran penduduk

5. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan Dukcapil

Kesimpulan

Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan dengan cukup baik, menghasilkan capaian indikator sebesar 97,19% dengan efisiensi anggaran 11,11%. Program ini tergolong efektif dan efisien, namun masih perlu peningkatan terutama dalam menjangkau seluruh masyarakat agar target dapat tercapai sepenuhnya di tahun berikutnya.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan pada indikator persentase pelayanan agenda kerja DPRD

Pada Tahun 2025, target indikator persentase pelayanan agenda kerja DPRD ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh agenda kerja DPRD telah terlayani secara optimal sesuai dengan perencanaan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- Anggaran: Rp27.454.791.443
- Realisasi: Rp26.476.616.432
- Serapan: 96,44%

Program ini mencakup dukungan administratif, fasilitasi rapat, penyusunan agenda kerja, serta pelayanan kegiatan DPRD.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Program ini sangat berkontribusi terhadap keberhasilan indikator, ditunjukkan dengan:

- Seluruh agenda kerja DPRD dapat difasilitasi dengan baik
- Dukungan administrasi dan operasional berjalan optimal
- Tidak terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaan kegiatan DPRD

Dengan demikian, program dapat dikategorikan sangat efektif.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 100% menunjukkan program sangat efektif dalam mencapai target indikator.

Efisiensi

Sisa Anggaran Rp. 27.454.791.443 – Rp. 26.476.616.432 = Rp. 978.175.011

Tingkat Efisiensi: $\approx 3,56\%$

Interpretasi

- Terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,56%
- Capaian indikator tetap maksimal (100%) menunjukkan program sangat efektif dan efisien

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Perencanaan agenda kerja DPRD yang baik dan terstruktur
2. Dukungan administratif yang memadai
3. Koordinasi yang efektif antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD
4. Ketersediaan anggaran yang cukup dan dikelola dengan baik

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Mempertahankan kualitas pelayanan agenda kerja DPRD
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran
3. Mengoptimalkan digitalisasi dalam pengelolaan agenda DPRD
4. Meningkatkan kapasitas SDM sekretariat DPRD
5. Melakukan evaluasi berkala untuk peningkatan kualitas layanan

Kesimpulan

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD telah dilaksanakan dengan sangat baik, ditunjukkan oleh capaian indikator 100% dan efisiensi anggaran sebesar 3,56%. Program ini terbukti sangat efektif dan efisien dalam mendukung kelancaran pelaksanaan agenda kerja DPRD di Kabupaten Sarmi.

c. ***Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat***

Pada Tahun 2025, target indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat ditetapkan sebesar 77,24, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 19,07, sehingga tingkat capaian kinerja hanya 24,69%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Sarmi masih sangat rendah dan jauh dari target yang telah ditetapkan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Pembinaan Perpustakaan

- Anggaran: Rp499.962.675
- Realisasi: Rp499.961.903
- Serapan: 99,9998%

Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui pembinaan perpustakaan, penyediaan layanan literasi, dan pengembangan budaya baca.

Analisis terhadap Capaian Kinerja

Meskipun program telah dilaksanakan dengan serapan anggaran hampir 100%, capaian indikator hanya 24,69%, yang menunjukkan:

- Program belum efektif dalam meningkatkan kegemaran membaca Masyarakat
- Dampak program terhadap perubahan perilaku masyarakat masih rendah

Analisis Penyebab Rendahnya Capaian

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Rendahnya minat baca Masyarakat
Budaya membaca belum menjadi kebiasaan.
2. Terbatasnya akses layanan perpustakaan
Jangkauan layanan belum merata, terutama di wilayah terpencil.

3. Keterbatasan sarana dan koleksi bacaan

Buku dan bahan bacaan kurang variatif dan menarik.

4. Kurangnya inovasi dalam program literasi

Kegiatan masih bersifat konvensional dan kurang menarik minat masyarakat.

Minimnya pemanfaatan teknologi digital

Layanan literasi digital belum berkembang optimal.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 24,69% menunjukkan program tidak efektif dalam mencapai target indikator.

Efisiensi

- Sisa Anggaran Rp.499.962.675 – Rp.499.961.903 = Rp.772
- Tingkat Efisiensi $\approx 0,00015\%$ (sangat kecil)

Interpretasi

- Anggaran terserap hampir seluruhnya
- Namun capaian indikator sangat rendah menunjukkan efisiensi administratif tinggi, tetapi efektivitas sangat rendah

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pembinaan dan pengelolaan perpustakaan
2. Penyediaan layanan perpustakaan daerah
3. Kegiatan peningkatan minat baca masyarakat

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Meningkatkan inovasi program literasi seperti kegiatan berbasis komunitas, lomba literasi, dan kampanye membaca
2. Memperluas jangkauan layanan perpustakaan melalui perpustakaan keliling dan pojok baca di kampung/desa
3. Mengembangkan layanan literasi digital untuk menjangkau generasi muda

4. Menambah dan memperbarui koleksi bahan bacaan agar lebih menarik dan relevan
5. Meningkatkan kolaborasi dengan sekolah dan komunitas dalam membangun budaya membaca

Kesimpulan

Program Pembinaan Perpustakaan telah dilaksanakan dengan serapan anggaran optimal, namun belum mampu meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat secara signifikan. Dengan capaian hanya 24,69%, program dinilai tidak efektif, sehingga diperlukan inovasi dan penguatan strategi yang lebih berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat agar budaya literasi dapat meningkat di masa mendatang.

d. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada indikator persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada

Pada Tahun 2025, target indikator persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan secara optimal.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Anggaran: Rp299.974.921
- Realisasi: Rp299.974.921
- Serapan: 100%

Program ini mencakup kegiatan penegakan peraturan daerah, operasi penertiban, patroli rutin, serta penanganan pelanggaran di masyarakat.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian indikator didukung oleh beberapa faktor:

1. Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada secara konsisten
Seluruh pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti.
2. Peningkatan intensitas patroli dan pengawasan
Membantu mencegah dan menekan pelanggaran.
3. Koordinasi yang baik antar instansi terkait
Mendukung efektivitas penegakan aturan.
4. Respon cepat terhadap laporan Masyarakat
Mempercepat penyelesaian pelanggaran.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 100% Program sangat efektif dalam mencapai target indikator.

Efisiensi

- Anggaran: Rp299.974.921
- Realisasi: Rp299.974.921
- Sisa anggaran: Rp0

Tingkat Efisiensi = 0% (serapan 100%)

Interpretasi

- Anggaran terserap sepenuhnya
- Capaian indikator maksimal menunjukkan program sangat optimal, efektif, dan efisien

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Komitmen pemerintah daerah dalam penegakan peraturan
2. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang optimal
3. Dukungan anggaran yang memadai
4. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Mempertahankan konsistensi penegakan Perda dan Perkada
2. Meningkatkan pendekatan preventif melalui sosialisasi
3. Memperkuat kapasitas SDM Satpol PP

4. Mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital
5. Meningkatkan sinergi lintas sektor

Kesimpulan

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarmi telah dilaksanakan dengan sangat baik, ditunjukkan oleh capaian indikator 100% dan serapan anggaran 100%. Program ini terbukti sangat efektif dan efisien dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada indikator Persentase daerah yang terjangkau layanan telekomunikasi dan internet

Pada Tahun 2025, target indikator persentase daerah yang terjangkau layanan telekomunikasi dan internet ditetapkan sebesar 37,23%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 48,91%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 131,38%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja indikator melampaui target dan akses layanan telekomunikasi serta internet di Kabupaten Sarmi mengalami peningkatan yang signifikan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Anggaran: Rp81.996.898
- Realisasi: Rp81.996.898
- Serapan: 100%

Program ini mendukung penyediaan data dan informasi sektoral, termasuk data cakupan layanan telekomunikasi dan internet sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi

Adanya pengembangan infrastruktur jaringan di wilayah tertentu.

2. Dukungan data dan informasi yang akurat

Membantu perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat.

3. Sinergi dengan pihak penyedia layanan telekomunikasi

Mendukung perluasan jaringan.

4. Program yang mendukung pemetaan wilayah layanan

Sehingga daerah yang belum terjangkau dapat diidentifikasi.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa program yang ada lebih berperan sebagai pendukung data, bukan sebagai pelaksana utama pembangunan infrastruktur jaringan.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 131,38% menunjukkan program dan faktor pendukung lainnya sangat efektif dalam melampaui target indikator.

Efisiensi

- Anggaran: Rp81.996.898
- Realisasi: Rp81.996.898
- Sisa anggaran: Rp0

Tingkat Efisiensi = 0% (serapan 100%)

Interpretasi

- Anggaran terserap seluruhnya
- Capaian indikator sangat tinggi menunjukkan program berjalan optimal dan efisien, meskipun kontribusinya lebih bersifat tidak langsung

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Perluasan jaringan oleh penyedia layanan telekomunikasi
2. Dukungan kebijakan pemerintah pusat/daerah
3. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap akses internet
4. Ketersediaan data sektoral yang mendukung perencanaan

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Mempertahankan dan meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi

2. Mendorong pembangunan infrastruktur TIK di wilayah blank spot
3. Memperkuat koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi
4. Meningkatkan kualitas layanan internet, tidak hanya cakupan
5. Mengembangkan program yang lebih langsung terkait infrastruktur TIK

Kesimpulan

Program Penyelenggaraan Statistik Sektor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarmi telah mendukung pencapaian indikator secara tidak langsung, dengan capaian yang melampaui target (131,38%). Program ini menunjukkan efektivitas tinggi dan efisiensi optimal, namun ke depan perlu didukung oleh program yang lebih fokus pada pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan internet agar peningkatan cakupan dapat berkelanjutan dan merata.

Sasaran 24: Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN Dengan Indikator Indeks Merit Sistem

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada indikator Indeks Merit Sistem

Pada Tahun 2025, target Indeks Merit Sistem ditetapkan sebesar 50,6, namun realisasi belum dapat disajikan karena masih dalam proses evaluasi oleh KASN. Dengan demikian, capaian kinerja belum dapat dihitung secara kuantitatif dan masih berada pada tahap proses penilaian.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarmi, yaitu:

1. Program Kepegawaian Daerah
 - Anggaran: Rp1.403.081.870
 - Realisasi: Rp1.403.080.000
 - Serapan: 99,99%
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Anggaran: Rp1.680.873.212

- Realisasi: Rp1.399.968.500
- Serapan: 83,30%

Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN berbasis sistem merit, termasuk pengelolaan kepegawaian, peningkatan kompetensi, dan pengembangan SDM aparatur.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Meskipun hasil akhir Indeks Merit Sistem belum tersedia, pelaksanaan program menunjukkan:

- Upaya perbaikan sistem manajemen ASN telah dilakukan
- Dukungan anggaran relatif optimal
- Kegiatan telah mengarah pada pemenuhan indikator penilaian KASN

Namun demikian, belum dapat dipastikan tingkat keberhasilan karena hasil evaluasi belum diterbitkan.

Analisis Potensi Kendala

Beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi capaian Indeks Merit Sistem antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan sistem merit secara menyeluruh pada aspek perencanaan, pengembangan, promosi, dan mutasi ASN
2. Keterbatasan kualitas dan kompetensi SDM ASN
3. Dokumentasi dan eviden pendukung penilaian KASN belum lengkap
4. Belum terintegrasinya sistem manajemen kepegawaian berbasis digital
5. Serapan anggaran program pengembangan SDM belum optimal

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Belum dapat diukur secara pasti, karena masih dalam proses evaluasi KASN

Namun secara proses, program dapat dikategorikan cukup mendukung Efisiensi

Total Anggaran Rp. 1.403.081.870 + Rp. 1.680.873.212 = Rp. 3.083.955.082

Total Realisasi Rp1.403.080.000 + Rp1.399.968.500 = Rp2.803.048.500

Sisa Anggaran = Rp280.906.582

Tingkat Efisiensi $\approx 9,11\%$

Interpretasi

- Terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,11%
- Program telah dilaksanakan cukup optimal menunjukkan pengelolaan anggaran cukup efisien, namun hasil akhir masih menunggu evaluasi

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Pengelolaan administrasi kepegawaian
2. Pengembangan kompetensi ASN
3. Penyusunan dokumen dan eviden penilaian merit sistem
4. Koordinasi dengan KASN dalam proses evaluasi

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Melengkapi seluruh dokumen dan eviden penilaian KASN
2. Meningkatkan penerapan sistem merit secara menyeluruh
3. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi ASN
4. Mengembangkan sistem kepegawaian berbasis digital
5. Melakukan evaluasi internal secara berkala

Kesimpulan

Program Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM telah dilaksanakan dengan cukup baik dan efisien, namun capaian Indeks Merit Sistem Tahun 2025 belum dapat diukur karena masih dalam proses evaluasi oleh KASN. Ke depan, diperlukan penguatan implementasi sistem merit secara menyeluruh agar hasil evaluasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 25: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan dengan Indikator Nilai LKJp Kabupaten

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada indikator Nilai LKJp Kabupaten

Indikator Nilai LKJIP Kabupaten pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar CC, namun realisasi masih dalam proses evaluasi oleh Kementerian PANRB, sehingga capaian kinerja belum dapat ditentukan secara final.

Sebagai pembanding, pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar C dan berhasil terealisasi C, yang menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas pemerintah daerah masih berada pada kategori cukup dan memerlukan peningkatan untuk mencapai level yang lebih tinggi.

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, yaitu:

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000 dan realisasi sebesar Rp200.000.000 atau 100%.

Kegiatan ini berperan dalam mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, termasuk LKJIP, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Analisis Faktor Pendukung (Keberhasilan Parsial)

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator antara lain:

1. Realisasi anggaran mencapai 100%, sehingga seluruh kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan dapat dilaksanakan.
2. Tersusunnya dokumen LKJIP secara tepat waktu, sebagai syarat utama penilaian SAKIP.
3. Adanya pengalaman capaian tahun sebelumnya (nilai C), yang menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan.
4. Koordinasi antar perangkat daerah mulai berjalan, meskipun masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Analisis Permasalahan/Kegagalan

Meskipun kegiatan telah dilaksanakan secara optimal dari sisi anggaran, terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target CC, yaitu:

1. Nilai LKJIP Tahun 2025 belum dapat dipastikan, karena masih dalam proses evaluasi.
2. Capaian tahun sebelumnya masih pada level C, sehingga peningkatan ke level CC membutuhkan perbaikan signifikan.
3. Kualitas implementasi SAKIP belum optimal, terutama dalam keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja.
4. Pemahaman dan komitmen OPD terhadap SAKIP belum merata, sehingga kualitas dokumen masih bervariasi.
5. Analisis kinerja dalam LKJIP masih bersifat deskriptif, belum sepenuhnya berbasis evaluasi dan outcome.

Analisis Efisiensi Anggaran

Dari sisi anggaran, kegiatan menunjukkan realisasi 100%, yang berarti seluruh anggaran telah dimanfaatkan. Namun demikian, efektivitas penggunaan anggaran belum dapat diukur secara penuh, karena hasil akhir berupa nilai LKJIP masih dalam proses evaluasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa serapan anggaran yang tinggi belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas kinerja, sehingga perlu penguatan pada aspek substansi, bukan hanya administratif.

Kesimpulan

Program Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dengan optimal dari sisi penyerapan anggaran, serta mampu mempertahankan capaian tahun sebelumnya (nilai C). Namun demikian, untuk mencapai target CC, masih diperlukan perbaikan yang signifikan dalam implementasi SAKIP, terutama pada kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.

Rekomendasi

1. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh, tidak hanya pada penyusunan dokumen.
2. Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja, agar lebih terukur dan konsisten.
3. Meningkatkan kapasitas SDM OPD dalam penyusunan LKJIP, melalui pelatihan dan pendampingan.
4. Melakukan evaluasi internal secara berkala, sebelum penilaian eksternal oleh Kementerian PANRB.
5. Mendorong peningkatan kualitas analisis kinerja, agar lebih berbasis outcome dan berdampak.

Sasaran 26: Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Dengan Indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome) Dan Persentase Program RKPD Selaras Dengan RPJMD

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada Indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)

Pada Tahun 2025, target indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan ditetapkan sebesar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun realisasi yang dicapai adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dengan demikian, capaian kinerja belum memenuhi target, karena masih terdapat temuan material dalam pengelolaan keuangan daerah.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarmi, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Anggaran: Rp170.051.305.199
 - Realisasi: Rp80.759.485.105
 - Serapan: 47,49%
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Anggaran: Rp1.789.617.222

- Realisasi: Rp1.454.633.000
- Serapan: 81,28%

Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Meskipun program telah dilaksanakan, capaian Opini BPK masih WDP, yang menunjukkan:

- Program belum efektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel
- Masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah terutama terlihat dari rendahnya serapan anggaran pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan.

Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Masih adanya temuan BPK seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan dan kelemahan pengendalian internal.
2. Pengelolaan aset daerah belum tertib termasuk pencatatan, inventarisasi, dan penilaian aset.
3. Rendahnya kualitas laporan keuangan terutama dalam penyajian dan pengungkapan.
4. Serapan anggaran yang belum optimal khususnya pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset masih terbatas

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: WDP (belum mencapai target WTP)
- Menunjukkan program belum efektif dalam mencapai target indikator.

Efisiensi

Total Anggaran Rp.170.051.305.199 + Rp.1.789.617.222 =
Rp.171.840.922.421

Total Realisasi Rp.80.759.485.105 + Rp.1.454.633.000 = Rp.82.214.118.105

Sisa Anggaran = Rp. 89.626.804.316

Tingkat Efisiensi $\approx$ 52,15%

Interpretasi

- Terdapat sisa anggaran yang cukup besar (52,15%)
- Capaian indikator belum optimal menunjukkan efisiensi rendah dan efektivitas belum tercapai

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah
2. Pengelolaan kas dan anggaran daerah
3. Penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah
4. Tindak lanjut sebagian temuan hasil pemeriksaan BPK

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Menindaklanjuti seluruh temuan BPK secara tuntas
2. Meningkatkan kualitas pengendalian internal (SPIP)
3. Menertibkan pengelolaan dan pencatatan aset daerah
4. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset
5. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara tepat sasaran
6. Meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP

Kesimpulan

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah belum mampu mendorong pencapaian target Opini BPK WTP, dengan realisasi masih pada WDP. Hal ini menunjukkan bahwa program belum efektif dan belum efisien, sehingga diperlukan perbaikan mendasar dalam pengelolaan keuangan, penataan aset, serta penguatan pengendalian internal untuk mencapai opini WTP pada tahun berikutnya.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada Indikator Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD

Pada Tahun 2025, target indikator persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD ditetapkan sebesar 93,72%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 82,24%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 87,74%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal dan masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Program Pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarmi, yaitu:

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Anggaran: Rp5.361.913.876
- Realisasi: Rp3.130.229.596
- Serapan: 58,38%

Program ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD), serta meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Analisis Program terhadap Capaian Kinerja

Program ini telah memberikan kontribusi terhadap keselarasan perencanaan, namun belum optimal, yang terlihat dari:

- Capaian kinerja 87,74% (belum mencapai target)
- Masih terdapat program dalam RKPD yang belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD
- Serapan anggaran yang relatif rendah mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program

Analisis Penyebab Belum Tercapainya Target

Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar perangkat daerah
2. Perubahan kebijakan atau prioritas pembangunan yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan RPJMD

3. Kualitas perencanaan di perangkat daerah masih bervariasi
4. Pengendalian dan evaluasi belum berjalan optimal
5. Rendahnya serapan anggaran program perencanaan

Analisis Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas

- Capaian: 87,74% menunjukkan program cukup efektif, namun belum maksimal.

Efisiensi

Sisa Anggaran Rp. 5.361.913.876 – Rp. 3.130.229.596 = Rp. 2.231.684.280

Tingkat Efisiensi $\approx 41,62\%$

Interpretasi

- Terdapat sisa anggaran yang cukup besar (41,62%)
- Capaian kinerja belum optimal menunjukkan efisiensi belum optimal dan efektivitas masih perlu ditingkatkan

Upaya yang Telah Dilakukan

1. Penyusunan dokumen RKPD
2. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan dengan RPJMD
3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan
4. Koordinasi antar perangkat daerah

Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kualitas sinkronisasi antara RKPD dan RPJMD
2. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah
3. Meningkatkan kapasitas perencana di masing-masing OPD
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
5. Meningkatkan penyerapan anggaran program perencanaan secara tepat sasaran

Kesimpulan

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah telah mendukung pencapaian indikator dengan kategori cukup baik, namun belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan capaian 87,74% dan efisiensi

41,62%, program ini masih memerlukan peningkatan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan agar keselarasan antara RKPD dan RPJMD dapat tercapai secara maksimal di tahun mendatang.

Sasaran 27: Meningkatnya OPD Yang Menerapkan Zona Integritas Dengan Indikator Maturitas SPIP Dan Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

a. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada Indikator Maturitas SPIP

Indikator Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target Level 3, namun realisasi yang dicapai masih pada Level 1, sehingga menunjukkan bahwa capaian kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan:

Program Penyelenggaraan Pengawasan

- Anggaran: Rp 2.786.133.953
- Realisasi: Rp 2.786.133.356 (99,99%)

Program ini mencakup kegiatan pengawasan internal, reviu, monitoring, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingginya realisasi anggaran menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara optimal dari sisi penyerapan anggaran.

Analisis Efisiensi

Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 597 atau sekitar 0,01% dari total pagu. Efisiensi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program. Namun demikian, tingginya serapan anggaran belum berbanding lurus dengan capaian output/outcome, khususnya dalam peningkatan level maturitas SPIP.

Analisis Penyebab Kegagalan

Belum tercapainya target Maturitas SPIP disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Faktor Internal:

- Implementasi SPIP belum berjalan secara menyeluruh pada seluruh unit kerja
- Dokumen dan bukti dukung SPIP belum lengkap dan belum sesuai standar penilaian
- Kapasitas SDM dalam penerapan SPIP masih terbatas
- Pengendalian risiko dan manajemen risiko belum optimal
- Peran APIP dalam pembinaan SPIP belum maksimal

2. Faktor Eksternal:

- Kurangnya pendampingan teknis yang intensif dari instansi pembina (BPKP)
- Perubahan kebijakan/regulasi yang belum sepenuhnya diadaptasi

Analisis Keberhasilan/Kegagalan

- Keberhasilan:
Program pengawasan telah dilaksanakan dengan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi, menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
- Kegagalan:
Meskipun program terlaksana, belum mampu meningkatkan level maturitas SPIP dari Level 1 menuju Level 3, sehingga indikator ini dinilai belum berhasil.

Rekomendasi / Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan maturitas SPIP ke depan, perlu dilakukan:

- Penguatan implementasi SPIP secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah
- Penyusunan dan penyempurnaan dokumen SPIP sesuai standar penilaian
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis
- Penerapan manajemen risiko secara konsisten
- Peningkatan peran APIP dalam pembinaan dan evaluasi SPIP
- Penguatan koordinasi dengan BPKP sebagai pembina SPIP

Kesimpulan

Capaian indikator Maturitas SPIP belum mencapai target yang ditetapkan, meskipun didukung oleh program pengawasan dengan serapan anggaran yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas pengendalian intern. Ke depan, diperlukan penguatan implementasi SPIP secara substansial, bukan hanya administratif.

b. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan pada Indikator Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Indikator Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 93,72%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 87,74%, sehingga tingkat capaian kinerja adalah 93,62% ($87,74 / 93,72 \times 100\%$).

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja belum sepenuhnya mencapai target, meskipun secara umum sudah berada pada kategori cukup baik.

Pencapaian indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan:

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- Anggaran: Rp 1.099.992.375
- Realisasi: Rp 1.099.992.250 (99,99%)

Program ini berperan dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut temuan melalui kegiatan:

- pendampingan kepada OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan
- asistensi penyusunan dokumen tindak lanjut
- koordinasi dan monitoring penyelesaian temuan

Analisis Efisiensi

Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 125 atau sekitar 0,01% dari total pagu. Efisiensi ini tidak berdampak pada pelaksanaan kegiatan, namun

menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Meskipun demikian, tingginya serapan anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan pencapaian target indikator.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor Keberhasilan:

- Adanya kegiatan pendampingan dan asistensi kepada OPD
- Peningkatan koordinasi antara Inspektorat dan perangkat daerah
- Komitmen sebagian OPD dalam menindaklanjuti temuan

Faktor Kegagalan/Penghambat:

- Masih terdapat OPD yang lambat atau belum optimal dalam menindaklanjuti temuan
- Keterbatasan pemahaman OPD terhadap mekanisme penyelesaian tindak lanjut
- Kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala dan intensif
- Beberapa temuan membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup lama (bersifat administratif maupun keuangan)

Kesimpulan

Capaian indikator Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan belum mencapai target yang ditetapkan, meskipun didukung oleh program dengan serapan anggaran yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan tindak lanjut.

Rekomendasi / Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan capaian kinerja ke depan, perlu dilakukan:

- Peningkatan monitoring dan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut temuan
- Penguatan komitmen pimpinan OPD dalam penyelesaian temuan
- Pemberian batas waktu (deadline) yang tegas dan mekanisme sanksi administratif

- Peningkatan kualitas pendampingan dan asistensi teknis
- Pengembangan sistem informasi pemantauan tindak lanjut temuan
- Peningkatan kapasitas SDM OPD dalam pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

3.2.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Analisis efisiensi penggunaan Anggaran

Pemerintah Kabupaten Sarmi secara umum telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPD) dan rencana kerja tahunan. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang relatif tinggi disertai dengan pengelolaan anggaran yang efisien.

Pada Tahun Anggaran 2025, efisiensi belanja langsung tercatat sebesar 30,28% atau senilai Rp153.759.023.893,00 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp508.335.872.307,00, dengan realisasi sebesar Rp354.434.094.852,00. Kondisi ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Interpretasi Efisiensi Tinggi sebagai Risiko

Tingkat efisiensi anggaran pada Tahun 2025 yang mencapai 30,28% menunjukkan adanya penghematan anggaran yang cukup signifikan. Meskipun secara umum efisiensi merupakan hal positif, namun dalam perspektif pengelolaan kinerja, efisiensi yang terlalu tinggi perlu diinterpretasikan secara hati-hati sebagai potensi risiko.

Efisiensi yang tinggi dapat mengindikasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Risiko ketidaktepatan perencanaan anggaran

Besarnya selisih antara anggaran dan realisasi dapat menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil atau belum mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan kegiatan secara optimal.

2. Risiko tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan

Efisiensi yang tinggi dapat disebabkan oleh adanya kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak berjalan sesuai rencana, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya pencapaian output dan outcome.

3. Risiko penurunan kualitas capaian kinerja

Penghematan anggaran yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, yang pada akhirnya mempengaruhi capaian indikator kinerja.

4. Risiko ketidakseimbangan antara efisiensi dan efektivitas

Dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 82,45%, menunjukkan bahwa efisiensi yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip value for money belum tercapai secara optimal.

5. Risiko under-spending (penyerapan anggaran rendah)

Tingginya efisiensi juga dapat mencerminkan rendahnya penyerapan anggaran yang berpotensi berdampak pada tertundanya manfaat pembangunan kepada masyarakat.

Implikasi terhadap Kinerja

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka efisiensi anggaran sebesar 30,28% tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan penghematan, tetapi juga sebagai indikator perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan program.

Jika tidak ditindaklanjuti, kondisi ini berpotensi menyebabkan:

- target kinerja tidak tercapai secara optimal,
- output kegiatan tidak maksimal,
- serta berkurangnya dampak pembangunan terhadap masyarakat.

Rata-rata capaian kinerja yang diperoleh sebesar 82,45%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal. Dengan demikian, efisiensi anggaran yang terjadi tidak hanya mencerminkan penghematan belanja, tetapi juga menunjukkan adanya

upaya menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai (value for money).

Namun secara lebih mendalam, capaian kinerja yang belum mencapai 90% menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi yang dicapai belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kinerja, sehingga terdapat potensi ketidaktepatan dalam alokasi anggaran, penentuan prioritas program, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut diperoleh melalui beberapa upaya, antara lain:

1. **Perbaikan proses bisnis**, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan terarah.
2. **Pemanfaatan teknologi informasi**, untuk mendukung efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
3. **Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana**, guna menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan.
4. **Pengendalian belanja secara selektif dan berbasis prioritas**, sesuai dengan kebutuhan dan target kinerja.
5. **Penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan**, yaitu tetap mengacu pada standar harga dalam DPA, namun dalam implementasinya dimungkinkan menggunakan harga yang lebih rendah sepanjang tidak mengurangi kualitas, spesifikasi, dan output yang dihasilkan.

Meskipun tingkat efisiensi anggaran pada Tahun 2025 cukup tinggi yaitu sebesar 30,28%, namun capaian kinerja rata-rata sebesar 82,45% menunjukkan bahwa efisiensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pelaksanaan program. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan antara penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai.

Dengan demikian, secara interpretatif dapat disimpulkan bahwa efisiensi yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan kinerja, melainkan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas perencanaan,



ketepatan penganggaran, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar efisiensi yang dihasilkan benar-benar berdampak pada peningkatan capaian kinerja secara menyeluruh.

Sebagai bahan pendukung analisis, berikut disajikan tabel efisiensi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025:



Tabel 3.48
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

<i>Sasaran Strategis</i>		<i>Indikator</i>		<i>Program</i>	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Efesiensi</i>	<i>%</i>
1	Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan	115.087.599.584,00	86.082.320.726,00	74,80	29.005.278.858,00	25,20
		2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Program Pembinaan Sejarah	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	0,00	-
				Program Pengembangan Kesenian	522.751.642,00	379.998.080,00	72,69	0,00	27,31
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	229.901.850,00	229.901.850,00	100,00	0,00	-
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	3	Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	115.087.599.584,00	86.082.320.726,00	74,80	29.005.278.858,00	25,20
		4	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	2.099.841.987,00	2.098.785.233,00	99,95	1.056.754,00	0,05
		5	Angka Harapan Hidup	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	699.999.139,00	699.199.139,00	99,89	800.000,00	0,11
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusiakesehatan	1.100.000.000,00	1.085.000.000,00	98,64	15.000.000,00	1,36



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89.910.642.239,00	60.322.265.776,00	67,09	29.588.376.463,00	32,91
3	Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab tantangan era erubahan	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.039.022.392,00	1.039.022.392,00	100,00	0,00	-
		7	Persentase pemuda dalam pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	563.544.090,00	563.544.090,00	100,00	0,00	-
		8	Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.365.167.804,00	1.354.979.000,00	99,25	10.188.804,00	0,75
4	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	9	Indeks Pembangunan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	249.998.375,00	249.998.375,00	100,00	0,00	-
				Program Perlindungan Perempuan	149.999.328,00	147.773.328,00	98,52	2.226.000,00	1,48
5	Meningkatnya kualitas dana kuantitas jalan dan jembatan serta penataan drainase	10	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	24.811.987.000,00	23.964.876.600,00	96,59	847.110.400,00	3,41
		11	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	1.350.000.000,00	1.324.500.000,00	98,11	25.500.000,00	1,89
6	Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak	12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.763.566.504,00	4.691.999.944,00	98,50	71.566.560,00	1,50



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

		13	Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.040.000.000,00	1.039.930.000,00	99,99	70.000,00	0,01
7	Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	14	Rasio rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	12.045.744.000,00	11.363.868.000,00	94,34	681.876.000,00	5,66
8	Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	15	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.412.346.874,00	1.412.155.000,00	99,99	191.874,00	0,01
		16	Arus pergerakan penumpang angkutan udara						
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks kualitas air (IKA)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.034.817.182,00	2.034.557.484,00	99,99	259.698,00	0,01
		18	Indeks kualitas Udara (IKU)						
		19	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	150.203.142,00	150.203.142,00	100,00	0,00	-
10	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan	20	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Program Pengelolaan Persampahan	2.183.792.326,00	2.181.155.000,00	99,88	2.637.326,00	0,12
		21	Ketersediaan TPA yang terkelola secara baik						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

11	Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana	22	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Program Penanganan Bencana	136.255.407,00	136.255.407,00	100,00	0,00	-
		23	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	224.800.000,00	224.800.000,00	100,00	0,00	-
12	Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan	24	Kontribusi sector pertanian dan Peternakan dalam perekonomian wilayah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.788.089.500,00	4.788.089.500,00	100,00	0,00	-
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	904.027.000,00	896.527.000,00	99,17	7.500.000,00	0,83
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	329.755.000,00	329.755.000,00	100,00	0,00	-
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	399.990.000,00	399.990.000,00	100,00	0,00	-
				Program Penyuluhan Pertanian	2.323.294.210,00	2.227.293.910,00	95,87	96.000.300,00	4,13
		Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.289.137.253,00	2.289.137.253,00	100,00	0,00	-
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	899.967.578,00	899.967.578,00	100,00	0,00	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.301.016.381,00	1.298.604.381,00	99,81	2.412.000,00	0,19
13	Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah masyarakat	26	Nilai realisasi invetasi tahunan (PMA/PMDN)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	102.954.000,00	102.935.000,00	99,98	19.000,00	0,02
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	102.741.625,00	102.628.000,00	99,89	113.625,00	0,11
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	103.978.875,00	103.795.000,00	99,82	183.875,00	0,18
		27	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Hubungan Industrial	668.278.940,00	668.228.540,00	99,99	50.400,00	0,01
		28	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	180.170.000,00	180.170.000,00	100,00	0,00	-
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.999.998.000,00	1.999.998.000,00	100,00	0,00	-
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	83.376.000,00	83.376.000,00	100,00	0,00	-
		29	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	69.899.940,00	69.899.940,00	100,00	0,00	-
		30	Persentase UMKM dan IKM aktif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) Dan Program Pengembangan Ukm	892.134.091,00	892.134.091,00	100,00	0,00	-
		31	Persentase koperasi aktif	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32.049.375,00	32.000.000,00	99,85	49.375,00	0,15



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

				Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	29.242.000,00	29.235.000,00	99,98	7.000,00	0,02
14	Meningkatnya daya saing pariwisata	32	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.699.988.387,00	1.576.101.990,00	92,71	123.886.397,00	7,29
		33	Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.299.974.500,00	1.299.916.000,00	100,00	58.500,00	0,00
15	Meningkatnya pendapatan asli daerah	34	Peningkatan nilai PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.286.567.134,00	1.286.567.134,00	100,00	0,00	-
16	Meningkatnya ketahanan pangan	35	Skor PPH	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	939.999.680,00	881.019.944,00	93,73	58.979.736,00	6,27
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.174.839.000,00	1.174.839.000,00	100,00	0,00	-
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	930.000.000,00	929.950.000,00	99,99	50.000,00	0,01
17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata	36	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.108.369.159,00	2.108.369.159,00	100,00	0,00	-
18	Meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah	37	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	466.354.921,00	466.354.000,00	100,00	921,00	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

19	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik	38	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.099.999.844,00	1.099.998.500,00	100,00	1.344,00	0,00
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	34.188.141,00	34.188.141,00	100,00	0,00	-
20	Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	39	Persentase layanan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	506.547.906,00	506.547.906,00	100,00	0,00	-
		40	Persentase layanan pemberdayaan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	653.378.651,00	653.378.651,00	100,00	0,00	-
21	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat	41	Cakupan layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Program Pemberdayaan Sosial	768.947.732,00	768.947.732,00	100,00	0,00	-
22	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	42	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	999.992.975,00	999.992.975,00	100,00	0,00	-
23	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	43	Tingkat cakupan layanan Administrasi kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	550.000.000,00	450.000.000,00	81,82	100.000.000,00	18,18
				Program Pencatatan Sipil	350.000.000,00	349.999.000,00	100,00	1.000,00	0,00
		44	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	27.454.791.443,00	26.476.616.432,00	96,44	978.175.011,00	3,56



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

		45	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	499.962.675,00	499961903	100,00	772,00	0,00
		46	Persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	299.974.921,00	299.974.921,00		0,00	
		47	Persentase daerah yang terjangkau layanan telokomunikasi dan internet	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	81.996.898,00	81.996.898,00	100,00	0,00	-
24	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	48	Indeks Merit Sistem	Program Kepegawaian Daerah	1.403.081.870,00	1.403.080.000,00	100,00	1.870,00	0,00
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.680.873.212,00	1.399.968.500,00	83,29	280.904.712,00	16,71
25	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	49	Nilai LKJp Kabupaten	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah	200000000	200000000	100,00	0,00	-
26	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	50	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	170.051.305.199,00	80.759.485.105,00	47,49	89.291.820.094,00	52,51
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.789.617.222,00	1.454.633.000,00	81,28	334.984.222,00	18,72
		51	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.361.913.876,00	3.130.229.596,00	58,38	2.231.684.280,00	41,62
27		52	Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.786.133.953,00	2.786.133.356,00	100,00	597,00	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas	53	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.099.992.375,00	1.099.992.250,00	100,00	125,00	0,00
Rata-rata Capaian				508.335.872.307,00	354.434.094.852,00	69,72	153.759.023.893,00	30,28

b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Selain sumberdaya anggaran pencapaian indikator kinerja juga dipengaruhi oleh Sumberdaya Manusianya. Investasi yang paling penting bagi organisasi adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan organisasi agar tetap bertahan dan berkembang dengan baik. Agar sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dapat memberikan kontribusi yang maksimal, maka sumber daya manusia itu perlu dikembangkan baik melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan pegawai dapat terjadi secara formal ataupun informal dan sangat penting untuk individu maupun organisasi. Pengembangan tersebut dibutuhkan sebagai bentuk penyesuaian diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh sebab itu program pengembangan pegawai harus dilakukan secara berkelanjutan dan dinamis. Berikut adalah Jumlah PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

Tabel .3.49
PNS Kabupaten Sarmi yang telah mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

No	Dinas / Instansi	Diklat Struktural			Diklat Fungsional	Jumlah
		PKN/ PIM II	PKA/ PIM III	PKP/ PIM IV		
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi	4	7	11		22
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sarmi	-	1	5		6
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Sarmi	1	6	6		13
I	DINAS-DINAS DAERAH					
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	3	6	9		18
2	Dinas Kesehatan	-	3	5		8
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2	7	7		16



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	5	7		12
5	Dinas Sosial	1	2	6		9
6	Dinas Tenaga Kerja	1	3	5		9
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan	-	3	6		9
8	Dinas Ketahanan Pangan	-	3	2		5
9	Dinas Lingkungan Hidup	-	3	3		6
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	2	6		9
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1	4	9		14
12	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	3	6		9
13	Dinas Perhubungan	-	2	6		8
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	3	5		8
15	Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	-	5	5		10
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu	1	2	5		8
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	-	3	3		6
18	Dinas Pertanian	-	5	7		12
19	Dinas Perikanan	1	3	5		9
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	-	4	6		10
21	Dinas Parawisata	-	5	6		11
22	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Linmas	-	4	4		8
II	BADAN-BADAN DAERAH					
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2	6	10		18
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	5	4		11
3	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	4	6		11



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

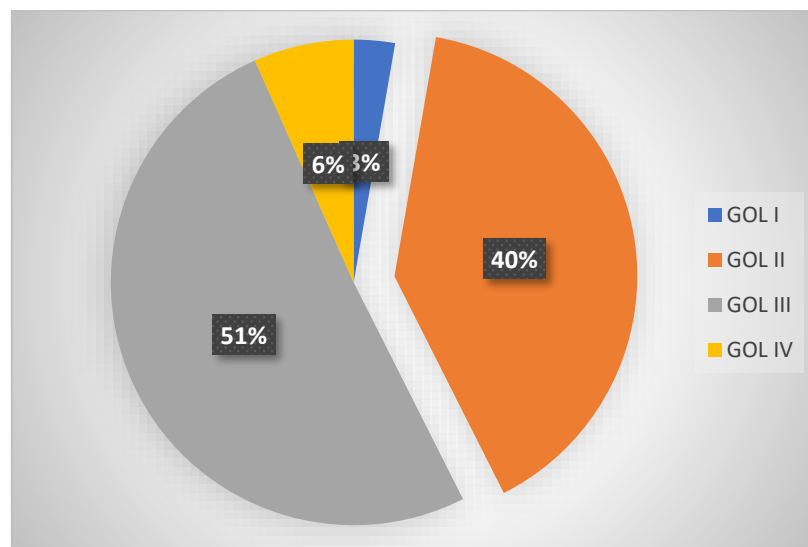
4	Badan Pendapatan Daerah	1	2	6		9
5	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	1	2	3		6
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	3	4		8
III	DISTRIK-DISTRIK					
1	Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi	-	2	2		4
2	Distrik Apawer Hulu Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
3	Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
4	Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
5	Distrik Sarmi Timur Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
6	Distrik Tor Atas Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
7	Distrik Pantai Timur Barat Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
8	Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
9	Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
10	Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
11	Distrik Apawer Hilir Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
12	Distrik Verkam Kabupaen Sarmi	-	-	1		1
13	Distrik Ismari Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
14	Distrik Muara Tor Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
15	Distrik Bonggo Barat Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
16	Distrik Apawer Tengah Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
17	Distrik Sobey Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
18	Distrik Ve'en Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
19	Distrik Sarmi Timur Tengah Kabupaten Sarmi	-	-	1		1

20	Distri Sungai Biri Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
21	Distrik Bonngo Timur Jauh Kabupaten Sarmi	-	-	1		1
IV	KELURAHAN					
1	Kelurahan Sarmi Kota	-	-	-		-
2	Kelurahan Mararena	-	-	-		-
		24	118	200		342

Sumber: BKPSDM Kabupaten Sarmi, 2023

Grafik 3.4

Presentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan, Desember 2025



Suber data BPS Sarmi 2024

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 sebanyak 2.108 orang, terdiri dari 1.193 laki laki dan 915 perempuan. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah PNS sebanyak 2.086 orang, terdiri dari 1.188 laki-laki dan 898 perempuan.

3.2.7. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Target pendapatan daerah Kabupaten Sarmi pada anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.024.414.112.418,46 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 862.721.415.879,00 atau 84,21%. Rincian target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 3.50

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
	PENDAPATAN DAERAH				
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	969.715.538.643,00	869.528.266.462,00	89,66	1.113.594.610.195,67
4.1	Pajak Daerah	14.436.416.020,00	16.471.191.645,00	114,09	18.339.019.892,67
4.1.01	Retribusi Daerah	4.523.287.750,00	4.561.349.086,00	100,84	3.516.513.936,00
4.1.02	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	390.000.000,00	518.356.270,00	132,91	270.839.093,00
4.1.03	Lain-lain PAD yang Sah	7.168.929.651,00	7.168.929.651,00	100,00	5.859.433.240,00
4.1.04	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.354.198.619,00	4.222.556.638,00	179,36	8.692.233.623,67
		14.436.416.020,00	16.471.191.645,00	114,09	18.339.019.892,67
	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	936.560.196.650,00	837.774.115.344,00	89,45	1.086.730.008.170,00
4.2.01	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	929.018.451.000,00	831.975.888.876,00	89,55	1.073.854.616.418,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
4.2.02	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	7.541.745.650,00	5.798.226.468,00	76,88	12.875.391.752,00
		7.541.745.650,00	5.798.226.468,00	76,88	12.875.391.752,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER				
		936.560.196.650,00	837.774.115.344,00	89,45	1.086.730.008.170,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.718.925.973,00	15.282.959.473,00	81,64	8.525.582.133,00
4.3.03	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.718.925.973,00	15.282.959.473,00	81,64	8.525.582.133,00
		18.718.925.973,00	15.282.959.473,00	81,64	8.525.582.133,00
	JUMLAH PENDAPATAN				
		969.715.538.643,00	869.528.266.462,00	89,66	1.113.594.610.195,67
	BELANJA DAERAH				
5	BELANJA OPERASI	1.024.414.112.418,46	862.721.415.879,00	84,21	1.131.661.126.096,75
5.1	Belanja Pegawai	758.398.856.728,46	665.474.097.655,00	87,74	776.473.831.582,00
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	307.723.116.271,46	272.128.394.138,00	88,43	273.587.685.981,00
5.1.02	Belanja Hibah	415.409.102.452,00	367.207.118.512,00	88,39	414.567.713.652,00
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	19.047.782.005,00	11.335.670.005,00	59,51	66.770.215.549,00
5.1.06	JUMLAH BELANJA OPERASI	16.218.856.000,00	14.802.915.000,00	91,26	21.548.216.400,00
		758.398.856.728,46	665.474.097.655,00	87,74	776.473.831.582,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

	BELANJA MODAL				
5.2	Belanja Modal Tanah	101.766.908.888,00	76.941.329.415,00	75,60	186.053.486.663,75
5.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.200.000.000,00	9.023.250.000,00	98,07	10.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.257.912.175,00	16.799.057.170,00	82,92	19.730.520.348,00
5.2.03	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.139.687.334,00	22.021.734.649,00	54,86	44.297.641.726,00
5.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	31.647.521.018,00	28.578.041.544,00	90,30	111.828.160.540,75
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	110.180.693,00	107.638.452,00	97,69	197.164.049,00
5.2.06	JUMLAH BELANJA MODAL	411.607.668,00	411.607.600,00	99,99	0,00
		101.766.908.888,00	76.941.329.415,00	75,60	186.053.486.663,75
	BELANJA TIDAK TERDUGA				
5.3	Belanja Tidak Terduga	9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,60	7.893.775.000,00
5.3.01	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,60	7.893.775.000,00
		9.700.000.000,00	8.594.854.000,00	88,60	7.893.775.000,00
	BELANJA TRANSFER				
5.4	Belanja Bantuan Keuangan	154.548.346.802,00	111.711.134.809,00	72,28	161.240.032.851,00
5.4.02	JUMLAH BELANJA TRANSFER	154.548.346.802,00	111.711.134.809,00	72,28	161.240.032.851,00
		154.548.346.802,00	111.711.134.809,00	72,28	161.240.032.851,00
	JUMLAH BELANJA				
		1.024.414.112.418,46	862.721.415.879,00	84,21	1.131.661.126.096,75
	SURPLUS/DEFISIT				
		(54.698.573.775,46)	6.806.850.583,00	(12,44)	(18.066.515.901,08)
	PEMBIAYAAN DAERAH				
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54.698.573.775,46	54.698.573.775,46	100,00	74.765.089.676,54
6.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	56.698.573.775,46	56.698.573.775,46	100,00	76.765.089.676,54
6.1.01	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.698.573.775,46	56.698.573.775,46	100,00	76.765.089.676,54



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Sarmi
Tahun 2026

		56.698.573.775,46	56.698.573.775,46	100,00	76.765.089.676,54
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
6.2.02	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO				
		54.698.573.775,46	54.698.573.775,46	100,00	74.765.089.676,54
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				

Sumber: BPKAD Kabupaten Sarmi (*un-audited*)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sarmi Tahun 2025, kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun belum mencapai target secara optimal.

Realisasi pendapatan daerah mencapai sebesar Rp.869.528.266.462,00 atau 89,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.969.715.538.643,00. Capaian ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sudah cukup baik, terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru melampaui target dengan capaian 114,09%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan lokal, khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Namun demikian, realisasi pendapatan transfer hanya mencapai 89,45%, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 81,64%, yang menunjukkan masih adanya ketergantungan terhadap transfer pusat serta belum optimalnya penerimaan dari sumber lainnya.

Di sisi belanja daerah, realisasi mencapai Rp.862.721.415.879,00 atau 84,21% dari total anggaran. Realisasi tertinggi terdapat pada belanja operasi sebesar 87,74%, yang mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Sementara itu, belanja modal hanya terealisasi sebesar 75,60%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik dan investasi daerah belum optimal, khususnya pada belanja gedung dan bangunan yang relatif rendah.

Selain itu, belanja transfer hanya terealisasi sebesar 72,28%, yang mengindikasikan belum optimalnya penyaluran bantuan keuangan kepada pihak terkait.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp.6.806.850.583,00, yang sebelumnya direncanakan mengalami defisit. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, meskipun di sisi lain juga mengindikasikan adanya kegiatan yang belum terlaksana secara optimal.



Kesimpulan

Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 menunjukkan:

- Pendapatan daerah cukup baik, dengan PAD melampaui target
- Belanja daerah belum sepenuhnya optimal, terutama pada belanja modal dan transfer
- Terjadi efisiensi anggaran yang menghasilkan surplus

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat efisiensi, masih diperlukan peningkatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SARMI
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DOMINGGUS CATUE, S. KM, M. Kes**

Jabatan : **Bupati Sarmi**

Pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Petam 24 Maret 2025

BUPATI SARMI

DOMINGGUS CATUE, S. KM, M. Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SARMI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
A 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang religius, berbudaya dan berdaya saing					
1	Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100
		2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	54,22
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,11
		2	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	3,04
		3	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,61
3	Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab taantangan era erubahan	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,2
		2	Persentase pemuda dalam pembangunan	Persen	40,66
		3	Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Eaven	1
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	83,58
A 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Sesuai Arah RTRW					
1	Meningkatnya kualitas dana kuantitas jalan dan jembatan serta penataan drainase	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	19,75
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	44,01
2	Meningkatnya pemerataan ketersediaan	1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses	Persen	93,68

	air bersih dan sanitasi layak		Terhadap Sumber Air Minum Layak		
		2	Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Persen	78,76
3	Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	1	Rasio rumah layak huni	Persen	73,72
4	Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	1	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Per 1000 penduduk	4,61
		2	Arus pergerakan penumpang angkutan udara	Orang	520
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	81,80
		2	Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,12
		3	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	100,00
6	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan	1	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	20,00
		2	Ketersediaan TPA yang dikelola secara baik	Ada/Tidak Ada	Ada
7	Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana	1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	95,00
		2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)	Persen	100,00
A3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan					
1.	Meningkatnya produktivitas	1	Kontribusi sector pertanian dalam perekonomian wilayah	Persen	21,33

	pertanian,perkebunan dan perikanan	2	Kontribusi sektor peternakan dalam perekonomian wilayah	Persen	1,41
		3	Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Persen	2,07
2	Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerahmasyarakat	1	Nilai realisasi invetasi tahunan (PMA/PMDN)	Rp. Miliar	33,48
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,45
		3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,12
		4	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	2,33
		5	Persentase UMKM dan IKM aktif	Persen	41,00
		6	Persentase koperasi aktif	Persen	48,21
3	Meningkatnya daya saing pariwisata	1	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	Persen	9,55
		2	Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)	Persen	2,10
4	Meningkatnya pendapatan asli daerah	1	Peningkatan nilai PAD	Persen	1,86
5	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH	Akor	68,72
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata	1	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	50,00
A 4 : Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, Serta Wawasan Kebangsaan Dan Kehidupan Politik Masyarakat Yang Rukun, Bersat Dan Demokratis					
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	90,00

	serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah				
2	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik	1	Persentase etnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	Persen	100,00
3	Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1	Persentase layanan rehabilitasi sosial	Persen	48,70
		2	Persentase layanan pemberdayaan sosial	Persen	63,71
4	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat	1	Cakupan layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Persen	38,69
5	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Indeks SPBE	Predikat	Cukup
6	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	1	Tingkat cakupan layanan Administrasi kependudukan	Persen	82,38
		2	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100,00
		3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	77,24
		4	Persentase penegakan terhadap Perda dan Perkada	Persen	100,00
		5	Persentase daerah yang terjangkau layanan telokomunikasi dan internet	Persen	37,23
7	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1	Indeks Merit Sistem	Predikat	55,66
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	1	Nilai LKJp Kabupaten	Skala Nilai	B

9	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Predikat	WTP
		2	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	93,72
10	Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas	1	Maturitas SPIP	Level	3
		2	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	85,00

Petam.24 Maret 2025

BUPATI SARMI



DOMINGGUS CATUE, S. KM, M. Kes